PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani
Secara Elektronik

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1227

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat diuji melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025-2029

## BAB I
## PENDAHULUAN

Situasi pangan global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dan multidimensional, di antaranya meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global yang pesat, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perang dagang antarnegara. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, ditandai dengan penurunan produktivitas, perubahan pola tanam, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian, terbatasnya ketersediaan sumber daya air dan mengganggu rantai pasok pangan global.

Pertumbuhan populasi dunia yang terus meningkat mendorong lonjakan kebutuhan pangan secara global. Lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta produk pangan yang lebih sensitif terhadap pertumbuhan pendapatan terutama di negara-negara berkembang, seperti produk ternak dan minyak nabati. Permintaan terhadap komoditas-komoditas tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam beberapa dekade mendatang, seiring dengan peningkatan taraf hidup dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Kondisi ini berpotensi semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik dan perang dagang yang menyebabkan guncangan signifikan terhadap rantai pasok global serta mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertanian. Hal ini berdampak pada menurunnya nilai dan volume perdagangan internasional, yang pada akhirnya berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Disrupsi ketersediaan pangan di pasar internasional diperkirakan akan semakin sering terjadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, seiring dengan peningkatan harga pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga pupuk dan BBM meningkatkan biaya usaha tani secara keseluruhan dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi, dapat menyebabkan kenaikan harga pangan sehingga mengancam ketahanan pangan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Saat ini, sejumlah negara telah mengalami kondisi rawan pangan (*food insecurity*) bahkan krisis pangan (*food crisis*), seperti Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, Ethiopia, Yaman, dan beberapa negara di kawasan Jazirah Arab yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.

Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari

dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Namun demikian, sektor pertanian nasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural, di antaranya peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, penurunan produktivitas lahan, tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas strategis seperti gandum dan kedelai, serta rendahnya tingkat regenerasi petani.

Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, serta peningkatan daya saing produk pertanian.

Pembangunan nasional yang di dalamnya termasuk pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar memberikan dampak langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional sektor pertanian yang selaras Visi Presiden pada RPJMN tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagai rencana jangka menengah pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai wujud kesinambungan pembangunan, maka capaian pembangunan pertanian yang telah diraih pada periode sebelumnya menjadi pembelajaran dan fondasi untuk percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan pada periode selanjutnya. Permasalahan dan kendala yang menjadi tantangan merupakan dasar untuk menentukan langkah antisipatif dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

## 1.1. Kondisi Umum

### 1.1.1. Indikator Makro

Sektor pertanian merupakan tulang punggung peradaban manusia yang tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan populasi dunia tetapi juga memengaruhi ekonomi, lingkungan, dan stabilitas global. Sektor pertanian di Indonesia bahkan mampu bertahan terhadap guncangan pandemi COVID-19 yang mengganggu hampir semua sektor ekonomi. Sektor pertanian telah terbukti menjadi penyangga ekonomi dan ketahanan pangan nasional ketika pandemi tersebut melanda Indonesia dan dunia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi (*year on year)* sektor pertanian Indonesia yang secara konsisten positif selama delapan triwulan (dari triwulan I tahun 2020 hingga triwulan IV tahun 2021), sementara pada saat yang sama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) total tahun 2020 negatif. Secara spesifik, kinerja dan ketahanan relatif sektor pertanian dapat diamati pada beberapa indikator makro sektor pertanian lainnya, antara lain: Tenaga Kerja Pertanian, Nilai Tukar Petani, Neraca Perdagangan, Investasi Pertanian, dan Produksi Komoditas Pertanian Strategis, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

a. PDB Pertanian Indonesia 2020-2024

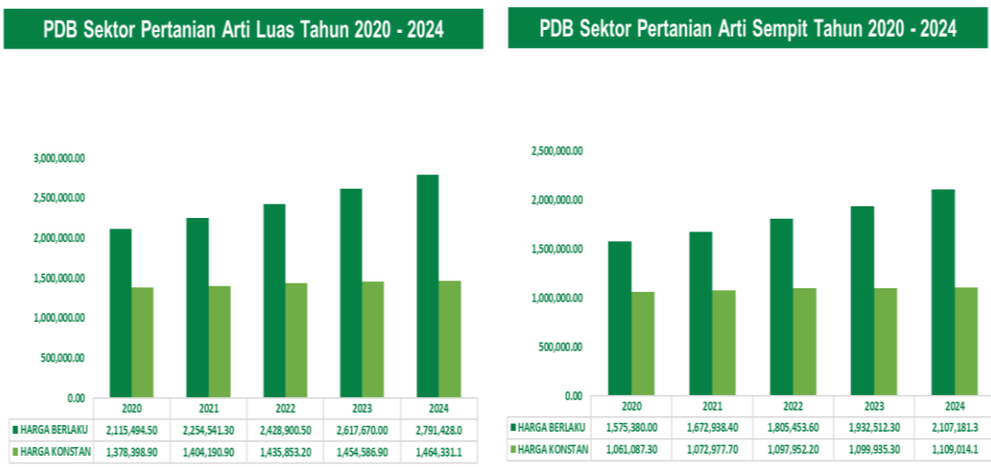


**Gambar 1. 1 Kontribusi PDB Pertanian terhadap PDB Nasional 2020-2024**

Pada tahun 2020-2024, PDB Sektor Pertanian menunjukkan tren positif. PDB pertanian arti luas berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 6,64% dan harga konstan naik 0,68%. Sedangkan pertanian arti sempit berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 9,05% dan harga konstan naik 0,9%. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif 1,77% di saat yang sama PDB nasional tumbuh negatif -2,07%.

b. Tenaga Kerja Pertanian Indonesia 2020-2024

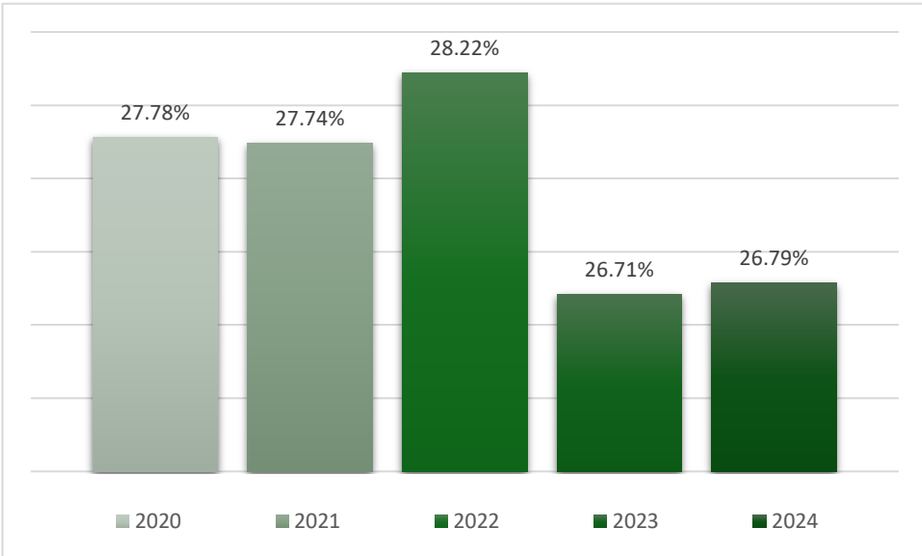


**Gambar 1. 2 Kontribusi Tenaga Kerja Pertanian terhadap Tenaga Kerja Nasional, 2020-2024**

Sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selama 5 tahun terakhir (2020-2024), pangsa tenaga kerja pertanian terhadap total angkatan kerja berkontribusi lebih dari 25% dari total angkatan kerja, dengan nilai rata-rata 27,43%. Nilai rata-rata *share* ini setara dengan 39,72 juta pekerja dari total 144,77 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian secara signifikan terjadi pada tahun 2022, salah satunya merupakan akibat dari pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sebagian besar tenaga kerja non-pertanian yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau belum bisa kembali ke pekerjaan sebelumnya, kemudian beralih kepada sektor pertanian. Selain itu, banyaknya program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian yang memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, alsintan, bahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, termasuk pelatihan untuk petani muda, menyebabkan banyak masyarakat tertarik untuk berusaha di sektor pertanian.

c. Nilai Tukar Petani Indonesia 2020-2024

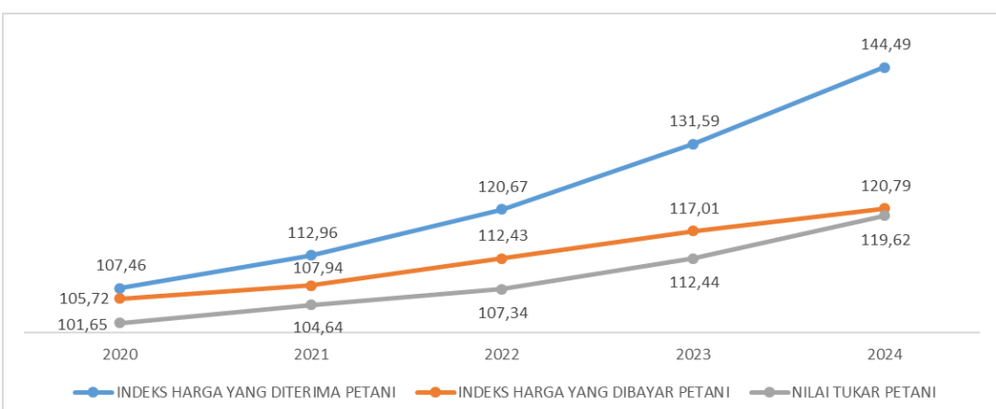


**Gambar 1. 3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), 2020-2024**

Selama periode 2020-2024, nilai NTP terus tumbuh mencapai 119,62 pada tahun 2024 dari angka 101,65 pada tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan kontribusi dari kenaikan Indeks yang diterima petani (It), dari 107,46 pada tahun 2020 menjadi 144,49 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga jual komoditas

oleh petani relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran modal untuk produksi pertanian.

d. Neraca Perdagangan Pertanian Indonesia 2020-2024

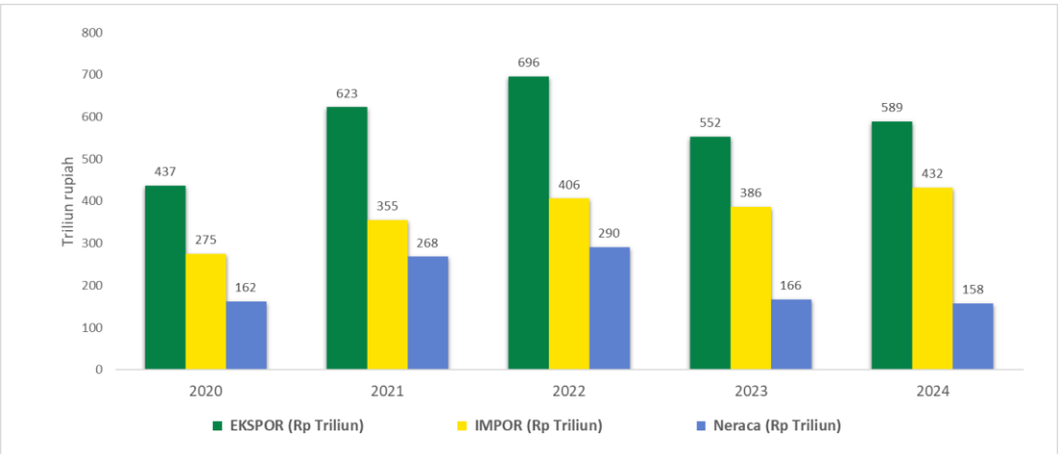


**Gambar 1. 4 Perkembangan Neraca Ekspor-Impor Pertanian, 2020-2024**

Sejak tahun 2020-2024, secara kumulatif neraca perdagangan pertanian (segar dan olahan) menunjukkan surplus. Surplus tersebut, sebagian besar disumbang dari subsektor perkebunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 92%, khususnya komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kelapa dan kopi. Penurunan nilai ekspor pada tahun 2022-2024 terjadi karena adanya penurunan ekspor kelapa sawit, karet dan kelapa. Tekanan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) mengakibatkan harga global melemah, tentunya memengaruhi nilai ekspor kelapa sawit. Sementara ekspor karet yang menurun terjadi karena melemahnya industri otomotif global pasca pandemi COVID-19.

e. Investasi Pertanian Indonesia 2020-2024

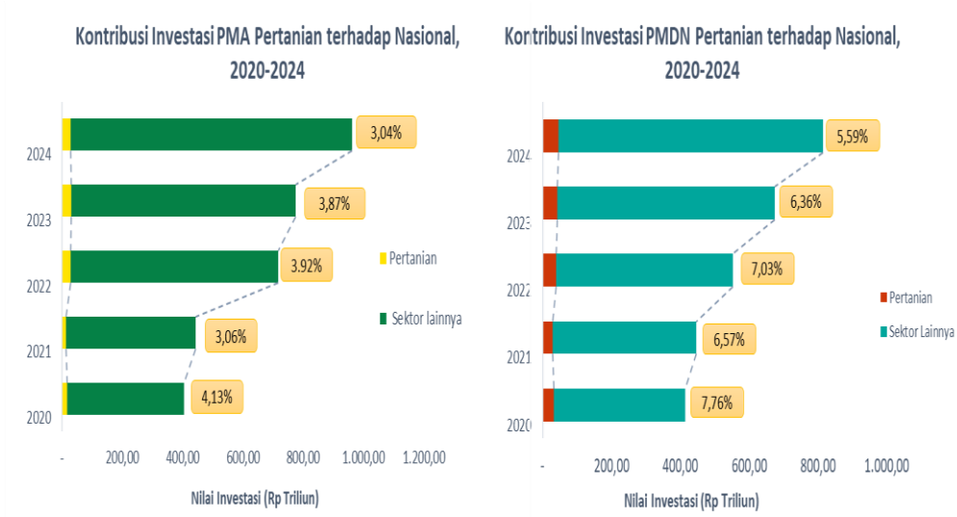


**Gambar 1. 5 Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Pertanian, 2020-2024**

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pertanian selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata kontribusi investasi PMA pertanian terhadap PMA nasional sebesar 3,61%, sementara kontribusi investasi PMDN pertanian terhadap PMDN nasional sebesar 6,66%. Adapun total investasi pertanian (PMA+PMDN) selama 2020-2024 sebesar Rp 306,45 triliun. Kontribusi investasi terbesar pada sektor perkebunan, baik dari PMA maupun PMDN. Oleh karena itu, perlu dorongan investasi pada 3 (tiga) subsektor lainnya yaitu tanaman pangan,

hortikultura serta peternakan, sehingga mampu meningkatkan kinerja produksi maupun hilirisasi pada tiga subsektor tersebut.

### 1.1.2. Produksi Komoditas Pertanian Strategis

**Subsektor Tanaman Pangan** Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 591.1 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, komoditas tanaman pangan yang ditetapkan sebagai komoditas strategis oleh Kementerian Pertanian antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.

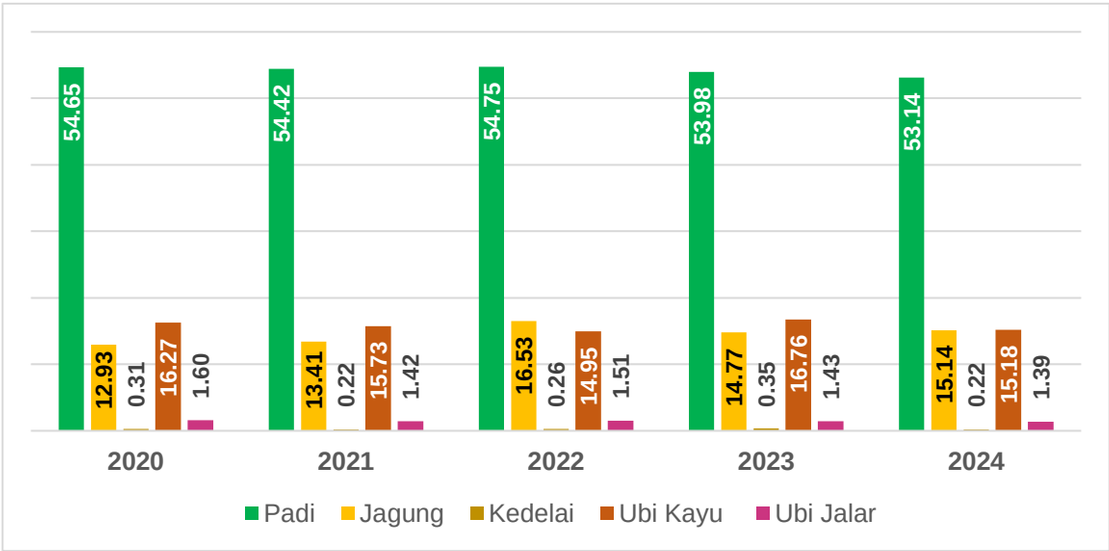


**Gambar 1. 6 Perkembangan Produksi 5 (Lima) Komoditas Strategis Tanaman Pangan, 2020-2024**

**Produksi padi** di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari serangan hama dan penyakit, kondisi iklim, penurunan luas baku sawah, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi pertanian. Pada tahun 2023-2024, Indonesia menghadapi fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kering berkepanjangan di sejumlah daerah. Kondisi ini menyebabkan penurunan produksi padi di beberapa wilayah.

Luas lahan baku sawah selama periode 2020-2024 mengalami penurunan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian. Pada tahun 2019 luas lahan baku sawah tercatat sebesar 7.463.948 hektar (Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019), menurun sebesar 79.607 ha (1,07%) menjadi 7.384.341 hektar pada tahun 2024 (Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024). Demikian juga dengan luas panen padi kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun dengan persentase penurunan rata-rata 1,46%. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penurunan produksi padi periode 2020-2024.

**Produksi jagung** di Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sebagai salah satu komoditas pangan strategis, jagung memegang peran penting, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak dan konsumsi rumah tangga di beberapa daerah. Secara rata-rata, produksi jagung selama 5 tahun terakhir berkisar di atas angka 14,5 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 4,7%. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga pembelian pemerintah, sehingga meningkatkan minat petani menanam jagung.

**Produksi kedelai** di Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan nasional yang berkisar di angka 2,7 juta ton per tahun. Produksi kedelai relatif fluktuatif di kisaran 200-350 ribu ton. Adapun rata-rata produksi selama 2020-2024

berkisar pada volume produksi 270 ribu ton per tahun. Artinya produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipenuhi sebagian besar dari impor.

**Produksi ubi kayu dan ubi jalar** di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Produksi ubi kayu dalam 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata di kisaran 15,78 juta ton per tahun, sementara angka kebutuhan dalam negeri rata-rata berkisar 12,5 juta ton. Artinya produksi ubi kayu dalam negeri sudah cukup memenuhi kebutuhan ubi kayu dalam negeri, bahkan cenderung surplus dan menjadi potensi ekspor. Sementara produksi ubi jalar selama 2020-2024 rata-rata mengalami penurunan sebesar 3,4% per tahun, dimana pada tahun 2020 produksi ubi jalar sebesar 1,6 juta ton, menurun menjadi 1,39 juta ton pada tahun 2024.

Selain beberapa komoditas strategis subsektor tanaman pangan yang telah diuraikan di atas, Kementerian Pertanian akan mengembangkan komoditas lain seperti gandum dan sorghum sebagai bahan makanan pokok alternatif, sekaligus untuk substitusi impor.

**Subsektor Hortikultura**

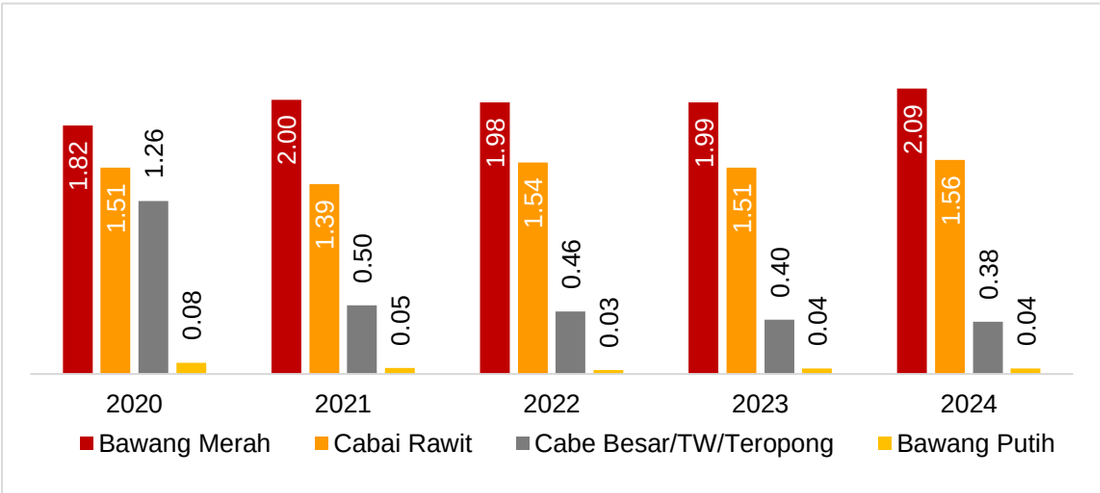


**Gambar 1. 7 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura**

**Produksi bawang merah** mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2024, rata-rata peningkatan produksi sebesar 3,63% per tahun. Total produksi tertinggi dicapai pada tahun 2024 sebesar 2,09 juta ton. Indikasi kenaikan produksi dapat dilihat dari meningkatnya luas panen pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,33% per tahun.

**Produksi bawang putih** tahun 2020 sebesar 0,08 juta ton, yang terus menurun sampai tahun 2024 dengan produksinya 0,04 juta. Kondisi saat ini, kebutuhan bawang putih sebagian besar dipenuhi dari impor. Kendala budidaya bawang putih di dalam negeri disebabkan oleh minimnya akses petani untuk mendapatkan bibit unggul, disamping itu budidaya komoditas bawang putih dominan ditentukan oleh kondisi geografis suatu wilayah, sehingga tidak mudah dikembangkan secara meluas di wilayah Indonesia. Ke depan, dalam mengurangi impor komoditas bawang putih, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi komoditas ini.

**Produksi cabai rawit dan cabai besar.** Produksi cabai rawit sepanjang 2020-2024 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan cenderung positif sebesar 1,18%. Produksi cabai besar pada tahun 2020 sebesar 1,26 juta ton, sedangkan tahun 2024 produksinya turun sebesar 0,38 juta ton, dengan rata-rata penurunan produksi sepanjang 2020-2024 sebesar 21,48%. Produksi cabai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, lahan, air,

bibit, pupuk, dan pestisida. Fluktuasi harga komoditas cabai yang sangat dinamis dan tingkat produktivitas yang tidak stabil secara langsung berkontribusi pada inflasi.

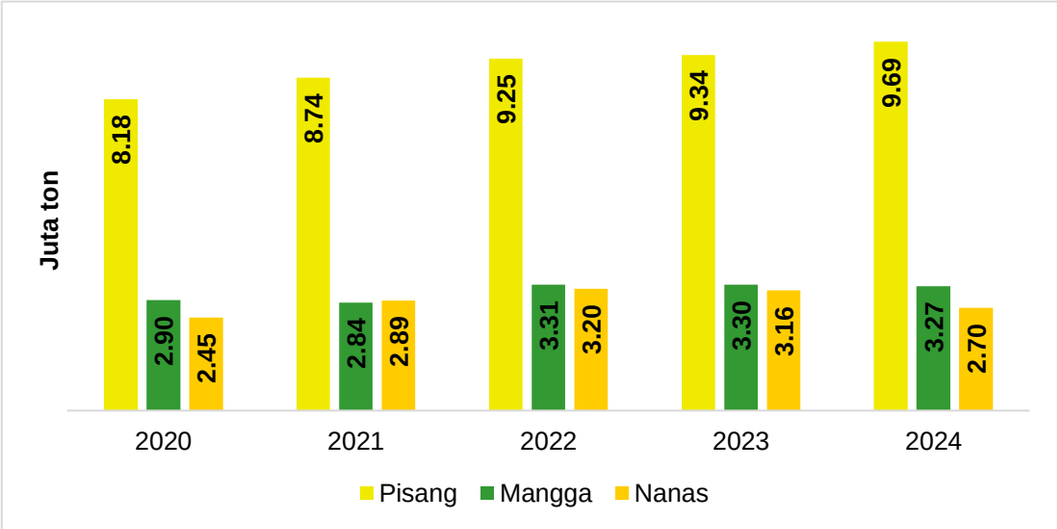


**Gambar 1. 8 Perkembangan Produksi Komoditas Strategis Hortikultura (Tanaman Buah, 2020-2024)**

**Produksi tanaman buah**. Pisang, mangga dan nanas merupakan 3 (tiga) komoditas hortikultura dalam kelompok tanaman buah yang mempunyai capaian produksi tertinggi. Produksi pisang mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 sebesar 18,38% atau setara dengan peningkatan 1,50 juta ton. Untuk komoditas mangga dan nanas, perkembangan produksinya relatif fluktuatif, namun jika dilihat secara rata-rata perkembangannya tumbuh positif. Rata-rata peningkatan produksi mangga sebesar 3,31% dan nanas sebesar 3,28%. Kedua komoditas ini mengalami produksi tertinggi pada tahun 2022 masing-masing sebesar 3,31 juta ton dan 3,20 juta ton. Ketiga komoditas di atas merupakan komoditas ekspor. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan lebih dari 100% untuk ekspor mangga, sementara untuk manggis meningkat 42% dari tahun 2022. Selain itu, komoditas buah yang memiliki potensi besar adalah durian, seperti terlihat dari data produksi tahun 2023 mengalami peningkatan sampai 152%.

Komoditas hortikultura potensi ekspor selanjutnya adalah florikultura terutama krisan, mawar dan anggrek**.** Adapun pasar ekspor yang potensial untuk florikultura di antaranya Jepang (penggemar anggrek, bonsai dan bunga potong), Belanda (sebagai hub florikultura dunia, sehingga terbuka untuk bunga tropis), Amerika Serikat sebagai pasar besar untuk anggrek dan tanaman daun serta Singapura yang merupakan pasar regional yang dekat dan mudah dijangkau.

**Subsektor Perkebunan**

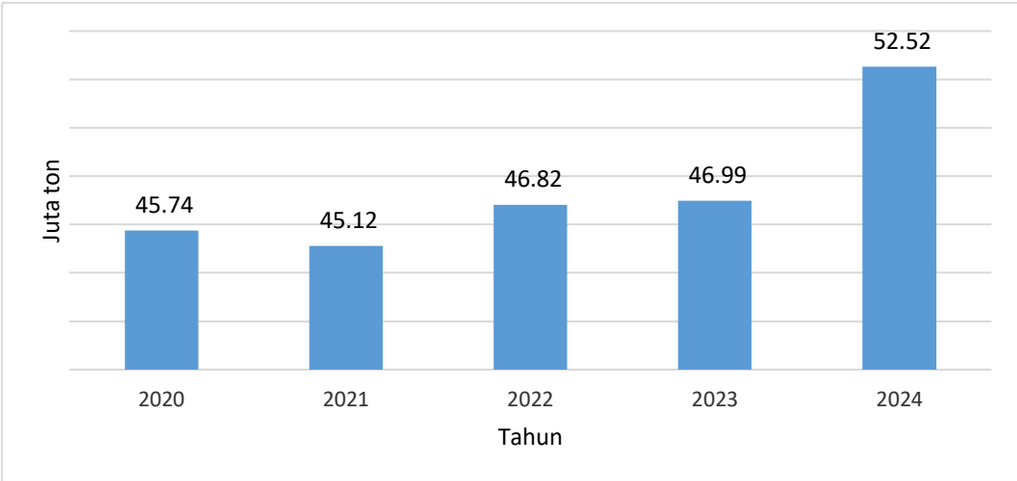


**Gambar 1. 9 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit 2020-2024 (juta ton)**

**Kelapa sawit** merupakan salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan. Produksi kelapa sawit cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2024. Rata-rata peningkatan produksi sebesar 14,81%, dengan luas areal saat ini sekitar 16,8 juta ha. Upaya peremajaan kelapa sawit terus dioptimalkan guna mendukung peningkatan ekspor dan juga pengembangan produk turunan dalam bentuk biodiesel atau industri hilir mendukung pertanian berkelanjutan dan swasembada energi.

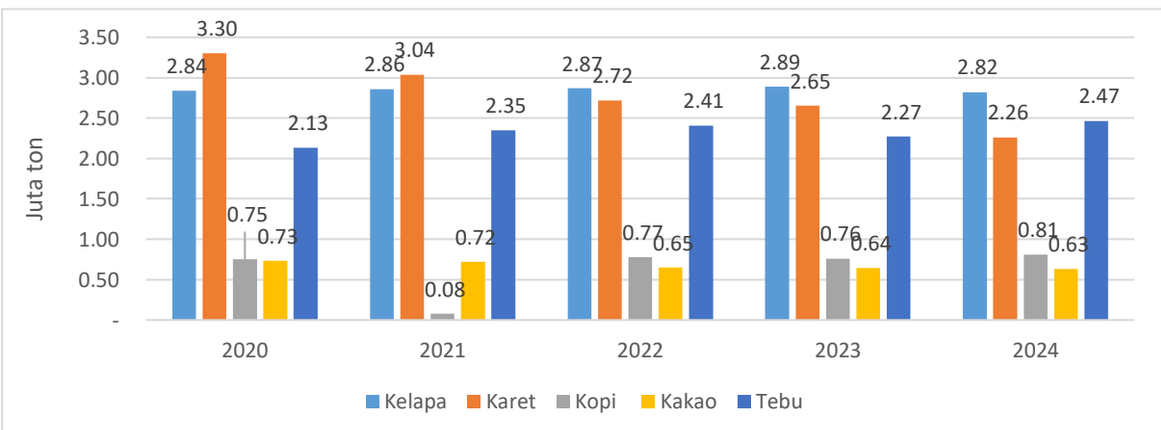


**Gambar 1. 10 Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan 2020-2024**

**Produksi kelapa** cenderung stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan bibit kelapa dalam skala besar untuk dikembangkan di areal lahan sub optimal dalam rangka menjaga stabilitas produksi. Sebaran produksi kelapa berdasarkan pulau untuk kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut: Sumatera (4.723.232 ton), Jawa (2.893.738 ton), Sulawesi (3.445.0554 ton), Kalimantan (641.260 ton), Bali dan Nusa Tenggara (908.104 ton), Maluku (1.547.611 ton) serta Papua (156.615 ton).

**Produksi Karet** tiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan puncaknya pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan anjloknya harga karet dunia yang mengakibatkan turunnya minat petani untuk menanam karet. Upaya pemerintah dalam mengatasi turunnya harga tersebut yaitu melakukan intervensi dalam bentuk menyerap hasil panen karet mentah dari petani dengan harga normal.

**Produksi Kopi** tiap tahun berfluktuasi dari tahun 2020-2024, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman serta rendahnya

peremajaan tanaman kopi yang sudah tua. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kopi, peremajaan, ekstensifikasi dan intensifikasi.

**Produksi Kakao.** Berdasarkan data *International Cocoa Organization* pada tahun 2022/2023, Indonesia merupakan produsen kakao peringkat ke tujuh dunia. Pada tahun 2022-2024, produksi kakao Indonesia terus mengalami penurunan karena menurunnya luas areal tanaman menghasilkan, menurunnya produktivitas kakao karena kurangnya pemeliharaan tanaman dan serangan hama dan penyakit, serta terjadinya konversi perkebunan kako menjadi usaha pertanian lain dan non pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi kakao, peremajaan, dan rehabilitasi lahan.

**Produksi Tebu** merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia, terutama sebagai bahan utama pembuatan gula. Peningkatan produksi terjadi dari tahun 2020-2022 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2023. Program bongkar ratoon dan perluasan tanaman tebu merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu serta mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Disamping itu, Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kementerian BUMN dan swasta melakukan revitalisasi pabrik gula di beberapa lokasi sentra produksi tebu.

Komoditas perkebunan yang diarahkan untuk mencukupi kebutuhan ekspor diantaranya adalah kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan karet.

**Sub Sektor Peternakan**

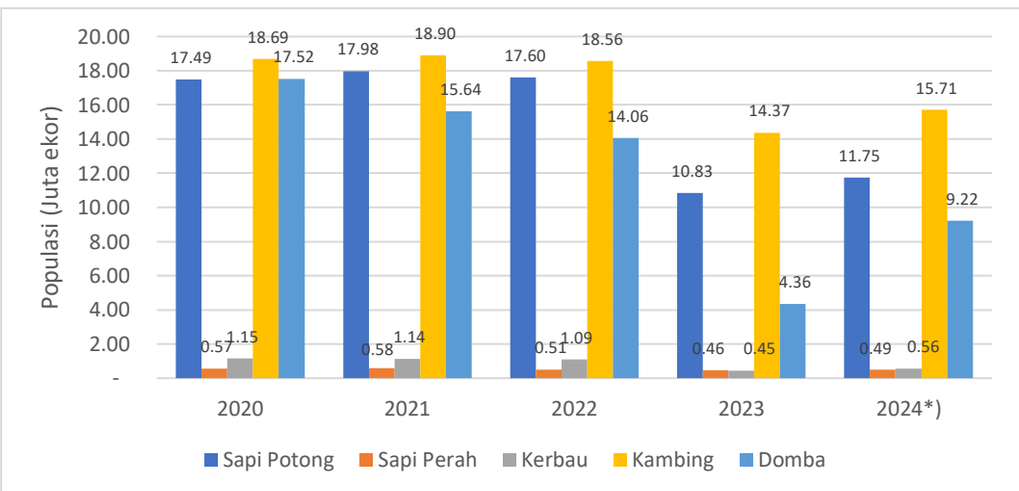


*) angka sementara

**Gambar 1. 11 Perkembangan Populasi Komoditas Strategis Peternakan, 2020 - 2024**

**Populasi sapi potong** tertinggi selama periode 2020-2024 terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 17,98 juta ekor. Pada tahun 2023, terjadi penurunan populasi sapi potong yang disebabkan oleh terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang terutama pada ternak ruminansia. Sebagai upaya mengendalikan penyebaran PMK tersebut, pemerintah telah melakukan vaksinasi secara masif pada seluruh ternak sapi potong yang tersebar di wilayah Indonesia. Pada tahun 2024, mulai terjadi penurunan kasus dengan terbentuknya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi, sehingga secara perlahan kembali meningkatkan pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan kegiatan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak, kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi serta mendorong peternak untuk terus melakukan pengendalian penyakit hewan menular melalui vaksinasi secara teratur.

**Populasi sapi perah** yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis sapi *Friesian Holstein* (FH) yang dikenal memiliki produksi susu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan. Tahun 2021 menjadi puncak populasi sapi perah tertinggi yaitu sekitar 582.169 ekor, kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan populasi. Hal ini disebabkan sapi perah merupakan salah satu jenis ternak yang rentan terhadap PMK. Terjadinya wabah PMK tidak hanya menurunkan populasi, tetapi juga menurunkan produktivitas sapi perah.

Sebagaimana komoditas sapi potong, pada tahun 2024 komoditas sapi perah juga mulai mengalami peningkatan populasi karena adanya kekebalan pada ternak pasca vaksinasi serta didukung dengan kegiatan perbaikan kualitas pakan, pemberian obat dan vitamin, optimalisasi reproduksi, serta adanya penambahan indukan sapi perah melalui impor, sehingga secara perlahan pertumbuhan populasi sapi perah mulai mengalami peningkatan.

**Populasi kerbau** pada tahun 2020-2022 berada di atas 1,1 juta ekor, kemudian menurun pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena semakin menurunnya minat petani dan peternak rakyat untuk memelihara kerbau. Selama ini, sebagian besar ternak kerbau tenaganya digunakan untuk membajak sawah, namun dengan kemajuan teknologi, saat ini pembajakan sawah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pertanian. Dari sisi teknis budidaya, ternak kerbau ini memiliki keunikan tersendiri, yakni tingkat reproduksi kerbau yang rendah (tingkat kebuntingan sekitar 45%-55%, tingkat kelahiran sekitar 45%-50%, dan birahi sulit dideteksi), serta sistem manajemen yang belum optimal karena perkawinan kerbau sebagian besar terjadi secara alami dan tidak ada pengaturan pemanfaatan pejantan sehingga kemungkinan terjadinya *inbreeding* cukup besar.

**Populasi kambing** merupakan ternak yang umum diusahakan di Indonesia, terutama wilayah Pulau Jawa. Populasi kambing pada tahun 2021 sekitar 18,69 juta ekor. Pada tahun 2022-2023, populasi kambing terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pemotongan kambing terutama untuk kebutuhan kurban, sebagaimana data pemotongan ternak pada tahun 2022 sebanyak 756.099 ekor dan pada tahun 2023 jumlah pemotongan meningkat menjadi 819.118 ekor, tanpa diimbangi dengan laju penambahan populasi ternak kambing. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan populasi kambing, hal ini disebabkan adanya dukungan program pemberdayaan peternak dan bantuan bibit kambing.

**Populasi babi** merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena berperan sebagai sumber protein hewani, penyumbang pendapatan ekonomi bagi peternak, dan memiliki nilai budaya yang signifikan di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur.

Masih merebaknya penyakit *African Swine Fever* (ASF) di Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan kematian babi di sejumlah wilayah yang berdampak pada penurunan populasi babi di Indonesia. Populasi babi tahun 2020 sebanyak 7,62 juta ekor dan tahun 2024 sebanyak 4,12 juta ekor atau menurun sebesar 46,02% dengan rata-rata penurunan populasi sebesar 12,25% per tahun. Saat ini kondisi peternakan babi di Indonesia sedang masa pemulihan pasca ASF dengan perbaikan sistem peternakan babi di Indonesia antara lain melalui aturan ketat pada lalu lintas ternak, penguatan biosekuriti di peternakan babi, manajemen pemeliharaan melalui penerapan *Good Farming Practices* (GFP) maupun *Good Breeding Practices* (GBP), revitalisasi pusat pembibitan babi nasional BPTU-HPT Siborong-borong, pengembangan pembibitan babi melalui peran perusahaan swasta serta perbaikan mutu genetik babi melalui importasi bibit dan semen beku babi.

**Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging.** Ayam ras petelur merupakan ayam ras yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya dan ayam ras pedaging (*broiler*) merupakan ayam yang mempunyai kemampuan produksi daging sangat cepat sehingga saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Ayam *broiler* berproduksi pada umur sekitar 4 – 5 minggu dengan bobot badan antara 1,2 – 1,9 kg/ekor dan ayam petelur berproduksi pada umur 19 minggu.

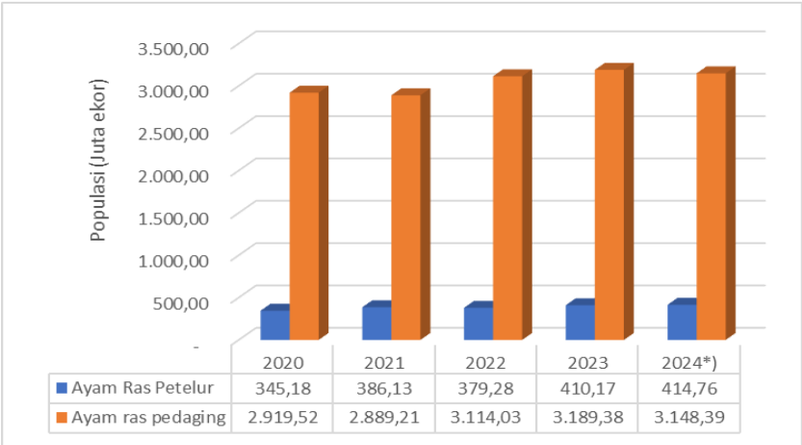


*) angka sementara

**Gambar 1. 12 Populasi Ayam 2020-2024 (Juta ekor)**

Ayam ras petelur dan ayam ras pedaging populasinya mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024. Populasi ayam ras petelur paling tinggi tahun 2024 sekitar 414,76 juta ekor, sedangkan populasi ayam ras pedaging paling tinggi tahun 2023 sekitar 3.189,38 juta ekor. Populasi ayam ras petelur dan ayam ras pedaging pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 dimana terjadinya gangguan pada rantai pasok (*supply chain*), turunnya permintaan pasar, *over* produksi dan harga menurun, kesulitan modal dan biaya pakan naik, ditambah lagi dengan adanya keterbatasan tenaga kerja karena pembatasan sosial.

Secara umum, pada tahun 2023, populasi beberapa komoditas peternakan mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya wabah PMK.

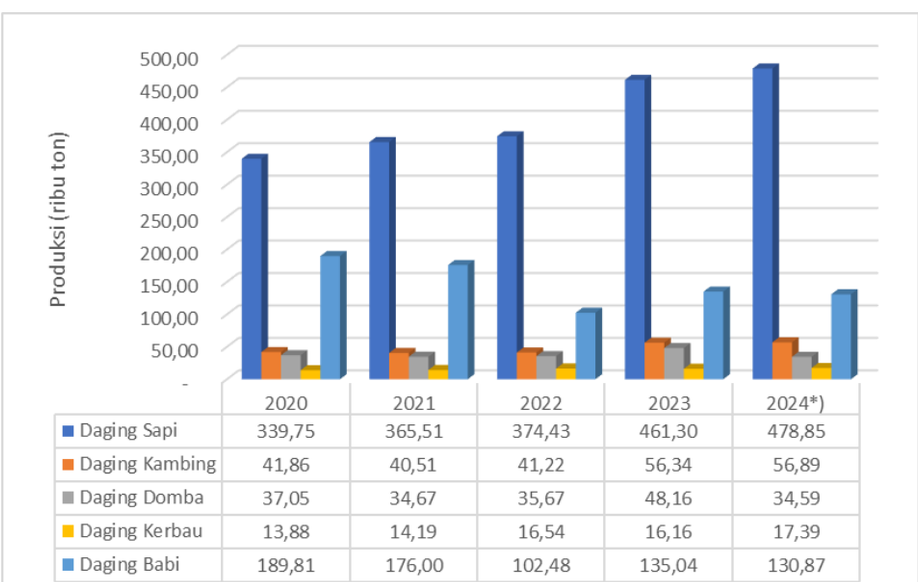


*) angka sementara

**Gambar 1. 13 Perkembangan Produksi Daging 2020-2024 (ribu ton)**

**Produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba dan babi** selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil dan tidak mengalami dinamika yang terlalu signifikan dan peningkatan produksi terjadi pada daging sapi tahun 2020-2024. Produksi daging sapi tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2020. Meningkatnya produksi dan produktivitas sapi tersebut antara lain melalui optimasi pemberian pakan berkualitas (termasuk kombinasi hijauan dan konsentrat) serta pengendalian terhadap penyakit hewan menular.

Total produksi daging kerbau, kambing, dan domba tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan total produksi terendah terjadi pada tahun 2021. Penurunan produksi daging kerbau, kambing, dan domba tersebut umumnya disebabkan selain turunnya populasi ternak akibat dari penyakit PMK, juga terjadi penurunan permintaan terhadap daging akibat adanya pendemi COVID-19.

Pada tahun 2020-2024, rata-rata produksi daging babi mengalami fluktuasi. Produksi daging babi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan produksi terendah terjadi pada tahun 2022. Penurunan daging babi disebabkan merebaknya wabah ASF di sentra produksi daging babi di Indonesia.

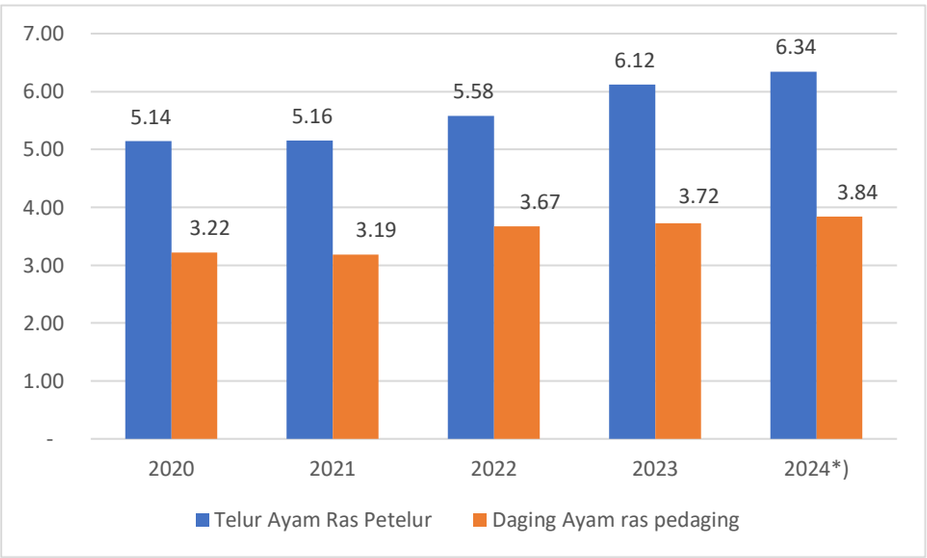


***)** angka sementara

**Gambar 1. 14 Perkembangan Produksi Telur Ayam Ras Petelur dan Daging Ayam Ras Pedaging 2020-2024 (ribu ton)**

**Produksi telur** ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 5,14 juta ton, kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,39% menjadi 5,16 juta ton pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 8,21% hingga mencapai 5,58 juta ton. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi naik sebesar 9,62% menjadi 6,12 juta ton. Untuk tahun 2024, produksi diproyeksikan meningkat lagi sebesar 3,71% menjadi 6,34 juta ton. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi telur ayam ras petelur meningkat sekitar 23,36%, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan tingginya permintaan terhadap komoditas telur di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penduduk.

**Produksi daging ayam ras pedaging** secara umum menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 3,22 juta ton, kemudian turun sekitar 0,9% menjadi 3,19 juta ton pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan turunnya permintaan daging ayam akibat pembatasan

aktivitas masyarakat serta terganggunya rantai pasok. Mulai tahun 2022, produksi kembali meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, naik sebesar 15% menjadi 3,67 juta ton. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,4% menjadi 3,72 juta ton, dan diproyeksikan kembali meningkat 3,2% pada tahun 2024, mencapai 3,84 juta ton.

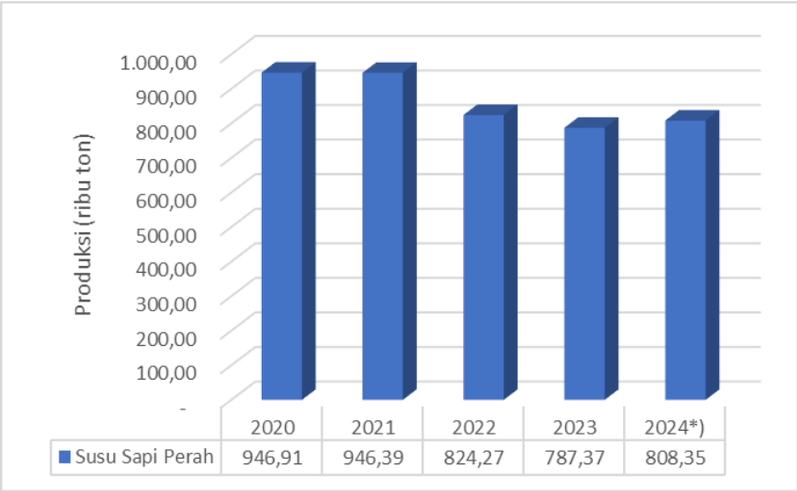


*) angka sementara

**Gambar 1. 15 Perkembangan Produksi Susu 2020-2024 (ribu ton)**

**Produksi Susu.** Selain menghasilkan produksi daging, ternak ruminansia juga memproduksi susu untuk memenuhi kebutuhan protein asal ternak, sebagai bahan makanan penambah nutrisi. Pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengandalkan impor. Produksi susu pada kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan dan penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2022 di mana produksi turun menjadi 824.273 ton, atau berkurang sekitar 12,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi susu 4,48%, menjadi 787.374 ton. Meski demikian, pada tahun 2024, produksi meningkat sebesar 2,66%, mencapai 808.353 ton. Fluktuasi produksi susu disebabkan oleh penurunan populasi sapi perah, penurunan populasi sapi betina produktif, penurunan produktivitas dengan adanya wabah PMK, cuaca ekstrem serta rendahnya harga jual susu di tingkat peternak.

### 1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kementerian Pertanian telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Keberhasilan pencapaian sasaran dievaluasi dengan membandingkan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan, kendala maupun permasalahan dalam mencapai target kinerja. Hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi berikutnya.

Hasil evaluasi kinerja sasaran strategis periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara umum target indikator kinerja dapat dicapai dengan baik (capaian di atas 80%). Keberhasilan pencapaian tersebut didorong oleh berbagai faktor penentu baik yang berasal dari lingkungan internal, diantaranya peningkatan kualitas SDM aparatur, efektivitas pelaksanaan

anggaran, perbaikan regulasi, ketepatan sasaran program, maupun yang berasal dari lingkungan eksternal seperti keberpihakan kebijakan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, dukungan lintas sektor maupun penguatan kerjasama dalam dan luar negeri.

Namun demikian, masih terdapat berbagai sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara optimal karena adanya berbagai dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja Kementerian Pertanian 2020 – 2024. Beberapa dinamika lingkungan strategis tersebut diantaranya dinamika pada lingkungan internal seperti kebijakan *automatic adjustment* yang diterapkan pada pertengahan periode, perubahan struktur organisasi yang mengurangi cakupan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Pertanian, serta dinamika lingkungan eksternal seperti dampak perubahan iklim ekstrem kekeringan (El Niño) dan ekstrem basah (La Niña), serangan hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, pandemi COVID, serta disrupsi terhadap distribusi komoditas pangan strategis akibat ketegangan geopolitik global.
Kementerian Pertanian melakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana strategis pada tahun 2020 dan 2021, yang berdampak pada perubahan sebagian indikator kinerja. Penjelasan terhadap urgensi penyesuaian tersebut sebagai berikut:

a. Penyesuaian pada Renstra tahun 2020 karena terjadinya pandemi COVID yang melanda dunia menyebabkan perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran, dan kebijakan penting lainnya.

b. Penyesuaian pada Renstra tahun 2021 akibat adanya kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan direktif Presiden, menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target.

Penyesuaian tersebut menyebabkan adanya penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang secara rinci tahun penggunaan indikator kinerja pada sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kementerian Pertanian 2020-2024**

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | PERIODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1 | Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri | 2020 – 2024 |
| | | 2 | Peningkatan akses pangan | 2021 |
| | | 3 | Peningkatan konsumsi pangan berkualitas | 2021 – 2022 |
| | | 4 | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | 2020 – 2024 |
| | | 5 | Persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani | 2020 – 2024 |
| | | 6 | Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis | 2020 – 2024 |
| | | 7 | Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan | 2021 – 2023 |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | PERIODE |
|---|---|---|---|---|
| | | 8 | Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan | 2021 – 2023 |
| | | 9 | Tingkat pemenuhan prasarana pertanian | 2021 - 2024 |
| | | 10 | Tingkat kemanfaatan sarana produksi pertanian | 2021 - 2024 |
| 2 | Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian | 11 | Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian | 2020 - 2024 |
| | | 12 | Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional | 2021 - 2024 |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian | 13 | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | 2021 - 2022 |
| | | 14 | Persentase petani yang menerapkan teknologi | 2020 - 2024 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional | 15 | Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | 2020 - 2024 |
| | | 16 | Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | 2021 - 2024 |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel | 17 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | 2020 - 2024 |
| | | 18 | Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian | 2020 - 2023 |

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 Revisi II, diolah

Analisis ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian periode 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1:**

**Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas**

Sasaran strategis "Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas" bertujuan untuk menjamin penyediaan pangan baik jumlah dan mutu, didukung dengan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum target sasaran ini rata-rata dapat dicapai melalui pencapaian target produksi komoditas pangan strategis, penyediaan pangan segar yang memenuhi keamanan pangan, penanganan serangan OPT dan DPI, pengendalian wilayah dari penyakit hewan menular strategis, serta penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS, namun, terdapat 2 (dua) indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan yaitu IKSS2

"Peningkatan akses pangan," dan IKSS3 "Peningkatan konsumsi pangan berkualitas" yang tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 serta 2 (dua) indikator terkait perkarantinaan yaitu IKSS 7 "Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan keamanan hayati yang tidak memenuhi persyaratan karantina di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan" dan IKSS 8 "Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan" yang tidak diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2024 karena adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian, sehingga dalam analisis capaian tidak menyertakan analisis keempat indikator kinerja tersebut. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 6 (enam) IKSS sebagai berikut.

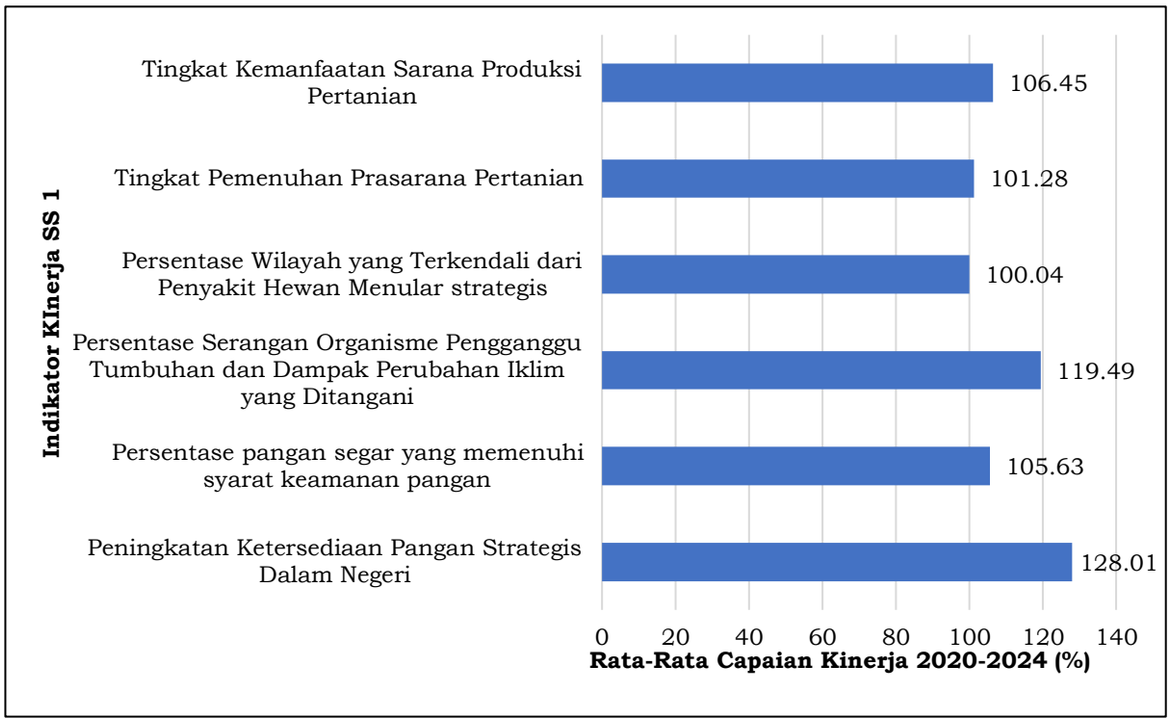


**Gambar 1. 16 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis**

Berdasarkan data di atas, sebagian besar rata-rata capaian indikator kinerja periode 2020-2024 berada di atas 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Secara rata-rata, pada periode 2020-2024 capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah "Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri" yang mencapai 128,01%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh peningkatan produksi komoditas pangan strategis meliputi peningkatan komoditas tanaman pangan terutama jagung, peningkatan komoditas hortikultura terutama bawang merah dan peningkatan sebagian besar komoditas peternakan (daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam, dan telur). Peningkatan produksi ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya penyediaan benih dan bibit unggul, penerapan budidaya yang baik, upaya antisipasi perubahan iklim dan pengendalian serangan OPT serta penyakit tanaman dan hewan.

Capaian kinerja IKSS yang terendah adalah "Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis". Namun demikian, capaian indikator ini sebesar 100,04% yang berarti mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengancam dan menghambat pencapaian target, yaitu masih terdapat wilayah kabupaten/kota yang belum dapat dikendalikan terhadap

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Persentase wilayah yang masih rendah pengendaliannya terutama untuk PMK yang mewabah sejak tahun 2022, *Lumpy Skin Disease* (LSD), *Septicaemia epizootica* dan rabies. Untuk itu, masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih baik guna memperluas wilayah yang dapat dikategorikan terkendali untuk penyakit-penyakit tersebut.

**Sasaran Strategis 2:**

**Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian**

Sasaran strategis "Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian" bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian dengan mendorong penanganan pascapanen yang baik serta pengolahan dan pemasaran hasil komoditas pertanian. Penanganan pascapanen yang baik dapat mengurangi kehilangan hasil, sedangkan pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian ditujukan untuk penyediaan kebutuhan dalam dan luar negeri. Penyediaan sarana prasarana pasacapanen dan pengolahan serta perluasan jaringan pemasaran dapat mendukung keberhasilan sasaran ini.
Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS 11 "Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian" dan IKSS 12 yaitu "Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional". Rata-rata capaian kedua indikator tersebut pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

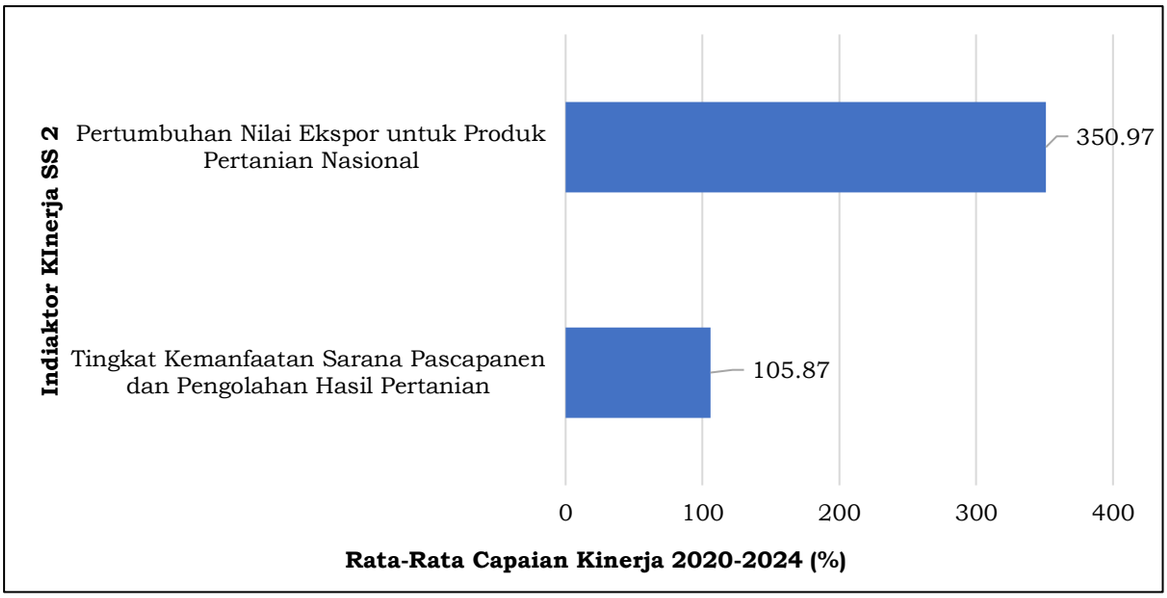


**Gambar 1. 17 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian**

Berdasarkan gambar di atas, kedua IKSS pada sasaran strategis "Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian" mencapai di atas 100%. Hal ini berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS tertinggi adalah pada indikator kinerja "Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian nasional" dengan rata-rata capaian 350,97%.

Komoditas pertanian yang mengalami peningkatan nilai ekspor cukup signifikan adalah komoditas ubi kayu, kacang hijau, jahe, jamur, durian, bawang merah, cengkeh dan sagu. Selain itu komoditas lain yang cukup konsisten mengalami peningkatan ekspor adalah mangga, nanas, manggis,

krisan, bawang merah, cabai, lada, kopi, kakao, nilam, hasil ternak, dan produk hewan non pangan.

Capaian indikator kinerja "Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian" juga menunjukkan pencapaian rata-rata di atas 100% dengan rata-rata capaian 105,87% yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah termanfaatkannya sarana pascapanen dan pengolahan hasil pertanian untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang diberikan pemerintah kepada petani. Sarana tersebut digunakan petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi komoditas pertaniannya.

**Sasaran Strategis 3:**

**Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian**

Sasaran strategis "Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian" ditujukan untuk memastikan bahwa petani mampu mengakses, memahami, dan mengimplementasikan teknologi pertanian yang telah dihasilkan dalam kegiatan usaha tani mereka. Pemanfaatan inovasi teknologi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif, tetapi juga untuk memastikan bahwa teknologi tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh petani di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk menjembatani hasil-hasil riset dan inovasi pertanian dengan kebutuhan serta kapasitas petani, sehingga teknologi yang tersedia dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani.
Sasaran strategis ini memiliki 2 IKSS yaitu IKSS 13 "Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan" dan IKSS 14 "Persentase petani yang menerapkan teknologi". IKSS 13 tidak lagi diukur oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2023 karena adanya kebijakan sentralisasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan oleh institusi lain. Pembahasan capaian ini hanya menganalisis IKSS14. Hasil analisis terhadap indikator tersebut pada periode 2020-2024 sebagaimana uraian berikut.

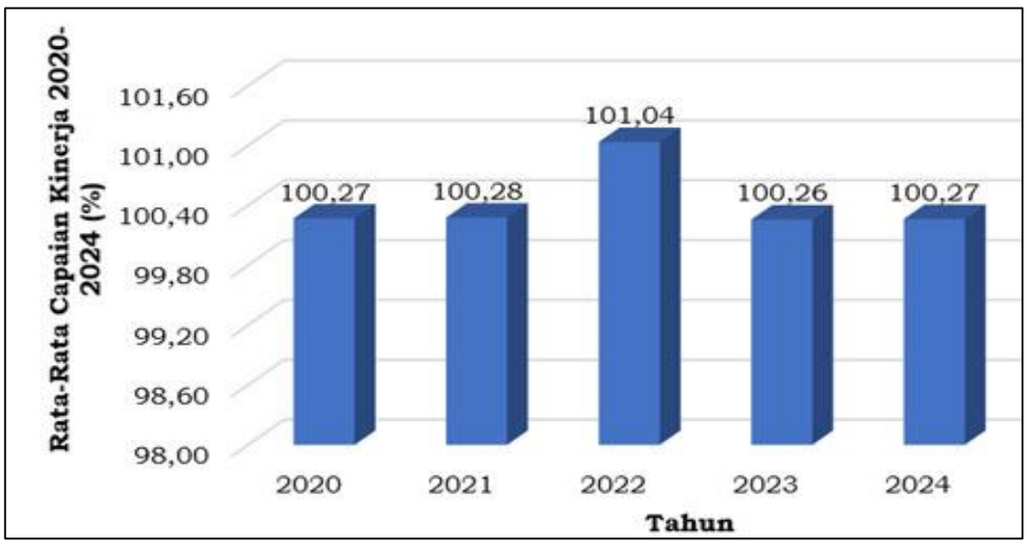


**Gambar 1. 18 Perkembangan Capaian IKSS Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi**

Berdasarkan gambar di atas, capaian IKSS Persentase petani yang menerapkan teknologi periode 2020-2024 selalu mencapai lebih dari 100% dengan rata-rata capaian sepanjang 2020-2024 sebesar 100,42%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Keberhasilan indikator ditandai dengan perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta adopsi inovasi dan

teknologi pertanian sehingga terjadi peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani. Peningkatan kapasitas petani ini didukung melalui berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan pertanian yang meliputi penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pengelolaan OPT, mekanisasi pertanian, pengelolaan panen dan pasca panen serta kegiatan Sekolah Lapang (SL) pertanian organik.

**Sasaran Strategis 4:**

**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional**

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional" bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, sekaligus mendorong perbaikan mutu kelembagaan pertanian. Salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, adalah penyediaan SDM pertanian yang kompeten, mengingat sektor ini kini harus bersaing dengan berbagai sektor lain dalam penggunaan tenaga kerja, lahan dan faktor produksi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan sektor pertanian yang semakin kompleks. Di sisi lain, kelembagaan petani juga memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang paling mendasar. Penguatan kelembagaan petani perlu terus didorong agar institusi tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam mengakses faktor-faktor produksi serta berbagai sumber daya pendukung usaha tani lainnya.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS15 "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" dan IKSS16 "Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya". Oleh karena itu, analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis ini dilakukan terhadap kedua IKSS tersebut sebagai berikut.

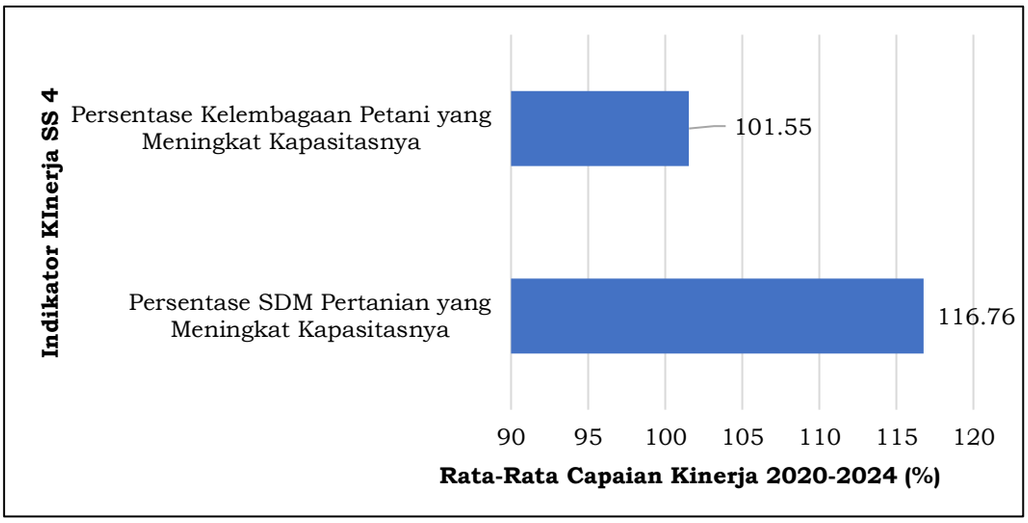


**Gambar 1. 19 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional**

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada gambar di atas, rata-rata capaian indikator kinerja kedua IKSS pada periode 2020-2024 adalah lebih dari 100%, yang berarti kinerja pada sasaran strategis ini melebihi target yang ditetapkan atau sangat berhasil. Capaian kinerja IKSS yang tertinggi adalah pada indikator kinerja "Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya" yang mencapai rata-rata 116,76%. Keberhasilan pencapaian indikator ini

didukung oleh berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petani melalui masifnya kegiatan pelatihan petani, penentuan metode dan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan petani, peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan widyaiswara, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pelatihan, dan metode pelatihan yang melibatkan interaksi aktif peserta pelatihan.

Di sisi lain, indikator "Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya" secara rata-rata capaian kinerjanya pada periode 2020-2024 sebesar 101,55% atau melebihi target yang ditetapkan. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

**Sasaran Strategis 5:**

**Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel**

Sasaran strategis "Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel" bertujuan utuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif serta birokrasi yang profesional dan transparan. Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak akhir 1990-an, dengan tujuan utama meningkatkan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, reformasi ini terus mengalami penyempurnaan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, penataan anggaran juga harus dilakukan dengan akuntabel, yang berarti pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) IKSS, yaitu IKSS17 "Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian" dan IKSS18 "Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian". Kedua indikator ini selama periode 2020-2024 mengalami dinamika yang cukup mendasar, yaitu: 1) perubahan metode perhitungan nilai reformasi birokrasi sejak tahun 2023; dan 2) indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dihitung berdasarkan kategori pada tahun 2024, sehingga pada tahun 2024 indikator ini diganti menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil analisis capaian kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) IKSS sebagai berikut.

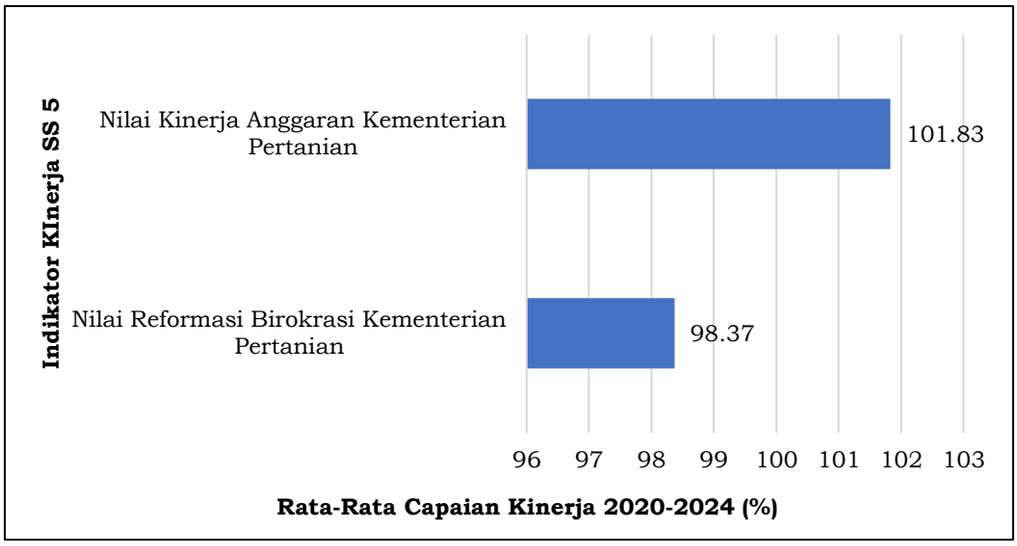


**Gambar 1. 20 Rata-rata Capaian IKSS pada Sasaran Strategis Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel**

Rata-rata capaian IKSS "Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel" pada periode 2020-2024 sebesar 100,01% atau sangat berhasil. Namun demikian capaian ini lebih didominasi oleh capaian IKSS "Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian" yang rata-rata capaiannya sebesar 101,83%, sedangkan rata-rata capaian Nilai RB sebesar 98,37%.

Keberhasilan capaian indikator kinerja NKA Kementerian Pertanian didukung oleh berbagai upaya strategis meliputi pencapaian sasaran strategis, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/K/L, konsolidasi dan koordinasi internal Kementan dan eksternal (Bappenas dan Kementerian Keuangan), percepatan pencairan anggaran, melakukan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun, optimalisasi belanja kontraktual dengan menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) di awal tahun dan memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa ditangani dan didaftarkan paling lambat pertengahan semester, serta penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Di sisi lain, Nilai RB Kementerian Pertanian menjadi satu-satunya indikator yang nilai rata-rata kinerjanya tidak mencapai 100% atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah karena adanya perubahan metode perhitungan Nilai RB. Perubahan metode ini berdampak cukup signifikan karena semula menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), kemudian berubah menggunakan hasil perhitungan indikator pada dimensi RB General dan RB Tematik. Hal ini dilakukan karena RB harus dapat mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan RB berdampak.

**Tabel 1. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementan Tahun 2020-2024**

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas | 1 | Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri | % | 116,74 | 133,70 | 175,82 | 110 | 103,76 | 128,01 |
| | | 2 | Peningkatan Akses Pangan | % | - | 18,84 | n/a*) | - | - | - |
| | | 3 | Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas | % | - | 240,97 | 231,28 | - | - | - |
| | | 4 | Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan | % | 106,88 | 106,30 | 107,05 | 107,28 | 100,64 | 105,63 |
| | | 5 | Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani | % | 120,78 | 126,23 | 120,01 | 127,80 | 102,61 | 119,49 |
| | | 6 | Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular strategis | % | 100,25 | 100,30 | 99,42 | 100,09 | 100,15 | 100,04 |
| | | 7 | Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang ditetapkan | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| | | 8 | Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan | % | 146,34 | 133,93 | 232,56 | 227,27 | - | - |
| | | 9 | Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian | % | 106,29 | 99,16 | 102,06 | 100,82 | 98,05 | 101,28 |
| | | 10 | Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian | % | 109,58 | 106,25 | 108,38 | 105,85 | 102,18 | 106,45 |
| 2 | Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian | 11 | Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian | % | - | 107,69 | 107,70 | 106,03 | 102,06 | 105,87 |
| | | 12 | Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional | % | 281,71 | 165,76 | 74,92 | 996,00 | 236,45 | 350,97 |

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-Rata Capaian Kinerja 2020-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian | 13 | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | % | 117,03 | 165,16 | 162,03 | - | - | - |
| | | 14 | Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi | % | 100,27 | 100,28 | 101,04 | 100,26 | 100,27 | 100,42 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional | 15 | Persentase SDM Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya | % | 150,64 | 106,56 | 113,60 | 104,68 | 108,33 | 116,76 |
| | | 16 | Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya | % | - | 104,37 | 101,25 | 100,29 | 100,27 | 101,55 |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel | 17 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | Nilai | 99,30 | 98,18 | 97,47 | 96,87 | 100,05 | 98,37 |
| | | 18 | Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian | Nilai | 101,76 | 102,36 | 103,34 | 101,68 | 100,01 | 101,83 |

### 1.1.4. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Aspirasi Masyarakat, dapat diperoleh melalui:

- Media Cetak
- Media Elektronik
- Forum konsultansi publik; dan/atau
- Metode penjaringan aspirasi lainnya yang akuntabel

Beberapa aspirasi masyarakat yang didapat dari berbagai media terkait pembangunan pertanian adalah:

1. **Harga dan ketersediaan input sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) yang lebih terjangkau**
   Petani berharap agar harga input sarana produksi dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau. Harga input sarana produksi yang tinggi dapat menjadi beban bagi petani dan memengaruhi biaya produksi mereka.
   Selain harga yang terjangkau, petani juga mengharapkan ketersediaan input sarana produksi yang lebih terjamin, sehingga pasokan dapat mencukupi kebutuhan petani dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat menghambat aktivitas pertanian.
2. **Kepastian kepemilikan lahan pertanian**
   Para petani sangat membutuhkan kepastian hukum terkait lahan pertanian yang mereka garap. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan mendorong investasi jangka panjang dalam sektor pertanian.
3. **Penguatan kelembagaan petani**
   Penguatan kelembagaan petani seperti Poktan/Gapoktan dan KEP diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dan akses ke pasar.
4. **Jaminan akses pasar dan stabilitas harga komoditas pertanian**
   Akses pasar yang adil dan inklusi adalah fondasi vital bagi kesejahteraan petani dalam ekonomi pertanian. Stabilitas harga komoditas pertanian memberikan dampak pada peningkatan animo petani untuk berusaha tani. Kedua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5. **Adopsi teknologi pertanian modern**
   Adopsi teknologi adalah proses dimana petani atau pelaku usaha pertanian mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pertanian mereka. Adopsi teknologi dapat berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian.
6. **Kemudahan akses petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah**
   Petani menginginkan kemudahan dalam mendapatkan akses bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian.

### 1.1.5. Isu Aktual

#### 1.1.5.1. Sumber Daya Manusia Pertanian

Pembangunan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memperkuat kapasitas SDM pertanian sebagai tulang punggung transformasi sektor pertanian Indonesia. Petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap inovatif agar mampu menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan

ketahanan pangan. Pengembangan SDM menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Sampai saat ini sektor pertanian merupakan penyedia lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian luas menyerap tenaga kerja sebanyak 40,76 juta orang atau 28 persen dari total orang yang bekerja. Dari yang bekerja pada sektor pertanian tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan kelompok umur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tenaga kerja di sektor pertanian menyerupai pola piramida terbalik, dimana kelompok umur tua semakin besar, dan kelompok umur muda relatif sedikit.

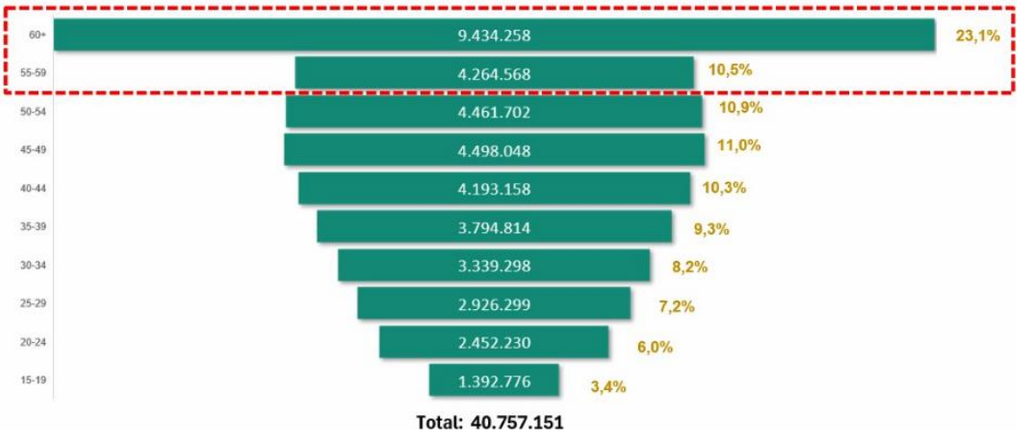


**Gambar 1. 21 Klasifikasi petani berdasarkan kelompok umur**

Terdapatnya perubahan struktural demografi ketenagakerjaan pada sektor pertanian mengarah pada fenomena *aging farmer*. *Aging farmer* didefinisikan sebagai penuaan petani, dimana tenaga kerja sektor pertanian didominasi oleh masyarakat berusia 40-60 tahun (UGM, 2022). *Aging farmer* sebenarnya tidak akan menjadi urgensi yang serius ketika peningkatan usia petani juga diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja muda di sektor pertanian. Sayangnya, fenomena peningkatan *aging farmer* dan regenerasi petani berbanding terbalik. Situasi ini akan menyebabkan kekosongan tenaga kerja petani, sehingga akan berpengaruh terhadap produksi pertanian. Oleh karena itu, tantangan yang sesungguhnya dibalik *aging farmer* adalah tingkat regenerasi petani yang masih rendah.

Salah satu fokus utama pengembangan SDM pertanian adalah peningkatan kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kementerian Pertanian akan memperluas akses pelatihan teknis bagi petani dan generasi muda, termasuk penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), *smart farming*, dan pengelolaan agribisnis. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi akan diperkuat untuk memastikan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, tercipta tenaga kerja pertanian yang terampil, adaptif, dan siap bersaing di era digital.

Selain aspek teknis, penguatan kapasitas SDM juga mencakup pembangunan mental kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Program pendampingan dan inkubasi bisnis akan digalakkan untuk mendorong terciptanya usaha pertanian yang bernilai tambah tinggi. Petani tidak hanya diposisikan sebagai produsen, tetapi juga sebagai pengusaha yang mampu mengelola rantai pasok, pemasaran, dan inovasi produk. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di perdesaan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem penyuluhan pertanian, Kementerian Pertanian akan merevitalisasi peran penyuluh sebagai agen perubahan di lapangan. Penyuluh pertanian akan dibekali dengan metode penyuluhan modern, termasuk pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan edukasi. Sinergi antara penyuluh, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lokal akan ditingkatkan guna mempercepat diseminasi inovasi pertanian. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan teknologi dapat berjalan lebih efektif, mendorong produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Melalui pengembangan SDM pertanian yang holistik, Kementerian Pertanian berupaya menciptakan generasi petani yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan pertanian Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi global. Pada akhirnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen kuat dan strategi yang terukur, periode 2025–2029 diharapkan menjadi titik lompatan bagi kemandirian dan kemajuan pertanian Indonesia.

#### 1.1.5.2. Penerapan Teknologi

Pertanian modern menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern telah diakselerasi melalui tiga pilar utama: mekanisasi, digitalisasi, dan *smart farming*. Saat ini pertanian Indonesia berada pada level teknologi *agriculture* 2.0 menuju teknologi *agriculture* 3.0. *Agriculture* 3.0 yang dikenal juga sebagai pertanian presisi, merupakan era pertanian yang memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan praktik pertanian. Teknologi pertanian pada tahun 2029 diharapkan sudah menjadi teknologi pertanian 4.0.

*Smart farming* telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan input pertanian seperti air, pupuk, dan pestisida. Teknologi *precision farming* telah diterapkan untuk memastikan dosis pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman, sehingga mengurangi limbah dan biaya produksi. Selain itu, sistem irigasi cerdas berbasis IoT telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, terutama di daerah rawan kekeringan.

#### 1.1.5.3. Infrastruktur Pendukung Pertanian

Ketersediaan prasarana pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang memengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Prasarana tersebut meliputi: (1) pengairan lahan pertanian; (2) ketersediaan lahan pertanian; serta (3) pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Pengairan lahan pertanian didukung oleh kinerja aspek pengelolaan air irigasi untuk pertanian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian, pengairan lahan pertanian meliputi:

a. Rehabilitasi jaringan irigasi.
b. Pengembangan sumber air yang terdiri irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan.
c. Bangunan konservasi air.

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau sesuai untuk dijadikan lahan usaha tani dalam rangka memproduksi baik tanaman maupun hewan ternak. Lahan pertanian yang dimaksud meliputi: lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ketersediaan lahan pertanian dilakukan melalui kegiatan optimasi lahan dan lahan pertanian pangan produktif. Kegiatan optimasi lahan dilakukan pada lahan rawa dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa yang potensial mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa untuk meningkatkan ketersediaan lahan pertanian.

Pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian merupakan salah satu faktor pendukung keberlangsungan penyelenggaraan pertanian. Pemberian akses pembiayaan bertujuan untuk mempermudah petani dalam memperoleh modal guna menyelenggarakan dan mengembangkan usaha pertanian. Modal didapatkan dari berbagai sumber baik APBN maupun non-APBN melalui berbagai skema pembiayaan. Perlindungan usaha pertanian berguna untuk memberikan proteksi terhadap potensi kerugian usaha pertanian melalui asuransi usaha pertanian. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha tani padi (petani) dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar dan pelaku usaha ternak sapi/kerbau dengan kepemilikan ternak maksimal 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil untuk mendapatkan modal usaha kembali pada saat terjadi gagal panen atau kematian ternak.

#### 1.1.5.4. Sarana Produksi Pertanian

Sarana yang dimaksud meliputi benih/bibit, pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian. Benih/bibit unggul dan bermutu yang ditandai dengan sertifikasi harus mempunyai keunggulan dari sisi varietas, ketahanan terhadap hama, serta mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.

Optimasi distribusi pupuk untuk meningkatkan indeks pertanaman serta luas panen dan optimasi distribusi pestisida diharapkan berkontribusi kepada luas panen. Distribusi pupuk termasuk didalamnya adalah pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk organik dan pupuk anorganik.

Distribusi pestisida merupakan gabungan dari pestisida kimia dan pestisida alami. Sementara itu, pemanfaatan alsintan yang tepat guna diharapkan dapat membantu petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional. Alsintan yang dimaksud meliputi alsintan pra-panen dan pasca panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

#### 1.1.5.5. Pengarusutamaan Gender di Sektor Pertanian

Selama periode 2020-2024 Kementerian Pertanian telah melakukan beragam strategi agar pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan. Kementan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG) mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengawasan/audit. Kegiatan di Kementerian Pertanian yang berbasis gender di antaranya kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, serta Program *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services* (YESS).

YESS terus memperjuangkan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dunia pertanian. Melalui konsep *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI), program ini memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu capaiannya adalah dari target penerima manfaat YESS tahun 2023 sebanyak 66.990 orang, penerima manfaat kategori GESI untuk perempuan mencapai 26.274 orang.

Kementerian Pertanian selama periode 2020-2024 telah meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebanyak 2 (dua) kali. Anugerah penghargaan level tertinggi yaitu level Mentor untuk APE 2020 dan anugerah penghargaan level Utama untuk APE 2023. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Kementan dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan kementerian, yang bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan pertanian.

#### 1.1.5.6. Praktik Pertanian Berkelanjutan

Praktik pertanian berkelanjutan memprioritaskan keseimbangan antara produksi pangan, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi petani, agar dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan). Praktik pertanian berkelanjutan di Kementerian Pertanian di antaranya Desa Organik, Pengendalian Hama Terpadu, Irigasi Hemat Air, Rotasi Tanaman, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan *Climate Smart Agriculture* (CSA).

Pertanian berkelanjutan di Indonesia menjadi strategi penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. Sebagai negara agraris dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan seperti degradasi lahan, penurunan kesuburan tanah, dan perubahan iklim. Praktik pertanian berkelanjutan mencakup pendekatan agroekologi, penggunaan pupuk organik, integrasi tanaman–ternak, serta diversifikasi tanaman yang tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem.

Implementasi praktik pertanian berkelanjutan memerlukan sinergi antara inovasi teknologi, kearifan lokal dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani. Peranan pemerintah dan swasta sangat penting untuk mendukung dan menciptakan ekosistem pertanian berkelanjutan, seperti dukungan dalam pendanaan, penyiapan teknologi, proses hilirisasi produk pertanian ramah lingkungan, dan pendekatan teknologi *Internet of Things* (IoT) dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi input sarana produksi budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1. Potensi

Berdasarkan uraian pada sub bab 1.1, maka terdapat beberapa potensi yang meliputi kekuatan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta peluang yang dapat dimanfaatkan Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kekuatan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program swasembada pangan di RPJMN 2025–2029. Komitmen Presiden dalam RPJMN 2025–2029 untuk mempercepat swasembada pangan menjadi motor utama penggerak Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan produksi, mengurangi impor, menjaga stabilitas harga, serta membuka lapangan kerja. Swasembada pangan menjadi kunci memperkuat kedaulatan pangan. Program ini mencakup intensifikasi, ekstensifikasi, modernisasi, pemanfaatan benih unggul, *smart farming*, dan peningkatan indeks panen. Sinergi lintas kementerian, optimalisasi KUR, serta dampak sosial bagi sekitar 40 juta pekerja sektor pertanian akan memperkuat ekonomi desa dan regenerasi petani. Di tengah krisis pangan global, upaya mewujudkan ini jadi tonggak transformasi pertanian menuju kemandirian, modernitas, dan daya saing nasional.
2. Keragaman sumber daya di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia didukung dengan keragaman sumber daya, meliputi luas lahan pertanian sekitar 45 juta hektar, lahan sawah sekitar 7,38 juta hektar, beragam komoditas unggulan, serta plasma nutfah lokal yang strategis. Didukung jaringan kelembagaan yang luas (sekitar 5.700 BPP, 38.000 penyuluh) dan 40,6 juta tenaga kerja, Kementerian Pertanian berharap mampu mendorong inovasi, meningkatkan kapasitas petani, dan mengoptimalkan potensi lokal melalui pendekatan pembangunan berbasis wilayah. Selain itu, peluang ekspor senilai USD 7,44 miliar dari sawit, karet, kopi, kakao, dan komoditas unggulan lain memperkuat daya saing global. Dengan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pertanian berperan penting dalam transformasi pertanian menuju kemandirian, ketahanan, dan kesejahteraan rakyat.
3. Akses kelembagaan organisasi Kementerian Pertanian memiliki jaringan yang tersebar di seluruh provinsi.
4. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai tahap produksi pertanian, mulai dari penyiapan benih hingga pemanenan dan pengolahan. Perempuan berpotensi dalam mengembangkan inovasi pertanian seperti pertanian organik dan diversifikasi produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sedangkan peluang yang dimiliki Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa peluang bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
   a. Potensi pasar ekspor Indonesia semakin terbuka seiring dengan proyeksi FAO bahwa permintaan pangan global akan meningkat 60% pada 2050. Banyak negara berkembang akan semakin bergantung pada impor pangan, sementara negara maju mengalami penurunan kapasitas produksi akibat urbanisasi dan perubahan lahan. Indonesia, dengan keanekaragaman hayati dan tren global terhadap produk sehat dan organik, memiliki peluang besar untuk mengembangkan rantai nilai dari produk pangan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah.
   b. Proyeksi penurunan luas lahan pertanian subur di negara maju menyebabkan penurunan produksi pertanian pada negara tersebut. Sedangkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri. Sehingga hal ini menjadi peluang pasar ekspor baru bagi komoditas pangan dan pertanian untuk beberapa komoditas utama dan strategis.
   c. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang semakin berkurang di wilayah perdesaan pada beberapa negara berkembang menjadi peluang tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga ahli pertanian, untuk bekerja di luar negeri. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi

pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten melalui pendidikan vokasi, sertifikasi keterampilan modern, dan peningkatan kualitas penyuluhan.

d. Proyeksi peningkatan populasi akan meningkatkan *demand* terhadap produk pangan dan pertanian, sedangkan ketersediaan akan semakin menurun seiring berkurangnya lahan pertanian di dunia. Hal ini selain menimbulkan potensi ekspor juga berpeluang meningkatkan nilai tambah, daya saing dan harga produk ekspor pertanian Indonesia di luar negeri.

2. Tren pertumbuhan usaha pertanian global berpotensi meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia. Hal ini menimbulkan peluang bagi SDM petani di Indonesia, yaitu:
   a. Peluang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian dari hulu ke hilir.
   b. Peluang peningkatan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM pertanian nasional.
3. Kemajuan teknologi digital juga menimbulkan peluang bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian Indonesia, yaitu:
   a. Penerapan teknologi digital sebagai salah satu metode pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan SDM Pertanian.
   b. Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi SDM pertanian nasional melalui berbagai kerjasama berbasis pemanfatan teknologi digital.
4. Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan potensi sumber daya pertanian yang besar, termasuk plasma nutfah yang melimpah (mega *biodiversity*). Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) darat Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sejak lama telah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografis yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun.

   Indonesia memiliki koleksi sumber daya genetik tanaman pangan, khususnya padi sebanyak 6.330 aksesi yang tersimpan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dan sebanyak 3.442 aksesi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Beberapa padi kultivar *Landraces japonica* dari Indonesia, yang memiliki karakter malai besar, daun besar, sistem perakaran kuat, batang tebal, dan sedikit *unproductive tillers* telah digunakan dalam program pemuliaan internasional.
5. Selain itu, koleksi sumber daya genetik tanaman yang terdiri atas tanaman pangan lainnya, hortikultura, perkebunan, dan tanaman pakan ternak tersebar di UK/UPT di bawah Kementerian Pertanian yang berkedudukan di seluruh Indonesia, meliputi 13.481 aksesi tanaman pangan lainnya, 23.077 aksesi tanaman hortikultura, 8.541 aksesi tanaman perkebunan, dan 117 aksesi tanaman pakan ternak. Sebanyak 10.785 aksesi tanaman tersimpan dalam Bank Gen Pertanian
6. Visi, Misi, dan Program Kerja Presiden pada Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 memberikan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu peluang:
   a. Swasembada pangan menjadi salah satu fokus strategis nasional dalam mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karena itu, seluruh K/L terkait

akan terlibat bahu membahu dalam mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden. Kementerian Pertanian otomatis akan terbantu dan mendapat banyak dukungan dari seluruh K/L terkait.

b. Pembangunan pertanian berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).
c. Modernisasi pertanian melalui penerapan *Agriculture* 3.0 akan membuat pertanian nasional semakin produktif dan mandiri.
d. Penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian dalam meningkatkan produksi pangan asal pertanian untuk komoditas pangan prioritas (padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu dan sukun) serta komoditas pangan bergizi (misal beras, sayur dan buah, susu, karkas, dan lain-lain).
e. Sentralisasi penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian.
f. Penyuluhan pemanfaatan varietas tanaman dan benih unggul hasil penelitian.
g. Penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih melalui kerja sama dan kolaborasi dengan swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
h. Diklat di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
i. Penyuluhan mengenai pengelolaan dan pengembangan usaha tani.
j. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM pengembangan usaha tani (pengembangan akses pasar dan akses informasi).
k. Penyuluhan mengenai rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
l. Pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam memangkas rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
m. Penyuluhan dan pengembangan kompetensi SDM pertanian dalam pemanfaatan teknologi digital and *smart farming* berbasis kearifan lokal dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian.
n. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang didukung melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan pada kegiatan-kegiatan strategis Kementerian Pertanian.

7. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal tersebut memungkinkan mereka mengadopsi teknologi baru dan mengelola usaha pertanian dengan lebih efektif. Memberikan akses yang lebih adil kepada perempuan dan pihak yang termarjinalkan terhadap sumber daya seperti lahan, modal dan teknologi akan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pertanian.
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan. Alih status penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke pusat adalah langkah strategis yang memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian nasional. Perubahan ini memungkinkan koordinasi dan standarisasi penyuluhan, memperluas akses penyuluh ke pelatihan, sertifikasi, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas pendampingan petani dalam menghadapi tantangan iklim, pasar, dan produksi. Didukung Inpres Nomor 3 tahun 2025, penyuluh kini berperan vital dalam percepatan swasembada pangan, adopsi inovasi, dan modernisasi pertanian. Harmonisasi kelembagaan dan pembiayaan juga membuka peluang peningkatan kapasitas, sarana kerja, dan kesejahteraan penyuluh. Dalam jangka panjang, alih status ini memperkuat sistem penyuluhan profesional.

### 1.2.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang meliputi kelemahan yang dimiliki Kementerian Pertanian serta tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029. Kelemahan Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kurangnya jenis Jabatan Fungsional Teknis (JFT) Kementerian Pertanian dalam mengakomodir struktur organisasi baru.
2. Beberapa area abu-abu (*grey area*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti pelestarian varietas tanaman berkelanjutan dan perlindungan tanaman menggunakan pestisida, masih menjadi kegiatan lintas unit eselon I, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaannya.
3. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian. Meskipun sudah ada banyak tenaga kerja yang terlibat, jumlah dan kualitas SDM pertanian yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan baru dalam sektor pertanian yang semakin kompleks, seperti pengembangan teknologi pertanian modern, perubahan iklim, dan kebutuhan global terhadap pangan organik. Kementerian Pertanian memerlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih besar dan serius, terutama dalam bidang teknologi pertanian dan analisis data.
4. Koordinasi yang terkadang kurang efektif antar unit kerja. Kementerian Pertanian terdiri dari banyak unit kerja yang masing-masing memiliki fungsi yang sangat spesifik. Kadang kala, koordinasi antar unit kerja yang berbeda masih kurang berjalan efektif, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih tugas atau pengambilan keputusan yang kurang sinkron. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan atau program yang bersifat lintas sektor.
5. Keberagaman program yang belum terintegrasi dengan baik. Kementerian Pertanian memiliki beragam program yang diimplementasikan di lapangan, namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program-program ini terintegrasi dengan baik dan tidak berjalan secara silo. Program-program yang tidak saling terhubung bisa mengurangi dampaknya, padahal sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang lebih holistik untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti ketahanan pangan dan perubahan iklim.
6. Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang terstruktur pada program-program pembangunan pertanian. Meskipun banyak program pembangunan pertanian yang diluncurkan, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa program tersebut dievaluasi secara rutin dan hasilnya bisa diukur. Tanpa evaluasi yang efektif, sulit bagi Kementerian Pertanian untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi sektor pertanian.
7. Tantangan dalam mengelola anggaran yang terbatas dengan prioritas yang beragam. Mengingat anggaran yang terbatas dan banyaknya program yang perlu didanai, Kementerian Pertanian sering kali menghadapi tantangan dalam memprioritaskan program-program yang akan memberikan dampak maksimal. Ini bisa mengarah pada ketidakseimbangan dalam alokasi dana dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Penyempurnaan dalam perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya menjadi penting untuk menghindari ini.
8. Stereotipe gender membatasi perempuan dan pihak termarjinalkan untuk terlibat dalam kegiatan pertanian dan menghambat akses mereka ke sumber daya (modal, lahan dan teknologi) dan peluang.

Sedangkan tantangan yang perlu dijawab Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Proyeksi FAO terkait pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita dunia hingga tahun 2050 memberikan beberapa tantangan bagi Kementerian Pertanian, meliputi:
   a. Peningkatan *demand* pangan nasional membutuhkan peningkatan produksi komoditas pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan import terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan utama dan prioritas dalam negeri seperti padi, jagung, kedelai, daging, susu, telur, bawang, cabai, tebu, dan lain-lain.
   b. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian akan meningkatkan kebutuhan lahan pertanian. Alih fungsi lahan masih menjadi masalah serius dalam pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan masih menjadi masalah nasional yang diharapkan dapat diselesaikan melalui reformasi agraria berkelanjutan.
   c. Peningkatan kebutuhan produksi pertanian juga akan meningkatkan kebutuhan pengairan lahan pertanian. Ketersediaan sumber daya air pertanian yang semakin berkurang membutuhkan upaya khusus agar lahan pertanian mendapatkan air yang cukup untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai produksi yang ditargetkan.
      Data Kementerian PUPR menunjukkan sekitar 52% jaringan irigasi teknis di Indonesia dalam kondisi rusak ringan sampai berat, sehingga mengurangi efisiensi pengairan. Dengan perubahan iklim, ketersediaan air semakin tidak menentu, sehingga diperlukan peningkatan efisiensi penggunaan air dan pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik.
   d. Perubahan iklim ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi target luas panen dalam mencapai produksi pertanian yang diharapkan. Peramalan iklim yang akurat serta upaya lain diperlukan dalam menciptakan tanaman yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ekstrem tersebut.
      Badan Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa suhu global terus meningkat, dan Indonesia diprediksi mengalami peningkatan suhu rata-rata 0,8–1,4°C pada 2050. Dampaknya mencakup perubahan pola hujan, peningkatan kejadian kekeringan, banjir, serangan hama, dan penyakit tanaman yang makin sulit diprediksi. Ini menuntut pengembangan varietas tahan iklim ekstrem dan sistem peringatan dini yang lebih canggih.
   e. Potensi penurunan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di wilayah perdesaan.
2. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dan berpotensi menghambat pembangunan pertanian pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, yaitu:
   a. IKSS 6 “Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis” tidak tercapai sesuai target yang ditentukan pada tahun 2022 dan tahun 2023, walaupun masih dalam batas toleransi 5%. Pada tahun 2022 capaian kinerja IKSS 6 sebesar 99,42% dimana target yang ditetapkan sebesar 80,5% sedangkan realisasi kinerja sebesar 80,03%. Target tahun 2022 ini sama dengan target tahun 2021, dimana kinerja tahun 2021 tercapai sesuai target. Sedangkan tahun 2023 pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 99,47%, dimana target yang ditetapkan sebesar 81% dan hanya tercapai 80,57%.

Berdasarkan realisasi kinerja terhadap target tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja IKSS 6 tahun 2022 dan tahun 2023 cenderung stagnan, sehingga perlu ada peningkatan kinerja pada Renstra periode berikutnya.

b. IKSS 17 "Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian", tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Target tahun 2021 sebesar 79,76% dan tercapai sebesar 79,05%. Target tahun 2021 sebesar 80,71% dan tercapai sebesar 79,4%. Target tahun 2022 sebesar 81,46% dan tercapai sebesar 79,4%. Sedangkan target tahun 2023 sebesar 82,21% hanya tercapai sebesar 79,64%.

   Realisasi kinerja "Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian" tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak mencapai 80%, cenderung stagnan antara 79,05% hingga 79,64%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dan Kementerian Pertanian perlu merumuskan terobosan kreatif agar target RB dapat tercapai melebihi 80%.

c. Penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab Pemda, namun belum semua Pemda memiliki perhatian bahkan menganggap pertanian bukan prioritas. Hal ini menyebabkan produksi pertanian di beberapa wilayah tidak optimal dikarenakan pengembangan SDM pertanian, khususnya pengembangan penyuluh di daerah tidak merata. Ketimpangan kesejahteraan penyuluh antar daerah juga berpotensi terjadi di masa yang akan datang, dimana tidak semua daerah memiliki perhatian yang sama terhadap pembangunan pertanian di wilayahnya.
d. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur penyuluhan di Balai Penyuluhan belum optimal, sehingga proses pengembangan dan adopsi teknologi pertanian menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung penyuluhan.
e. Adanya keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lain dalam pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Selain itu, KEP belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lain karena keterbatasan akses sumber informasi, teknologi dan pasar. Hal ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional menjadi terhambat dan cenderung stagnan.

3. Sumber Daya Alam Terbatas
   Luas baku sawah Indonesia berkurang dari sekitar 8,1 juta ha (2013) menjadi 7,4 juta ha (2021). Konversi lahan sawah irigasi juga menjadi masalah karena luas lahan sawah terus berkurang, meskipun ada pencetakan sawah baru. Penurunan kualitas tanah akibat erosi, degradasi, dan penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang juga menurunkan produktivitas jangka panjang. Perlu upaya intensifikasi berkelanjutan dan penggunaan teknologi konservasi tanah.
4. Rantai Distribusi Panjang
   Distribusi produk pertanian di Indonesia melibatkan hingga 5–7 rantai perantara dari petani ke konsumen akhir, yang sering kali menyebabkan harga melambung 2–3 kali lipat di tingkat konsumen. Hal ini merugikan petani, rantai pasok panjang dan tidak efisien menyebabkan hilang nilai tambah hasil panen dan mengurangi daya saing produk lokal.
5. Kehilangan Hasil Panen
   FAO memperkirakan kehilangan hasil panen di Indonesia mencapai 20–30% untuk komoditas hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan, serta sekitar 10–20% untuk beras. Penyebabnya antara lain infrastruktur

pascapanen yang minim, kurangnya fasilitas penyimpanan dingin, dan lemahnya akses pasar.

6. Penetrasi Produk Impor
   Volume impor pangan Indonesia pada 2023 mencapai lebih dari USD 22 miliar, dengan kontribusi besar dari komoditas seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan daging. Produk-produk impor yang sering kali lebih murah dan stabil pasokan dapat menurunkan daya saing produk lokal dan membuat petani sulit bersaing.
7. Kerusakan Lingkungan
   Deforestasi di Indonesia, menurut *Global Forest Watch*, mencapai 1,1 juta hektar pada 2021, sebagian besar untuk ekspansi perkebunan. Praktik pertanian intensif juga menyebabkan degradasi lahan, penurunan biodiversitas, dan polusi air, dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas, yang mengancam keberlanjutan sektor pertanian.
8. Masalah Manajemen
   Sebagian besar petani kecil kurang memiliki kemampuan manajerial, baik dalam pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, maupun pemasaran. Survei Kementan (2022) menunjukkan hanya sekitar 20% kelompok tani aktif memiliki rencana usaha yang jelas. Kondisi ini bisa mengurangi efisiensi dan produksi.
9. Produktivitas Rendah
   Produktivitas padi di Indonesia rata-rata 5,2 ton/ha, lebih rendah dibandingkan Vietnam (5,9 ton/ha) dan Tiongkok (6,9 ton/ha). Produktivitas kedelai nasional sekitar 1,5 ton/ha, jauh di bawah potensi hasil optimal yang bisa mencapai 2,5–3 ton/ha. Rendahnya produktivitas ini menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing.
10. Usaha Tani Skala Kecil
    Sekitar 93% petani Indonesia menggarap lahan kurang dari 0,5 ha (BPS, 2021), yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses teknologi modern, permodalan, pengetahuan dan pemasaran yang lebih luas. Usaha tani skala kecil rentan terhadap guncangan pasar dan perubahan iklim, yang selanjutnya memengaruhi produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan.
11. Adopsi teknologi dan informasi

    Tingkat adopsi teknologi modern oleh petani masih rendah, baik dari sisi pemahaman maupun penguasaan, sehingga mayoritas petani masih mengandalkan cara-cara tradisional dan berskala rumah tangga. Teknologi seperti irigasi presisi, *drone* pemantau lahan, aplikasi cuaca, dan alat pengolahan pasca panen terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20–30%. Rendahnya literasi digital, kurangnya pelatihan, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital di perdesaan menjadi hambatan utama dalam mempercepat transformasi menuju pertanian modern dan korporasi petani.

    Kecepatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru dan perubahan dinamika pasar global, terutama terkait dengan keberlanjutan dan ketahanan pangan sangat diperlukan. Lambatnya adopsi teknologi baru atau kesulitan dalam melakukan perubahan kebijakan yang sesuai dengan perubahan pasar dapat menghambat daya saing produk pertanian Indonesia.
12. Kelembagaan petani

    Sebagian besar petani di Indonesia masih bekerja secara individual tanpa tergabung dalam kelembagaan seperti koperasi, gapoktan, atau badan usaha milik petani yang kuat. Padahal, kelembagaan berperan penting dalam konsolidasi usaha, penguatan posisi tawar, akses modal, serta efisiensi distribusi input dan hasil panen. Saat ini, kelembagaan petani yang

efektif masih terbatas, sehingga banyak potensi kolektif yang tidak tergarap maksimal dan petani sulit bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

13. Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Pertanian
    Jumlah petani di Indonesia terus menurun, terutama di kalangan generasi muda. Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, proporsi tenaga kerja muda di sektor pertanian turun lebih dari 30%. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi atau mindset terhadap pekerjaan tani yang dianggap kurang menjanjikan, penuh risiko, dan tidak bergengsi. Urbanisasi juga memperparah kondisi ini, dengan banyak pemuda desa memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor lain yang dinilai lebih stabil dan berpendapatan lebih baik. Hal ini menimbulkan ancaman regenerasi petani dan berpotensi mengganggu keberlanjutan produksi pertanian nasional.
14. Keterbatasan peralatan dan infrastruktur penyuluhan
    Ketersediaan peralatan dan infrastruktur di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) masih jauh dari optimal. Banyak BPP yang kekurangan sarana seperti alat peraga, perangkat teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya, sehingga proses penyampaian materi penyuluhan dan adopsi teknologi pertanian tidak berjalan maksimal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman dan penerapan teknologi oleh petani di lapangan.
15. Keterbatasan kapasitas kelembagaan ekonomi petani (KEP)
    Masih terdapat keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan dalam membentuk serta mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). KEP juga sering kali belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena minimnya akses terhadap informasi pasar, teknologi, permodalan, dan jejaring usaha. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha tani nasional berjalan lambat, kurang terkoordinasi, dan sulit tumbuh menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.

# BAB II
# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN

## 2.1. Visi Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah:

**"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah:

**"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**

Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pertanian**

  Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, **Pertanian** bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

- **Pertanian Maju**

  Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

- **Pertanian Berkelanjutan**

  Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Bab I, Pasal 1, angka 1 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian

yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan.

- **Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia**

  Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
  2. Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
  3. Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.
  4. Kesehatan rakyat (*one health*) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

## 2.2. Misi Kementerian Pertanian

Presiden periode 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau yang dikenal dengan istilah "Asta Cita" dalam mewujudkan Visi Indonesia tahun 2025-2029. **Asta Cita Presiden periode 2025-2029 adalah:**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 disusun dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 serta memastikan kontribusi dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden. **Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 tersebut adalah:**

1. **Meningkatkan Kesejahteraan Petani**

   Kesejahteraan petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani dilakukan melalui upaya strategis agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

2. **Mendorong Kemandirian Pangan Asal Pertanian**

   Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Hal ini berarti bahwa kemandirian pangan dapat diwujudkan melalui swasembada pangan pada beberapa komoditas pertanian strategis yang menjadi prioritas nasional, maupun prioritas Kementerian Pertanian.

3. **Meningkatkan Nilai Manfaat Produk Pertanian bagi Rakyat Indonesia**

   Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia, yaitu:

   - Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.
   - Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
   - Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT).

4. **Mencegah dan Menangani Penularan Penyakit Hewan kepada Manusia**

   Misi ini menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan dapat memengaruhi tingkat kesehatan manusia, bahkan beberapa dapat menyebabkan kematian. Penyakit tersebut diantaranya adalah *Monkeypox* (*Mpox*), Rabies, Antraks, Flu Burung dan lain sebagainya. Penerapan sistem kesehatan hewan nasional secara komprehensif diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyakit yang ditularkan melalui hewan dan/atau produk hewan, dapat meminimalisasi dampak dari penularan penyakit dari hewan dan/atau produk hewan ini.

5. **Meningkatkan Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Berdampak Langsung kepada Masyarakat**

   Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

## 2.3. Tujuan Kementerian Pertanian

Visi dan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 akan menjadi arah strategis (*strategic direction*) pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan strategis atau *destination statement* merupakan penjabaran visi dengan mempertimbangkan misi Kementerian Pertanian. Sehingga, Tujuan merupakan visi yang dipersempit yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi serta melaksanakan misi Kementerian Pertanian. Tujuan dipetakan berdasarkan Misi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Kementerian Pertanian tahun 2029. Tujuan Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Petani**

   Tujuan ini merupakan peran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan kesejahteraan petani diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara bertahap. Tujuan 1 ini memiliki 1 (satu) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

   - IT.1: Indeks Kesejahteraan Petani

2. **Tujuan 2: Terwujudnya Kemandirian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Prioritas**

   Tujuan 2 ini adalah terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas, dimana sebagian besar produksi dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Penerapan sistem budidaya pertanian berkelanjutan memastikan produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, namun juga harus dapat memenuhi kebutuhan pangan di masa yang akan datang, khususnya dalam mengantisipasi krisis pangan yang diperkirakan akan melanda dunia, termasuk Indonesia. Pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk kontribusi Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional ekonomi sirkular dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tujuan ini memiliki 4 (empat) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

   - IT.2: Indeks swasembada pangan prioritas
   - IT.3: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan
   - IT.4: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
   - IT.5: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian

3. **Tujuan 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian bagi Rakyat**

   Tujuan 3 adalah meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat. Komoditas pertanian yang dihasilkan harus bernilai tambah dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian tersebut dan meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui hilirisasi rantai nilai pertanian, dimana orientasi penjualan tidak lagi berbasiskan produk mentah, namun sudah masuk pada produk setengah jadi dan produk jadi. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) Indikator Tujuan (IT), yaitu:

- IT.6 : Persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi
- IT.7: Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan
- IT.8: Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura

**4. Tujuan 4: Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dari Akibat dan Dampak Penyakit Hewan serta Penyakit Bawaan Pangan**

Tujuan 4 adalah meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Munculnya berbagai penyakit hewan yang berdampak kepada manusia beberapa waktu belakangan ini, seperti Rabies, *Monkeypox,* Antraks, Flu Burung, dan lain sebagainya, memengaruhi kesehatan manusia khususnya di wilayah penularan penyakit. Untuk itu maka dibutuhkan penerapan sistem kesehatan hewan nasional dalam meningkatkan kesehatan hewan, mencegah dampak penyakit hewan kepada manusia serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit hewan bagi kesehatan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT) 9. Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**5. Tujuan 5: Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel dan Profesional.**

Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) merupakan upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat makro, meso maupun mikro. Tujuan 5 Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional, merupakan upaya reformasi birokrasi tingkat mikro (K/L) dalam membentuk birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tujuan (IT)10. Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian.

## 2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian merupakan standar kinerja Kementerian Pertanian di tingkat Kementerian dalam mewujudkan pembangunan nasional. SS Kementerian Pertanian dibentuk berdasarkan Tujuan Kementerian Pertanian serta *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai Kementerian Pertanian. SS Kementerian Pertanian sejatinya merupakan *Critical Success Factor* (CSF) atas *outcome* akhir (*final outcome*) yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional terkait dengan pertanian. *Outcome* akhir (*final outcome*) beserta CSF nya dapat digambarkan sebagai berikut.

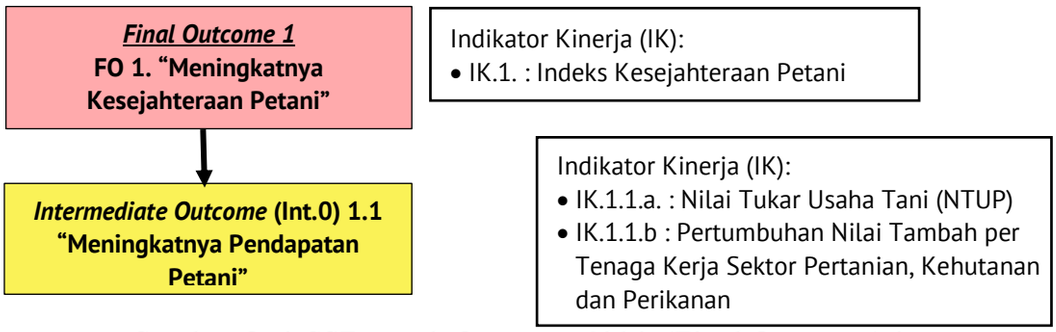


**Gambar 2. 1 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 1**

*Outcome* akhir (*final outcome*) 1 (FO.1) adalah meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator kinerja IK.1 Indeks Kesejahteraan Petani. CSF dalam mewujudkan FO.1 ini adalah *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1, yaitu Meningkatnya pendapatan petani, dengan 2 (dua) indikator kinerja, meliputi:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.a: Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP).
- *Intermediate Outcome* (Int.O) 1.1.b: Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Kesejahteraan petani merupakan salah satu hasil akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan pertanian, dimana langkah kritis keberhasilan yang perlu diwujudkan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatnya pendapatan petani. Hal ini karena salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 2 (FO.2) dapat digambarkan berikut ini.

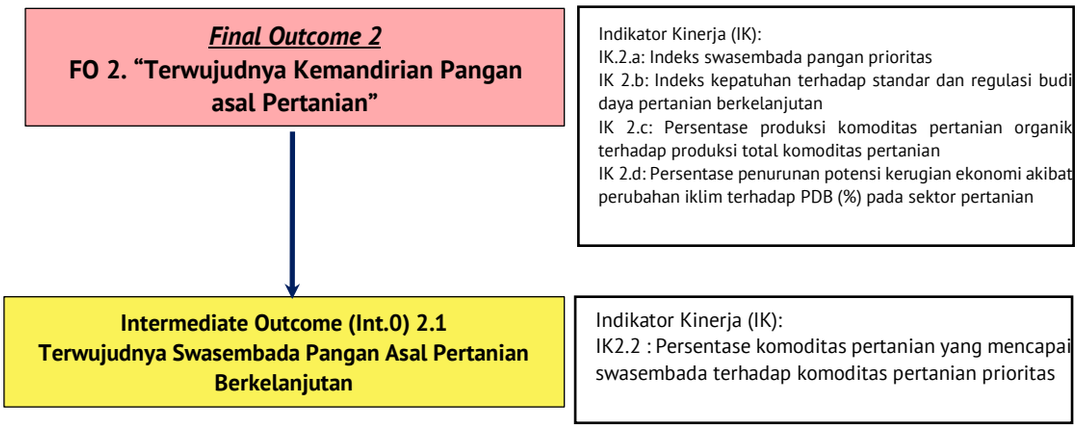


**Gambar 2. 2 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 2**

*Outcome* akhir kedua (FO.2) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kemandirian pangan asal pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 2 adalah IK.2.a: Indeks swasembada pangan prioritas, IK 2.b: Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan IK 2.c: Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian, IK 2.d: Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian. CSF dari FO.2 ini, yaitu:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 2.1: Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas

Kemandirian pangan merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dari produksi dalam negeri. Oleh karena itu, terdapat hal kritis dalam mewujudkan kemandirian pangan, yaitu terwujudnya swasembada pangan. Swasembada pangan mengukur sebagian besar kebutuhan dalam negeri dipenuhi dari produksi pangan dalam negeri.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 3 (FO.3) dapat digambarkan berikut ini.

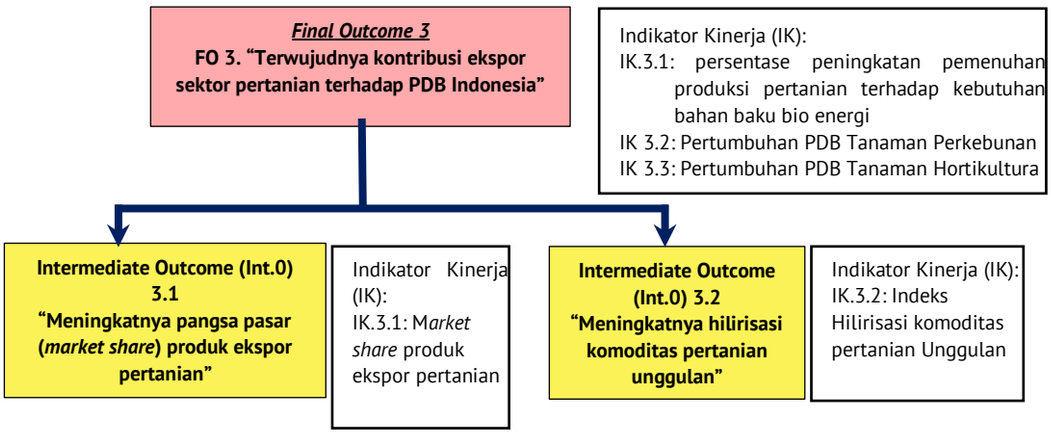


**Gambar 2. 3 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 3**

*Outcome* akhir ketiga (FO.3) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya kontribusi ekspor sektor pertanian terhadap PDB Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 3 Persentase kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian terhadap PDB. Kinerja dan indikator kinerja ini mengukur seberapa besar kontribusi ekspor produk pangan dan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). CSF dari FO.3 ini terdiri dari 2 (dua) CSF, yaitu:

- *Intermediate Outcome* (Int.O) 3.1 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.1 *market share* produk ekspor pertanian.
- *Intermediate Outcome* (Int.O) 3.2 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, dengan Indikator Kinerja (IK) 3.2 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan.

Kontribusi ekspor produk pangan asal pertanian dapat meningkat melalui 2 (dua) langkah kritis keberhasilan, yaitu peningkatan pangsa pasar dan hilirisasi (termasuk kualitas) produk pangan asal pertanian. Ketersediaan produk pertanian unggulan berkualitas hasil hilirisasi akan dapat meningkatkan nilai tambah dan berpotensi meningkatkan daya saing. Sehingga, dengan ketersediaan akses pasar yang potensial, maka volume ekspor akan dapat meningkat sehingga meningkatkan kontribusi ekspor sektor pertanian.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 4 (FO.4) dapat digambarkan berikut ini.

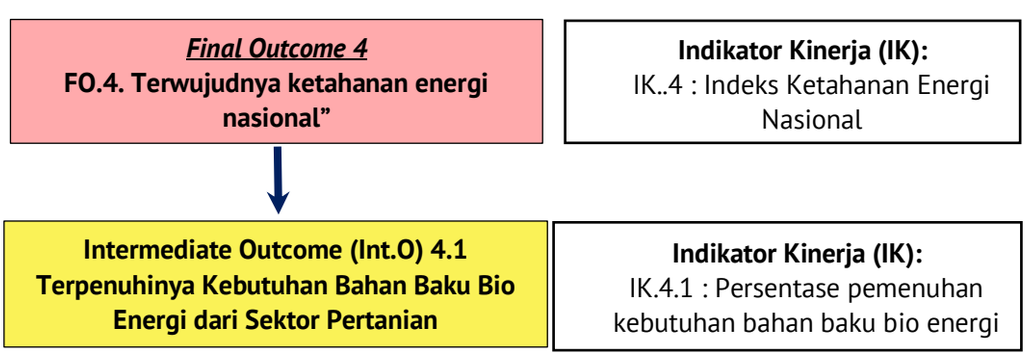


**Gambar 2. 4 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 4**

*Outcome* akhir keempat (FO.4) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya ketahanan energi nasional, dengan Indikator Kinerja (IK) 4 adalah Indeks ketahanan energi nasional. FO.4 sebenarnya merupakan *outcome* akhir dari sektor energi, khususnya terkait dengan ketersediaan energi non fosil dalam menjawab tantangan

krisis energi ke depan. Namun, bahan baku yang dibutuhkan dalam mewujudkan kedaulatan energi tersebut berasal dari komoditas pertanian, yaitu kelapa sawit untuk bahan baku Bio Diesel dan Bio Avtur, serta beberapa komoditas pertanian lainnya, sebagai bahan baku Bio-Ethanol. Sehingga, CSF dari FO.4 ini adalah *Intermediate Outcome* (Int.O) 4.1 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, dengan Indikator Kinerja (IK) 4.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi.

Selanjutnya *outcome* akhir (*final outcome*) 5 (FO.5) dapat digambarkan berikut ini.

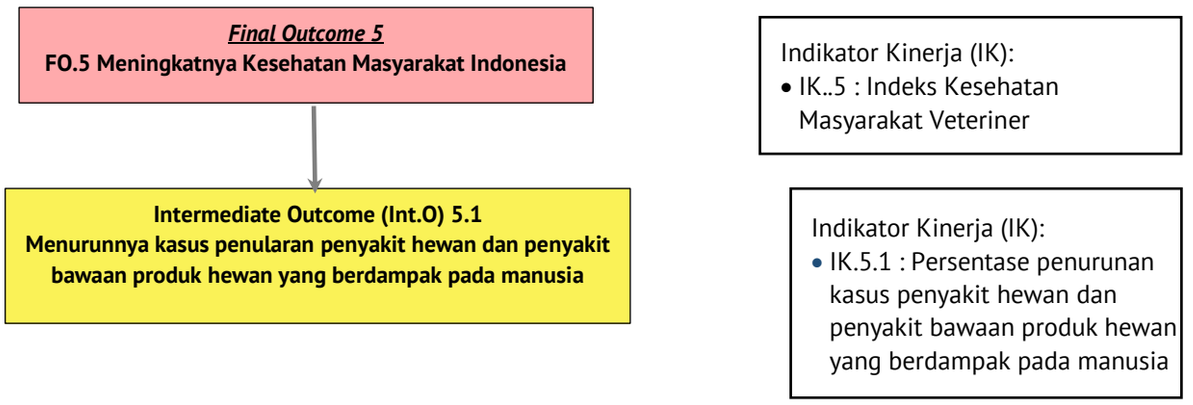


**Gambar 2. 5 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 5**

*Outcome* akhir kelima (FO.5) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Meningkatnya kesehatan masyarakat Indonesia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner yang melekat pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) akan terus berupaya dalam meningkatkan kesehatan hewan dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit hewan yang berdampak terhadap manusia. Selain itu, Kementerian Pertanian juga berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari dampak penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat untuk semua (*one health*). *Intermediate Outcome* (Int.O) yang merupakan CSF dari FO.5 ini adalah Int.O 5.1 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia, dengan Indikator Kinerja (IK) 5.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia.

Selanjutnya outcome akhir (*final outcome*) 6 (FO.6) dapat digambarkan berikut ini.

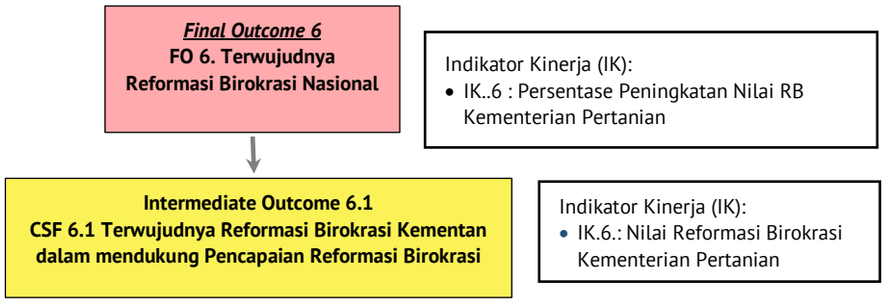


**Gambar 2. 6 CSF untuk Outcome Akhir (Final Outcome) 6**

*Outcome* akhir keenam (FO.6) yang ingin diwujudkan dalam pembangunan nasional terkait pertanian adalah Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi, dengan Indikator Kinerja (IK) 6 Persentase Peningkatan Nilai RB Kementerian Pertanian. Seperti telah diuraikan sebelumnya, RB merupakan upaya seluruh

Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilakukan serempak setiap tahun. Untuk itu, maka langkah kritis dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) adalah terwujudnya RB Kementerian Pertanian sesuai target yang dicanangkan. CSF untuk FO.6 ini adalah Int.O.6.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi dengan Indikator Kinerja (IK) 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Berdasarkan CSF pada masing-masing FO.1, FO.2, FO.3, FO.4, FO.5 dan FO.6 yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diterjemahkan *Intermediate Outcome* (Int.O) beserta indikator kinerjanya menjadi SS dan IKSS yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 1 Penerjemahan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
|---|---|
| SS.1 Meningkatnya pendapatan petani | IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)<br>IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan |
| SS.2 Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan | IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas |
| SS.3 Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian | IKSS 3.1 *Market share* produk ekspor pertanian |
| SS.4 Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan | IKSS 4.1 Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan |
| SS.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian | IKSS 5.1 Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi |
| SS.6 Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia | IKSS 6.1 Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia |
| SS.7 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | IKSS 7.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian |

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini kemudian diturunkan (*cascading*) menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga Output yang menjadi dasar dalam penentuan Kriteria Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). *Cascading* kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Detail pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi dokumen perencanaan untuk SP, IKP, SK, IKK dan Output disajikan dalam Lampiran 5.

#### 2.4.1.1. Manajemen Risiko Pembangunan Pertanian

Untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Kementerian Pertanian menerapkan pendekatan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan

Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara kolaboratif, terstruktur, dan sistematis. Penerapan manajemen risiko di Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis secara efektif, dengan mengintegrasikan proses identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan risiko ke dalam seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui pendekatan ini, potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan program dan kegiatan dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan penyusunan langkah mitigasi yang tepat dan terukur.

Pada periode 2025-2029, penerapan manajemen risiko difokuskan pada program-program prioritas Kementerian Pertanian yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN, seperti: Program Swasembada Pangan, Peningkatan Produksi Daging dan Susu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), dan Hilirisasi. Selain pemetaan risiko pada Proyek Strategis Nasional (PSN), dilakukan pula identifikasi risiko secara menyeluruh berdasarkan sasaran strategis kementerian yang telah ditetapkan. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target-target PSN maupun sasaran strategis kementerian.

Manajemen risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi, analisis, perlakuan (mitigasi), serta pemantauan yang terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hasil identifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis menunjukkan enam kelompok risiko utama yang perlu menjadi perhatian pada periode 2025–2029, sebagai berikut:

- Risiko Produksi dan Ketahanan Pangan

  Perubahan iklim, kekeringan, banjir, serta serangan organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan menular strategis berpotensi menurunkan produksi dan mengganggu stabilitas pasokan pangan. Perlakuan (mitigasi) dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas surveilans dan laboratorium veteriner, pengembangan varietas tahan cekaman iklim, serta penerapan teknologi budidaya adaptif dan ramah lingkungan.

- Risiko Ketersediaan dan Akses Input Produksi

  Fluktuasi harga pupuk, benih, dan pestisida di pasar global serta ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan margin usaha tani. Distribusi input yang belum merata juga berisiko menunda masa tanam. Mitigasi ditempuh melalui penguatan sistem distribusi berbasis digital, pengembangan industri input dalam negeri, dan koordinasi kebijakan subsidi serta bantuan sarana produksi dengan kementerian terkait.

- Risiko Kelembagaan, SDM, dan Kapasitas Daerah

  Keterbatasan kompetensi SDM pertanian dan kelembagaan petani masih menjadi kendala dalam implementasi program. Kapasitas penyuluh di beberapa daerah belum merata, sementara kelembagaan petani belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Mitigasi dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemanfaatan sistem informasi dan monitoring digital untuk percepatan transfer pengetahuan.

- Risiko Infrastruktur dan Pembiayaan Pertanian

  Sebagian infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan sarana pascapanen masih terbatas. Walaupun alokasi anggaran Kementerian Pertanian menunjukkan tren peningkatan, kebutuhan pengembangan infrastruktur di lapangan tetap tinggi. Mitigasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan alsintan, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan kemitraan swasta.

- Risiko Pasar dan Nilai Tambah Produk Pertanian

  Fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan kapasitas hilirisasi menurunkan daya saing dan pendapatan petani. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya integrasi rantai pasok dan keterbatasan diversifikasi produk olahan. Mitigasi diarahkan pada penguatan sistem informasi pasar, pengembangan kemitraan petani dan industri, peningkatan kapasitas pengolahan dan pascapanen, serta pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berorientasi nilai tambah dan ekspor.

- Risiko Tata Kelola, Kepatuhan, dan Pengelolaan Aset

  Risiko pada aspek tata kelola mencakup potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan, serta kelemahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Risiko ini berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas program. Mitigasi dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan audit berbasis risiko, digitalisasi pemantauan bantuan, serta peningkatan tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset pertanian.

Melalui penerapan manajemen risiko yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem perencanaan serta penganggaran, Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal. Pendekatan ini memastikan setiap risiko dikelola secara proaktif, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem pertanian nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemetaan risiko dalam rangka pencapaian target-target PSN dan sasaran strategis kementerian dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.

# BAB III
# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

## 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi nasional merupakan gambaran besar mengenai arah pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan memuat prioritas pembangunan pertanian yang disusun untuk memecahkan permasalahan prioritas dan mendesak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian masalah diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap capaian sasaran pembangunan sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan (Asta Cita). Misi Pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, atau dikenal dengan istilah Trisula Pembangunan. Trisula pembangunan tersebut akan terwujud jika didukung oleh pondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, pemerintah digital dan reformasi birokrasi.

Kementerian Pertanian mendukung Prioritas Nasional (PN) 2 (Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru); PN 3 (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi); PN 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas); PN 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri); PN 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan); PN 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan); dan PN 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur).

Dari PN tersebut, Kementerian Pertanian berkontribusi secara langsung terhadap pelaksanaan PN 2, PN 3 dan PN 5.

Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 2 terkait dengan pencapaian Swasembada Pangan maupun berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi dalam mewujudkan Swasembada Energi. Kontribusi Kementerian Pertanian pada PN 3 melalui pelaksanaan brigade pangan yang dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di bidang budidaya pertanian. Sedangkan kontribusi Kementerian Pertanian dalam PN 5 adalah melalui hilirisasi komoditas pertanian.

Prioritas Nasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional yaitu Program Hasil Terbaik Cepat (*quick wins*) sebagai berikut.

**Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil**

**Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional**

**Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut**

**Gambar 3. 1 Program Terbaik Cepat terkait Kementerian Pertanian**

Kementerian Pertanian berkontribusi terhadap Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima). Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 1 (satu) melalui produksi pangan asal pertanian. Kontribusi untuk Program Hasil Terbaik Cepat nomor 3 (tiga) melalui peningkatan produktivitas. Kontribusi terhadap jaminan kesejahteraan sosial melalui kredit usaha untuk mendukung dalam menghilangkan kemiskinan absolut. Detail masing-masing kontribusi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat**

| PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil | 1. Produksi pangan asal pertanian bergizi<br>2. Produksi Susu |
| Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional | 3. Swasembada Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, dan Tebu<br>4. Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan Padi, Jagung, Kedelai, Singkong, Tebu, dan Sagu |
| Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut | 5. Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian untuk Program Hasil Terbaik Cepat. Berikutnya yaitu program prioritas dengan orientasi jangka menengah. Terdapat sebanyak 17 Program Prioritas Presiden, sebanyak 3 (tiga) diantaranya terkait dengan pertanian sebagai berikut.

**Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden terkait Pertanian**

Berdasarkan gambar di atas, Kementerian Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan swasembada pangan, energi dan air; menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani; serta pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya. Pemetaan kontribusi Kementerian Pertanian terhadap ketiga program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 2 Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap Program Prioritas**

| PROGRAM PRIORITAS | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|
| Mencapai swasembada pangan, energi, dan air | 1. Swasembada Pangan<br>2. KSPP: Padi, Jagung, Hortikultura<br>3. Tambahan luas panen tanaman pangan minimal 4 Juta ha tercapai tahun 2029 |
| Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani | 4. Menjamin ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih dan pestisida kepada Petani → Meningkatkan produksi dan produktivitas |
| Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri lainnya | 5. Program Kredit Usaha Tani: Peternakan, Perkebunan, Produksi Pangan Rakyat. |

Berdasarkan tabel di atas, berhasil dipetakan sebanyak 5 (lima) kontribusi Kementerian Pertanian terhadap program prioritas nasional. Masing-masing program prioritas tersebut dijabarkan menjadi program kerja. Berdasarkan hasil analisis, berikut program kerja terkait swasembada pangan.

- Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

- Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru
- Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan ID FOOD, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen
- Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani
- Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian
- Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian
- Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Berdasarkan Rancangan RPJMN tahun 2025-2029, sasaran dan intervensi program swasembada pangan dalam Kerangka Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

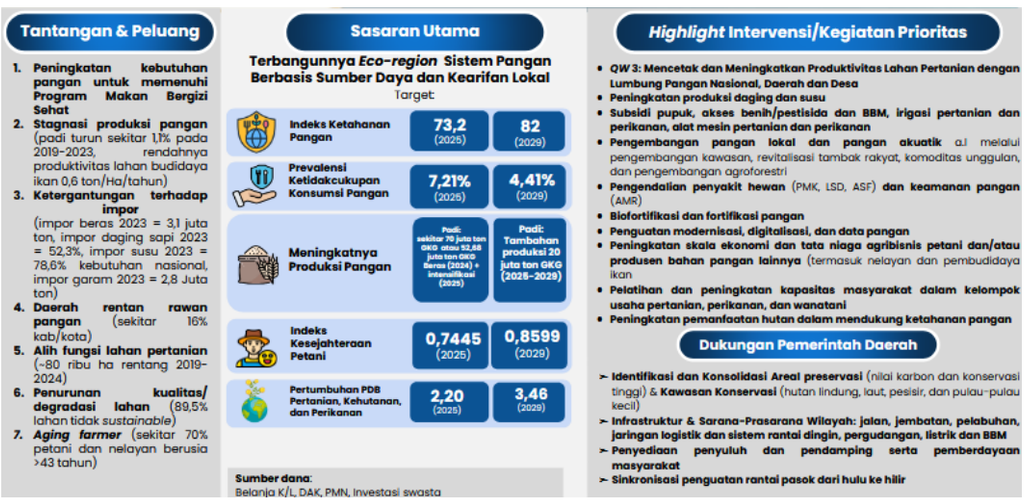


Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

**Gambar 3. 3 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Pangan**

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional swasembada pangan dilakukan dalam mewujudkan beberapa sasaran, yaitu:

- **Meningkatkan ketahanan pangan**

  Kontribusi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memastikan swasembada pangan dapat terwujud. Ketersediaan komoditas pangan strategis diprioritaskan berdasarkan konsumsi masyarakat, sehingga dapat memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi dari produksi dalam negeri.

- **Memastikan kecukupan konsumsi pangan nasional**

  Ketersediaan pangan yang diupayakan sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia akan memastikan kecukupan pangan nasional, sehingga akan menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Selain itu, kandungan gizi yang tersedia dalam setiap komoditas pangan juga menjadi perhatian sehingga masyarakat dapat mengonsumsi pangan bergizi yang beraneka ragam.

- **Meningkatkan produksi pangan**

  Kementerian Pertanian akan berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditas pangan strategis nasional. Peningkatan produksi dilakukan baik dengan meningkatkan produktivitas dan potensi produksi, luas panen, memastikan tanaman yang tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, khususnya iklim ekstrim, ternak yang tahan terhadap penyakit hewan hingga memastikan optimalnya indeks pertanaman serta ketersediaan benih/bibit, pupuk, pestisida, lahan, air maupun prasarana dan sarana pertanian lainnya.

- **Mengurangi impor pangan**

  Upaya Kementerian Pertanian dalam memastikan kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri terpenuhi melalui produksi dalam negeri secara otomatis akan dapat mengurangi impor. Kualitas pangan yang dihasilkan menjadi tantangan untuk memastikan komoditas pertanian yang dihasilkan bermutu dan aman untuk dikonsumsi.

- **Meningkatkan kesejahteraan petani**

  Kesejahteraan petani menjadi salah satu *highlight* nasional dan salah satu fokus Presiden di bidang pertanian. Seluruh upaya yang dilakukan dan telah dijelaskan sebelumnya tentunya akan memengaruhi kesejahteraan petani, terutama peningkatan nilai tukar petani.

Sedangkan kerangka program prioritas swasembada energi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

**Gambar 3. 4 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi**

Kementerian Pertanian hanya berkontribusi dalam penyediaan bahan baku bio energi berupa bahan baku Bio-Avtur, Bio-Diesel maupun Bio-Ethanol dalam mewujudkan swasembada energi. Kerangka ini secara detail akan dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedangkan sasaran dan intervensi Hilirisasi dan Industrialisasi dalam Kerangka Prioritas Nasional 5 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

**Gambar 3. 5 Kerangka Prioritas Nasional terkait Swasembada Energi**

Berdasarkan kerangka di atas, dapat dilihat bahwa prioritas nasional Hilirisasi dan Industrialisasi dilakukan dalam mewujudkan sasaran utama Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan. Kontribusi Kementerian Pertanian dalam bentuk intervensi pengembangan hilirisasi kelapa sawit dan pengembangan hilirisasi kelapa.
Dalam rangka mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Pertanian menempatkan hilirisasi komoditas pertanian sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan sektor pertanian lima tahun ke depan. Hilirisasi di sektor pertanian tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk primer, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural menuju pertanian yang modern, berbasis industri, dan berdaya saing global. Kebijakan hilirisasi nasional menekankan pentingnya pengembangan industri berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan, penguatan keterkaitan antar sektor (*on farm–off farm*), serta peningkatan ekspor berbasis produk olahan. Menyikapi arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi secara lebih terstruktur dan terfokus pada komoditas strategis yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang kuat, baik di dalam maupun luar negeri. Komoditas prioritas dalam kebijakan hilirisasi Kementerian Pertanian 2025–2029 meliputi: ayam, kelapa dalam, jambu mete, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah dan kacang hijau. Penyediaan *cold chain* juga dirancang sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menjaga kualitas produk pertanian selama proses transportasi, penyimpanan dan distribusi.

Selain itu, RPJMN juga mencantumkan Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional yang merupakan implementasi dari program hasil terbaik cepat mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

**Gambar 3. 6 Kegiatan Prioritas Lumbung Pangan Nasional**

Baik sasaran, indikator maupun indikasi *highlight* intervensi sesuai kewenangan Kementerian Pertanian telah dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 sebagaimana dijelaskan dalam pohon kinerja pada Bab II maupun kerangka kinerja dan pendanaan pada Bab IV. Selain itu, indikasi lokasi prioritas juga telah dimasukkan dalam dokumen perencanaan Kementerian Pertanian berdasarkan prioritas. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan beberapa indikasi *highlight* intervensi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

RPJMN tahun 2025-2029 juga memuat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 (diolah)

**Gambar 3. 7 Proyek Strategis Nasional (PSN) lingkup Pangan dan Pertanian**

Berdasarkan gambar tersebut, PSN dalam RPJMN 2025-2029 lingkup pangan dan pertanian adalah:

- Pengembangan lumbung pangan
- Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi

- Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong dalam PSN Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu

Selain PSN yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan PSN lainnya dalam rangka mendukung peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada pangan dan hilirisasi produk pertanian.

RPJMN Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*.

(i) Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUG dan lnklusi Sosial) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Strategi PUG dan lnklusi sosial harus dilaksanakan secara menyeluruh dari semua Prioritas Nasional (PN) maupun non-PN untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan inklusif, yang didahului dengan proses: (a) analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif; (b) analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan (c) penyusunan rencana aksi/intervensi beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut. Selanjutnya dalam rangka memastikan konvergensi upaya pencapaian target kesetaraan gender disusun strategi nasional/rencana aksi/dokumen kebijakan strategis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi Gender dan Inklusi Sosial yaitu: (a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); (b) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); (d) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); (e) Indeks Pembangunan Gender; (f) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia; (g) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki

dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan *(tagging)* anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan Kementerian Pertanian lainnya, seperti penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian, dukungan peningkatan kapasitas dan bantuan alat dan bahan bagi perempuan petani.

(ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa, pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (a) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian SDGs 2030; (b) mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam RPJMN dan RPJMD; (c) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (d) pemantauan dan evaluasi pencapaian target SDGs; dan (e) inklusi sosial dan keberlanjutan. Semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marginal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam pencapaian banyak tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, arah kebijakan pertanian difokuskan pada pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan bertujuan menciptakan pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara kebijakan nasional, peran masyarakat, teknologi, dan keberpihakan terhadap petani kecil. Arah kebijakan pembangunan pertanian yang mendukung SDGs antara lain:

(a) Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui peningkatkan produksi pangan pokok secara berkelanjutan; diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan; serta penguatan cadangan pangan dan distribusi yang merata.

(b) Pengentasan Kemiskinan Petani melalui peningkatan akses petani terhadap modal, pasar, teknologi, dan informasi; mendorong pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri; serta perlindungan harga dan jaminan usaha tani.

(c) Pertanian Ramah Lingkungan dan Tanggap Iklim melalui penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan (ramah lingkungan, hemat air, minim pestisida); restorasi lahan pertanian kritis dan konservasi sumber daya

genetik lokal; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui praktik pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*).

(d) Penguatan Kelembagaan Petani dan Kemitraan melalui pembentukan dan penguatan kelompok tani, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani; kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi; serta digitalisasi pertanian melalui sistem informasi pertanian modern.

(e) Pengembangan Infrastruktur dan Sarana Produksi melalui perbaikan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan hasil panen; serta akses sarana produksi yang berkualitas dan terjangkau (benih, pupuk, alat mesin pertanian).

(f) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian melalui pelatihan, penyuluhan, dan transfer teknologi kepada petani; regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam sektor pertanian (petani milenial); dan inovasi berbasis riset dan teknologi lokal.

(iii) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital dalam RPJMN 2025-2029 dilakukan melalui (a) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (b) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan pemanfaatan riset, pengembangan serta inovasi; (d) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*); serta literasi digital secara luas; (e) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (f) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (g) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

Transformasi digital di sektor pertanian adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pengurangan risiko gagal panen, kemudahan akses informasi dan pasar, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan keterlibatan generasi muda dan keberlanjutan dalam kegiatan pertanian. Teknologi dalam transformasi digital pertanian antara lain penggunaan teknologi digital; *Internet of Things* (IoT); *drone* dan citra satelit; *Artificial Intelligence* (AI); aplikasi *mobile* dan *platform* digital; *big data* dan sistem pertanian presisi dalam budidaya dan pengolahan hasil pertanian. Hal ini merupakan bagian penting dari strategi modernisasi pertanian untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama dalam hal ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

(iv) Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim

Perubahan iklim sudah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Hal ini ditandai oleh suhu udara yang semakin panas, kejadian iklim ekstrem yang semakin sering, musim hujan dengan durasi semakin pendek dan musim kemarau yang semakin panjang di berbagai daerah. Awal musim hujan dan kemarau juga makin sulit diprediksi. Kenaikan muka air laut memengaruhi produktivitas lahan dekat akibat kenaikan salinitas tanah. Semua gejala perubahan iklim tersebut memengaruhi berbagai sektor, khususnya pertanian yang paling rentan dan mudah terpengaruh oleh cuaca ekstrem, yang berdampak pula terhadap ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup warga negara. Perwujudan ketahanan pangan pada tingkat makro (nasional dan global) ke depan akan semakin sulit karena permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Sementara pertumbuhan produksi atau pasokan pangan akan semakin sulit pula karena menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya penguatan ketahanan pangan semakin penting mengingat krisis pangan dapat terjadi kapan saja di tengah kondisi perubahan iklim global yang berpotensi mengancam kehidupan.

Solusi inovatif untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan pangan nasional dan upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga dalam jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pembangunan pertanian berketahanan iklim dan rendah karbon menjadi salah satu prioritas dalam penanganan dampak negatif perubahan iklim dan pada waktu bersamaan diharapkan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi manfaat tambahan (*co-benefit*) dari berbagai aksi adaptasi.

Pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim sektor pertanian dapat diintegrasikan dengan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

RPJMN tahun 2025-2029 juga mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk menjadi koordinator terhadap Program Prioritas (PP) dan mengampu serta berkontribusi terhadap Kegiatan Prioritas (KP) seperti diuraikan pada Lampiran III Perpres nomor 12 tahun 2025. Namun terdapat satu indikator dimana Kementerian Pertanian tidak lagi menjadi pengampunya, yaitu indikator KP 05.01.05 Produksi bahan baku (*Crude Palm Oil*/CPO dan *Crude Palm Kernel Oil*/CPKO). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tusi Kementerian Pertanian. Tusi Kementerian Pertanian hanya sampai Tandan Buah Segar (TBS). Kontribusi tersebut diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3. Kontribusi Kementerian Pertanian Terhadap PP dan KP sesuai Lampiran III RPJMN**

| NO | PN/PP / KP | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|---|
| | **Program Prioritas (PP) 10: Swasembada Pangan** | |
| 1 | PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) |
| 2 | PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani (%) | IT 1 Indeks Kesejahteraan Petani (%) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 01: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Kalimantan Tengah** | |
| 3 | KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton) | IKP 2.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah (ton) |
| 4 | KP 02.10.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha) | IKK 3.1 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha) |

| NO | PN/PP / KP | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 02: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Utara** | |
| 5 | KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton) | IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara (ton) |
| 6 | KP 02.10.2 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha) | IKK 2.1 Peningkatan Luas Panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara (Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 03: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Sumatera Selatan** | |
| 7 | KP 02.10.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton) | IKP 2.2 Peningkatan Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (Ton) |
| 8 | KP 02.10.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha) | IKK 3.2 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 04: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur** | |
| 9 | KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) | IKP 2.3 Peningkatan Produksi Beras KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) |
| 10 | KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) | IKK 3.3 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) |
| 11 | KP 02.10.4 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) | IKP 2.4. Peningkatan Produksi Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ton) |
| 12 | KP 02.10.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) | IKK 3.4 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Nusa Tenggara Timur (Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 05: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua** | |
| 13 | KP 02.10.5 Peningkatan Produksi Jagung KSPP Papua (Ton) | IKP 2.5. Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua (Ton) |
| 14 | KP 02.10.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha) | IKK 3.5 Peningkatan Luas Panen Jagung KSPP Papua (Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 06: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Papua Selatan** | |
| 15 | KP 02.10.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton) | IKP 2.6 Peningkatan Produksi Beras KSPP Papua Selatan (Ton) |
| 16 | KP 02.10.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha) | IKK 3.6 Peningkatan Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 07: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan lainnya** | |
| 17 | KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha) | IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak (ribu Ha) |
| 18 | KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha) | IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman (ribu Ha) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 10: Pengembangan Pangan Hewani** | |
| 19 | KP 02.10.10 Produksi Daging (juta ton) | IKP 5.1 Produksi Daging (juta ton) |
| 20 | KP 02.10.10 Produksi Telur (juta ton) | IKP 5.2 Produksi telur (juta ton) |
| 21 | KP 02.10.10 Produksi Susu (ribu ton) | IKP 5.3 Produksi susu (ribu ton) |

| NO | PN/PP / KP | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|---|
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 11: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati** | |
| 22 | KP 02.10.11 Produksi Padi (juta ton) | IKP 1.1 Produksi Padi (juta ton) |
| 23 | KP 02.10.11 Produksi Jagung (juta ton) | IKP 1.2 Produksi Jagung (juta ton) |
| 24 | KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang (ribu ton) | IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang (ribu ton) |
| 25 | KP 02.10.11 Produksi Sorghum (ribu ton) | IKP 1.4 Produksi Sorghum (ribu ton) |
| 26 | KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar (ton) | IKP 1.5 Produksi Ubi jalar (ton) |
| 27 | KP 02.10.11 Produksi Kedelai (ton) | IKP 1.6 Produksi Kedelai (ton) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 13: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Penjaminan Mutu dan keamanan Pangan** | |
| 28 | KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%) | IKK1.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu (%) |
| 29 | KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%) | IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan (%) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 14: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan** | |
| 30 | KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas) | IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi (komoditas) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 16: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif** | |
| 31 | KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga) | IKK2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi (lembaga) |
| 32 | KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%) | IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani (%) |
| | **Kegiatan Prioritas (KP) 17: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah** | |
| 33 | KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur (juta ton) | IKP.3.1 Produksi buah dan sayur (juta ton) |
| 34 | KP 02.10.17 Produksi Tanaman obat (ton) | IKP 3.2 Produksi Tanaman obat (ton) |
| 35 | KP 02.10.17 Produksi Florikultura (ribu tangkai) | IKP 3.3 Produksi Florikultura (ribu tangkai) |
| 36 | KP 02.10.17 Produksi Vanili (ton) | IKP 9.7 Produksi Vanili (ton) |
| 37 | KP 02.10.17 Produksi Lada (ton) | IKP 9.4 Produksi Lada (ton) |
| 38 | KP 02.10.17 Produksi Pala (ton) | IKP 9.5 Produksi Pala (ton) |
| 39 | KP 02.10.17 Produksi Cengkeh (ton) | IKP 9.6 Produksi Cengkeh (ton) |
| 40 | KP 02.10.17 Produksi Kopi (ton) | IKP 9.8 Produksi Kopi (ton) |
| 41 | KP 02.10.17 Produksi Tebu (ton) | IKP 9.9 Produksi Tebu (ton) |
| 42 | KP 02.10.17 Produksi Karet (ton) | IKP 9.10 Produksi Karet (ton) |
| 43 | KP 02.10.17 Produksi Kakao (ton) | IKP 9.11 Produksi Kakao (ton) |
| 44 | KP 02.10.17 Produksi Teh (ton) | IKP 9.12 Produksi Teh (ton) |

| NO | PN/PP / KP | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|---|
| 45 | KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%) | IT.7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan (%) |
| 46 | KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%) | IT.8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura (%) |
| | **KP 18: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan** | |
| 47 | KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks) | IT.3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan (Indeks) |
| 48 | KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%) | IKK 4.1 Proporsi Lahan Pertanian yang termasuk kriteria lahan produktif dan berkelanjutan (%) |
| 49 | KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%) | IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%) |
| 50 | KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%) | IT.4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian (%) |
| 51 | KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur) | IKK 3 Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (varietas dan/atau galur) |
| 52 | KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi) | IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (aksesi) |
| | **PP 15: Ekosistem Ekonomi Sirkular** | |
| | **KP 02: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan** | |
| 53 | KP 02.15.02 Persentase penurunan susut pangan (%) | IKK 3.1 Persentase penurunan susut pangan (%) |
| | **PN 05: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri** | |
| | **PP 01: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor** | |
| | **KP 05: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit** | |
| 54 | KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit (ton) | IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit (ton) |
| 55 | KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) (ton) | *Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian* |
| | **KP 06: Pengembangan Hilirisasi Kelapa** | |
| 56 | KP 05.01.06 Produktivitas kelapa (ton/hektar) | IKSK 1.2 Produktivitas kelapa (ton/hektar) |
| 57 | KP 05.01.06 Produksi kelapa (ton) | IKP 9.2 Produksi Kelapa (ton) |
| | **KP 08: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong** | |
| 58 | KP 05.01.08 Produksi Sagu (ton) | IKP 9.3 Produksi Sagu (ton) |
| 59 | KP 05.01.08 Produktivitas Sagu (ton/hektar) | IKK 1.3 Produktivitas Sagu (ton/hektar) |
| 60 | KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu (ton) | IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu (ton) |
| 61 | KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar) | IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar) |
| | **PP 14: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan** | |

| NO | PN/PP / KP | KONTRIBUSI KEMENTERIAN PERTANIAN |
|---|---|---|
| | **KP 01: Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/wabah dan Penanganan Bencana** | |
| 62 | KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota) | IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan (kab/kota) |
| | **PP 03: Pembangunan Berketahanan Iklim** | |
| | **KP 03: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim** | |
| 63 | KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%) | IT.5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian (%) |

## 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Dalam periode 2025–2029, Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

*Blueprint* Swasembada Pangan 2024–2029 menjadi dokumen pengarah yang konkret dalam mendukung pencapaian target swasembada, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas utama melalui pendekatan sistematis yang mencakup intervensi hulu dan hilir. Kementerian Pertanian akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui cetak sawah/perluasan areal tanam, peningkatan IP/optimasi lahan, penyediaan benih unggul, perbaikan sistem irigasi, modernisasi alat mesin pertanian, dan peningkatan produksi susu dan daging nasional (P2SDN). Proyek strategis nasional seperti pencetakan sawah dan revitalisasi bendungan akan menjadi bagian integral dari upaya ini, yang juga sekaligus mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan pokok.

Dalam mendukung agenda hilirisasi nasional sebagaimana dicanangkan pemerintah, peningkatan nilai tambah produk pertanian juga menjadi sasaran penting. Hilirisasi tidak hanya dipandang sebagai strategi peningkatan pendapatan petani dan kontribusi ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam arti luas. Produk-produk strategis seperti kopi, kelapa, kakao, kelapa sawit, dan ubi kayu akan didorong untuk memasuki rantai pasok industri melalui penguatan kapasitas pascapanen, fasilitasi investasi, serta integrasi dengan pelaku usaha dan UMKM. Hal ini sejalan dengan target RPJMN dalam pengembangan agroindustri berbasis wilayah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani dan pangan bergizi, strategi peningkatan produksi susu dan daging menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Peningkatan populasi sapi perah dan sapi potong didorong melalui program pembibitan dan investasi peternakan yang ramah iklim dengan mendorong pihak swasta untuk berinvestasi pada subsektor peternakan. Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian juga menjalankan strategi ketahanan pangan berbasis komunitas

melalui optimalisasi pekarangan sebagai sumber pangan bergizi, mendukung pengurangan angka *stunting* dan peningkatan ketahanan pangan keluarga sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN.

Selain itu, guna mendukung transisi energi nasional dan mengurangi tekanan pada ekspor bahan mentah, program mandiri energi berbasis biodiesel akan diakselerasi dengan target peningkatan produksi CPO dan implementasi campuran B-50 menuju B-100. Upaya ini bertujuan untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri dan menstabilkan harga komoditas sawit secara global, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama minyak nabati dunia.

Dengan strategi yang menyeluruh dan terintegrasi, Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025–2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat.

**Gambar 3. 8 Blueprint Swasembada Pangan 2024-2029**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian memuat program untuk menjawab tantangan penyelenggaraan pertanian nasional yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah. Implementasi arah kebijakan dan strategi memiliki dampak yang besar terhadap capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian 2025-2029. Perumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian dilakukan mengacu dan menjabarkan RPJMN 2025-2029 terkait dengan pertanian.

Kerangka yang digunakan dalam perumusan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian yaitu rumah strategi. Pendekatan rumah strategi dimulai dengan merumuskan atap (kuning) yang akan diterjemahkan sebagai tujuan akhir atau visi Kementerian Pertanian yang akan terwujud jika tujuan antara dapat tercapai (merah). Kelima hasil antara dapat tercapai jika kedelapan pilar (hijau) dapat terlaksana. Pelaksanaan kedelapan pilar yang efektif dan efisien perlu didukung oleh fondasi yang kuat (biru). Penjabaran lebih detail mengenai rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 3. 9 Rumah Strategi Kementerian Pertanian 2025 – 2029**

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Pertanian 2025-2029, atap atau tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia" yang diterjemahkan menjadi Visi Kementerian Pertanian 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan akhir tersebut, Kementerian Pertanian perlu mencapai kelima tujuan antara sebagai berikut:

1. **Kemandirian pangan asal pertanian**
   Kemandirian berarti 2 (dua) hal yaitu mengurangi ketergantungan impor dan kemampuan menyediakan kebutuhan pangan mandiri. Melepaskan ketergantungan impor dalam berbagai sektor merupakan isu strategis yang dibahas dan diupayakan, termasuk sektor pertanian. Kondisi geopolitik global yang memanas menyebabkan terganggunya rantai pasok dan perdagangan global serta berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga pangan. Tantangan yang perlu dijawab untuk menurunkan risiko tersebut adalah bagaimana Indonesia secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional agar kemandirian dapat terwujud.
2. **Pertumbuhan volume usaha pertanian**
   Kesejahteraan petani bergantung pada 2 (dua) hal yaitu pendapatan dan pengeluaran petani. Pertumbuhan volume usaha petani berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan petani dimana volume usaha pertanian yang meningkat berkorelasi positif dengan pendapatan pertani.
3. **Bahan baku bio energi**
   Isu terkait bahan baku bio energi adalah bagaimana sektor pertanian dapat berkontribusi dalam ketahanan energi melalui penyediaan sumber energi alternatif. Beberapa komoditas pertanian seperti komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura berkontribusi terhadap penyediaan bahan baku tersebut. Tersedianya bahan baku bio energi asal pertanian diharapkan dapat berkontribusi untuk membantu transisi penggunaan energi fosil menjadi energi baru terbarukan di tingkat nasional.
4. **Nilai tambah dan daya saing produk pertanian**
   Hilirisasi merupakan upaya transformatif yang giat dilaksanakan di tingkat nasional. Indonesia tidak lagi diharapkan menjual bahan baku namun menjual produk yang jadi dan siap dikonsumsi masyarakat, termasuk produk pertanian. Proses pengolahan bahan baku pada rantai pasok hulu menjadi produk yang siap konsumsi pada rantai pasok hilir akan meningkatkan nilai ekonomis produk pertanian. Pengolahan yang

tepat adalah proses penting untuk mendekat ke pasar (*close to market*), namun efisiensi rantai pasok adalah isu strategis berbeda. Rantai pasok yang efisien dari petani menuju ke pengguna akhir (*end customer*) akan memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani karena proses distribusi yang berkurang dan kontrol terhadap harga jual yang meningkat.

Peningkatan daya saing produk pertanian menitikberatkan pada persaingan terhadap produk pertanian sejenis dari negara lain. Penerimaan negara tujuan ekspor terhadap produk pertanian nasional dibanding produk pertanian negara lain merupakan tolok ukur daya saing. Standar mutu yang ketat dan pemenuhan standar teknis lainnya yang diprasyaratkan perlu menjadi perhatian dalam penyiapan dan pemilihan produk serta negara tujuan ekspor.

5. **Kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular**

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agar dapat mewujudkannya, maka harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

   Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari wabah atau penyakit menular melalui kegiatan kewaspadaan wabah, penanggulangan wabah, dan pasca-wabah. Salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah adalah penyakit yang dapat menular dari manusia ke manusia dan/atau dari hewan ke manusia. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Poin tujuan antara di atas dapat terlaksana jika koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga berjalan dengan efektif dan efisien. Dari sudut pandang Kementerian Pertanian, untuk dapat mewujudkan tujuan antara tersebut, maka pilar penyokong harus berdiri tegak. Berikut penjelasan mengenai pilar-pilar tersebut.

1. **Pilar 1: Prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi**

   Pilar 1 (satu) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Prasarana dan sarana pertanian meliputi lahan pertanian, air untuk pertanian, pupuk dan pestisida untuk pertanian, serta alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan pra panen dan pasca panen. Peran Kementerian Pertanian dalam menyediakan, mendistribusikan serta menjamin kualitas prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan produksi. Orientasi berbasis kebutuhan produksi berarti setiap proses penyediaan harus tepat dan akurat sesuai kebutuhan komoditas pertanian strategis nasional. Pendistribusian berarti ketepatan waktu dan ketepatan penyaluran prasarana dan sarana pertanian berdasarkan jenis komoditas dan sebaran wilayah tanam maupun panen nasional. Penjaminan kualitas yaitu memastikan bahwa prasarana dan sarana pertanian telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. **Pilar 2: Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan**

   Pilar 2 (dua) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Modern dalam produksi dan produktivitas adalah perubahan paradigma penyelenggaraan pertanian dalam menggunakan sumber daya sebagai input (baik hayati dan non hayati) yang tepat sesuai kebutuhan. Dalam metode pertanian saat ini, sering disebut dengan pertanian presisi, yaitu metode pertanian yang menghasilkan output maksimal dengan input yang minimal serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. Hal tersebut mustahil terwujud tanpa pemanfaatan teknologi pertanian termutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan. Tantangan yang terjadi adalah bagaimana Kementerian Pertanian dapat mengidentifikasi teknologi yang tepat sesuai karakteristik petani nasional, meningkatkan kesadaran petani akan pentingnya teknologi pertanian tersebut, dan memastikan petani dapat beradaptasi dan mampu menggunakan teknologi tersebut.

3. **Pilar 3: Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) menuju Lumbung Pangan Nasional**

   Pilar 3 (tiga) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Untuk mewujudkan kemandirian pangan maka kebutuhan masyarakat wajib terpenuhi melalui produksi dalam negeri. Orientasi produksi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini namun juga antisipasi kebutuhan pangan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia meluncurkan program KSPP yaitu sentra produksi terintegrasi pangan untuk mendorong terciptanya lumbung pangan nasional. Ketersediaan lumbung pangan nasional diharapkan dapat menghindari masyarakat dari kerawanan pangan yang disebabkan baik faktor dalam negeri maupun faktor global.

4. **Pilar 4: Pemanfaatan teknologi pertanian modern**

   Pilar 4 (empat) berkontribusi terhadap kemandirian pangan asal pertanian. Perkembangan penyelenggaraan pertanian global yang telah memasuki era *agriculture* 4.0 didorong oleh perkembangan teknologi. Peran kecerdasan buatan, berbagai sensor yang dapat membantu pengambilan keputusan. Teknologi pertanian tersebut perlu didorong pemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertanian berkelanjutan nasional. Kementerian Pertanian tidak hanya mengambil peran dalam penyediaan teknologi pertanian dalam bentuk prasarana dan sarana pertanian, namun juga mendorong penggunaan teknologi tersebut oleh para petani.

   Pemanfaatan teknologi pertanian modern tentunya akan berdampak terhadap budi daya pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian, sehingga akan meningkatkan ketersediaan pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri.

5. **Pilar 5: Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani**

   Pilar 5 (lima) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Pertumbuhan volume usaha tani dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu SDM pertanian dan produk pertanian. Profesi petani bukan pilihan mayoritas generasi muda sehingga di masa mendatang, ancaman kurangnya kuantitas petani berpotensi terjadi. Tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak masif karena kebutuhan produk komoditas pertanian yang berbanding lurus dengan peningkatan populasi global maupun nasional, membutuhkan lebih banyak modal, termasuk modal manusia. Faktor berikutnya yaitu kualitas usaha tani yang dipengaruhi

oleh pengetahuan dan kemampuan petani. Penyuluh pertanian memainkan peran strategis untuk meningkatkan keduanya dengan memberikan informasi, edukasi dan mendorong meningkatnya peningkatan serta adopsi teknologi dan metode pertanian mutakhir.

6. **Pilar 6: Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian**

   Pilar 6 (enam) berkontribusi terhadap pertumbuhan volume usaha pertanian. Perlindungan usaha merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu petani menghadapi kesulitan dalam penyelenggaraan usaha tani. Perlindungan dilakukan dengan memberikan asuransi tani yang dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun gangguan OPT. Akses pembiayaan sendiri merupakan stimulus yang diberikan kepada petani untuk pengembangan usaha pertanian. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menyediakan akses perlindungan dan pembiayaan serta mendorong pemanfaatan keduanya oleh petani atau usaha tani.

7. **Pilar 7: Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional**
   Pilar 7 (tujuh) berkontribusi terhadap nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hilirisasi komoditas meningkatkan nilai ekonomis komoditas pertanian strategis melalui sistem pengolahan dan pemasaran yang efektif dan efisien. Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk tidak lagi menjual bahan baku maupun produk setengah jadi, namun menjual produk yang siap konsumsi. Dengan menghasilkan produk yang siap konsumsi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani maupun usaha tani

8. **Pilar 8: Sistem kesehatan hewan nasional**

   Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu. Penyelenggaraan Siskeswanas merupakan salah satu upaya kesehatan melalui Kementerian Pertanian untuk berkontribusi menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit hewan melalui edukasi dan pengendalian penyakit menular.

   Fungsi edukasi yang dimaksud adalah memberikan pemahaman masyarakat mengenai jenis penyakit hewan yang dapat menular kepada masyarakat. Pelaksanaan edukasi mengisi kekosongan yang selama ini terjadi dikarenakan ketiadaan fungsi dari penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian/Lembaga. Pengendalian penyakit hewan, khususnya penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui otoritas veteriner.

Delapan pilar di atas dapat berdiri tegak jika didukung oleh fondasi yang kuat. Berdasarkan hasil diskusi dan analisis, terdapat 4 (empat) fondasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. **Sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian yang produktif**

   Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku pertanian berkelanjutan merupakan aset berharga yang perlu dimiliki. Kelembagaan pertanian dapat berkembang jika SDM pertanian tersedia dan kompeten. Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM Pertanian serta memfasilitasi pembentukan kelembagaan pertanian.

2. **Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian**

   Implementasi RB Kementerian Pertanian adalah untuk mewujudkan tata kelola yang berkualitas yang dapat mendorong tercapainya pembangunan

sektor pertanian. Implementasi RB nasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. Kementerian Pertanian tidak hanya berkontribusi melaksanakan RB General namun juga RB Tematik untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret dari pembangunan sektor pertanian.

3. **Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian**

   Standardisasi produk dan praktik pertanian merupakan penyeragaman spesifikasi berdasarkan standar baku yang telah ditetapkan melalui regulasi. Standar baku tersebut memuat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi produk pertanian serta panduan untuk melaksanakan setiap tahapan dalam praktik pertanian nasional. Penyeragaman dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas produk pertanian maupun menjaga konsistensi implementasi praktik pertanian. Sertifikasi merepresentasikan jaminan tertulis terkait produk maupun praktik pertanian yang menyatakan keduanya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kementerian Pertanian berkontribusi untuk menjamin ketersediaan standar produk dan standar praktik pertanian berkelanjutan serta melakukan sertifikasi terhadap produk dan praktik pertanian berkelanjutan.

4. **Tata kelola pertanian berkelanjutan (*Good Agricultural Pracitices, Good Handling Practices, Good Farming Practices*, dll)**

   Tata kelola pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan pertanian modern yang berupaya menjamin akses generasi mendatang terhadap komoditas pertanian serta peningkatan kualitas, mutu dan keamanan komoditas pertanian. Dengan persaingan global yang semakin ketat, ketiganya merupakan trilogi yang harus dimiliki secara bersamaan untuk menciptakan daya saing produk pertanian. Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menciptakan instrumen, memberikan edukasi kepada petani maupun kelompok tani mengenai sistem pertanian berkelanjutan, hingga mendorong implementasi pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan rumah strategi di atas, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2025-2029. Terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi koridor implementasi 13 strategi jangka menengah Kementerian Pertanian. Implementasi strategi yang baik diharapkan dapat mewujudkan visi **"Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia"** di akhir periode perencanaan jangka menengah.

1. **Arah Kebijakan 1 "Peningkatan pendapatan petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:
   - **Strategi 1:** Meningkatkan akses pembiayaan petani serta perlindungan usaha pertanian.
   - **Strategi 2:** Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui penyuluhan dan pengembangan modal manusia (*human capital*) pertanian berbasis kompetensi.
   - **Strategi 3:** Meningkatnya kualitas dan pangsa pasar produk pertanian nasional.
   - **Strategi 4:** Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional yang produktif.
2. **Arah Kebijakan 2 "Kemandirian pangan nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- **Strategi 5:** Swasembada pangan untuk komoditas pangan strategis nasional berdasarkan kebutuhan pangan masyarakat dengan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
- **Strategi 6:** Menerapkan tata Kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
- **Strategi 7:** Membangun Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memastikan cadangan pangan nasional dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta mengantisipasi krisis pangan dunia berdasarkan produksi dalam negeri.
- **Strategi 8:** Standardisasi dan sertifikasi produk dan praktik pertanian.
- **Strategi 9:** Pemanfaatan teknologi pertanian modern.

3. **Arah Kebijakan 3 "Memastikan ketersediaan bahan baku bio energi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 10** "Memenuhi kebutuhan bahan baku bio energi yang berasal dari komoditas hasil pertanian".
4. **Arah Kebijakan 4 "Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Indonesia."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 11** "Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional."
5. **Arah Kebijakan 5 "Peningkatan Kesehatan Masyarakat dari penyakit hewan menular."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 12** "Penerapan sistem kesehatan hewan nasional."
6. **Arah Kebijakan 6 "Tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel dan profesional."** Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan **strategi 13** "Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan *good government governance."*

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan alat strategis untuk mengarahkan dan mengatur pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan bernegara dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Penyusunannya dilakukan secara strategis dan terukur dengan mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada. Fungsi penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

a. Memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
b. Memberikan gambaran umum tentang regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
c. Menjelaskan peran Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
d. Menjadi dasar penyusunan matriks kerangka regulasi yang memuat arah dan kebutuhan regulasi secara terperinci.

Adapun tujuan dari penyusunan kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

a. Mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
b. Memenuhi kebutuhan regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri/Lembaga
c. Mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN
d. Menyelesaikan permasalahan penting, mendesak, dan berdampak besar pada pencapaian pembangunan nasional

Penyusunan kerangka regulasi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. **Sejalan dengan Kebijakan Nasional:** selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.
b. **Berlandaskan Konstitusi:** berbasis pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.
c. **Memfasilitasi dan Mengatur Masyarakat dan Penyelenggara Negara:** mendukung peran masyarakat dan penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan nasional.
d. **Berdasarkan Analisis dan Evaluasi Regulasi:** mempertimbangkan efektivitas regulasi yang ada, dengan:
   1. Tidak perlu regulasi baru jika regulasi lama sudah efektif.
   2. Membentuk/mengubah regulasi jika regulasi lama belum efektif/optimal.
e. **Analisis Biaya dan Manfaat:** melibatkan analisis dampak, biaya, dan manfaat regulasi (CBA) bagi semua pemangku kepentingan.
   I. Regulasi dibuat jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, atau
   II. Jika regulasi tersebut adalah satu-satunya solusi untuk mencapai tujuan.
f. **Asas Pembentukan dan Materi Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
g. **Format Narasi dan Matriks:** disajikan dalam bentuk narasi yang jelas dan dituangkan dalam matriks kerangka regulasi.

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029, maka dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari:

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Sub-urusan Penyuluhan).
3. Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).
5. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao.
6. Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
7. RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi.
9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Penjelasan lebih rinci terkait kerangka regulasi dituangkan dalam matriks kerangka regulasi yang disajikan dalam Lampiran 3.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan landasan fundamental bagi organisasi untuk mencapai sasaran strategisnya. Dengan merancang dan menerapkan kerangka kelembagaan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk didalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, sasaran strategis, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Terdapat beberapa elemen kunci dari kerangka kelembagaan, seperti:

a. **Fungsi dan Struktur Organisasi:** menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar unit organisasi untuk memastikan kelancaran operasi dan pencapaian tujuan.
b. **Tata Laksana Antar Unit Organisasi:** merumuskan proses dan prosedur kerja yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar unit.
c. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Menentukan kebutuhan SDM, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Adapun penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

a. **Sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan visi Presiden:** mempertimbangkan visi dan agenda pembangunan jangka panjang RPJPN, prioritas pembangunan RPJMN, dan visi - misi Presiden.
b. **Berlandaskan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:** memperhatikan kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
c. **Berbasis Prinsip Organisasi yang Efektif, Efisien, dan Transparan:** membangun organisasi yang mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja dengan mempertimbangkan:
   I. Pencapaian visi dan misi Kementerian/Lembaga.
   II. Struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya.
   III. Ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.
d. **Melalui Proses Evaluasi:** melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

   Penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029 dilakukan melalui proses evaluasi terhadap SOTK Kementerian Pertanian saat ini. Proses evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait SOTK saat ini dalam mendukung capaian visi-misi Kementerian untuk periode berikutnya. Permasalahan terkait SOTK tersebut kemudian disusun desain kriteria organisasi yang dibutuhkan untuk pencapaian visi-misi Kementerian

Pertanian Periode Renstra 2025-2029. Berikut adalah kerangka kelembagaan Kementerian Pertanian untuk periode Renstra 2025-2029:

**Tabel 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Pertanian Periode Renstra 2025-2029**

| No | Permasalahan SOTK | Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan |
|---|---|---|
| 1 | Belum ada unit kerja khusus dalam melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan | Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon I di bawah Menteri yang melaksanakan tata kelola sistem budi daya pertanian berkelanjutan |
| 2 | Belum ada unit kerja khusus yang menangani pemuliaan benih tanaman (benih berkelanjutan) | |
| 3 | Penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan secara desentralisasi di Direktorat PPH Ditjen Tanaman Pangan, Direktorat PPH Ditjen Hortikultura, dan Direktorat PPH Ditjen Perkebunan | Butuh unit kerja dengan kewenangan setingkat eselon II di bawah 1 (satu) unit kerja eselon I yang menangani penjaminan mutu dan keamanan pangan secara terpusat (sentralisasi) |
| 4 | 2 Direktorat pada Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, serta Perkebunan didesain berdasarkan kelompok komoditas pertanian, sehingga berpotensi tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya jika komoditas yang menjadi kewenangan Direktorat tersebut tidak menjadi prioritas Kementerian Pertanian di tahun berjalan | Unit kerja setingkat eselon II di keempat Ditjen Komoditas sebaiknya didesain berdasarkan proses: (1) Perbenihan/ pembibitan (2) Penanaman, (3) penerapan praktik budidaya pertanian modern dan berkelanjutan, (4) perlindungan tanaman dan hewan, (5) panen komoditas pertanian |
| 5 | Tugas dan Fungsi penyuluhan merupakan salah satu tugas dan fungsi di BPPSDMP, sedangkan kewenangan penyuluhan di daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah | Dibutuhkan unit kerja yang setingkat UKE 1 yang menangani penyuluhan dan pembinaan penyuluh nasional *(corporate university)* |
| 6 | Belum ada unit kerja yang khusus yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi secara umum | Butuh unit kerja setingkat eselon I yang menangani pengembangan SDM pertanian berbasis kompetensi |
| 7 | Adanya tumpang tindih dalam pengembangan SDM pertanian | Biro OSDMA akan menangani pengembangan SDM ASN Pertanian (internal dan eksternal Kementerian Pertanian) BPPSDMP akan menangani pengembangan SDM pertanian eksternal |
| 8 | Ada UPT di satu UKE 1 yang memiliki tusi lintas UKE 1 (BP MPT, BB PPMB TPH, BB POPT) | Revitalisasi UPT berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki |

| No | Permasalahan SOTK | Desain Kriteria Organisasi yang Dibutuhkan |
|---|---|---|
| 9 | Belum ada unit kerja khusus yang menangani adopsi teknologi *digital farming* menuju pertanian maju dan modern | Butuh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang menangani adopsi teknologi *digital farming* menuju pertanian maju dan modern |
| 10 | Belum ada unit kerja yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: *green house* | Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan prasarana/infrastruktur pertanian, seperti: *green house* |
| 11 | Penyediaan pupuk dan pestisida dilakukan juga oleh unit teknis | Butuh Unit Kerja setingkat Eselon II yang menangani penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida secara terpusat |
| 13 | Pelaksanaan fungsi sebenarnya dari Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner yang diperuntukkan hanya untuk hewan ternak → belum ada otoritas veteriner khusus setingkat UKE 1 | Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I sebagai Otoritas Veteriner Nasional |
| | | Butuh Unit Kerja setingkat Eselon I yang menangani budi daya peternakan |

# BAB IV
# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## 4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Pertanian menyusun 7 (tujuh) sasaran program teknis yaitu: Meningkatnya pendapatan petani, terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan, meningkatnya cadangan pangan nasional, meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian, meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan, terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian, meningkatnya kesehatan masyarakat dari penularan penyakit hewan, dan 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut akan dibagi menjadi beberapa kegiatan yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome* level 1 dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu Sasaran Strategis (SS). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome* level 2 dari suatu program. IKP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian output dari suatu kegiatan. Tabel 4.1 memperlihatkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis serta Target tahun 2025 – 2029 terkait 7 (tujuh) sasaran program teknis maupun 1 (satu) sasaran program dukungan manajemen.

**Tabel 4. 1 Tabel Sasaran, Indikator, dan Target Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SS 1: Meningkatnya pendapatan petani | IKSS 1.1 Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) | 123,64 | 125,02 | 126,42 | 127,84 | 129,27 |
| | IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%) | 3,5 | 3,8 | 4 | 3,6 | 3,3 |
| SS 2: Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan | IKSS 2.1 Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas (%) | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| SS 3: Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian | IKSS 3.1: *Market share* produk ekspor pertanian (%) | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 |
| SS 4: Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan | IKSS 4.1: Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan (Indeks) | 0,23 | 0,41 | 0,66 | 0,84 | 1 |
| SS 5: Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian | IKSS 5.1: Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi (%) | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 6: Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia | IKSS 6.1: Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia (%) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,7 |
| SS 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | IKSS 7.1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | 86,98 | 88,17 | 89,77 | 90,67 | 91,28 |

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan penjelasan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian Pertanian. Pemenuhan kebutuhan pendanaan berasal dari APBN yang bersumber dari rupiah murni, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman dan/atau Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan sumber dana lainnya. Berikut ini beberapa kerangka pendanaan yang biasa digunakan antara lain:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)
   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK terdiri dari:
   a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
   b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
   c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
   Dalam pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional, Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi pendanaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Pertanian untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber dana SBSN yang berbasis syariah.
3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
   Sumber pendanaan lain untuk pembangunan pertanian adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pendanaan melalui pinjaman luar negeri difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya, yaitu (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), ketahanan air dan pangan (*water and*

*food security*); (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi.

Kebutuhan anggaran tersebut dapat dioptimalkan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian Pertanian dan disinkronisasikan dengan realitas kemampuan sumber daya yang tersedia dalam Kementerian Pertanian. Dengan demikian target capaian output diharapkan sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan pada lampiran 1.

# BAB V
# PENUTUP

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029 yang mengandung Visi dan Misi Presiden serta Prioritas Nasional. Rencana Strategis Kementerian Pertanian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta arah kebijakan dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang pertanian. Renstra Kementerian Pertanian menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP, dan IKK, untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kementerian Pertanian ini harus digunakan sebagai pedoman dan rujukan arah pembangunan bidang pertanian yang hendak dicapai pada Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan dasar dan acuan bagi satuan kerja dalam menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; dan (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral. Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak yang terkait.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pembangunan pertanian dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dilakukan melalui manajemen risiko pembangunan pertanian, kajian kelayakan, serta sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi. Evaluasi pelaksanaan renstra dilaksanakan pada tahun ke-3 pelaksanaan Renstra dan pada tahun ke-5 pelaksanaan renstra.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

**Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian**

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | 31.894.909,14 | 40.145.000,00 | 60.193.793,59 | 60.656.775,57 | 62.016.790,90 | |
| SS 1 | Meningkatnya pendapatan petani | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 1.1 | Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) | | Nilai | 122,27 | 123,64 | 125,02 | 126,42 | 127,84 | 129,27 | | | | | | |
| IKSS 1.2 | Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | | % | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 3,60 | 3,30 | | | | | | |
| SS 2 | Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 2.1 | Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas | | % | Indikator baru | 68,09 | 68,09 | 68,09 | 70,21 | 72,34 | | | | | | |
| SS 3 | Meningkatnya pangsa pasar (*market share*) produk ekspor pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 3.1 | *Market share* produk ekspor pertanian | | % | Indikator baru | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,80 | 2,85 | | | | | | |
| SS 4 | Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 4.1 | Indeks hilirisasi komoditas pertanian unggulan | | Indeks | Indikator baru | 0,23 | 0,41 | 0,66 | 0,84 | 1,00 | | | | | | |
| SS 5 | Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 5.1 | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi | | % | Indikator baru | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 | | | | | | |
| SS 6 | Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSS 6.1 | Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia | | % | Indikator baru | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1,70 | | | | | | |
| SS 7 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| IKSS 7.1 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | | Nilai | 85,11 | 86,98 | 88,17 | 89,77 | 90,67 | 91,28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | 3.400.093,78 | 8.958.848,75 | 10.064.230,80 | 10.657.720,97 | 11.283.529,29 | |
| SP.1 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Jenderal |
| IKP1.1 | Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Pertanian | | Nilai | 78,47 | 80,12 | 81,01 | 82,31 | 82,91 | 83,22 | | | | | | |
| SP.2 | Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Inspektorat Jenderal |
| IKP 2.1 | Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian | | Nilai | 2,85 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | | | | | | |
| SP.3 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Tanaman Pangan yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Eselon I Teknis |
| IKP 3.1 | Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Tanaman Pangan | | Indeks | Indikator baru | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | | | | | | |
| SP.4 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Hortikultura yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Eselon I Teknis |
| IKP 4.1 | Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Hortikultura | | Indeks | Indikator baru | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | | | | | | |
| SP.5 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Perkebunan |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKP 5.1 | Indeks tata kelola birokrasi Ditjen. Perkebunan | | Indeks | Indikator baru | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | | | | | | |
| SP.6 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Eselon I Teknis |
| IKP 6.1 | Indeks tata kelola birokrasi Ditjen PKH | | Indeks | Indikator baru | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | | | | | | |
| SP.7 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal PSP |
| IKP 7.1 | Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal PSP | | Indeks | 0,815 | 0,870 | 0,873 | 0,875 | 0,878 | 0,880 | | | | | | |
| SP.8 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 8.1 | Indeks tata kelola birokrasi Direktorat Jenderal LIP | | Indeks | Indikator baru | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | | | | | | |
| SP.9 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Eselon I Teknis |
| IKP 9.1 | Indeks tata kelola Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Indeks | Indikator baru | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | | | | | | |
| SP.10 | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan PPSDMP yang baik, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | Eselon I Teknis |
| IKP 10.1 | Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan PPSDMP | | Indeks | Indikator baru | 0,7798 | 0,7800 | 0,7802 | 0,7804 | 0,7806 | | | | | | |
| **018.WA - Program Dukungan Manajemen** | | | | | | | | | | 1.286.557,41 | 3.763.351,14 | 3.876.251,68 | 3.992.539,23 | 4.112.315,41 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1746 Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian | | | | | | | | | | 4.451,03 | 4.542,23 | 4.678,50 | 4.818,85 | 4.963,42 | |
| SK 1 | Meningkatnya kualitas legislasi, kebijakan dan advokasi hukum yang optimal | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Hukum |
| IKK 1.1 | Indeks Reformasi Hukum | | Indeks | 99,40 | 99,40 | 99,45 | 99,50 | 99,55 | 99,60 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Indeks Kualitas Kebijakan | | Indeks | 66,08 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | | | | | | |
| IKK 1.3 | Indeks Kualitas Advokasi Hukum | | Indeks | Indikator Baru | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | | | | | | |
| 018.WA.01.1746.AAA | Undang-Undang | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1746.AAA.111 | tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | | RUU | Ro baru | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 199,00 | 204,97 | 211,12 | 217,45 | |
| 018.WA.01.1746.AAA.112 | tentang Penyuluhan Bidang Pertanian | | RUU | Ro baru | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 200,56 | 206,57 | 212,77 | 219,15 | |
| 018.WA.01.1746.AAG | Peraturan Menteri | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 018.WA.01.1746.AAG.111 | Peraturan Menteri mengenai sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura | | Peraturan Menteri | Ro baru | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 618,81 | 637,37 | 656,49 | 676,19 | |
| 018.WA.01.1746.AAG.112 | Peraturan Menteri mengenai sektor Peternakan, Kesehatan Hewan, Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Peraturan Menteri | Ro baru | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 808,28 | 832,52 | 857,50 | 883,23 | |
| 018.WA.01.1746.AAG.113 | Peraturan Menteri mengenai sektor Lahan, Irigasi dan Prasarana Sarana Pertanian | | Peraturan Menteri | Ro baru | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 623,53 | 642,24 | 661,50 | 681,35 | |
| 018.WA.01.1746.AAG.114 | Peraturan Menteri mengenai sektor Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Penyuluhan dan Pengembangan SDM | | Peraturan Menteri | Ro baru | | 6 | 6 | 6 | 6 | | 620,72 | 639,34 | 658,52 | 678,28 | |
| 018.WA.01.1746.BCB | Perkara Hukum Lembaga | | | Ro baru | | | | | | | | - | - | - | |
| *018.WA.01.1746.BCB.957* | Penanganan Perkara Litigasi | | Perkara | Layanan | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 649,09 | 834,64 | 859,68 | 885,47 | 912,03 | |
| SK 2 | Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Hukum |
| IKK 2.1 | Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan hukum | | Skala Likert | 3,34 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,38 | | | | | | |
| 018.WA.01.1746.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.01.1746.EBA.Z01 | 957 Layanan Hukum | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.801,94 | 636,70 | 655,80 | 675,48 | 695,74 | |
| 1747 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian | | | | | | | | | | 4.681,88 | 7.004,36 | | | | |
| SK.1 | Terwujudnya Layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian yang Prima | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Kerja Sama luar Negeri |
| IKK 1.1 | Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian | | % | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | |
| IKK 1.2 | Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Luar Negeri Pertanian | | Skala Likert | 3,23 | 3,23 | 3,24 | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1747.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1747.AEC.101 | Kerjasama Luar Negeri Bidang Pertanian | | Kesepakatan | 14 | 12 | 11 | | | | 4.681,88 | 7.004,36 | | | | |
| 1747 Fasilitasi Kerja Sama Bidang Pertanian | | | | | | | | | | | | 7.214,49 | 7.430,93 | 7.653,85 | |
| SK.1 | Terwujudnya Layanan Kerja Sama Bidang Pertanian yang Prima | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Kerja Sama Pertanian |
| IKK 1.1 | Persentase Progres Capaian Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pertanian | | % | Indikator baru | | | 90 | 90 | 90 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Tingkat Kepuasan Layanan Biro Kerja Sama Pertanian | | Skala Likert | Indikator baru | | | 3,24 | 3,25 | 3,25 | | | | | | |
| 018.WA.01.1747.AEC | Kerja Sama | | | Indikator baru | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1747.AEC.102 | Kerja Sama Bidang Pertanian | | Kesepakatan | RO Baru | | | 11 | 12 | 12 | 4.681,88 | 7.004,36 | 7.214,49 | 7.430,93 | 7.653,85 | |
| 1749 Pengelolaan Organisasi dan SDM | | | | | | | | | | 8.265,59 | 8.784,38 | 9.047,91 | 9.319,35 | 9.598,93 | |
| SK 1 | Terwujudnya Struktur Organisasi yang agile dan tepat ukuran serta terwujudnya sistem kerja baru di Lingkungan Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | OSDMA |
| IKK 1.1 | Persentase penyederhanaan struktur organisasi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.2 | Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi | | Nilai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBA.Z08 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 886,88 | 730,50 | 752,42 | 774,99 | 798,24 | |
| SK 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pertanian dan penerapan sistem nilai BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | OSDMA |
| IKK 2.1 | Indeks BerAKHLAK Kementerian Pertanian | | % | 68,91 | 80,00 | 80,05 | 81,00 | 81,5 | 82,00 | | | | | | |
| IKK 2.2 | Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pertanian | | Nilai | 4,69 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,71 | 4,75 | | | | | | |
| IKK 2.3 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | Nilai | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 91,00 | 91,50 | 92,00 | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBD.Z31 | Layanan Reformasi Kinerja | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.134,46 | 592,20 | 609,97 | 628,26 | 647,11 | |
| SK 3 | Meningkatnya implementasi sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | OSDMA |
| IKK 3.1 | Indeks sistem merit | | Nilai | 273,50 | 287,00 | 292,00 | 297,00 | 302,00 | 308,00 | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBC | EBC Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1749.EBC.Z11 | 954 Layanan Manajemen SDM | | Layanan/Orang | 14.807,00 | 14.807,00 | 42.841,00 | 42.841,00 | 42.841,00 | 42.841,00 | 6.244,25 | 7.461,68 | 7.685,53 | 7.916,09 | 8.153,58 | |
| 1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | | | | | | | | | | 21.182,88 | 25.229,30 | 25.986,18 | 26.765,76 | 27.568,74 | |
| SK 1 | Meningkatnya kualitas layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | PPVTPP |
| IKK 1.1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | | Skala Likert (1-4) | 3,50 | 3,55 | 3,58 | 3,61 | 3,64 | 3,67 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.2 | Tingkat Kepuasan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian terhadap layanan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | | Skala Likert (1-4) | 3,50 | 3,55 | 3,58 | 3,61 | 3,64 | 3,67 | | | | | | |
| 018.WA.01.1753.ADC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1753.ADC.111 | Sertifikat Hak Pelindungan Varietas Tanaman Pertanian | | produk | 83,00 | 100 | 70 | 80 | 80 | 80 | 1.380,20 | 983,84 | 1.013,35 | 1.043,75 | 1.075,07 | |
| 018.WA.01.1753.ADC.112 | Sertifikat Pendaftaran Varietas Tanaman Pertanian | | produk | 225,00 | 300 | 160 | 170 | 180 | 180 | 1.383,00 | 485,40 | 499,96 | 514,96 | 530,41 | |
| 018.WA.01.1753.AEA | Koordinasi | | | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | - | - | - | |
| 018.WA.01.1753.AEA.001 | Koordinasi Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian | | kegiatan | 3,00 | 4 | | | | | 5.652,84 | | - | - | - | |
| 018.WA.01.1753.AEA.111 | Koordinasi Pelindungan Varietas dan Perizinan Pertanian | | kegiatan | 3,00 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 8.322,50 | 8.572,18 | 8.829,34 | 9.094,22 | |
| 018.WA.01.1753.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 018.WA.01.1753.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit/Paket | 37 | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 750,13 | 200,00 | 206,00 | 212,18 | 218,55 | |
| 018.WA.01.1753.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | Unit/Paket | | | | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 018.WA.01.1753.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1753.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.426,71 | 12.334,56 | 12.704,59 | 13.085,73 | 13.478,30 | |
| 018.WA.01.1753.FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.01.1753.FAB.111 | Sistem Informasi Pertanian | | Sistem Informasi | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 590,00 | 455,00 | 468,65 | 482,71 | 497,19 | |
| 018.WA.01.1753.EBD | layanan Menajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | - | - | |
| 018.WA.01.1753.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Rekomendasi | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 2.448,00 | 2.521,44 | 2.597,08 | 2.675,00 | |
| 4576 Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum | | | | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1.171.174,71 | 3.656.310,75 | 3.766.000,07 | 3.878.980,07 | 3.995.349,48 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 1 | Terwujudnya Tata kelola Perencanaan yang baik | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Perencanaan |
| IKK 1.1 | Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan | | % | 79,02 | 79,22 | 79,42 | 79,62 | 79,82 | 80,02 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Layanan Biro Perencanaan | | Skala Likert | 3,28 | 3,30 | 3,33 | 3,36 | 3,38 | 3,41 | | | | | | |
| 018.WA.01.4576.AEA.111 | Koordinasi Kebijakan, Keuangan dan Umum | | Kegiatan | Ro baru | 8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 7.236,76 | 37.141,31 | 38.255,55 | 39.403,21 | 40.585,31 | |
| 018.WA.01.4576.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | layanan | | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.712,49 | 7.389,81 | 7.611,51 | 7.839,85 | 8.075,05 | |
| 018.WA.01.4576.EBD.Z23 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen/ Layanan | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.962,78 | 810,00 | 834,30 | 859,33 | 885,11 | |
| 018.WA.01.4576.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 4.749,72 | 6.579,81 | 6.777,21 | 6.980,52 | 7.189,94 | |
| SK 2 | Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan akuntabel | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Keuangan dan BMN |
| IKK 2.1 | Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian | | Opini | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 20.449,00 | | 21.694,00 | 22.345,00 | 23.015,00 | |
| IKK 2.2 | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | | Nilai | 89,82 | 89,84 | 89,86 | 89,88 | 89,90 | 89,92 | 103,00 | | 109,00 | 112,00 | 116,00 | |
| IKK 2.3 | Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Keuangan dan BMN | | Skala Likert (1-4) | 3,41 | 3,42 | 3,44 | 3,46 | 3,48 | 3,50 | 915,00 | | 3.340.556,00 | 3.342.556,00 | 3.345.556,00 | |
| 018.WA.01.4576.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | Layanan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.021.372,86 | 3.454.094,25 | 3.557.717,07 | 3.664.448,59 | 3.774.382,04 | |
| 018.WA.01.4576.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.021.372,86 | 3.454.094,25 | 3.557.717,07 | 3.664.448,59 | 3.774.382,04 | |
| 018.WA.01.4576.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | 57 | 56 | 1 | 1 | 1 | 8.141,52 | 508,00 | 523,24 | 538,94 | 555,11 | |
| 018.WA.01.4576.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen/ Layanan | 55 | 57 | 56 | 1 | 1 | 1 | 8.141,52 | 508,00 | 523,24 | 538,94 | 555,11 | |
| SK 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset/BMN Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Keuangan dan BMN |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 3.1 | Indeks Pengelolaan Aset | | Indeks | 3,38 | 3,40 | 3,42 | 3,45 | 3,47 | 3,50 | | | | | | |
| 018.WA.01.4576.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | Layanan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 457,40 | 478,55 | 492,91 | 507,69 | 522,92 | |
| 018.WA.01.4576.EBA.Z07 | Layanan BMN | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 457,40 | 478,55 | 492,91 | 507,69 | 522,92 | |
| SK 4 | Terwujudnya digitalisasi arsip Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | - | - | - | Biro Umum dan Pengadaan |
| IKK 4.1 | Tingkat digitalisasi Arsip | | Nilai | 96,97 | 97,00 | 97,25 | 97,50 | 97,75 | 98,00 | | | - | - | - | |
| 018.WA.01.4576.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | Layanan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.768,17 | 110,23 | 113,54 | 116,94 | 120,45 | |
| 018.WA.01.4576.EBD.Z33 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.768,17 | 110,23 | 113,54 | 116,94 | 120,45 | |
| SK 5 | Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Umum dan Pengadaan |
| IKK 5.1 | Indeks Tata Kelola Pengadaan | | Indeks | 69,41 | 69,50 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | | | | | | |
| 018.WA.01.4576.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | 1.121 | 1.773 | 4.285 | 1.811 | 1.816 | 1.888 | 28.961,19 | 12.502,09 | 12.877,15 | 13.263,47 | 13.661,37 | |
| 018.WA.01.4576.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | unit | 265 | 1.431 | 1.074 | 1.418 | 1.422 | 1.428 | 23.617,20 | 7.685,59 | 7.916,16 | 8.153,64 | 8.398,25 | |
| 018.WA.01.4576.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | M2 | 856 | 342 | 3.211 | 393 | 394 | 460 | 5.343,99 | 4.816,50 | 4.961,00 | 5.109,82 | 5.263,12 | |
| SK 6 | Meningkatnya kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan | Pusat | | | | | | | | | | | | | Biro Umum dan Pengadaan |
| IKK 6.1 | Indeks kepuasan unit eselon I terhadap layanan Umum dan Pengadaan | | Skala Likert | 3,25 | 3,11 | 3,13 | 3,15 | 3,17 | 3,19 | | | | | | |
| 018.WA.01.4576.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | Layanan | | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 80.899,82 | 136.024,51 | 140.105,24 | 144.308,40 | 148.637,65 | |
| 018.WA.01.4576.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 80.899,82 | 136.024,51 | 140.105,24 | 144.308,40 | 148.637,65 | |
| SK 7 | Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Bogor | | | | | | | | | | | | | PSEKP |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 7.1 | Rasio Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan | | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | | |
| IKK 7.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian | | Skala Likert (1-4) | N/A (Indikator baru) | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | | | | | | |
| 018.WA.01.4576.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 2.547,25 | 3.600,00 | 3.708,00 | 3.819,24 | 3.933,82 | |
| 018.WA.01.4576.ABR.111 | Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian | | Rekomendasi | 16,00 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 2.547,25 | 3.600,00 | 3.708,00 | 3.819,24 | 3.933,82 | |
| 018.WA.01.4576.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | Orang | | 13.840 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 2.077,25 | 4.462,00 | 4.595,86 | 4.733,74 | 4.875,75 | |
| 018.WA.01.4576.AEF.I01 | layanan sosialisasi | | Orang | Ro baru | 13.840 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 11.155 | 2.077,25 | 4.462,00 | 4.595,86 | 4.733,74 | 4.875,75 | |
| 4577 Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian | | | | | | | | | | 76.801,32 | 61.480,13 | 63.324,53 | 65.224,27 | 67.181,00 | |
| SK 1 | Terwujudnya SPBE Kementerian Pertanian dalam mendukung tranformasi pemerintahan digital | Pusat | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 1.1 | Indeks SPBE Kementerian Pertanian | | indeks | 4,00 | 4,26 | | | | | | | | | | |
| IKK 1.2 | Indeks pemerintah digital | | indeks | Indikator Baru | | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | | | | | | |
| IKK 1.3 | Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE (%) | | % | Indikator Baru | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| IKK 1.4 | Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral | | indeks | Indikator Baru | 3,28 | 3,36 | 3,43 | 3,51 | 3,59 | | | | | | |
| IKK 1.5 | Indeks kepuasan pengguna layanan pusat data dan sistem informasi pertanian | | indeks | 3,33 | 3,54 | 3,56 | 3,57 | 3,59 | 3,61 | | | | | | |
| 018.WA.01.4577.AEA.111 | Koordinasi Data dan Informasi | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127,70 | 502,73 | 517,81 | 533,35 | 549,35 | |
| *018.WA.01.4577.AEA.111.051* | *Pelaksanaan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan* | | *Kegiatan* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127,70 | 502,73 | 517,81 | 533,35 | 549,35 | |
| 018.WA.01.4577.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | layanan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.956,39 | 30.682,85 | 31.603,34 | 32.551,44 | 33.527,98 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.01.4577.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.066,65 | 8.904,84 | 9.171,99 | 9.447,15 | 9.730,56 | |
| 018.WA.01.4577.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.889,74 | 21.778,01 | 22.431,35 | 23.104,29 | 23.797,42 | |
| 018.WA.01.4577.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | 144 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1.771,26 | 200,00 | 206,00 | 212,18 | 218,55 | |
| 018.WA.01.4577.EBB.951 | 951 - Layanan Sarana Internal | | Unit | 169 | 20 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1.671,26 | 200,00 | 206,00 | 212,18 | 218,55 | |
| 018.WA.01.4577.EBB.971 | 971 - Layanan Prasarana Internal | | M2 | Ro baru | 124 | - | - | - | - | 100,00 | - | | | | |
| 018.WA.01.4577.FAB | FAB - Sistem Informasi Pemerintahan | | | | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 28.523,99 | 4.957,00 | 5.105,71 | 5.258,88 | 5.416,65 | |
| 018.WA.01.4577.FAB.971 | 001 - Sistem Informasi Pertanian | | Sistem Informasi | Ro baru | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 28.523,99 | 4.957,08 | 5.105,79 | 5.258,96 | 5.416,73 | |
| SK 2 | Meningkatnya citra positif Kementerian Pertanian | Pusat | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 2.1 | Indeks citra positif Kementerian Pertanian | | indeks | 3,63 | 3,63 | 3,64 | 3,65 | 3,66 | 3,67 | | | - | - | - | Biro Humas dan Informasi Publik |
| 018.WA.01.4577.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.597,76 | 8.125,70 | 8.369,47 | 8.620,56 | 8.879,17 | |
| 018.WA.01.4577.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.597,76 | 8.125,71 | 8.369,48 | 8.620,56 | 8.879,18 | |
| BAA.111 | Layanan Publik Kepada Masyarakat | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| BAA. | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | | layanan | 1 | 1 | | | | | 67,91 | | | | | |
| BAB. | Pelayanan Publik Kepada Lembaga | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| BAB.111 | Layanan Publik Kepada Lembaga | | layanan | 1 | 1 | | | | | 22,43 | | | | | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan Sakeholder terhadap Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | Pusat | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 3.1 | Indeks kepuasan Stakeholder terhadap layanan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | | Skala Likert | 3,02 | 3,10 | 3,12 | 3,14 | 3,16 | 3,18 | | | - | - | - | |
| 018.WA.01.4577.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.733,90 | 17.011,85 | 17.522,20 | 18.047,87 | 18.589,31 | |
| 018.WA.01.4577.EBA.959 | Layanan Protokoler | | layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.733,90 | 17.011,85 | 17.522,20 | 18.047,87 | 18.589,31 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4578 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | 83.764,00 | 79.376,04 | 80.169,80 | 80.971,50 | 81.781,22 | |
| SK 1 | Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV | Pusat | | | | | | | | 33.080,49 | 36.725,23 | 37.092,48 | 37.463,40 | 37.838,04 | Inspektorat I/II/III/IV |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV | | % | 90 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 33.080,49 | 36.725,23 | 37.092,48 | 37.463,40 | 37.838,04 | |
| 4578.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | 8.941,57 | 9.030,98 | 9.121,29 | 9.212,51 | |
| 4578.EBD.U10 | Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat I | | Laporan | 50 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.205,51 | 2.633,90 | 2.660,24 | 2.686,84 | 2.713,71 | |
| 4578.EBD.U11 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat I | | Laporan | 24 | 108 | 56 | 56 | 56 | 56 | 9.439,20 | 4.871,16 | 4.919,87 | 4.969,07 | 5.018,76 | |
| 4578.EBD.U12 | Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat I | | Laporan | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 998,81 | 1.436,51 | 1.450,87 | 1.465,38 | 1.480,04 | |
| 4578.EBD.U16 | Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat II | | Laporan | 50 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2.205,51 | 2.576,90 | 2.602,67 | 2.628,70 | 2.654,98 | |
| 4578.EBD.U17 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat II | | Laporan | 24 | 70 | 56 | 56 | 56 | 56 | 6.118,00 | 4.871,16 | 4.919,87 | 4.969,07 | 5.018,76 | |
| 4578.EBD.U18 | Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat II | | Laporan | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 998,81 | 1.333,91 | 1.347,25 | 1.360,72 | 1.374,33 | |
| 4578.EBD.U22 | Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat III | | Laporan | 51 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1.877,87 | 2.706,16 | 2.733,22 | 2.760,55 | 2.788,15 | |
| 4578.EBD.U23 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat III | | Laporan | 24 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 874,00 | 5.097,76 | 5.148,74 | 5.200,22 | 5.252,23 | |
| 4578.EBD.U24 | Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat III | | Laporan | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 788,46 | 1.335,58 | 1.348,93 | 1.362,42 | 1.376,05 | |
| 4578.EBD.U28 | Laporan Hasil Audit pada satker lingkup mitra Inspektorat IV | | Laporan | 51 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2.205,51 | 2.763,16 | 2.790,79 | 2.818,69 | 2.846,88 | |
| 4578.EBD.U29 | Laporan Hasil Pemantauan/Pengawalan lingkup mitra Inspektorat IV | | Laporan | 24 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4.370,00 | 5.097,76 | 5.148,74 | 5.200,22 | 5.252,23 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4578.EBD.U30 | Laporan Hasil Evaluasi lingkup mitra Inspektorat IV | | Laporan | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 998,81 | 2.001,28 | 2.021,29 | 2.041,51 | 2.061,92 | |
| SK 2 | Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV | | | | | | | | | 4.005,56 | 3.172,31 | 3.204,03 | 3.236,07 | 3.268,43 | Inspektorat I/II/III/IV |
| IKK 2.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV | | % | 85 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 4.005,56 | 3.172,31 | 3.204,03 | 3.236,07 | 3.268,43 | |
| 4578.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 4578.EBD.U13 | Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat I | | Laporan | 12 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.394,80 | 693,65 | 700,59 | 707,59 | 714,67 | |
| 4578.EBD.U19 | Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat II | | Laporan | 12 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 929,87 | 605,11 | 611,16 | 617,27 | 623,45 | |
| 4578.EBD.U25 | Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat III | | Laporan | 18 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 751,02 | 542,34 | 547,76 | 553,24 | 558,77 | |
| 4578.EBD.U31 | Laporan Hasil Reviu lingkup mitra Inspektorat IV | | Laporan | 21 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 929,87 | 1.331,21 | 1.344,52 | 1.357,97 | 1.371,55 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV | | | | | | | | | 41.488,67 | 29.100,00 | 29.391,00 | 29.684,91 | 29.981,76 | |
| IKK 3.1 | Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV. | | Skala Likert | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | | | | | | |
| 4578.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | 41.488,67 | | | | | |
| 4578.EBD.015 | Layanan Audit Internal Inspektorat I | | Laporan | 12 | 11 | | | | | 20.617,74 | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4578.EBD.021 | Layanan Audit Internal Inspektorat II | | Laporan | 12 | 11 | | | | | 19.270,93 | | | | | |
| 4578.EBD.027 | Layanan Audit Internal Inspektorat III | | Laporan | 12 | 1 | | | | | 800,00 | | | | | |
| 4578.EBD.033 | Layanan Auditn Internal Inspektorat IV | | Laporan | 12 | 12 | | | | | 800,00 | | | | | |
| 4578.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | 29.100,00 | 29.391,00 | 29.684,91 | 29.981,76 | |
| 4578.AEA.015 | Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat I | | Kegiatan | RO Baru | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.262,81 | 8.345,44 | |
| 4578.AEA.021 | Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat II | | Kegiatan | RO Baru | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.140,70 | 7.212,11 | |
| 4578.AEA.027 | Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat III | | Kegiatan | RO Baru | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.140,70 | 7.212,11 | |
| 4578.AEA.033 | Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat IV | | Kegiatan | RO Baru | | 22 | 22 | 22 | 22 | | 7.000,00 | 7.070,00 | 7.140,70 | 7.212,11 | |
| SK 4 | Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu | | | | | | | | | 4.089,28 | 4.044,00 | 4.084,44 | 4.125,29 | 4.166,54 | Inspektorat Investigasi |
| IKK 4.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu | | % | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 4.089,28 | 4.044,00 | 4.084,44 | 4.125,29 | 4.166,54 | |
| 4578.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 4578.EBD.U34 | Laporan Hasil Pengawasan untuk Tujuan Tertentu | | Laporan | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4.089,28 | 4.044,00 | 4.084,44 | 4.125,29 | 4.166,54 | |
| SK 5 | Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 1.100,00 | 6.334,50 | 6.397,85 | 6.461,83 | 6.526,44 | Inspektorat Investigasi |
| IKK 2.1 | Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian | | Nilai | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
| IKK 2.2 | Indeks kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi. | | Skala Likert | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | | | | | | |
| 4578.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 4578.EBD.035 | Layanan Audit Internal Inspektorat Investigasi | | Laporan | 12,00 | 1,00 | | | | | 1.100,00 | | | | | |
| 4578.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 4578.AEA.035 | Koordinasi Pengawasan Internal Inspektorat Investigasi | | Laporan/ Kegiatan | RO Baru | | 18 | 18 | 18 | 18 | | 6.334,50 | 6.397,85 | 6.461,83 | 6.526,44 | |
| 1760 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal | | | | | | | | | | 44.472,51 | 50.338,45 | 50.310,20 | 49.178,50 | 50.761,78 | |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK | | | | | | | | | 873,04 | 2.077,95 | 2.119,93 | 2.161,82 | 2.204,70 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal | | % | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 873,04 | 2.077,95 | 2.119,93 | 2.161,82 | 2.204,70 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 1760.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1760.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 873,04 | 2.077,95 | 2.119,93 | 2.161,82 | 2.204,70 | |
| SK 2 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern | | | | | | | | | 2.852,56 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKK 2.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal | | % | 90 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 2.852,56 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 1760.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen/ Rekomendasi | 46 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2.852,56 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | |
| SK 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 2.760,10 | 2.049,83 | 2.080,67 | 2.112,12 | 2.144,21 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKK 3.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal | | Nilai | 95,07 | 95,07 | 95,12 | 95,17 | 95,22 | 95,27 | 2.760,10 | 2.049,83 | 2.080,67 | 2.112,12 | 2.144,21 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 1760.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.AEA.952 | Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran | | Kegiatan | RO Baru | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | 1.541,83 | 1.572,67 | 1.604,12 | 1.636,21 | |
| 1760.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 23 | 5 | | | | | 2.010,10 | - | - | - | - | |
| 1760.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |
| SK 4 | Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 3.600,00 | 3.511,44 | 2.910,60 | 3.205,56 | 3.213,88 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 4.1 | Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian | | Nilai | 3,00 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | 3.600,00 | 3.511,44 | 2.910,60 | 3.205,56 | 3.213,88 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 1760. | Kerja sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.AEC.001 | Kerja Sama Pengawasan | | Kesepakat an | RO Baru | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 399,84 | 408,00 | 416,16 | 424,48 | |
| 1760.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBA.Z08 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198,32 | 781,20 | 781,20 | 781,20 | 781,20 | |
| 1760.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBC.Z10 | Layanan Manajemen SDM | | Orang | RO Baru | 58 | 291 | 292 | 293 | 294 | 161,97 | 814,80 | 851,20 | 851,20 | 851,20 | |
| 1760.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | Orang | RO Baru | 480 | 240 | 120 | 180 | 180 | 3.000,00 | 1.318,20 | 672,80 | 959,60 | 959,60 | |
| 1760.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBD.Z31 | Layanan Reformasi Kinerja | | Layanan | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239,71 | 197,40 | 197,40 | 197,40 | 197,40 | |
| SK 5 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDItjen/Setba/SetItjen | | | | | | | | | 34.386,81 | 39.027,23 | 39.527,00 | 38.027,00 | 39.527,00 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| IKK 5.1 | Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal | | Skala Likert | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,28 | 3,29 | 34.386,81 | 39.027,23 | 41.027,23 | 38.027,23 | 39.527,23 | Sekretariat Inspektorat Jenderal |
| 1760.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.CAN.036 | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengawasan | | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4.775,10 | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - | |
| 1760.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBA.Z01 | Layanan Hukum | | Layanan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 1760.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| 1760.EBA.Z06 | Layanan BMN | | Layanan | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1760.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28.089,81 | 30.569,03 | 32.069,03 | 33.569,03 | 35.069,03 | |
| 1760.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 2 | 2 | 297 | 297 | 297 | 297 | 724,90 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 1760.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760.EBD.Z33 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | Layanan | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 120,20 | 120,20 | 120,20 | 120,20 | |
| 1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 128.107,02 | 106.811,27 | 144.407,45 | 149.080,74 | 154.793,21 | Setdirjen TP |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | 10.668,79 | 1.958,00 | 11.722,30 | 11.870,62 | 12.026,35 | |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP | | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94,00 | 1.912,78 | 1.450,00 | 2.966,30 | 3.114,61 | 3.270,34 | |
| 018.WA.1766.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Rekomendasi | 54 | 44 | 8 | 44 | 44 | 44,00 | 1.912,78 | 1.450,00 | 2.966,30 | 3.114,61 | 3.270,34 | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TP | | % | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89,00 | 8.756,01 | 508,00 | 8.756,01 | 8.756,01 | 8.756,01 | |
| 018.WA.1766.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Layanan | 68 | 84 | 1 | 84 | 84 | 84,00 | 8.756,01 | 508,00 | 8.756,01 | 8.756,01 | 8.756,01 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 14.826,18 | 13.331,65 | 21.816,33 | 22.721,92 | 23.672,72 | |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TP | | Nilai | 87,25 | 87,70 | 88,15 | 88,60 | 89,05 | 89,50 | 14.826,18 | 13.331,65 | 21.816,33 | 22.721,92 | 23.672,72 | |
| 018.WA.1766.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBD.Z23 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 67 | 35 | 17 | 17 | 17 | 17,00 | 10.900,41 | - | 18.112,11 | 19.017,70 | 19.968,50 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1766.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,00 | 3.925,77 | 13.331,65 | 3.704,22 | 3.704,22 | 3.704,22 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | | | | | | | | | 349,97 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| IKK 3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen TP | | Likert | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,68 | 3,70 | 3,72 | 349,97 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| 018.WA.1766.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 349,97 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal | | | | | | | | | 102.262,09 | 91.063,62 | 110.410,81 | 114.030,20 | 118.636,14 | |
| IKK 4.1 | Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen TP | | Likert | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,31 | 3,32 | 102.262,09 | 91.063,62 | 110.410,81 | 114.030,20 | 118.636,14 | |
| 018.WA.1766.ACD | Perizinan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.ACD.001 | Perizinan Lembaga Bidang Tanaman Pangan | | Badan Usaha | RO Baru | 3 | 4 | 4 | 5 | 5,00 | 449,69 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 018.WA.1766.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.AEC.001 | Pengelolaan Layanan Kerja Sama | | Kesepakatan | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4,00 | 500 | 2.674 | 750 | 750 | 750 | |
| 018.WA.1766.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBA.Z06 | Layanan BMN | | Layanan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 143 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| 018.WA.1766.EBA.Z01 | Layanan Hukum | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 588,61 | 648,80 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 018.WA.1766.EBA.Z08 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 178,40 | 135,41 | 178,40 | 178,40 | 178,40 | |
| 018.WA.1766.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | RO Baru | 34 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 11.681,73 | 800,00 | 11.681,73 | 11.681,73 | 11.681,73 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1766.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5,00 | 78.561,23 | 83.180,21 | 83.180,21 | 86.533,65 | 90.860,33 | |
| 018.WA.1766.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 329 | 125 | 3 | 128 | 128 | 128,00 | 5.921,41 | 185,23 | 5.921,41 | 5.921,41 | 5.921,41 | |
| 018.WA.1766.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | Unit | 14 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17,00 | 3.059,31 | 214,77 | 3.372,88 | 3.541,53 | 3.718,60 | |
| 018.WA.1766.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBC.Z13 | Layanan Manajemen SDM | | Orang | RO Baru | 562 | 642 | 562 | 562 | 562,00 | 1.158,36 | 1.075,00 | 1.946,19 | 2.043,50 | 2.145,67 | |
| 018.WA.1766.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.EBD.Z33 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | Layanan | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 20,07 | 120,20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 018.WA.1766.FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1766.FAB.001 | Sistem Informasi Tanaman Pangan | | Sistem Informasi | RO Baru | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 1774 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura | | | | | | | | | | 57.810,35 | 75.204,48 | 67.486,00 | 70.486,00 | 73.286,00 | Setditjen Hortikultura |
| SK.1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura | | % | 92,82 | 92,83 | 92,84 | 92,85 | 92,86 | 92,87 | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| 018.WA.1774.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | 10 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Hortikultura | | % | - | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | | | | | | Setditjen Hortikultura |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1774.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA.Z06 | Layanan BMN | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| SK.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Hortikultura | | Nilai | 92,40 | 92,50 | 92,60 | 92,70 | 92,80 | 92,90 | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| 018.WA.1774.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBD.Z23 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | 70 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| SK.3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| IKK 3.1 | indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Hortikultura | | skala likert | 3,45 | 3,57 | 3,58 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | | | | | | SetDitjen Hortikultura |
| 018.WA.1774.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.ABR.010 | Layanan Rekomendasi Hortikultura | | Rekomendasi Kebijakan | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA.Z01 | Layanan Hukum | | Layanan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| IKK 4.1 | - Indeks Kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen SetDItjen Hortikultura | | skala likert | 3,13 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | | | | | | Setditjen Hortikultura |
| 018.WA.1774.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1774.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 018.WA.1774.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1774.AEA.021 | Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan | | Kegiatan | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | | | | | | | | | | 108.999,40 | 127.716,38 | 128.216,38 | 128.216,38 | 128.216,38 | Ditjen Perkebunan |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawasan internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan | | % | - | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. Perkebunan | | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | |
| 1780.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | 2 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | | | | | | |
| 1780.EBD.Z25 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat | | Dokumen | 4 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | | |
| 1780.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBA.Z06 | - Layanan BMN | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1780.EBA.Z07 | - Layanan BMN UPT Pusat | | Layanan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen. Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen. Perkebunan | | Nilai | 89,70 | 88,00 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | 90,00 | | | | | | |
| 1780.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 89,00 | 11,00 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1780.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1780.EBD.Z27 | Layanan Manajemen Keuangan UPT Pusat | | Dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen. Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKK 3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Sekretariat Ditjen. Perkebunan | | Skala Likert (1-4) | Indikator Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| IKK 3.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya | | Skala Likert (1-4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| IKK 3.3 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon | | Skala Likert (1-4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| IKK 3.4 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan | | Skala Likert (1-4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 3.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak | | Skala Likert (1-4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 1780.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBA.Z01 | Layanan Hukum | | Layanan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 1780.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1780.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat DItjen Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen. Perkebunan dan atau UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKK 4.1 | Indeks kepuasan unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen. Perkebunan | | Skala Likert (1-4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 1780.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBA.Z08 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1780.EBA.994 | Layanan perkantoran | | Layanan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 1780.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 1780.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBD.Z33 | - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan | | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1780.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBC.Z13 | Layanan Manajemen SDM | | Orang | 840 | 759 | 991 | 991 | 991 | 991 | | | | | | |
| 1780.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 1780.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1780.EBB.952 | Layanan Prasarana Internal | | Unit | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | Satuan | Baseline | | | | | | 486.232,71 | 560.150,54 | 651.619,82 | 696.115,69 | 704.729,66 | Sekretariat Ditjen PKH |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | 2.129,83 | 3.262,41 | 3.563,37 | 3.564,18 | 3.764,21 | |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH | | % | 94,15 | 94,15 | 94,25 | 94,35 | 94,45 | 94,50 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKH | | % | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | dokumen | 126 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.129,83 | 2.927,74 | 2.969,48 | 2.969,48 | 2.969,48 | |
| 018.06.WA.1787.EBD.Z25 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Kantor Daerah | | dokumen | RO baru | - | 56 | 56 | 56 | 56 | | 334,67 | 593,89 | 594,71 | 794,73 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 13.704,85 | 1.859,00 | 2.643,22 | 4.365,28 | 5.575,22 | |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKH | | Nilai | 90,67 | 90,70 | 90,75 | 90,80 | 90,85 | 90,90 | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBD Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Layanan | 239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.078,71 | 400,00 | 450,00 | 460,00 | 470,00 | |
| 018.06.WA.1787.EBD Z27 | Layanan Manajemen Keuangan Kantor Daerah/Provinsi | | Layanan | RO baru | - | 61 | 61 | 61 | 61 | - | 1.159,00 | 1.564,33 | 2.876,39 | 3.876,33 | |
| 018.06.WA.1787.EBD 952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 396 | 13 | - | - | - | - | 6.138,64 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA 956 | Layanan BMN | | Layanan | 131 | 240 | - | - | - | - | 487,50 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA Z06 | Layanan BMN | | Layanan | RO baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 300,00 | 628,89 | 1.028,89 | 1.228,89 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen/Badan di lingkungan Kementerian Pertanian | | | | | | | | | 450.699,73 | 545.355,29 | 627.961,38 | 666.734,38 | 671.828,38 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 3.24 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen PKH | | Skala likert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA 957 | Layanan Hukum | | Layanan | 1 | 1 | - | - | - | - | 3.060,49 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA Z01 | Layanan Hukum | | Layanan | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 018.06.WA.1787.EBA 958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 5 | 1 | - | - | - | - | 133,21 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | RO baru | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | 276,16 | 471,86 | 321,86 | 521,86 | |
| 018.06.WA.1787.EBA 963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 3.239,50 | 3.340,09 | 3.647,35 | 6.757,35 | 6.875,35 | |
| 018.06.WA.1787.EBA 960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 23 | 1 | - | - | - | - | 950,00 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA Z08 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | RO baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 018.06.WA.1787.EBA 969 | Layanan Bantuan Hukum | | Layanan | 1 | 6 | - | - | - | - | 150,42 | - | - | - | - | |
| 018.06.WA.1787.EBA 994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 47 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 443.166,12 | 541.739,04 | 623.842,17 | 659.655,17 | 664.431,17 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH | | | | | | | | | 19.698,30 | 9.673,85 | 17.451,85 | 21.451,85 | 23.561,85 | |
| IKK 4.1 | Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PKH | | Skala likert | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3.45 | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBA 962 | Layanan Umum | | Layanan | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.921,76 | 8.673,85 | 13.405,29 | 14.405,29 | 15.515,29 | |
| 018.06.WA.1787.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBB 951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 14 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 018.06.WA.1787.EBC | Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBC 954 | Layanan Manajemen SDM | | Orang | RO baru | 1.823 | | | | | 2.276,55 | | | | | |
| 018.06.WA.1787.EBC Z13 | Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia | | Orang | RO baru | - | 125 | 3.040 | 3.133 | 3.236 | | 500,00 | 2.546,56 | 5.546,56 | 6.546,56 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1797 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | 138.382 | 70.737 | 183.344 | 186.834 | 190.484 | Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | % | 95,5 | 95,5 | 96 | 96 | 96,5 | 97 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | % | 91,6 | 91,6 | 92 | 92 | 92,5 | 93 | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBD | Layanan manajemen kinerja internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBD.Z24 | Layanan pemantauan dan evaluasi | | Dokumen | 0 | 0 | 48 | 49 | 50 | 52 | 0 | 6.230 | 7.865 | 7.905 | 8.040 | |
| 018.WA.1797.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Layanan | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | Nilai | 85,8 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBA | Layanan dukungan manajemen internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBA.994 | Layanan perkantoran | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41.306 | 41.792 | 48.379 | 48.979 | 49.228 | |
| 018.WA.1797.EBD | Layanan manajemen kinerja internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBD.Z26 | Layanan manajemen keuangan | | Dokumen | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 8.978 | 49.376 | 49.576 | 50.434 | |
| 018.WA.1797.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | Layanan | 94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.WA.1797.EBD.Z27 | Layanan manajemen keuangan daerah | | Dokumen | RO Baru | 0 | 73 | 75 | 77 | 79 | 0 | 5.598 | 6.581 | 6.981 | 7.028 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Jenderal PSP di lingkungan Kementerian Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 3.1 | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | Skala Likert (1-4) | 3,29 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | | | | | | |
| 018.WA.1797.FAB | Sistem informasi pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.FAB.001 | Sistem informasi prasarana dan sarana pertanian | | Layanan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 300 | 580 | 680 | 705 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen PSP | | | | | | | | | | | | | | Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian |
| IKK 4.1 | Tingkat kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian | | Skala Likert (1-4) | 3,34 | 3,34 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBA | Layanan dukungan manajemen internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBA.Z01 | Layanan hukum | | Layanan | | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 193 | 3.520 | 3.920 | 4.058 | |
| 018.WA.1797.EBA.957 | Layanan hukum | | Layanan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.WA.1797.EBA.Z02 | Layanan hubungan masyarakat dan informasi | | Layanan | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 458 | 4.026 | 4.126 | 4.295 | |
| 018.WA.1797.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.WA.1797.EBA.Z08 | Layanan organisasi dan tata kelola internal | | Layanan | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 699 | 7.186 | 7.386 | 7.625 | |
| 018.WA.1797.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.WA.1797.EBA.962 | Layanan umum | | Layanan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22.046 | 4.791 | 30.353 | 31.353 | 32.324 | |
| 018.WA.1797.EBA.963 | Layanan data dan informasi | | Layanan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.997 | 817 | 6.346 | 6.446 | 6.963 | |
| 018.WA.1797.EBA.Z06 | Layanan BMN | | Layanan | RO Baru | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 480 | 766 | 866 | 951 | |
| 018.WA.1797.EBB | Layanan sarana dan prasarana internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBB.951 | Layanan sarana internal | | Unit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.000 | 400 | 2.000 | 2.150 | 2.323 | |
| 018.WA.1797.EBD | Layanan manajemen kinerja internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1797.EBD.Z23 | Layanan perencanaan dan penganggaran | | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16.366 | 16.466 | 16.513 | |
| 018.WA.1797.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Layanan | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7924 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen LIP | | | Layanan | | 1 | | | | | 26.590,50 | 53.368,28 | 49.093,00 | 53.330,95 | 53.328,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal | | | | | | | | | 4.407,21 | 14.940,40 | 14.780,15 | 19.663,09 | 19.660,14 | |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP | | % | | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 1.069,78 | 3.940,40 | 3.780,15 | 3.663,09 | 3.660,14 | |
| 018.WA .03.7924.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 722,27 | 2.640,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 018.WA .03.7924.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 347,51 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 018.WA .03.7924.FAB | Sistem Informasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.FAB.999 | Sistem Informasi Lahan dan Irigasi Pertanian | | Sistem Informasi | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 100,40 | 180,15 | 63,09 | 60,14 | |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen LIP | | % | | 85,00 | 85,50 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 3.337,44 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 018.WA .03.7924.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 3.337,44 | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Ditjen LIP | | | | | | | | | 3.334,30 | 3.315,00 | 3.315,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen LIP | | Nilai | | 85,00 | 85,00 | 85,50 | 85,50 | 86,00 | 3.334,30 | 3.315,00 | 3.315,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| 018.WA .03.7924.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3.334,30 | 3.315,00 | 3.315,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| 018.WA .03.7924.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | - | - | 16.000,00 | - | 16.000,00 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP | | | | | | | | | 296,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| IKK 3.1 | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Ditjen LIP | | Skala Likert | | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 296,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA .03.7924.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 296,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP | | | | | | | | | 18.552,99 | 34.654,88 | 30.539,86 | 30.539,86 | 30.539,86 | |
| IKK 4.1 | Tingkat kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Ditjen LIP | | Skala Likert | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 18.552,99 | 34.654,88 | 30.539,86 | 30.539,86 | 30.539,86 | |
| 018.WA .03.7924.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 536,02 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | 874,25 | |
| 018.WA .03.7924.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7.323,67 | 1.600,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| 018.WA .03.7924.EBB.9xx | Layanan Prasarana Internal | | m2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 018.WA .03.7924.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA .03.7924.EBA.962 | Layanan Hukum | | Layanan | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 200,00 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | |
| 018.WA .03.7924.EBA.957 | Layanan Umum | | Layanan | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.832,94 | 8.298,64 | 5.363,62 | 5.363,62 | 5.363,62 | |
| 018.WA .03.7924.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6.660,35 | 23.689,49 | 23.689,49 | 23.689,49 | 23.689,49 | |
| 6918 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Pusat | | | | | | | | 735.488,64 | 760.935,21 | 966.779,64 | 1.015.119,37 | 1.065.877,29 | |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas internal dan eksternal | | | | | | | | | | | | | | SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen Biro/Pusat dibawah koordinasi Setjen |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | % | 85,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 | 4.313,44 | 6.502,11 | 16.377,00 | 17.196,00 | 18.056,00 | BRMP |
| IKK 1.2 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | % | 85,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 97,00 | | | | | | BRMP |
| 018.WA.09.6918.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | 27,00 | 64,00 | - | - | - | - | 4.313,44 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBD.Z24 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon I) | | Dokumen | 27,00 | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | - | 2.777,55 | 2.777,55 | 2.777,55 | 2.777,55 | |
| 018.WA.09.6918.EBD.Z25 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Eselon II ke bawah) | | Dokumen | 27,00 | - | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | - | 3.724,56 | 13.599,45 | 14.418,45 | 15.278,45 | |
| SK 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | SetDitjen/SetBadan/SetItjen/Biro/ Pusat dibawah koordinasi Setjen |
| IKK 2.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Nilai | 88,92 | 91,00 | 91,50 | 92,00 | 92,50 | 93,00 | 5.977,25 | 508,00 | 9.087,00 | 9.541,00 | 10.018,00 | BRMP |
| 018.WA.09.6918.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Dokumen | 25,00 | 5,00 | - | - | - | - | 4.427,25 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 1.550,00 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBD.Z26 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 508,00 | 9.087,00 | 9.541,00 | 10.018,00 | |
| SK 3 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Badan | | | | | | | | | | | | | | SetDitjen/ SetBadan |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| IKK 3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Nilai | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,69 | 3,74 | 3,78 | 94.793,51 | 25.450,47 | 31.174,48 | 32.734,05 | 34.371,35 | BRMP |
| 018.WA.09.6918.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.AEA.001 | Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian | | Kegiatan | 63,00 | 63,00 | - | - | - | - | 75.042,98 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 4,00 | 64,00 | - | - | - | - | 2.135,95 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBA.Z02 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon I) | | Layanan | 4,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.Z03 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Eselon II ke bawah) | | Layanan | 4,00 | - | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | - | 1.165,60 | 6.156,00 | 6.487,00 | 6.834,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | Layanan | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 998,36 | 1.039,00 | 1.091,48 | 1.146,05 | 1.203,35 | |
| 018.WA.09.6918.AEC | Kerja sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.AEC.502 | Layanan Kerjasama | | Kegiatan | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 16.616,22 | 22.787,87 | 23.469,00 | 24.643,00 | 25.876,00 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | SetDitjen/ SetBadan/ SetItjen |
| IKK 4.1 | Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat BRMP | | Nilai | Indikator Baru | 3,26 | 3,28 | 3,30 | 3,32 | 3,34 | 630.404,43 | 728.474,63 | 910.141,17 | 955.648,33 | 1.003.431,94 | BRMP |
| 018.WA.09.6918.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBA.956 | Layanan BMN | | Layanan | 15,00 | 64,00 | - | - | - | - | 1.110,00 | - | - | - | - | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.Z06 | Layanan BMN (Eselon I) | | Layanan | 15,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.Z07 | Layanan BMN (Eselon II ke bawah) | | Layanan | 15,00 | - | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | - | 628,00 | 744,00 | 805,00 | 869,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.957 | Layanan Hukum | | Layanan | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 321,49 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 310,50 | - | - | - | - | |
| 018.WA.09.6918.EBA.962 | Layanan Umum | | Layanan | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 16.477,75 | 61.513,07 | 60.199,17 | 63.208,33 | 66.368,94 | |
| 018.WA.09.6918.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | Layanan | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 605.980,63 | 657.735,02 | 755.129,00 | 792.885,00 | 832.530,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 64,00 | - | 212,00 | 223,00 | 234,00 | 246,00 | - | 3.540,18 | 29.390,00 | 30.860,00 | 32.403,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | Unit | 64,00 | - | - | 64,00 | 64,00 | 64,00 | - | - | 50.101,00 | 52.606,00 | 55.237,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBC.Z12 | Layanan Manajemen SDM | | Orang | 721,00 | 3.501,00 | 4.632,00 | 4.863,60 | 5.106,78 | 5.362,12 | 3.100,00 | 1.803,59 | 10.791,00 | 11.331,00 | 11.897,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | Orang | 57,00 | 26,00 | 490,00 | 515,00 | 541,00 | 568,00 | 2.500,00 | 2.577,37 | 2.756,00 | 2.894,00 | 3.039,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.09.6918.EBD.Z31 | Layanan Reformasi Kinerja | | Layanan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 429,06 | 197,40 | 551,00 | 579,00 | 608,00 | |
| 018.WA.09.6918.EBD.974 | Penyelenggaraan Kearsipan | | Layanan | RO Baru | 1,00 | - | - | - | - | 175,00 | - | - | - | - | |
| Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | | | | | | | | | | 303.688,924 | 3.310.859,797 | 3.866.553,010 | 4.235.848,511 | 4.667.956,018 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 1 | Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern | Pusat | | | | | | | | 1.912,54 | - | - | - | - | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 1.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP | | % | 90 | 90,00 | 90,40 | 90,60 | 90,80 | 91,00 | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | Dokumen | 21 | 15 | - | - | - | - | 1.912,54 | - | - | - | - | |
| SK 2 | Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK | Pusat | | | | | | | | 2.223,77 | - | - | - | - | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 2.1 | Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Badan PPSDMP | | % | 85,00 | 87,00 | 87,40 | 87,60 | 87,80 | 88,00 | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | Dokumen | 3 | 22 | - | - | - | - | 2.223,77 | - | - | - | - | |
| SK 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BPPSDMP | Pusat | | | | | | | | 10.144,2 2 | 8.542,04 | 9.396,01 | 10.335,5 1 | 11.369,4 0 | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 3.1 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Badan PPSDMP | | % | 94,09 | 90,00 | 90,25 | 90,50 | 90,75 | 91,00 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1813.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | Layanan | 7 | 10 | - | - | - | - | 10.144,22 | - | - | - | - | |
| 018.WA.1813.EBD.Z35 | Layanan Manajemen Kinerja | | Layanan | Ro baru | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8.542,04 | 9.396,01 | 10.335,51 | 11.369,40 | |
| SK 4 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Badan PPSDMP | Pusat | | | | | | | | 877,00 | 1.458,00 | 4.604,00 | 4.964,00 | 5.341,00 | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 4.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Badan PPSDMP | | Skala Likert (1-4) | Indikator baru | 3,60 | 3,61 | 3,62 | 3,63 | 3,64 | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAA | Pelayanan Publik kepada masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAA.003 | Layanan Publik BPPSDMP Kepada Masyarakat | | Layanan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 018.WA.1813.BAB | Pelayanan Publik kepada Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAB.002 | Layanan Publik BPPSDMP Kepada Lembaga | | Layanan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | |
| 018.WA.1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBA.957 | Layanan Hukum | | Layanan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 725,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.210,00 | 1.331,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1813.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | Layanan | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152,00 | 458,00 | 504,00 | 554,00 | 610,00 | |
| SK 5 | Meningkatnya kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP | Pusat | | | | | | | | 282.588,45 | 3.297.202,76 | 3.830.538,00 | 4.190.692,00 | 4.615.923,62 | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 5.1 | Indeks kepuasan unit eselon II dan UPT BPPSDMP terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Badan PPSDMP | | Skala Likert (1-4) | Indikator baru | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBA.962 | Layanan umum | | Layanan | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.678,00 | 3.236,00 | 3.228,00 | 3.601,00 | 3.732,00 | |
| 018.WA.1813.EBA.994 | Layanan perkantoran | | Layanan | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 259.580,00 | 3.274.276,76 | 3.797.205,00 | 4.153.875,00 | 4.574.914,62 | |
| 018.WA.1813.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | Unit | 3 | 127 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.621,06 | 300,00 | 2.330,00 | 3.363,00 | 4.399,00 | |
| 018.WA.1813.EBB.952 | Layanan Prasarana Internal | | Unit | Ro baru | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.049,90 | 432,00 | 3.475,00 | 4.523,00 | 5.575,00 | |
| 018.WA.1813.EBC | Layanan Manajemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1813.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | Orang | 325 | 1.275 | 170 | 170 | 170 | 170 | 15.659,49 | 13.000,00 | 15.800,00 | 16.030,00 | 17.803,00 | |
| 018.WA.1813.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | Ro baru | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5.958,00 | 8.500,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | |
| SK 6 | Terlaksananya Rencana Aksi RB oleh Badan PPSDMP | Pusat | | | | | | | | 748,74 | 1.000,00 | 2.100,00 | 2.210,00 | 2.331,00 | Sekretariat Badan PPSDMP |
| IKK 6.1 | Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB terhadap total Rencana Aksi RB sesuai kewenangan Badan PPSDMP | | % | Indikator baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | Layanan | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 748,74 | 1.000,00 | 2.100,00 | 2.210,00 | 2.331,00 | |
| SK 7 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian | UPT | | | | | | | | 4.005,20 | 1.771,00 | 12.648,00 | 17.759,00 | 19.470,00 | Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian |
| IKK 7.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan literasi pertanian | | Skala Likert (1-4) | Indikator baru | 3,56 | 3,58 | 3,60 | 3,62 | 3,66 | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | Ro baru | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 266,20 | - | 2.250,00 | 3.250,00 | 4.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.WA.1813.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEC.001 | Kerja sama di bidang perpustakaan dan literasi pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.360,00 | 3.866,00 | 4.112,00 | |
| 018.WA.1813.BAA | Pelayanan Publik kepada masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAA.001 | Layanan Publik BB Pustaka Kepada Masyarakat | | Orang | Ro baru | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 3.539,00 | 1.606,00 | 5.606,00 | 6.693,00 | 7.138,00 | |
| 018.WA.1813.BAB | Pelayanan Publik kepada lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAB.001 | Layanan Publik BB Pustaka Kepada Lembaga | | Layanan | Ro baru | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200,00 | 165,00 | 2.432,00 | 3.950,00 | 4.220,00 | |
| SK 8 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian | UPT | | Indikator baru | | | | | | 1.189,00 | 886,00 | 7.267,00 | 9.888,00 | 13.521,00 | Museum Tanah dan Pertanian |
| IKK 8.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan museum tanah dan pertanian | | Skala Likert (1-4) | Indikator baru | 3,56 | 3,58 | 3,60 | 3,62 | 3,66 | | | | | | |
| IKK 8.2 | Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan museum tanah yang dikelola | | Orang | Indikator baru | 12.200 | 10.000 | 25.000 | 27.000 | 30.000 | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAA | Pelayanan Publik kepada masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.BAA.002 | Layanan Publik Museum Tanah dan Pertanian Kepada Masyarakat | | Orang | Ro baru | 12.600 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 989,00 | 886,00 | 2.275,00 | 3.072,00 | 4.579,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 8.3 | Jumlah koleksi museum yang dikelola | | Unit | Indikator Baru | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | |
| IKK 8.4 | Jumlah koleksi museum yang dilindungi | | Unit | Indikator Baru | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | Ro baru | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 200,00 | - | 2.482,00 | 3.700,00 | 4.620,00 | |
| 018.WA.1813.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.WA.1813.AEC.002 | Kerja sama di bidang museum tanah dan pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.510,00 | 3.116,00 | 4.322,00 | |
| PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS | | | | | | | | | | 23.344.029,58 | 23.814.710,21 | 41.940.154,08 | 42.934.701,11 | 43.988.922,61 | |
| SP.1 | Terpenuhinya Produksi Komoditas Tanaman Pangan dalam negeri | | | | | | | | | | | | | | Ditjen TP (Akabi dan Serealia) |
| IKP 1.1 | Produksi Padi | | Juta Ton | 53,98 | 54,45 | 54,85 | 55,27 | 55,68 | 56,05 | | | | | | |
| IKP 1.2 | Produksi Jagung | | Juta Ton | 19,56 | 21,48 | 22,51 | 23,58 | 24,71 | 25,89 | | | | | | |
| IKP 1.3 | Produksi Aneka Kacang | | Ribu Ton | 516,11 | 540,28 | 552,84 | 565,70 | 578,86 | 592,32 | | | | | | |
| IKP 1.4 | Produksi Sorghum | | Ribu Ton | 17,34 | 18,21 | 18,40 | 18,58 | 18,77 | 18,95 | | | | | | |
| IKP 1.5 | Produksi Ubi jalar | | Ton | 1.430.341,00 | 1.517.449 | 1.562.972 | 1.609.861 | 1.658.157 | 1.707.902 | | | | | | |
| IKP 1.6 | Produksi Kedelai | | Ton | 349.099,00 | 370.359 | 381.470 | 392.914 | 404.701 | 416.842 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKP 1.7 | Produksi Ubi Kayu | | Ribu Ton | 16.764.227,00 | 17.270,93 | 17.529,99 | 17.792,94 | 18.059,83 | 18.330,73 | | | | | | |
| SP. 2 | Meningkatnya produksi komoditas TP prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Ditjen TP (Serealia) |
| IKP 2.1 | Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah | | Ton | Indikator Baru | 196.984 | 844.362 | 1.332.808 | 1.821.255 | 2.309.701 | | | | | | |
| IKP 2.2 | Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan | | Ton | Indikator Baru | 65.724 | 443.784 | 1.375.883 | 2.307.982 | 3.240.081 | | | | | | |
| IKP 2.3 | Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur | | Ton | Indikator Baru | 33.624 | 71.324 | 126.889 | 182.454 | 238.020 | | | | | | |
| IKP 2.4 | Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | | Ton | Indikator Baru | 49.100 | 60.687 | 81.260 | 117.177 | 181.038 | | | | | | |
| IKP 2.5 | Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua | | Ton | Indikator Baru | 1.310 | 3.847 | 6.535 | 9.382 | 12.393 | | | | | | |
| IKP 2.6 | Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan | | Ton | Indikator Baru | - | 964.000 | 2.121.000 | 3.168.000 | 3.719.000 | | | | | | |
| SP.3 | Terpenuhinya produksi hortikultura dalam negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 3.1 | Produksi Buah dan Sayur | | Juta Ton | 28,52 | 30,66 | 31,85 | 33,04 | 34,25 | 35,47 | | | | | | |
| IKP 3.2 | Produksi Tanaman obat | | Ton | 495.767,00 | 529.523,45 | 532.171,06 | 534.831,92 | 537.506,08 | 540.193,61 | | | | | | |
| IKP 3.3 | Produksi Florikultura | | Ribu Tangkai | 667.755,00 | 597.622,50 | 597.459,16 | 597.295,82 | 597.132,48 | 596.969,14 | | | | | | |
| SP.4 | Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Hortikultura |
| IKP 4.1 | Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara | | ton | 481,00 | 25.840 | 33.440 | 41.040 | 48.640 | 56.240 | | | | | | |
| SP.5 | Terpenuhinya produksi komoditas peternakan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen PKH |
| IKP 5.1 | Produksi Daging | | Juta Ton | 4,81 | 4,97 | 5,12 | 5,28 | 5,44 | 5,60 | | | | | | |
| IKP 5.2 | Produksi Telur | | Juta ton | 6,67 | 7,44 | 7,75 | 8,08 | 8,43 | 8,79 | | | | | | |
| IKP 5.3 | Produksi Susu | | ribu ton | 808,35 | 866,29 | 893,96 | 922,45 | 939,55 | 943,64 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SP.6 | Terjaminnya keamanan komoditas peternakan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen PKH |
| IKP 6.1 | Indeks Keamanan komoditas peternakan | | indeks | 0,488 | 0,613 | 0,634 | 0,656 | 0,678 | 0,695 | | | | | | |
| SP 7 | Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen PKH |
| IKP7.1 | Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan | | % | 80,00 | 80,00 | 80,30 | 80,60 | 85,00 | 90,00 | | | | | | |
| SP 8 | Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia | | | | | | | | | | | | | | Ditjen PKH |
| IKP 8.1 | Persentase wilayah yang terkendali dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia | | % | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | | | | | | |
| SP 9 | Terkendalinya risiko usaha pertanian | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal PSP |
| IKP 9.1 | Persentase pengendalian risiko usaha pertanian | | % | Indikator Baru | 5,50 | 5,67 | 6,08 | 6,49 | 6,90 | | | | | | |
| SP 10 | Menurunnya susut pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal PSP |
| IKP 10.1 | Persentase penurunan susut pangan | | % | Indikator Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| SP 11 | Meningkatnya pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan kebutuhan produksi | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal PSP |
| IKP 11.1 | Indeks pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian terhadap kebutuhan produksi | | Indeks (0-10) | Indikator Baru | 9,1 | 9,14 | 9,2 | 9,24 | 9,3 | | | | | | |
| SP 12 | Meningkatnya pemanfaatan PSP dalam mendukung lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Jenderal PSP |
| IKP 12.1 | Indeks pemanfaatan PSP yang mendukung lumbung pangan | | Indeks (0-10) | Indikator Baru | 9,1 | 9,14 | 9,2 | 9,24 | 9,3 | | | | | | |
| SP 13 | Meningkatnya indeks pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas dalam mendukung tercapainya swasembada pangan | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKP 13.1 | Rata-rata indeks pertanaman untuk komoditas pertanian prioritas | | Nilai | Indikator Baru | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,68 | - | - | - | - | - | Ditjen LIP |
| SP. 14 | Meningkatnya pemenuhan lahan dan air berdasarkan kebutuhan produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | Ditjen LIP |
| IKP 14.1 | Persentase pemenuhan lahan dan air terhadap kebutuhan produksi | | % | Indikator Baru | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | - | Ditjen LIP |
| SP. 15 | Meningkatnya ketersediaan lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen LIP |
| IKP 15.1 | Persentase peningkatan ketersediaan lumbung pangan terhadap kebutuhan produksi KSPP | | % | Indikator Baru | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | |
| SP 16 | Terwujudnya pelestarian sumber daya genetik pertanian | | | | | | | | | | | | | | BRMP |
| IKP 16.1 | Indeks pelestarian sumber daya genetik pertanian | | Nilai | Indikator Baru | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| SP 17 | Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian | | | | | | | | | | | | | | BRMP |
| IKP 17.1 | Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (%) | | % | Indikator Baru | 8,77 | 15,62 | 17,81 | 27,95 | 30,00 | | | | | | |
| 1761 Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 9.463,53 | 125.300,31 | 181.350,31 | 251.176,56 | 321.887,81 | |
| SK 1 | Terpenuhinya produktivitas komoditas aneka kacang dan umbi prioritas | | | | | | | | | 3.293,38 | 7.569,33 | 3.499,50 | 3.499,50 | 3.499,50 | Dit Akabi |
| IKK.1.1 | Produktivitas Ubi Kayu | | Ton/ha | 27,11 | 27,81 | 28,25 | 28,69 | 29,12 | 29,56 | 3.293,38 | 7.569,33 | 3.499,50 | 3.499,50 | 3.499,50 | |
| 018.HA.1761.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1761.AEA.619 | Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Aneka Kacang dan Umbi | | Kegiatan | 1,00 | 11,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 3.193,55 | 7.170,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 018.HA.1761.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1761.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Aneka Kacang dan Umbi | | NSPK | RO Baru | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 99,83 | 399,33 | 299,50 | 299,50 | 299,50 | |
| SK 2 | Terpenuhinya luas panen komoditas aneka kacang dan umbi prioritas | | | | | | | | | 6.170,15 | 117.730,98 | 177.850,81 | 247.677,06 | 318.388,31 | Dit Akabi |
| IKK 2.1 | Luas Panen Kedelai | | Hektar | 137.049 | 228.928 | 234.891 | 241.314 | 248.461 | 255.990 | 153,95 | 78.416,80 | 111.350,00 | 121.350,00 | 121.350,00 | |
| IKK 2.2 | Luas Panen Ubi Kayu | | Hektar | 565.593 | 588.719 | 592.235 | 595.771 | 599.329 | 602.907 | - | 4.766,90 | 40.075,00 | 73.325,00 | 110.075,00 | |
| IKK 2.3 | Luas Panen Ubi Jalar | | Hektar | 63.712 | 66.484 | 67.069 | 67.659 | 68.254 | 68.855 | - | 10.909,72 | 10.150,81 | 29.785,81 | 47.550,81 | |
| IKK 2.4 | Luas Panen Aneka Kacang | | Hektar | 346.381 | 403.234 | 409.500 | 415.865 | 422.331 | 428.900 | - | 10.041,74 | 10.150,00 | 17.091,25 | 33.287,50 | |
| IKK 2.5 | Luas Panen Talas Beneng | | Hektar | 474 | 574 | - | - | - | - | 1.437,00 | - | - | - | - | |
| 018.HA.1761.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1761.RAI.611 | Kawasan Kedelai | | Hektar | RO Baru | 115 | 75.000 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 153,95 | 78.416,80 | 111.350,00 | 121.350,00 | 121.350,00 | |
| 018.HA.1761.RAI.613 | Kawasan Ubi Jalar | | Hektar | RO Baru | - | 2.778 | 2.778 | 8.028 | 12.778 | - | 10.909,72 | 10.150,81 | 29.785,81 | 47.550,81 | |
| 018.HA.1761.RAI.612 | Kawasan Ubi Kayu | | Hektar | RO Baru | - | 1.429 | 11.429 | 20.929 | 31.429 | - | 11.952,00 | 40.075,00 | 73.325,00 | 110.075,00 | |
| 018.HA.1761.RAI.614 | Kawasan Kacang Tanah | | Hektar | RO Baru | - | 1.302 | 1.302 | 2.802 | 6.302 | - | 4.766,90 | 5.075,00 | 10.835,00 | 24.275,00 | |
| 018.HA.1761.RAI.615 | Kawasan Kacang Hijau | | Hektar | RO Baru | - | 6.349 | 6.349 | 7.849 | 11.349 | - | 5.274,84 | 5.075,00 | 6.256,25 | 9.012,50 | |
| 018.HA.1761.RAI.616 | Kawasan Aneka Umbi Lainya | | Hektar | RO Baru | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1761.CAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1761.CAI.620 | Kawasan Talas Beneng | | Hektar | RO Baru | 100 | - | - | - | - | 1.437,00 | - | - | - | - | |
| 018.HA.1761.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1761.QDD.001 | Pekarangan Ubi Jalar | | Klp. Masyarakat | RO Baru | 1.500 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 4.579,20 | 6.410,72 | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | |
| 1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 2.145.097,04 | 2.587.082,93 | 2.556.882,73 | 2.802.129,10 | 2.750.544,22 | |
| SK 1 | Terwujudnya komoditas serealia yang terfortifikasi | | | | | | | | | 21.000,00 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | Dit Serealia |
| IKK 1.1 | Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi | | komoditas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.000,00 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | |
| 018.HA.1762.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.RAI.625 | Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) | | Hektar | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 21.000,00 | 43.260,00 | 43.260,00 | 43.260,00 | 43.260,00 | |
| 018.HA.1762.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.AFA.629 | Peraturan/Norma/Pedoman Padi Kaya Gizi (Biofotifikasi) | | NSPK | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 95,86 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | |
| SK 2 | Terpenuhinya luas panen komoditas serealia prioritas | | | | | | | | | 2.124.056,27 | 2.543.436,51 | 2.327.751,22 | 2.532.464,01 | 2.436.100,95 | Dit Serealia |
| IKK 2.1 | Luas Panen Padi | | Hektar | 10.046.136 | 10.270.117 | 10.289.066 | 10.377.700 | 10.474.611 | 10.555.687 | 867.713,13 | 1.587.856,00 | 1.410.523,68 | 1.518.856,00 | 1.449.856,00 | |
| IKK 2.2 | Luas Panen Jagung | | Hektar | 2.548.654 | 2.644.228 | 2.743.387 | 2.846.264 | 2.952.999 | 3.063.736 | 640.002,76 | 909.000,00 | 827.100,00 | 922.878,18 | 894.676,29 | |
| IKK 2.3 | Luas Panen Sorgum | | Hektar | 6.936 | 7.049 | 7.162 | 7.274 | 7.387 | 7.500 | 102,50 | 1.262,50 | 2.387,50 | 3.012,50 | 3.762,50 | |
| 018.HA.1762.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.RAI.621 | Kawasan Padi | | Hektar | 862.290 | 1.550.000 | 2.600.000 | 2.177.780 | 2.435.714 | 2.271.428 | 867.713,13 | 1.587.856,00 | 1.410.523,68 | 1.518.856,00 | 1.449.856,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1762.RAI.622 | Kawasan Jagung | | Hektar | 255.600 | 300.000 | 1.000.000 | 909.000 | 1.015.420 | 984.084 | 640.002,76 | 909.000,00 | 827.100,00 | 922.878,18 | 894.676,29 | |
| 018.HA.1762.RAI.626 | Kawasan Sorgum | | Hektar | RO Baru | 500 | 5.000 | 9.500 | 12.000 | 15.000 | 102,50 | 1.262,50 | 2.387,50 | 3.012,50 | 3.762,50 | |
| 018.HA.1762.RAI.628 | Kawasan Gandum | | Hektar | RO Baru | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | 32.190,49 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 018.HA.1762.RAI.627 | Kawasan Padi (QW) | | Hektar | RO Baru | 1.076.000 | - | - | - | - | 601.572,00 | - | - | - | - | |
| 018.HA.1762.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.AEA.624 | Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan | | Kegiatan | 42 | 93 | 60 | 60 | 60 | 60 | 14.665,88 | 13.127,52 | 12.740,04 | 12.717,33 | 12.806,16 | |
| SK 3 | Tercapainya luas panen komoditas serealia prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian | | | | | | | | | 40,77 | 290,57 | 185.775,66 | 226.309,24 | 271.087,42 | |
| IKK 3.1 | Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah | | Hektar | Indikator Baru | 146.806 | 590.872 | 941.637 | 1.292.402 | 1.643.167 | - | - | 17.499,68 | 26.303,13 | 36.100,00 | |
| IKK 3.2 | Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan | | Hektar | Indikator Baru | 28.568 | 309.179 | 1.072.532 | 1.835.886 | 2.599.240 | - | - | 25.690,78 | 40.552,29 | 57.104,70 | |
| IKK 3.3 | Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur | | Hektar | Indikator Baru | 10.930 | 38.435 | 86.660 | 134.886 | 183.111 | - | - | 1.897,04 | 2.903,03 | 4.022,91 | |
| IKK 3.4 | Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | | Hektar | Indikator Baru | 9.048 | 10.857 | 14.114 | 19.760 | 29.640 | - | - | 119.678,03 | 124.277,28 | 129.076,54 | |
| IKK 3.5 | Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua | | Hektar | Indikator Baru | 189 | 539 | 889 | 1.239 | 1.589 | - | - | 2.144,19 | 2.448,10 | 2.750,16 | |
| IKK 3.6 | Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan | | Hektar | Indikator Baru | - | 665.000 | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | - | - | 18.575,36 | 29.534,83 | 41.742,56 | |
| 018.HA.1762.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.RAI.629 | Kawasan Padi KSPP Kalimantan Tengah | | Hektar | RO Baru | 152.068 | 539.565 | 927.063 | 1.314.561 | 1.702.058 | - | - | 17.499,68 | 26.303,13 | 36.100,00 | |
| 018.HA.1762.RAI.630 | Kawasan Padi KSPP Sumatera Selatan | | Hektar | RO Baru | 29.592 | 695.293 | 1.360.994 | 2.026.696 | 2.692.397 | - | - | 25.690,78 | 40.552,29 | 57.104,70 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1762.RAI.631 | Kawasan Padi KSPP Nusa Tenggara Timur | | Hektar | RO Baru | 11.322 | 55.910 | 100.498 | 145.086 | 189.674 | - | - | 1.897,04 | 2.903,03 | 4.022,91 | |
| 018.HA.1762.RAI.632 | Kawasan jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | | Hektar | RO Baru | 122.088 | 127.421 | 132.753 | 138.086 | 143.418 | - | - | 119.678,03 | 124.277,28 | 129.076,54 | |
| 018.HA.1762.RAI.633 | Kawasan jagung KSPP Papua | | Hektar | RO Baru | 1.222 | 1.688 | 2.382 | 2.720 | 3.056 | - | - | 2.144,19 | 2.448,10 | 2.750,16 | |
| 018.HA.1762.RAI.634 | Kawasan Padi KSPP Papua Selatan | | Hektar | RO Baru | - | 492.024 | 984.048 | 1.476.072 | 1.968.096 | - | - | 18.575,36 | 29.534,83 | 41.742,56 | |
| 018.HA.1762.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1762.AFA.627 | Peraturan/Norma/Pedoman Padi | | NSPK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,99 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | |
| 018.HA.1762.AFA.628 | Peraturan/Norma/Pedoman Jagung | | NSPK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21,79 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | |
| 018.HA.1762.AFA.630 | Peraturan/Norma/Pedoman Serealia Lain | | NSPK | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 96,86 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | |
| 4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 29.910,97 | 37.905,98 | 33.997,04 | 33.997,04 | 33.997,04 | |
| SK 1 | Tersedianya benih TP berdasarkan kebutuhan produksi TP | | | | | | | | | 27.910,97 | 35.365,98 | 31.457,04 | 31.457,04 | 31.457,04 | Dit Perbenihan TP |
| IKK 1.1 | Persentase ketersediaan benih TP terhadap kebutuhan produksi TP | | % | 80,81 | 84,59 | 85,71 | 86,82 | 87,94 | 89,05 | 7.249,94 | 10.823,27 | 9.254,10 | 9.254,10 | 9.254,10 | |
| 018.HA.4579.PDC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.PDC.001 | Sertifikasi benih padi | | Produk | 31.658 | 30.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 7.249,94 | 7.763,27 | 6.194,10 | 6.194,10 | 6.194,10 | |
| 018.HA.4579.PDC.002 | Sertifikasi benih Jagung | | Produk | 10.187 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.HA.4579.PDC.003 | Sertifikasi benih kedelai | | Produk | RO Baru | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 018.HA.4579.PDC.004 | Sertifikasi benih aneka umbi | | Produk | RO Baru | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 018.HA.4579.PDC.005 | Sertifikasi benih aneka kacang | | Produk | RO Baru | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.HA.4579.PDC.006 | Sertifikasi benih serealia lainnya | | Produk | RO Baru | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.2 | Persentase Wilayah mandiri benih insitu terhadap total Wilayah tanaman pangan | | % | 10,53 | 13,16 | 15,79 | 18,42 | 21,05 | 23,68 | 6.667,50 | 12.420,88 | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | |
| 018.HA.4579.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.RAG.011 | Pengembangan Produsen Benih Tanaman Pangan | | unit | RO Baru | 95 | 162 | 162 | 162 | 162 | 6.667,50 | 12.420,88 | 10.330,00 | 10.330,00 | 10.330,00 | |
| 018.HA.4579.QKB | Pemantauan produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.QKB.001 | Peredaran Benih Tanaman Pangan yang diawasi | | Laporan | 32 | 1.890 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 11.509,84 | 9.750,13 | 9.750,13 | 9.750,13 | 9.750,13 | |
| 018.HA.4579.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.AEA.001 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan | | kegiatan | 35 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2.163,05 | 1.974,64 | 1.725,75 | 1.725,75 | 1.725,75 | |
| 018.HA.4579.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.AFA.001 | Peraturan/Norma/Pedoman Sistem Perbenihan Tanaman Pangan | | NSPK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320,65 | 397,06 | 397,06 | 397,06 | 397,06 | |
| SK 2 | Terwujudnya metode Pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | BB PPMB TPH |
| IKK 2.1 | Persentase metode pengujian mutu benih TP dan hortikultura yang diterapkan | | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| 018.HA.4579.SDB | Penelitian dan Pengembangan Purwarupa | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4579.SDB.004 | Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih | | Purwarupa | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| 4580 Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 26.867,52 | 50.514,20 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SK 1 | Terlindunginya komoditas pertanian tanaman pangan dari OPT dan dampak perubahan iklim | | | | | | | | | 21.498,92 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | Dit Perlindungan TP |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.1 | Persentase area/ wilayah tanaman pangan yang terkendali terhadap luas area/wilayah tanaman pangan yang terserang OPT dan DPI | | % | 87,95 | 88,19 | 88,44 | 88,68 | 88,93 | 89,18 | 21.498,92 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| 018.HA.4580.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.RAI.001 | Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan | | Hektar | 50.000 | 7.787 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 17.256,52 | 32.878,70 | 33.878,70 | 33.878,70 | 33.878,70 | |
| 018.HA.4580.RAI.002 | Areal Penanganan DPI | | Hektar | 25.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.200,00 | 3.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | |
| 018.HA.4580.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.AEA.001 | Koordinasi Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan | | kegiatan | 14 | 18 | 53 | 53 | 53 | 53 | 2.848,69 | 8.223,88 | 8.223,88 | 8.223,88 | 8.223,88 | |
| 018.HA.4580.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan | | NSPK | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 193,71 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | 387,42 | |
| SK 2 | Terwujudnya Layanan pengujian mutu produk tanaman | | | | | | | | | 2.368,60 | 3.014,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | BPMPT |
| IKK 2.1 | Jumlah layanan pengujian mutu produk tanaman | | Layanan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.368,60 | 3.014,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 018.HA.4580.QJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.QJA.001 | Layanan Pengujian Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida | | Produk | 2.200 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.368,60 | 3.014,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SK 3 | Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil peramalan OPT | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | BB Peramalan OPT (TP) |
| IKK 3.1 | Persentase informasi hasil peramalan OPT yang dimanfaatkan | | % | 32 | 32 | 56 | 74 | 88 | 100 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 018.HA.4580.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.BMA.001 | Informasi Peramalan OPT | | Layanan | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.4580.SDB | Penelitian dan Pengembangan Purwarupa | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4580.SDB.001 | Model Pertanian Modern | | Purwarupa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura | | | | | | | | | | 500,00 | 55.400,00 | 86.730,00 | 98.730,00 | 121.230,00 | |
| SK 1 | Terpenuhinya luas panen komoditas buah dan florikultura prioritas | | | | | | | | | 500,00 | 55.400,00 | 86.730,00 | 98.730,00 | 121.230,00 | Dit Buah dan Florikultura |
| IKK 1.1 | Rata-rata luas panen komoditas buah prioritas | | Ha | 77.349 | 80.104 | 80.793 | 81.097 | 81.846 | 82.683 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Rata-rata luas panen florikultura prioritas | | m2 | 2.907.143 | 2.936.214 | 2.965.576 | 2.995.233 | 3.025.185 | 3.055.437 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.012 | Kawasan Durian | | Ha | 300 | - | 4.510 | 5.500 | 6.000 | 7.000 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.013 | Kawasan Mangga | | Ha | 428 | - | 200 | 200 | 300 | 1.000 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.014 | Kawasan Kelengkeng | | Ha | 300 | - | - | 100 | 300 | 500 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.015 | Kawasan Alpukat | | Ha | 330 | - | - | 100 | 300 | 1.000 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.016 | Kawasan Manggis | | Ha | 240 | - | - | 100 | 300 | 500 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.017 | Kawasan Buah Terna | | Ha | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.018 | Kawasan Buah Merambat | | Ha | - | - | 1 | 50 | 50 | 100 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.020 | Kawasan Buah Perdu | | Ha | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| 018.HA.5886.RAI.019 | Kawasan Florikultura | | m2 | - | - | - | 72.400 | 72.400 | 72.400 | | | | | | |
| 018.HA.5886.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.5886.AEA.021 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Buah dan Florikultura | | Kegiatan | 20 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 1773 Pelindungan Hortikultura | | | | | | | | | | 954,00 | 14.360,00 | 45.132,00 | 50.110,00 | 68.110,00 | |
| SK 1 | Terlindunginya komoditas pertanian hortikultura dari OPT dan dampak perubahan iklim | | | | | | | | | 954,00 | 14.360,00 | 45.132,00 | 50.110,00 | 68.110,00 | Dit Pelindungan Hortikultura |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.1 | Persentase area/ wilayah hortikultura yang terkendali terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terserang OPT | | % | 99,69 | 99,70 | 99,71 | 99.72 | 99.73 | 99.74 | | | | | | |
| 018.HA.1773.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1773.RAI.010 | Area pengendalian OPT Hortikultura | | Ha | 2.500 | 40 | 3.000 | 4.417 | 6.500 | 12.000 | | | | | | |
| 018.HA.1773.RAI.014 | Sarana Perlindungan Hortikultura | | unit | 50 | - | 56 | 100 | 100 | 200 | | | | | | |
| 018.HA.1773.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1773.QDD.010 | Kelompok Tani terlatih PHT | | Kelompok masyarakat | - | - | - | 80 | 80 | 100 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase area/ wilayah hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area/wilayah hortikultura yang terkena DPI | | % | 93,05 | 93,06 | 93,07 | 93,08 | 93,09 | 93,10 | | | | | | |
| 018.HA.1773.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1773.RAI.013 | Area penanganan DPI Hortikultura | | Ha | 200 | - | 32 | 140 | 140 | 200 | | | | | | |
| 018.HA.1773.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1773.AEA.013 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pelindungan Hortikultura | | kegiatan | 24 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 4581 Perbenihan Hortikultura | | | | | | | | | | 18.167,37 | 92.445,00 | 256.050,00 | 343.600,00 | 396.600,00 | |
| SK 1 | Tersedianya benih hortikultura berdasarkan kebutuhan produksi hortikultura | | | | | | | | | 18.167,37 | 92.445,00 | 256.050,00 | 343.600,00 | 396.600,00 | Dit Perbenihan Hortikultura |
| IKK 1.1 | Persentase ketersediaan benih hortikultura terhadap kebutuhan produksi hortikultura | | % | - | 39,80 | 40,10 | 40,42 | 40,76 | 41,10 | | | | | | |
| 018.HA.4581.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4581.RAI.010 | Benih Sebar Umbi/Rimpang Hortikultura | | Ha | 218 | 460 | 1.000 | 2.000 | 2.700 | 2.800 | | | | | | |
| 018.HA.4581.RAI.011 | Benih Sebar Batang Hortikultura | | batang | - | - | 482.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.4581.PDC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4581.PDC.021 | Sertifikat Tanda Daftar Varietas Hortikultura | | produk | - | - | 33 | 35 | 35 | 38 | | | | | | |
| 018.HA.4581.QKB | Pemantauan produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4581.QKB.011 | Peredaran benih hortikultura yang diawasi | | laporan | - | - | 100 | 100 | 100 | 200 | | | | | | |
| 018.HA.4581.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.4581.AEA.020 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perbenihan Hortikultura | | Kegiatan | 24 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat | | | | | | | | | | 185.550,30 | 73.709,00 | 427.200,00 | 459.200,00 | 497.200,00 | |
| SK 1 | Terpenuhinya luas panen komoditas sayuran dan tanaman obat prioritas | | | | | | | | | 185.550,30 | 73.709,00 | 377.200,00 | 384.200,00 | 397.200,00 | Dit Sayuran dan Tanaman Obat |
| IKK 1.1 | Rata-rata luas panen komoditas sayuran prioritas | | Ha | 90.592 | 93.383 | 94.142 | 94.901 | 95.627 | 96.377 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Rata-rata luas panen komoditas tanaman obat prioritas | | Ha | 7.021 | 7.031 | 7.056 | 7.091 | 7.126 | 7.162 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.010 | Kawasan Bawang Merah | | Ha | 6.210 | - | 250 | 6.800 | 6.800 | 7.000 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.011 | Kawasan Aneka Cabai | | Ha | 3.000 | 40 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.500 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.012 | Kawasan Bawang Putih | | Ha | 76 | 20 | 300 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.013 | Kawasan Tanaman Obat | | Ha | 100 | - | - | 100 | 100 | 1.000 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.XXX | Kawasan Sayuran Umbi | | Ha | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.xxx | Kawasan Sayuran Buah | | Ha | - | - | - | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 018.HA.1771.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1771.QDD.011 | Pekarangan Hortikultura | | Kelompok Masyarakat | - | 13.500 | 700 | 13.500 | 13.500 | 20.000 | | | | | | |
| 018.HA.1771.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1771.AEA.020 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Sayuran dan Tanaman Obat | | Kegiatan | 24 | 38 | - | 38 | 38 | 38 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.1771.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.1771.RBK.xxx | Prasarana Budidaya Sayuran | | Unit | - | - | - | - | 10,00 | 25,00 | | | | | | |
| SK 2 | Tercapainya luas panen komoditas hortikultura prioritas pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian | | | | | | | | | - | - | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | Dit Sayuran dan Tanaman Obat |
| IKK 2.1 | Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara | | Ha | 16.02 | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1771.RAI.XXX | Kawasan Hortikultura KSPP | | Ha | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.250 | | | | | | |
| 1783 Peningkatan Produksi Pakan Ternak | | | | Baseline | | | | | | 5.929,21 | 14.620,34 | 1.043.739,60 | 1.048.860,88 | 1.072.143,72 | Direktorat Pakan |
| SK.1 | Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak yang bermutu dan aman untuk produksi daging, telur dan susu | | | | | | | | | 1.294,71 | 3.047,34 | 835.189,60 | 844.255,88 | 822.283,72 | |
| IKK1.1 | Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi daging | Pusat | % | 93,45 | 93,94 | 94,29 | 94,64 | 95,01 | 95,34 | 1.294,71 | 3.047,34 | 373.900,00 | 400.340,00 | 359.118,51 | |
| IKK1.2 | Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi telur | Pusat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| IKK1.3 | Persentase pemenuhan pakan ternak terhadap kebutuhan populasi ternak untuk produksi susu | Pusat | % | 85,26 | 85,43 | 86,60 | 87,90 | 88,50 | 89,94 | - | - | 446.372,99 | 427.995,88 | 445.415,00 | |
| IKK1.4 | Persentase pakan ternak yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan terhadap total pakan ternak untuk produksi daging, telur dan susu | Pusat | % | 86.21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 12.316,61 | 13.320,00 | 15.150,21 | |
| 018.06.HA.1783.QEG | Bantuan Peralatan/Sarana | | | | | | | | | - | - | 708.472,99 | 753.599,68 | 713.718,51 | |
| 018.06.HA.1783.QEG.001 | Bantuan Hijauan Pakan Ternak | | Ha | RO baru | - | - | 760 | 800 | 975 | - | - | 690.972,99 | 745.059,68 | 703.043,51 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1783.QEG.002 | Bantuan pakan olahan/bahan pakan | | Ton | RO baru | - | - | 2.500 | 1.220 | 2.525 | - | - | 17.500,00 | 8.540,00 | 10.675,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan | | | | | | | | | - | - | 88.900,00 | 55.000,00 | 60.250,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG.003 | Hijauan Pakan Ternak | | unit | RO baru | - | - | 15 | 15 | 10 | - | - | 43.900,00 | 27.500,00 | 29.900,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG.004 | Pakan Olahan dan Bahan Pakan | | unit | RO baru | - | - | 15 | 10 | 10 | - | - | 42.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG.005 | Sarana penjaminan mutu dan keamanan pakan | | Unit | RO baru | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.850,00 | |
| 018.06.HA.1783.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | 1.119,01 | 2.647,34 | 13.940,00 | 14.770,00 | 15.600,00 | |
| 018.06.HA.1783.AEA.001 | Koordinasi pakan | | kegiatan | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.119,01 | 2.647,34 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 018.06.HA.1783.AEA.002 | Koordinasi penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan | | kegiatan | RO baru | - | 2 | 21 | 21 | 21 | - | - | 11.540,00 | 12.370,00 | 13.200,00 | |
| 018.06.HA.1783.AFA | Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | 175,70 | 400,00 | 1.727,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | |
| 018.06.HA.1783.AFA.001 | NSPK pakan | | NSPK | 4 | 4 | - | - | - | - | 175,70 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1783.AFA.002 | NSPK bidang pakan/bahan pakan | | NSPK | RO baru | - | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 018.06.HA.1783.AFA.003 | NSPK penjaminan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan | | NSPK | RO baru | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 227,00 | 400,00 | 600,00 | |
| 018.06.HA.1783.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | - | - | 21.900,00 | 18.736,20 | 30.365,00 | |
| 018.06.HA.1783.QDC.001 | Fasilitasi dan pembinaan produsen pakan/bahan pakan | | produsen | RO baru | - | - | 125 | 125 | 145 | - | - | 18.900,00 | 15.736,20 | 26.915,00 | |
| 018.06.HA.1783.QDC.002 | Fasilitasi dan pembinaan penjaminan mutu dan keamanan pakan | | Produsen | RO baru | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.450,00 | |
| 018.06.HA.1783.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | - | - | 249,61 | 250,00 | 250,21 | |
| 018.06.HA.1783.ABR.002 | Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan | | Rekomendasi | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 249,61 | 250,00 | 250,21 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.2 | Terpenuhinya bahan pakan sumber energi dalam negeri berdasarkan kebutuhan bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur | | | | | | | | | - | - | 1.550,00 | 1.605,00 | 1.860,00 | |
| IKK.2.1 | Persentase bahan pakan sumber energi dalam negeri terhadap total bahan pakan untuk produksi Daging dan Telur | | % | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | - | - | 1.550,00 | 1.605,00 | 1.860,00 | |
| 018.06.HA.1783.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | - | - | 500,00 | 500,00 | 700,00 | |
| 018.06.HA.1783.AEA.003 | Koordinasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri | | Kegiatan | RO baru | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 500,00 | 500,00 | 700,00 | |
| 018.06.HA.1783.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.06.HA.1783.ABR.001 | Kebijakan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan | | Rekomendasi Kebijakan | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.06.HA.1783.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | - | - | 550,00 | 605,00 | 660,00 | |
| 018.06.HA.1783.FBA.001 | Fasilitasi dan pembinaan Pemda dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri | | Daerah (Prov/Kab/ Kota) | RO baru | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 550,00 | 605,00 | 660,00 | |
| SK.3 | Terpenuhinya mutu dan Keamanan Pakan Ternak | | | | | | | | | 4.634,50 | 3.563,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | BPMSP Bekasi |
| IKK.3.1 | Persentase pengujian mutu dan keamanan pakan ternak yang dapat diselesaikan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian | | % | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 4.634,50 | 3.563,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.QJA | QJA Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | 4.634,50 | 3.563,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.QJA 001 | QJA 001 Pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan | | Produk | 343 | 3.887 | 1.782 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 4.634,50 | 3.563,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | |
| SK.4 | Tersedianya hijauan pakan ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak | | | | | | | | | - | - | 77.000,00 | 70.000,00 | 84.000,00 | UPT |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 4.1 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Indrapuri | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.2 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Padang Mangatas | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.3 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT SiborongBorong | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 83 | 85 | 90 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.4 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Sembawa | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.5 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BBPTUHPT Baturaden | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 83 | 86 | 90 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.6 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Denpasar | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| IKK 4.7 | Persentase permintaan hijauan pakan ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak di BPTUHPT Pelaihari | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | - | - | 11.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | - | - | 77.000,00 | 70.000,00 | 84.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG.002 | Hijauan Pakan Ternak di UPT | | Unit | 7 | - | - | 7 | 7 | 7 | - | - | 77.000,00 | 70.000,00 | 84.000,00 | |
| SK.5 | Tersedianya pakan ternak yang bermutu dan aman dalam memenuhi kebutuhan pakan | | | | - | | | | | - | 8.010,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | UPT |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 5.1 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Indrapuri | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 890,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.2 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Padang Mangatas | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 795,21 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.3 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Siborongborong | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 1.813,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.4 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Sembawa | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 465,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.5 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBPTU HPT Baturraden | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 980,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.6 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Denpasar | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 832,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.7 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BPTU HPT Pelaihari | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 602,52 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.8 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BIB Lembang | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 716,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| IKK 5.9 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BBIB Singosari | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 5.10 | Persentase ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan aman terhadap kebutuhan pakan ternak BET Cipelang | | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 415,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | 8.010,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | |
| 018.06.HA.1783.RAG.001 | Sarana Pakan/bahan pakan | | Unit | 10 | - | 281 | 50 | 60 | 70 | - | 8.010,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | |
| 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan | | | | | | | | | | 337.690,94 | 463.614,60 | 2.153.659,68 | 2.233.306,99 | 2.310.000,00 | |
| SK.1 | Meningkatnya perlindungan ternak dari PHMS | | | | | | | | | 235.566,43 | 430.552,69 | 785.688,98 | 846.623,80 | 920.966,81 | |
| IKK 1.1 | Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi daging | Pusat | % | | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 233.869,36 | 429.380,33 | 761.814,18 | 813.346,50 | 882.689,01 | |
| IKSK1.2 | Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi susu | Pusat | % | 76.29 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 848,00 | 636,18 | 22.862,40 | 32.264,90 | 37.265,40 | |
| IKSK1.3 | Presentase layanan kesehatan hewan dan pemenuhan persyaratan kesehatan hewan terhadap produksi telur | Pusat | % | 95.5 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.8 | 95.9 | 849,07 | 536,18 | 1.012,40 | 1.012,40 | 1.012,40 | |
| 018.06.HA.1784.AEA | Koordinasi | | % | | | | | | | 2.245,07 | 2.180,91 | 12.414,80 | 12.814,80 | 12.914,80 | |
| 018.06.HA.1784.AEA.001 | Koordinasi Kesehatan Hewan | | Kegiatan | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2.245,07 | 2.180,91 | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA.002 | Koordinasi Kesehatan Ternak | | Kegiatan | RO baru | - | - | 94 | 94 | 94 | - | - | 9.418,80 | 9.418,80 | 9.418,80 | |
| 018.06.HA.1784.AEA.003 | Koordinasi deteksi dan respon cepat | | Kegiatan | RO baru | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 1.300,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA.004 | Koordinasi pengawasan mutu dan keamanan obat hewan yang beredar | | Kegiatan | RO baru | | | | | | | | | | | |
| 018.06.HA.1784.AFA | Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | 300,00 | 500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.001 | NSPK Kesehatan Hewan | | NSPK | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 300,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.002 | NSPK pengendalian dan penanggulangan penyakit | | NSPK | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.003 | NSPK deteksi dan respon cepat kejadian penyakit hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.004 | NSPK layanan kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.005 | NSPK perlindungan hewan ternak dari PHMS | | NSPK | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA.006 | NSPK obat hewan dan alat kesehatan hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | 103.627,80 | 125.000,00 | 217.696,00 | 278.242,14 | 352.485,05 | |
| 018.06.HA.1784.QAH.001 | Layanan Kesehatan Hewan | | Layanan | 4.506.784 | 492.923 | 4.219.411 | 8.953.000 | 10.949.320 | 14.860.150 | 103.627,80 | 125.000,00 | 216.491,00 | 277.034,64 | 351.277,05 | |
| 018.06.HA.1784.QAH.002 | Layanan pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak | | Layanan | RO baru | - | - | 102 | 152 | 162 | - | - | 805,00 | 807,50 | 808,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH.003 | Layanan pengawasan obat hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.RAG | | | | | | | | | | 34.127,78 | 99.492,04 | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | |
| 018.06.HA.1784.RAG.001 | Sarana Bidang Kesehatan Hewan | | Unit | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |
| 018.06.HA.1784.RAG.004 | Sarana Laboratorium Kesehatan Hewan Infeksi RO baru dan zoonosis untuk kesehatan semua | | Unit | RO baru | - | 1 | - | - | - | - | 41.113,27 | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RAG.005 | Sarana laboratorium terpadu produksi dan pengembangan obat hewan nasional | | Unit | RO baru | - | 1 | - | - | - | - | 58.378,77 | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RAG 007 | SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia | | Unit | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.466,58 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RAG 008 | SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah | | Unit | 1 | 1 | - | - | - | - | 17.661,20 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RAG.010 | Sarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan | | Unit | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.RBK | Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | 95.265,78 | 203.379,75 | 16.478,18 | 16.466,86 | 16.466,96 | |
| 018.06.HA.1784.RBK.004 | Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan. Infeksi RO baru dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua | | unit | RO baru | - | 1 | - | - | - | - | 73.064,75 | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RBK 005 | Prasarana Laboratorium Terpadu Produksi dan Pengembangan Obat Hewan Nasional | | Unit | RO baru | - | 1 | - | - | - | - | 130.315,00 | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RBK 007 | SBSN Sarana Biosecurity Centre di Wilayah Timur Indonesia | | Unit | 1 | 1 | - | - | - | - | 55.533,42 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RBK 008 | SBSN Sarana Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan , Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Sumatera Bagian Tengah | | Unit | 1 | 1 | - | - | - | - | 35.838,80 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RBK 009 | Prasarana Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia | | Unit | 1 | | - | - | - | - | 3.893,56 | - | - | - | - | |
| 018.06.HA.1784.RBK.010 | Prasarana SBSN di UPT Kesehatan Hewan | | Unit | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16.478,18 | 16.466,86 | 16.466,96 | |
| SK. 2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap wabah penyakit Hewan | | | | | | | | | - | - | 154.857,51 | 172.120,00 | 172.120,00 | |
| IKK 2.1 | Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Hewan | Pusat | indeks | 0,48 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | - | - | 72.509,80 | 76.972,00 | 76.972,00 | |
| IKK 2.2 | Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan | Pusat | Kabupaten /Kota | | 100 | 200 | 300 | 400 | 514 | - | - | 82.347,71 | 95.148,00 | 95.148,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria | | | | | | | | | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA 007 | NSPK pelaporan dan deteksi dini potensi wabah penyakit hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 018.06.HA.1784.AFA 008 | NSPK respon potensi wabah penyakit hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.AFA 009 | NSPK Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan | | NSPK | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | - | - | 1.496,00 | 1.496,00 | 1.496,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA 005 | Koordinasi deteksi dini potensi wabah penyakit hewan | | Laporan | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 748,00 | 748,00 | 748,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA 006 | Koordinasi respon potensi wabah penyakit hewan | | Laporan | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| 018.06.HA.1784.AEA 007 | Koordinasi Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan | | Kegiatan | RO baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 374,00 | 374,00 | 374,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan publik lainnya | | | | | | | | | - | - | 152.761,51 | 170.024,00 | 170.024,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 005 | Layanan untuk deteksi dini potensi wabah penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 006 | Layanan untuk respon potensi wabah penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH.007 | Layanan untuk Pemberantasan penyakit hewan | | Layanan | RO baru | | | 2.160.950 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - | 72.637,51 | 89.900,00 | 89.900,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 008 | Layanan surveilans penyakit untuk pemberantasan penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 11 | 11 | 11 | - | - | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 009 | layanan unit pelayanan kesehatan hewan dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 38 | 38 | 38 | - | - | 73.074,00 | 73.074,00 | 73.074,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 010 | Layanan Penyidikan Penyakit dalam kesiapsiagaan dan ketahanan wabah penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| SK.3 | Tersedianya obat hewan sesuai kebutuhan | | | | | | | | | 50.669,19 | 10.060,65 | 47.669,19 | 47.669,19 | 47.669,19 | |
| IKK 3.1 | Persentase ketersediaan obat hewan terhadap kebutuhan | | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 50.669,19 | 10.060,65 | 47.669,19 | 47.669,19 | 47.669,19 | |
| 018.06.HA.1784.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | 50.669,19 | 10.060,65 | 47.669,19 | 47.669,19 | 47.669,19 | |
| 018.06.HA.1784.RAG 003 | Obat Hewan dan Bahan Biologik | | unit | 7.655.850 | 7.175.105 | 1.000.000 | 5.610.250 | 6.817.775 | 9.120.300 | 50.669,19 | 10.060,65 | 47.669,19 | 47.669,19 | 47.669,19 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.4 | Terjaminnya mutu dan keamanan obat hewan yang beredar | | | | | | | | | 7.759,18 | 2.083,70 | 15.919,00 | 16.919,00 | 17.919,00 | |
| IKK 4.1 | Persentase obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap obat hewan yang beredar | | % | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 7.759,18 | 2.083,70 | 15.919,00 | 16.919,00 | 17.919,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | 7.759,18 | 2.083,70 | 15.919,00 | 16.919,00 | 17.919,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJA 001 | Hasil mutu dan sertifikasi obat hewan | | Produk | 1.350 | 2.500 | 621 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.759,18 | 2.083,70 | 8.386,00 | 8.386,00 | 8.386,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJA 002 | Layanan Mutu Obat Hewan dan Pengujian Obat Hewan | | Produk | RO baru | - | - | 700 | 800 | 900 | - | - | 7.533,00 | 8.533,00 | 9.533,00 | |
| SK.5 | Terpenuhinya pengujian PHMS pada hewan di wilayah kerja UPT Veteriner | | | | 77.675 | 52.163 | 339.750 | 339.750 | 339.750 | 43.696,15 | 20.917,56 | 1.124.775,00 | 1.124.775,00 | 1.124.775,00 | |
| IKK 5.1 | Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Maros | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.2 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVet Denpasar | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.3 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di BBVET Wates | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.4 | Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Medan | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.5 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bukit Tinggi | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 5.6 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Bandar Lampung | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.7 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Subang | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.8 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner BanjarRO baru | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| IKK 5.9 | - Persentase pengujian PHMS yang dilakukan tepat waktu terhadap permintaan pengujian PHMS di Balai Veteriner Jayapura | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | 124.975,00 | 124.975,00 | 124.975,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | 66.433 | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QJC | Penyidikan dan Pengujian Penyakit | | | | | | | | | - | - | 124.575,00 | 124.575,00 | 124.575,00 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 001 | sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi | | Sampel | 574 | - | - | 339.750 | 339.750 | 339.750 | - | - | 93.431,25 | 93.431,25 | 93.431,25 | |
| 018.06.HA.1784.QJC 002 | Layanan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Mendukung Kesehatan untuk Semua | | Sampel | RO baru | - | - | 113.250 | 113.250 | 113.250 | - | - | 31.143,75 | 31.143,75 | 31.143,75 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.QAH 004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SK 6 | Tersedianya informasi PHMS pada ternak berdasarkan hasil identifikasi | | | | | | | | | - | - | 24.750,00 | 25.200,00 | 26.550,00 | |
| IKSK 6.1 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Maros | | % | 73 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.2 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVet Denpasar | | % | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.3 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di BBVET Wates | | % | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.4 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Medan | | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.5 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Bukittinggi | | % | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.6 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Lampung | | % | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.7 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Subang | | % | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.8 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Banjar RO baru | | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |
| IKSK 6.9 | Persentase PHMS yang teridentifikasi terhadap total PHMS yang terjadi pada ternak di Balai Veteriner Jayapura | | % | 70 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | - | - | 2.750,00 | 2.800,00 | 2.950,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1784.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.06.HA.1784.QAH.004 | Layanan Investigasi Penyakit hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | 24.750,00 | 25.200,00 | 26.550,00 | |
| 1785 Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak | | | | | | | | | | 394.855,00 | 128.322,25 | 2.451.152,90 | 2.455.462,00 | 2.529.546,51 | |
| SK.1 | Terpenuhinya potensi produksi ternak untuk produksi daging, telur dan susu | | | | | | | | | 171.519,86 | 69.322,72 | 809.465,00 | 809.840,00 | 908.465,00 | |
| IKK 1.1 | Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas daging | Pusat | % | Indikator Baru | 94,92 | 95,12 | 95,32 | 95,53 | 95,76 | 6.457,19 | 38.513,08 | 607.060,00 | 607.435,00 | 685.760,00 | |
| IKSK1.2 | Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas telur | Pusat | % | Indikator Baru | 102,10 | 102,14 | 102,18 | 102,22 | 102,26 | 164.962,68 | 30.802,50 | 78.705,00 | 78.705,00 | 88.705,00 | |
| IKSK1.3 | Persentase pemenuhan potensi produksi ternak untuk komoditas susu | Pusat | % | Indikator Baru | 21,03 | 25,17 | 29,03 | 33,69 | 39,08 | 100,00 | 7,13 | 123.700,00 | 123.700,00 | 134.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.QAH | Pelayanan Publik Lainnya | | | | | | | | | - | 14.269,00 | 438.750,00 | 439.125,00 | 509.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.QAH 001 | Layanan Optimalisasi Reproduksi | | Layanan | 1.547.009 | - | 500.011 | 2.750.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | - | 14.269,00 | 398.750,00 | 399.125,00 | 462.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.QAH 002 | Layanan Penandaan dan Pendataan Ternak | | Layanan | RO baru | 1.499.878 | - | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | - | - | 40.000,00 | 40.000,00 | 47.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.RAG.006 | Sarana Penandaan dan Pendataan Ternak | | Unit | 1.011.145 | - | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.AFA | Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria | | | | | | | | | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 018.06.HA.1785.AFA.001 | Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Perbibitan dan Produksi Ternak | | NSPK | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 018.06.HA.1785.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | 1.850,00 | 2.619,62 | 25.050,00 | 25.050,00 | 25.050,00 | |
| 018.06.HA.1785.AEA.001 | Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak | | Kegiatan | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1.850,00 | 2.619,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1785.AEA 002 | Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah | | Kegiatan | RO baru | - | - | 86 | 86 | 86 | - | - | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | - | - | 6.715,00 | 6.715,00 | 6.715,00 | |
| 018.06.HA.1785.QDD.001 | Fasilitasi dan pembinaan penguatan uji zuriat sapi perah untuk kelompok peternak | | Kelompok Masyarakat | RO baru | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 018.06.HA.1785.QDD.002 | Fasilitasi dan pembinaan pada wilayah sumber bibit untuk kelompok peternak | | Kelompok masyarakat | RO baru | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | |
| 018.06.HA.1785.QEO | Bantuan Produk dan Peralatan | | | | - | - | | | | 169.169,86 | 52.234,10 | 334.750,00 | 334.750,00 | 363.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.QEO 002 | Ternak Ruminansia Perah | | Ekor | RO baru | 1.438 | - | 2.500 | 3.000 | 4.000 | - | - | 87.500,00 | 87.500,00 | 94.550,00 | |
| 018.06.HA.1785.QEO 003 | Ternak Ruminansia Potong | | Ekor | RO baru | 1.000 | 5.200 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 3.060,04 | 20.800,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 138.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.QEO.004 | Ternak Unggas | | Ekor | RO baru | 7.500 | 92.500 | 200.000 | 350.000 | 400.000 | 164.862,68 | 30.802,50 | 70.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.QEO 005 | Ternak Lainnya | | Ekor | RO baru | 100 | 50 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 1.247,15 | 631,60 | 47.250,00 | 47.250,00 | 49.950,00 | |
| SK.2 | Tersedianya bibit/benih ternak bermutu berdasarkan kebutuhan produksi daging, telur dan susu | | | | | | | | | - | - | 3.405,00 | 3.405,00 | 4.105,00 | |
| IKK 2.1 | Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi daging | Pusat | % | 67,30 | 86,87 | 87,34 | 88,26 | 88,59 | 88,92 | - | - | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.100,00 | |
| IKK 2.2 | Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi telur | Pusat | % | | 102,10 | 102,14 | 102,18 | 102,22 | 102,26 | - | - | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| IKK 2.3 | Persentase ketersediaan bibit/benih ternak bermutu terhadap kebutuhan produksi susu | Pusat | % | | 0,21 | 0,28 | 0,37 | 0,50 | 0,68 | - | - | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| 018.06.HA.1785.PDC | Sertifikasi produk | | | | | | | | | - | - | 2.805,00 | 2.805,00 | 3.505,00 | |
| 018.06.HA.1785.PDC.001 | Sertifikasi benih/bibit ternak | | Sertifikat | RO baru | - | - | 30 | 35 | 40 | - | - | 1.575,00 | 1.575,00 | 2.275,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1785.PDC.002 | Penilaian penerapan Good Breeding Practices/Good Farming Practices/Good Hatchery Practice | | Sertifikat | RO baru | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| 018.06.HA.1785.QIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | | | | | | | | | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 018.06.HA.1785.QIA.001 | Pengawasan dan penerapan mutu bibit ternak dan tata kelola perbibitan dan produksi ternak | | Laporan | RO baru | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SK.3 | Terlindunginya varietas unggul tanaman dan hewan | | | | | | | | | - | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| IKK3 | Jumlah varietas/galur unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | Pusat | Galur | | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | - | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 018.06.HA.1785.REB | Konservasi Jenis / Spesies | | Galur | | | | | | | - | - | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 018.06.HA.1785.REB 001 | Pengelolaan SDGH | | Jenis | RO baru | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 018.06.HA.1785.REB 002 | Rumpun/Galur yang dilepas | | Jenis | RO baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SK.4 | Tersedianya bibit/benih ternak dalam memenuhi permintaan dari peternak/instansi pemerintah di UPT Perbibitan dan Produksi Ternak | | | | | | | | | 147.921,70 | - | 1.259.391,60 | 1.241.439,35 | 1.194.257,61 | |
| IKK 4.1 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTU-HPT Indrapuri | | % | Indikator Baru | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 1.693,82 | - | 38.840,70 | 100.550,40 | 114.650,00 | |
| IKK 4.2 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Siborongborong | | % | Indikator Baru | 70 | 75 | 78 | 82 | 85 | 3.940,46 | - | 39.650,00 | 149.650,00 | 149.650,00 | |
| IKK 4.3 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Padang Mangatas | | % | Indikator Baru | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 1.425,42 | - | 39.650,00 | 109.650,00 | 109.650,00 | |
| IKK 4.4 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Sembawa | | % | Indikator Baru | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 3.478,28 | - | 214.650,00 | 162.150,00 | 158.150,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 4.5 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBPTUHPT Baturaden | | % | Indikator Baru | 64 | 75 | 83 | 87 | 90 | 4.249,76 | - | 84.650,00 | 174.662,00 | 175.745,15 | |
| IKK 4.6 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Denpasar | | % | Indikator Baru | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 2.959,04 | - | 174.650,00 | 104.650,00 | 104.650,00 | |
| IKK 4.7 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BPTUHPT Pelaihari | | % | Indikator Baru | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 1.165,52 | - | 174.650,00 | 157.150,00 | 157.149,51 | |
| IKK 4.8 | Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BIB Lembang | | % | Indikator Baru | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 3.806,70 | - | 289.650,00 | 92.650,00 | 85.921,95 | |
| IKK 4.9 | Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BBIB Singosari | | % | Indikator Baru | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 120.576,17 | - | 29.650,00 | 94.900,00 | 59.041,00 | |
| IKK 4.10 | Persentase permintaan benih ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang | | % | Indikator Baru | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 4.626,54 | - | 163.350,90 | 55.426,95 | 39.650,00 | |
| IKK 4.11 | Persentase permintaan bibit ternak yang dapat dipenuhi terhadap permintaan dari peternak/instansi pemerintah di BET Cipelang | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 82 | 85 | 85 | - | - | 10.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.RAG | Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | 50.616,60 | - | 426.500,00 | 911.439,35 | 81.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.RAG.001 | Sarana Perbibitan Ternak | | unit | 1 | 36.912 | - | 11 | 11 | 11 | 28.608,40 | - | 151.500,00 | 911.439,35 | 81.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.RAG.007 | SBSN Sarana UPT | | unit | - | 1.155 | | 1 | | | 22.008,20 | | 275.000,00 | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1785.RBK | Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | 97.305,10 | - | 832.891,60 | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.RBK.001 | Prasarana Perbibitan Ternak | | unit | - | 28 | - | 11 | 11 | 11 | 11.971,10 | - | 214.190,70 | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| 018.06.HA.1785.RBK.006 | SBSN Prasarana UPT | | unit | - | | | 1 | | | 85.334,00 | | 618.700,90 | | | |
| SK.5 | Terjaminnya mutu bibit/benih ternak unggul yang beredar di wilayah kerja UPT Perbibitan dan Produksi Ternak | | | | | | | | | 75.413,43 | 58.999,53 | 377.991,30 | 399.877,65 | 421.818,90 | |
| IKK 5.1 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Indrapuri | | % | | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 1.358,69 | 728,00 | 4.170,00 | 4.672,50 | 5.242,50 | |
| IKK 5.2 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Siborongborong | | % | | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 1.021,35 | 673,53 | 7.466,00 | 9.338,00 | 11.222,00 | |
| IKK 5.3 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Padang Mangatas | | % | | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 2.332,23 | 1.786,15 | 2.775,00 | 2.925,00 | 3.075,00 | |
| IKK 5.4 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Sembawa | | % | | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 7.484,82 | 2.045,00 | 144.521,50 | 155.577,70 | 166.658,20 | |
| IKK 5.5 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BBPTU-HPT Baturaden | | % | | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 10.007,29 | 6.170,00 | 10.945,00 | 11.515,00 | 11.885,00 | |
| IKK 5.6 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Denpasar | | % | | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 1.811,35 | 893,25 | 2.010,00 | 2.092,50 | 2.175,00 | |
| IKK 5.7 | Persentase bibit ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan bibit ternak di BPTU-HPT Pelaihari | | % | | 75 | 80 | 85 | 88 | 88 | 5.056,99 | 5.210,00 | 139.253,80 | 146.189,95 | 153.473,20 | |
| IKK 5.8 | Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BIB Lembang | | % | | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 19.626,16 | 18.726,49 | 22.225,00 | 22.325,00 | 22.425,00 | |
| IKK 5.9 | Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BBIB Singosari | | % | | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 21.083,98 | 21.594,23 | 36.275,00 | 36.780,00 | 37.025,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 5.10 | Persentase benih ternak bermutu yang beredar terhadap ketersediaan benih ternak di BET Cipelang | | % | | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 5.358,34 | 947,39 | 7.725,00 | 7.837,00 | 8.013,00 | |
| IKK 5.11 | Persentase bibit ternak unggul bermutu terhadap ketersediaan bibit yang beredar di wilayah kerja BET Cipelang | | % | | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 272,23 | 225,50 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| 018.06.HA.1785.PDA | Standardisasi Produk | | | | | | | 7.820.582 | 7.977.490 | 75.413,43 | 58.999,53 | 372.321,30 | 394.207,65 | 416.148,90 | |
| 018.06.HA.1785.PDA.001 | Benih Ternak Unggul | | Produk | 5.455.732 | 6.400.800 | 4.840.075 | 5.745.900 | 5.806.414 | 5.840.936 | 46.068,48 | 41.268,10 | 64.650,00 | 65.367,00 | 65.888,00 | |
| 018.06.HA.1785.PDA.002 | Bibit Ternak Unggul | | Produk | 586.407 | 1.790.184 | 583.276 | 1.887.132 | 2.007.548 | 2.130.431 | 29.344,95 | 17.731,43 | 307.671,30 | 328.840,65 | 350.260,90 | |
| 018.06.HA.1785.PDC | Sertifikasi produk | | | | | | | | | | | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| 018.06.HA.1785.PDC.003 | Sertifikasi benih/bibit ternak UPT | | Produk | RO baru | - | - | 7.050 | 6.620 | 6.123 | - | - | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| 018.06.HA.1785.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 018.06.HA.1785.AEA.003 | Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di UPT | | Kegiatan | RO baru | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | 16.305,2090 | 8.162,1550 | 150.303,0000 | 160.008,0000 | 174.645,0000 | |
| SK.1 | Terpenuhinya persyaratan keamanan komoditas produk peternakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku | | | | | | | | | - | - | 20.344,00 | 21.161,00 | 22.182,00 | |
| IKK 1.1 | Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan keamanan komoditas pangan terhadap total komoditas produk peternakan siap edar | Pusat | % | 90 | 90,50 | 91 | 91,50 | 92 | 92,50 | - | - | 20.344,00 | 21.161,00 | 22.182,00 | |
| 018.06.HA.1786.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | - | - | 20.344,00 | 21.161,00 | 22.182,00 | |
| 018.06.HA.1786.QIC 001 | Pengawasan unit usaha, peredaran dan lalu lintas produk hewann produk hewan | | Lembaga | RO baru | - | - | 39,00 | 39,00 | 39,00 | - | - | 20.344,00 | 21.161,00 | 23.127,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 2 | Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Ketahanan terhadap zoonosis, keamanan dan kesehatan produk hewan | | | | | | | | | 1.761,22 | 2.609,00 | 99.016,00 | 104.922,00 | 115.192,00 | |
| IKK 2.1 | Indeks keamanan dan kesehatan produk hewan | Pusat | Indeks | 0,51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 1.561,22 | 1.809,00 | 74.544,00 | 77.736,00 | 84.928,00 | |
| IKK 2.2 | Tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan keamanan produk hewan | Pusat | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100,00 | 400,00 | 8.900,00 | 9.750,00 | 10.600,00 | |
| IKK 2.3 | Tingkat kepatuhan terhadap kesejahteraan hewan nasional | Pusat | % | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 100,00 | 400,00 | 15.572,00 | 17.436,00 | 19.664,00 | |
| 018.06.HA.1786.AFA | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | |
| 018.06.HA.1786.AFA 001 | NSPK Kesehatan masyarakat veteriner | | NSPK | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 1.800,00 | |
| 018.06.HA.1786.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | 1.261,22 | 2.109,00 | 19.500,00 | 19.550,00 | 19.600,00 | |
| 018.06.HA.1786.AEA 001 | Koordinasi kesehatan masyarakat veteriner | | Kegiatan | 1 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1.261,22 | 2.109,00 | 19.500,00 | 19.550,00 | 19.600,00 | |
| 018.06.HA.1786.UAC | Peningkatan Kapasitas aparatur negara | | | | | | | | | - | - | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.UAC 001 | Bimbingan Teknis SDM Penjaminan Keamanan Produk Hewan | | Orang | RO baru | - | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | - | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.UAC 002 | Bimbingan Teknis SDM Zoonosis | | orang | RO baru | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.UAC 003 | Bimbingan Teknis SDM Kesmavet | | Orang | RO baru | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.PDF | Sertifikasi Lembaga | | | | | | | | | - | - | 8.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.PDF 001 | Sertifikasi NKV Unit Usaha Produk Hewan | | Lembaga | RO baru | 70 | - | 400 | 500 | 700 | - | - | 8.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QAH | Pelayanan publik lainnya | | | | | | | | | - | - | 1.164,00 | 1.166,00 | 1.168,00 | |
| 018.06.HA.1786.QAH 001 | Pelayanan publik penjaminan keamanan produk hewan | | Layanan | RO baru | - | - | 3.500 | 3.516 | 3.533 | - | - | 1.164,00 | 1.166,00 | 1.168,00 | |
| 018.06.HA.1786.PCA | Perijinan Produk | | | | | | | | | - | - | 880,00 | 920,00 | 960,00 | |
| 018.06.HA.1786.PCA 001 | Registrasi Produk hewan | | Produk | RO baru | - | - | 110 | 115 | 120 | - | - | 880,00 | 920,00 | 960,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.HA.1786.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | - | - | 36.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.RAG 001 | Sarana Kesehatan Masyarakat Veteriner | | Unit | | 13 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 36.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QKA | Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat | | | | | | | | | - | - | 2.400,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QKA 001 | Pemantauan dugaan kejadian penyakit pada manusia yang berasal dari hewan dan/atau produk hewan | | Kelompok Masyarakat | RO baru | - | - | 24 | 32 | 40 | - | - | 2.400,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QDC 001 | Masyarakat yang teredukasi keamanan produk hewan dan zoonosis | | Orang | RO baru | 150 | - | 500 | 500 | 1.000 | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QDC 002 | Masyarakat yang teredukasi kesejahteraan hewan | | Orang | RO baru | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.HA.1786.QIC | Pengawasan dan Pengendalian Lembaga | | | | | | | | | - | - | 9.072,00 | 10.886,00 | 13.064,00 | |
| 018.06.HA.1786.QIC 002 | Pengawasan unit usaha penanganan hewan | | Lembaga | RO baru | - | - | 39 | 39 | 39 | - | - | 9.072,00 | 10.886,00 | 13.064,00 | |
| SK.3 | Terpenuhinya permintaan pengujian keamanan produk hewan | | | | | | | | | 14.543,99 | 5.553,16 | 30.943,00 | 33.925,00 | 37.271,00 | |
| IKK 3.1 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di BPMSPH | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.2 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Wates | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.3 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Maros | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 3.4 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Besar Veteriner Denpasar | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.5 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Medan | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.6 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bukittinggi | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.7 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Bandar Lampung | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.8 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Subang | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.9 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner BanjarRO baru | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| IKK 3.10 | persentase pengujian keamanan produk hewan yang dilakukan tepat waktu terhadap total permintaan pengujian di Balai Veteriner Jayapura | | % | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | | |
| 018.06.HA.1786.QJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | 14.543,99 | 5.553,16 | 30.943,00 | 33.925,00 | 37.271,00 | |
| 018.06.HA.1786.QJA 001 | Layanan Pengujian Keamanan Produk Hewan | | Produk | 2.921 | 37.915 | 12.796 | 72.802 | 79.890 | 87.720 | 14.543,99 | 5.553,16 | 30.943,00 | 33.925,00 | 37.271,00 | |
| 018.HA.1794 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | | | | | | | | | | 100.687 | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1795 - Perlindungan dan Penyediaan Lahan | | | | | | | | | | 1.046.392 | | | | | |
| 018.HA.3994 - Fasilitasi Pembiayaan Pertanian | | | | | | | | | | 8.289 | 10.460 | 656.011 | 697.741 | 739.471 | |
| SK 1 | Terlindunginya usaha pertanian nasional | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pembiayaan Pertanian |
| IKK 1.1 | Persentase lahan usaha pertanian yang terlindungi asuransi | | % | Indikator Baru | 2,87 | 3,13 | 4,53 | 5,93 | 7,33 | 5.855 | 0 | 631.525 | 670.807 | 709.843 | |
| | O.1 Perlindungan usaha pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.RBK | Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.RBK.001 | Asuransi usaha tani padi | | Unit | 278.832 | 0 | 0 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 595.384 | 625.209 | 652.091 | |
| 018.HA.3994.RBK.002 | Asuransi usaha ternak sapi/kerbau | | Unit | - | 0 | 0 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 0 | 0 | 29.211 | 37.974 | 49.367 | |
| 018.HA.3994.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.ABR.001 | Rekomendasi kebijakan perlindungan usaha pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | 363 | 399 | |
| 018.HA.3994.BDD | Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.BDD.001 | Bimbingan teknis perlindungan usaha pertanian | | Kelompok Masyarakat | RO Baru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | |
| 018.HA.3994.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.AEA.001 | Bimbingan, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pembiayaan Pertanian | | Kegiatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.855 | 0 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | |
| SK 2 | Meningkatnya akses pembiayaan usaha pertanian nasional | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pembiayaan Pertanian |
| IKK 2.1 | Persentase pelaku usaha tani yang mendapat akses pembiayaan | | % | Indikator Baru | 6,16 | 6,31 | 6,47 | 6,63 | 6,79 | 2.434 | 10.460 | 24.486 | 26.935 | 29.628 | |
| | O.2 Akses pembiayaan usaha pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.3994.ABR.001 | Rekomendasi kebijakan pembiayaan usaha pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 330 | 363 | 399 | |
| 018.HA.3994.BDB | Fasilitasi dan pembinaan lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.BDB.001 | Fasilitasi akses pembiayaan LKMA | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 4.950 | 5.445 | 5.990 | |
| 018.HA.3994.BDB.002 | Fasilitasi akses pembiayaan koperasi pertanian | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | |
| 018.HA.3994.BDC | Fasilitasi dan pembinaan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.BDC.001 | Fasilitasi akses pembiayaan petani | | Orang | RO Baru | 0 | 0 | 1.682.588 | 1.682.588 | 1.682.588 | 0 | 0 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | |
| 018.HA.3994.RBK | Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3994.RBK.003 | Pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan | | Unit | - | 317 | 3.000 | 3.300 | 3.630 | 3.993 | 2.434 | 10.460 | 11.506 | 12.657 | 13.922 | |
| 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | | | | | | | | | | 0 | 1.500 | 22.537 | 22.576 | 22.615 | |
| SK 3 | Terkendalinya susut pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pasca Panen |
| IKK 3.1 | Persentase penurunan susut pangan | | % | Indikator Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.500 | 22.537 | 22.576 | 22.615 | |
| | O.1 Susut pangan pasca panen asal pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AEA.001 | Koordinasi penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.500 | 21.537 | 21.576 | 21.615 | |
| 018.HA.1796.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.ABR.001 | Kajian penghitungan susut pangan pasca panen asal pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | | | | | | | | | | 632.079 | 111.720 | 1.069.590 | 1.069.615 | 1.069.715 | |
| SK 4 | Tersedianya pupuk berdasarkan kebutuhan produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pupuk |
| IKK 4.1 | Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan produksi pertanian | | % | Indikator Baru | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 632.079 | 111.720 | 1.069.590 | 1.069.615 | 1.069.715 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | O.1 Pupuk untuk produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA.001 | Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida | | Kegiatan | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.011 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| 018.HA.3993.AFA | Norma, standar, prosedur, dan kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AFA.001 | NSPK prosedur pembayaran pupuk bersubsidi | | NSPK | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.495 | 1.495 | 1.495 | |
| 018.HA.3993.QAA | Pelayanan publik kepada masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.QAA.001 | Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi | | Orang | - | 0 | 11.246.965 | 11.809.303 | 11.809.303 | 12.399.769 | 0 | 85.504 | 86.824 | 86.824 | 86.824 | |
| 018.HA.3993.QAA.001 | Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi | | Orang | - | 11.246.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.QAA.002 | Laporan pengawasan pupuk dan pestisida | | Laporan | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13.020 | 15.607 | 275 | 300 | 300 | |
| 018.HA.3993.QEA | Bantuan masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.QEA.001 | Bantuan langsung petani | | Paket | - | 0 | 0 | 189.137 | 189.137 | 189.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.ABR.001 | Pedoman teknis tata kelola pupuk bersubsidi | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.572 | 3.572 | 3.572 | |
| 018.HA.3993.ADA | Standarisasi produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.ADA.001 | Persyaratan teknis minimal pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah | | Produk | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | |
| 018.HA.3993.ADA.002 | Persyaratan teknis minimal pupuk anorganik | | Produk | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | |
| 018.HA.3993.BDB | Fasilitasi dan pembinaan lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.BDB.001 | Pembinaan lembaga uji mutu dan efektivitas pupuk | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 018.HA.3993.BDB.002 | Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pupuk | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 018.HA.3993.BDD | Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.3993.BDD.001 | Fasilitasi kelompok petani untuk pemanfaatan pupuk | | Kelompok Masyarakat | RO Baru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| 018.HA.3993.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.RAG.001 | Rumah pengolah pupuk organik (RPPO) | | Unit | - | 0 | 100 | 150 | 150 | 150 | 0 | 10.609 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 018.HA.3993.RAG.003 | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) | | Unit | 76.588 | 1.076.000 | 0 | 212.750.000 | 212.750.000 | 212.750.000 | 222.216 | 0 | 531.875 | 531.875 | 531.975 | |
| 018.HA.3993.RAG.004 | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian | | Unit | - | 125.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.RAG.005 | Bantuan Pembenah Tanah | | Unit | - | 0 | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0 | 430.821 | 430.821 | 430.821 | |
| 018.HA.3993.FAB | Sistem informasi pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.FAB.001 | Sistem informasi pupuk bersubsidi | | Layanan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | | | | | | | | | | 233.249 | 59.438 | 1.026.889 | 1.029.010 | 1.031.286 | |
| SK 5 | Tersedianya pestisida berdasarkan kebutuhan produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pestisida |
| IKK 5.1 | Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan produksi pertanian | | % | Indikator Baru | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 233.249 | 59.438 | 1.026.889 | 1.029.010 | 1.031.286 | |
| | O.2 Pestisida untuk produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.ABR.001 | Kebijakan pendaftaran pestisida untuk produksi pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 018.HA.3993.ABR.002 | Kebijakan pengawasan pestisida untuk produksi pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | |
| 018.HA.3993.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA.001 | Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida | | Kegiatan | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.674 | 0 | 2.941 | 3.236 | 3.559 | |
| 018.HA.3993.AEA.001 | Koordinasi pengawasan pestisida | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.337 | 1.337 | 1.337 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.3993.AEA.002 | Koordinasi pengelolaan pestisida untuk peningkatan produksi pertanian | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| 018.HA.3993.BDB | Fasilitasi dan pembinaan lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.BDB.001 | Pembinaan lembaga uji mutu, efikasi, toksisitas, dan residu pestisida | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 018.HA.3993.BDH | Fasilitasi dan pembinaan badan usaha | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.BDH.001 | Pembinaan penegakan aturan pendaftaran pestisida | | Badan Usaha | RO Baru | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| 018.HA.3993.BDD | Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.BDD.001 | Fasilitasi kelompok tani untuk penggunaan pestisida | | Kelompok Masyarakat | RO Baru | 0 | 0 | 125.680 | 125.680 | 125.680 | 0 | 0 | 20.817 | 20.817 | 20.517 | |
| 018.HA.3993.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.RAG.001 | Pestisida untuk mendukung peningkatan produksi pertanian | | Unit | - | 0 | 0 | 3.939.071 | 3.939.071 | 3.939.071 | 0 | 0 | 693.907 | 693.907 | 683.907 | |
| 018.HA.3993.RAG.003 | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) | | Unit | - | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 018.HA.3993.RAG.004 | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian | | Unit | - | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.RAG.006 | Bantuan Pestisida | | Unit | - | 0 | 563.800 | 563.800 | 563.800 | 563.800 | 0 | 59.438 | 278.021 | 279.847 | 292.100 | |
| 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | | | | | | | | | | 5.522.158 | 1.435.204 | 2.788.077 | 2.806.623 | 2.825.551 | |
| SK 6 | Meningkatnya pemanfaatan alsintan pra panen berdasarkan alsintan pra prapanen yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen |
| IKK 6.1 | Persentase alsintan pra panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pra panen yang disediakan | | % | Indikator Baru | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 5.522.158 | 1.435.204 | 2.788.077 | 2.806.623 | 2.825.551 | |
| | O.3 Alsintan pra panen untuk produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1796.AEA.001 | Bimtek, Monitoring, dan Evaluasi lingkup Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen | | Kegiatan | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.773 | 13.601 | 14.662 | |
| 018.HA.1796.AEA.001 | Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian | | Kegiatan | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.1796.AFA | Norma, standar, prosedur, dan kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AFA.001 | NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen | | NSPK | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 600 | 720 | 864 | |
| 018.HA.1796.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.ABR.002 | Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.200 | 1.440 | 1.728 | |
| 018.HA.1796.BDB | Fasilitasi dan pembinaan lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.BDB.001 | Bimbingan teknis kelembagaan alat dan mesin pertanian | | Lembaga | RO Baru | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 480 | 576 | 691 | |
| 018.HA.1796.BDD | Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.BDD.001 | Bimbingan teknis kelompok tani pengelolaan alat dan mesin pertanian pra panen | | Kelompok Masyarakat | RO Baru | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 360 | 432 | 518 | |
| 018.HA.1796.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG.001 | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan | | Unit | 91.108 | 63.582 | 22.156 | 34.120 | 35.826 | 37.618 | 5.513.673 | 1.403.834 | 2.602.104 | 2.617.133 | 2.632.168 | |
| 018.HA.1796.RAG.002 | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura | | Unit | - | 0 | 553 | 2.220 | 2.120 | 2.120 | 0 | 6.370 | 11.559 | 11.849 | 12.759 | |
| 018.HA.1796.RAG.003 | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan | | Unit | - | 0 | 0 | 3.240 | 3.407 | 3.582 | 0 | 0 | 59.000 | 59.232 | 59.480 | |
| 018.HA.1796.RAG.004 | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan | | Unit | - | 0 | 0 | 3.240 | 3.407 | 3.582 | 0 | 0 | 59.000 | 59.232 | 59.480 | |
| 018.HA.1796.RAG.005 | Perbengkelan alsintan | | Unit | - | 0 | 50 | 99 | 104 | 109 | 0 | 25.000 | 41.000 | 42.407 | 43.200 | |
| 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | | | | | | | | | | 0 | 993.295 | 2.735.583 | 2.815.313 | 2.876.328 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 7 | Meningkatnya pemanfaatan alsintan pasca panen untuk hilirisasi pertanian | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen |
| IKK 7.1 | Persentase alsintan pasca panen yang dimanfaatkan terhadap alsintan pasca panen yang disediakan untuk hilirisasi pertanian | | % | Indikator Baru | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 0 | 993.295 | 2.735.583 | 2.815.313 | 2.876.328 | |
| | O.4 Alsintan pasca panen untuk produksi pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AEA.001 | Koordinasi pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.500 | 20.475 | 21.499 | |
| 018.HA.1796.ABR | Kebijakan bidang pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.ABR.002 | Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.575 | 1.654 | |
| 018.HA.1796.AFA | Norma, standar, prosedur, dan kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.AFA.001 | NSPK pengelolaan alat dan mesin pertanian pasca panen | | NSPK | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144 | 151 | 159 | |
| 018.HA.1796.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG.007 | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan | | Unit | - | 0 | 2.978 | 4.079 | 4.283 | 4.498 | 0 | 913.608 | 2.468.933 | 2.540.879 | 2.572.923 | |
| 018.HA.1796.RAG.009 | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura | | Unit | RO Baru | 0 | 94 | 115 | 121 | 127 | 0 | 6.045 | 26.021 | 26.497 | 28.497 | |
| 018.HA.1796.RAG.010 | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan | | Unit | RO Baru | 0 | 100 | 142 | 149 | 156 | 0 | 13.378 | 31.570 | 32.624 | 36.551 | |
| 018.HA.1796.RAG.011 | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan | | Unit | RO Baru | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.429 | 17.401 | 18.121 | 18.854 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.1796.RBK | Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RBK.001 | Bangunan mesin pengering (vertical dryer) sub sektor tanaman pangan | | Unit | - | 0 | 140 | 186 | 195 | 205 | 0 | 50.631 | 154.743 | 158.731 | 177.918 | |
| 018.HA.1796.RBK.002 | Bangsal pasca panen hortikultura | | Unit | - | 0 | 50 | 69 | 72 | 76 | 0 | 6.204 | 15.771 | 16.260 | 18.273 | |
| 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | | | | | | | | | | 1.124.684 | 1.074.861 | 1.734.577 | 1.795.671 | 1.860.360 | |
| SK 8 | Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Prapanen |
| IKK 8.1 | Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen untuk lumbung pangan | | % | Indikator Baru | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 1.124.684 | 1.074.861 | 1.734.577 | 1.795.671 | 1.860.360 | |
| | O.1 Alsintan pra panen untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 12.149 | 16.813 | 20.175 | 24.211 | 29.053 | 1.124.684 | 1.074.861 | 1.731.577 | 1.792.671 | 1.857.360 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 018.HA.1796 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3.456.727 | 3.594.161 | 3.761.169 | |
| SK 9 | Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen |
| IKK 9.1 | Persentase pemanfaatan alat dan mesin pertanian pasca panen untuk lumbung pangan | | % | Indikator Baru | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 0 | 0 | 3.456.727 | 3.594.161 | 3.761.169 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | O.2 Alsintan pasca panen untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor tanaman pangan lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 5.079 | 5.283 | 5.498 | 0 | 0 | 3.291.727 | 3.421.161 | 3.579.769 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor hortikultura untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 215 | 221 | 227 | 0 | 0 | 160.000 | 168.000 | 176.400 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor perkebunan untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 018.HA.1796.RAG.xxx | Alat dan mesin pertanian pasca panen sub sektor peternakan untuk lumbung pangan | | Unit | RO Baru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | | | | | | | | | | 793.126 | 642.904 | 1.289.995 | 1.290.095 | 1.290.095 | |
| SK 10 | Meningkatnya ketersediaan pupuk untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pupuk |
| IKK 10.1 | Persentase ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan lumbung pangan | | % | Indikator Baru | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 793.126 | 642.904 | 1.289.995 | 1.290.095 | 1.290.095 | |
| | O.3 Pupuk untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA.001 | Koordinasi pengelolaan pupuk dan pembenah tanah untuk lumbung pangan | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | |
| 018.HA.3993.RAG | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.RAG.xxx | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) | | Unit | - | 281.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.RAG.xxx | Bantuan Pembenah Tanah | | | - | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 642.904 | 1.287.969 | 1.288.069 | 1.288.069 | |
| 018.HA.3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | | | | | | | | | | 53.800 | 28.058 | 19.908 | 20.908 | 21.908 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK 11 | Meningkatnya ketersediaan pestisida untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Pestisida |
| IKK 11.1 | Persentase ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan lumbung pangan | | % | Indikator Baru | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 53.800 | 28.058 | 19.908 | 20.908 | 21.908 | |
| | O.4 Pestisida untuk lumbung pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA.001 | Koordinasi pengelolaan pestisida untuk lumbung pangan | | Kegiatan | RO Baru | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 018.HA.3993.AEA | Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.3993.AEA.xxx | Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian (QW) | | Unit | - | 1.076.000 | 0 | | | | 53.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.HA.3993.AEA.xxx | Bantuan Pestisida | | | - | 0 | 169.080 | 169.080 | 169.080 | 169.080 | 0 | 28.058 | 17.908 | 18.908 | 19.908 | |
| 7922 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | | | Kegiatan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.587,12 | 4.247.412,30 | 4.451.680,00 | 3.919.780,00 | 3.642.715,00 | |
| SK.1 | Tersedianya Kebutuhan Air Pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian | | | | | | | | | - | 775.305,50 | 2.008.650,00 | 1.634.430,00 | 1.164.030,00 | |
| IKK 1.1 | Persentase ketersediaan Jaringan Irigasi Pertanian Terhadap Kebutuhan | | % | Indikator Baru | 47,04 | 47,74 | 48,14 | 48,54 | 48,93 | - | 775.305,50 | 2.008.650,00 | 1.634.430,00 | 1.164.030,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBR | Dukungan Teknis | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RBR.001 | Dokumen SID Irigasi Tersier | | Dokumen | RO Baru | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 20.534,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 018.03.HA.7922.RDK | OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RDK.003 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier | | Unit | 1.663 | - | 7.000 | 18.930 | 18.930 | 19.252 | - | 754.771,50 | 1.987.650,00 | 1.613.430,00 | 1.143.030,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.006 | Pengembangan jaringan irigasi pertanian | | Unit | Usulan RO Baru | - | - | 3.000 | 3.000 | 2.643 | - | - | - | - | - | |
| SK.2 | Tersedianya sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian non irigasi dan rawan kekeringan | | | | | | | | | 92.587,12 | 3.264.341,80 | 1.118.680,00 | 961.000,00 | 1.155.280,00 | |
| IKK 2.1 | Persentase ketersediaan sumber pengairan pertanian terhadap kebutuhan | | % | | 36,53 | 37,04 | 37,41 | 37,78 | 38,16 | 92.587,12 | 3.264.341,80 | 1.118.680,00 | 961.000,00 | 1.155.280,00 | |
| 018.03.HA.7922.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.AEA.001 | Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian | | Paket | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.814,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.03.HA.7922.AEA.002 | Monitoring dan Evaluasi lingkup Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Untuk Pertanian | | Paket | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.988,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RBK.xxx | Embung pertanian | | Unit | Usulan RO Baru | - | - | 750 | 750 | 750 | - | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.003 | Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim | | Unit | 415,00 | 165 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.244,32 | 392.751,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.011 | Irigasi Perpompaan | | Unit | 9.487,00 | 775 | 15.000 | 4.173 | 3.775 | 3.783 | 47.811,24 | 2.464.106,00 | 667.680,00 | 560.000,00 | 605.280,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.012 | Irigasi Perpipaan | | Unit | 5.053,00 | - | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 307.950,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.111 | Irigasi Hortikultura | | Unit | RO Baru | | 1.250 | | | | | 38.534,80 | | | | |
| 018.03.HA.7922.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.QDD.001 | Pengembangan sistem pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (Upland) | | Kelompok Masyarakat | 22,00 | 22 | 22 | | | | 25.727,94 | 60.000,00 | - | - | - | |
| SK 3 | Meningkatnya ketersediaan irigasi pertanian pada lumbung pangan | | | | | | | | | - | 207.765,00 | 114.450,00 | 114.450,00 | 113.505,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 2.1 | Presentase ketersediaan Jaringan Irigasi pada Lumbung Pangan | | % | Indikator Baru | - | 1,56 | 3,11 | 4,67 | 6,15 | - | 207.765,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 17.880,00 | |
| 018.03.HA.7922.RDK | OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RDKxxx | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier Pada Lumbung Pangan | | Unit | Usulan RO Baru | - | 940 | 940 | 940 | 894 | - | 207.765,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 17.880,00 | |
| IKK 2.2 | Persentase ketersediaan irigasi pertanian terhadap total kebutuhan irigasi pertanian untuk lumbung pangan | | % | Indikator Baru | - | - | 14,06 | 28,11 | 41,96 | - | - | 95.650,00 | 95.650,00 | 95.625,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RBK.xxx | Pengembangan jaringan irigasi pertanian | | Unit | Usulan RO Baru | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | 95.650,00 | 95.650,00 | 95.625,00 | |
| SK 4 | Meningkatnya ketersediaan air untuk lahan pertanian pada lumbung pangan | | | | | | | | | - | - | 1.209.900,00 | 1.209.900,00 | 1.209.900,00 | |
| IKK 2.1 | Persentase lahan pertanian yang mendapatkan air terhadap total kebutuhan lahan pertanian untuk lumbung pangan | | % | | - | - | 40,17 | 40,18 | 40,19 | - | - | 1.209.900,00 | 1.209.900,00 | 1.209.900,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7922.RBK.XXX | Irigasi perpompaan pada lumbung pangan | | Unit | Usulan RO Baru | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | - | - | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | |
| 018.03.HA.7922.RBK.XXX | Irigasi perpipaan pada lumbung pangan | | Unit | Usulan RO Baru | - | - | 2.499 | 2.499 | 2.499 | - | - | 249.900,00 | 249.900,00 | 249.900,00 | |
| 7923 Pelindungan dan Penyediaan Lahan | | | Kegiatan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.518.672,86 | 11.369.987,01 | 12.845.686,00 | 13.461.354,00 | 14.077.022,00 | |
| SK.1 | Terpenuhinya kebutuhan luas tanam komoditas pertanian prioritas | | | | | | | | | 10.356.550,09 | 10.953.962,43 | 10.875.000,00 | 11.475.000,00 | 12.075.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 1.1 | Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanamannya | | ribu ha | RPJMN 2025 - 2029 | 6,90 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 2.680.644,18 | 1.899.600,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.200.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.AEA.002 | Monitoring dan Evaluasi lingkup Pelindungan dan Optimasi Lahan | | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 417,61 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBK.002 | Jalan Usaha Tani | | Unit | 20 | - | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | 112.750,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBO | Prasarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBO.002 | Optimasi Lahan | | Ha | 348.758 | 350.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 500.000 | 2.397.991,22 | 1.692.900,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 | |
| | Konsultan Pengawas Eksternal Optimasi Lahan | | Paket | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 16.500,00 | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBR | Dukungan Teknis | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBR.002 | Dokumen SID Optimasi Lahan | | Dokumen | RO Baru | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 42.962,97 | 76.950,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | 76.950,00 | |
| 018.03.HA.7923.QEH | Bantuan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.QEH.001 | Bantuan Olah Lahan Pasca Optimasi Lahan | | Kelompok Masyarakat | RO Baru | 41 | | | | | 239.272,38 | | | | | |
| IKK 1.2 | Lahan baku sawah yang dicetak | | Ribu Ha | RPJMN 2025 - 2029 | 42,00 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 7.675.905,90 | 9.054.362,43 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.AEA.003 | Monitoring dan Evaluasi lingkup Penyediaan Lahan | | Paket | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 394,32 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBO | Prasarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBO.005 | Cetak Sawah | | Ha | RO Baru | 225.000 | 250.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 7.675.511,58 | 8.966.362,43 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.QEH | Bantuan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.03.HA.7923.QEH.002 | Bantuan Olah Lahan Pasca Cetak Sawah | | Ha | RO Baru | | 225.000 | | | | | 207.765,00 | | | | |
| | Konsultan Pengawas Eksternal Cetak Sawah | | Paket | | | 1 | | | | | 87.500,00 | | | | |
| SK.2 | Tersedianya lahan pertanian berdasarkan kebutuhan produksi pertanian | | | | | | | | | 147.412,15 | 231.075,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| IKK 2.1 | Persentase ketersediaan tambahan lahan baku terhadap kebutuhan produksi (hanya untuk sawah) | | % | Indikator Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 147.412,15 | 231.075,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBR | Dukungan Teknis | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBR.001 | Dokumen SID Cetak Sawah | | Dokumen | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 147.412,15 | 231.075,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SK.3 | Dimanfaatkannya informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian | | | | | | | | | 3.003,95 | 10.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| IKK 3.1 | Indeks pemanfaatan informasi hasil pemetaan lahan dan irigasi pertanian | | Indeks | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.003,95 | 10.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.AEA.001 | Monitoring dan Evaluasi lingkup Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian | | Paket | RO Baru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 943,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.03.HA.7923.QMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.QMA.001 | Data Lahan Pertanian | | Dokumen | RO Baru | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.060,73 | 10.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| SK.4 | Meningkatnya produktivitas dan pelindungan lahan pertanian | | | | | | | | | 11.706,68 | 174.449,58 | 192.186,00 | 207.854,00 | 223.522,00 | |
| IKK 4.1 | Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan | | % | RPJMN 2025 - 2029 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | - | 154.500,00 | 169.950,00 | 185.400,00 | 200.850,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBO | Prasarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBO.001 | Rehabilitasi lahan sawah | | Ha | RO Baru | - | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | - | 149.775,00 | 164.450,00 | 178.900,00 | 194.250,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.03.HA.7923.RBR.003 | Dokumen SID Rehabilitasi Lahan Sawah | | Dokumen | | | 11 | 11 | 11 | 11 | | 4.725,00 | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | |
| IKK 4.2 | Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | | % | RPJMN 2025 - 2029 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 11.706,68 | 19.949,58 | 22.236,00 | 22.454,00 | 22.672,00 | |
| 018.03.HA.7923.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.PBR.002 | Rekomendasi Pelindungan LP2B dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 11.706,68 | 19.949,58 | 22.236,00 | 22.454,00 | 22.672,00 | |
| SK 5 | Meningkatnya ketersediaan lahan pertanian untuk lumbung pangan | | | | | | | | | - | - | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| IKK 5.1 | Persentase ketersediaan tambahan lahan baku pertanian untuk lumbung pangan | | % | Indikator Baru | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| 018.03.HA.7923.RBO | Prasarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.03.HA.7923.RBO.xxx | Cetak Sawah | | Ha | RO Baru | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | - | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | |
| 7912 Perakitan dan Modernisasi Pertanian | | Pusat | | | | | | | | 47.015,42 | 188.433,93 | 406.696,64 | 425.273,64 | 444.783,64 | |
| SK.1 | Terlindunginya sumber daya genetik tanaman pertanian | | | | | | | | | | - | | | | BBPM Biogen |
| IKK 1.1 | Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia | | aksesi | 4.250,00 | 4.700,00 | 4.725,00 | 4.750,00 | 4.775,00 | 4.800,00 | - | 260,00 | 26.683,00 | 28.015,00 | 29.417,00 | |
| 018.HA.09.7912.DDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.DDA.XXX | Produk Varietas Tanaman Pangan | | Produk | RO Baru | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 2.205,00 | 2.315,00 | 2.431,00 | |
| 018.HA.09.7912.DDA.001 | Produk Varietas Hortikultura | | Produk | RO Baru | - | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | - | 260,00 | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.DDA.XXX | Produk Varietas Perkebunan | | Produk | RO Baru | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | 2.205,00 | 2.315,00 | 2.431,00 | |
| 018.HA.09.7912.DDA.XXX | Produk Varietas Tanaman Pakan Ternak | | Produk | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.DDA.XXX | Produk Varietas Bioteknologi Pertanian | | Produk | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.DDA.XXX | Produk Galur Ternak | | Produk | RO Baru | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 3.308,00 | 3.473,00 | 3.647,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.XXX | Sumber Daya Genetik Pertanian yang Dikonservasi dan Dimanfaatkan | | Unit | 4.250,00 | - | - | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | - | - | 15.656,00 | 16.438,00 | 17.260,00 | |
| SK.2 | Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | PPMP Tanaman Pangan |
| IKK 2.1 | Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan (%) | | % | Indikator Baru | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 4.834,58 | 9.921,18 | 16.162,00 | 18.928,00 | 21.715,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.001 | Produk Teknologi Terapan Tanaman Pangan Modern | | Produk | RO Baru | - | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | - | 4.664,00 | 6.996,00 | 9.328,00 | 11.660,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.101 | Benih Sumber Tanaman Pangan | | Unit | 1.149,00 | 234,00 | - | - | - | - | 4.834,58 | - | - | - | - | |
| 018.HA.09.7912.RAG.002 | Benih Sumber Kedelai | | Unit | RO Baru | - | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 | - | 849,73 | 893,00 | 938,00 | 985,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.001 | Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya | | Unit | RO Baru | - | 800.115,00 | 840.121,00 | 882.128,00 | 926.235,00 | - | 4.407,46 | 4.628,00 | 4.860,00 | 5.103,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Sarana Benih Sumber Tanaman Pangan | | Unit | RO Baru | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Tanaman Pangan | | Unit | RO Baru | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Prasarana Benih Sumber Tanaman Pangan | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Rekomendasi Kebijakan Tanaman Pangan Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Tanaman Pangan Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 359,00 | 370,00 | 390,00 | - | - | 718,00 | 754,00 | 792,00 | |
| SK.3 | Meningkatnya adopsi teknologi digital dan smart farming dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | PPMP Hortikultura |
| IKK 3.1 | Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Hortikultura (%) | | % | Indikator Baru | 7,41 | 14,81 | 22,22 | 25,93 | 29,63 | 2.604,40 | 36.067,194 | 48.056,53 | 50.983,24 | 54.027,94 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.002 | Produk Teknologi Terapan Tanaman Hortikultura Modern | | Produk | RO Baru | - | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | - | 2.798,82 | 3.498,53 | 4.198,24 | 4.897,94 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.102 | Benih Sumber Tanaman Hortikultura | | Unit | RO Baru | 52,00 | - | - | - | - | 2.604,40 | - | - | - | - | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.RAG.002 | Benih Sumber Bawang Putih | | Unit | RO Baru | - | 444,00 | 467,00 | 491,00 | 516,00 | - | 27.750,00 | 29.138,00 | 30.595,00 | 32.125,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.002 | Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya | | Unit | RO Baru | - | 1.034.650,00 | 1.086.383,00 | 1.140.703,00 | 1.197.739,00 | - | 3.452,00 | 3.625,00 | 3.807,00 | 3.998,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Sarana Benih Sumber Tanaman Hortikultura | | Unit | RO Baru | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 1.599,00 | 1.679,00 | 1.762,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Hortikultura | | Unit | RO Baru | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 3.065,00 | 3.218,00 | 3.379,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Kebun Induk Hortikultura | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 4.300,00 | 4.515,00 | 4.740,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK.001 | Prasarana Benih Sumber Hortikultura | | Unit | RO Baru | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | 2.066,37 | 2.170,00 | 2.279,00 | 2.393,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Rekomendasi Kebijakan Hortikultura Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Hortikultura Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 220,00 | 230,00 | 245,00 | - | - | 440,00 | 460,00 | 490,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.4 | Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | PPMP Perkebunan |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 4.1 | Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Perkebunan (%) | | % | Indikator Baru | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | - | 11.750,16 | 16.822,00 | 18.850,00 | 21.209,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.003 | Produk Teknologi Terapan Tanaman Perkebunan Modern | | Produk | RO Baru | - | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | - | 6.708,61 | 8.051,00 | 9.662,00 | 11.595,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.004 | Benih Sumber Tebu | | Unit | RO Baru | - | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.763,00 | - | 706,50 | 742,00 | 780,00 | 819,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.003 | Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya | | Unit | RO Baru | - | 245.000,00 | 257.250,00 | 270.113,00 | 283.619,00 | - | 2.835,05 | 2.977,00 | 3.126,00 | 3.283,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.010 | Sarana Benih Sumber Perkebunan | | Unit | RO Baru | - | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | - | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.654,00 | 1.737,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Perkebunan | | Unit | RO Baru | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Kebun Induk Tanaman Perkebunan | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Prasarana Benih Sumber Perkebunan | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Rekomendasi Kebijakan Perkebunan Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Perkebunan Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 275,00 | 290,00 | 300,00 | - | - | 550,00 | 580,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.5 | Meningkatnya adopsi teknologi digital, smart farming , dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan | | | | | | | | | | | | | | PPMP Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| IKK 5.1 | Persentase peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Peternakan (%) | | % | Indikator Baru | 8,33 | 16,67 | 20,83 | 25,00 | 29,17 | - | 12.231,08 | 14.303,50 | 15.358,00 | 16.431,50 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.004 | Produk Teknologi Terapan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern | | Produk | RO Baru | - | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | - | 2.590,00 | 3.237,50 | 3.885,00 | 4.532,50 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.004 | Bibit Sumber Ternak | | Unit | RO Baru | - | 355.550,00 | 395.000,00 | 415.000,00 | 435.000,00 | - | 5.381,33 | 5.651,00 | 5.934,00 | 6.231,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.005 | Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak | | Unit | RO Baru | - | 394.286,00 | 394.286,00 | 394.286,00 | 394.286,00 | - | 135,66 | 143,00 | 151,00 | 159,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.011 | Sarana Bibit Sumber Ternak | | Unit | RO Baru | - | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | - | 1.124,09 | 1.181,00 | 1.241,00 | 1.304,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan | | Unit | RO Baru | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.004 | Prasarana Bibit Sumber Ternak | | Unit | RO Baru | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Rekomendasi Kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 185,00 | 195,00 | 205,00 | - | - | 370,00 | 390,00 | 410,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.6 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian | | | | | | | | | | | | | | BBPM Mekanisasi Pertanian |
| IKK 6.1 | Indeks pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | - | 4.862,00 | 6.694,00 | 7.903,00 | 9.348,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.008 | Produk Teknologi Terapan Mekanisasi Pertanian Modern | | Produk | RO Baru | - | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | - | 4.862,00 | 5.835,00 | 7.002,00 | 8.403,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Mekanisasi Pertanian | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Mekanisasi Pertanian Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Mekanisasi Pertanian Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 69,00 | 72,00 | 75,00 | - | - | 138,00 | 144,00 | 150,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.7 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian | | | | | | | | | | | | | | BBPM Sumber Daya Lahan Pertanian |
| IKK 7.1 | Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 50,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | - | 2.098,71 | 3.729,34 | 4.384,97 | 5.032,60 | |
| 018.HA.09.7912.DDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.010 | Produk Teknologi Terapan Sumber Daya Lahan Pertanian Modern | | Produk | RO Baru | - | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | - | 2.098,71 | 2.698,34 | 3.297,97 | 3.897,60 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Lahan Pertanian Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 155,00 | 165,00 | 170,00 | - | - | 310,00 | 330,00 | 340,00 | |
| SK.8 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian | | | | | | | | | | | | | | BBPM Pasca Panen |
| IKK 8.1 | Indeks pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | - | 2.279,00 | 4.021,60 | 4.979,20 | 5.938,80 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.007 | Produk Teknologi Terapan Pascapanen Pertanian Modern | | Produk | RO Baru | - | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | - | 2.279,00 | 3.190,60 | 4.102,20 | 5.013,80 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Pascapanen Pertanian | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Pascapanen Pertanian Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Pascapanen Pertanian Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 55,00 | 60,00 | 65,00 | - | - | 110,00 | 120,00 | 130,00 | |
| SK.9 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi padi | | | | | | | | | | | | | | BBMP Padi |
| IKK 9.1 | Indeks pemanfaatan teknologi padi | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 76,00 | - | 5.809,32 | 10.249,00 | 12.317,00 | 14.402,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.011 | Produk Teknologi Terapan Padi Modern | | Produk | RO Baru | - | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | - | 840,00 | 2.520,00 | 4.200,00 | 5.880,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.001 | Benih Sumber Padi | | Unit | RO Baru | - | 250,00 | 263,00 | 277,00 | 291,00 | - | 4.969,32 | 5.218,00 | 5.479,00 | 5.753,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Padi | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 551,00 | 579,00 | 608,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Sarana Benih Sumber Padi | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Prasarana Benih Sumber Tanaman Padi | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Tanaman Padi Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Padi Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 68,00 | 72,00 | 75,00 | - | - | 136,00 | 144,00 | 150,00 | |
| SK.10 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian | | | | | | | | | | | | | | BBPM Biogen |
| IKK 10.1 | Indeks pemanfaatan teknologi hasil bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian (Indeks) | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 45,00 | 51,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | - | 4.181,80 | 5.760,00 | 6.512,00 | 7.271,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.009 | Produk Bioteknologi dan SDGP Terapan Modern | | Produk | RO Baru | - | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | - | 1.719,00 | 2.292,00 | 2.865,00 | 3.438,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.008 | Benih Sumber Padi Hasil Bioteknologi | | Unit | RO Baru | - | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | - | 2.462,80 | 2.586,00 | 2.716,00 | 2.852,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 551,00 | 579,00 | 608,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 55,00 | 60,00 | 65,00 | - | - | 110,00 | 120,00 | 130,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.11 | Terwujudnya pemanfaatan teknologi veteriner | | | | | | | | | | | | | | BBPM Veteriner |
| IKK 11.1 | Indeks pemanfaatan teknologi veteriner | | Nilai Indeks | Indikator Baru | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | - | 685,00 | 2.049,67 | 2.553,33 | 3.056,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.005 | Produk Teknologi Terapan Veteriner Modern | | Produk | RO Baru | - | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | - | 685,00 | 1.141,67 | 1.598,33 | 2.055,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Veteriner | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 551,00 | 579,00 | 608,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Veteriner Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 221,00 | 232,00 | 243,00 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Sosialisasi Teknologi Veteriner Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 68,00 | 72,00 | 75,00 | - | - | 136,00 | 144,00 | 150,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.12 | Meningkatnya adopsi teknologi modernisasi pertanian yang adaptif | | | | | | | | | | | | | | Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian |
| IKK 12.1 | Persentase peningkatan ketersediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif | | % | Indikator Baru | - | 22,08 | 22,73 | 25,97 | 29,22 | 39.576,44 | 98.288,50 | 252.166,01 | 254.489,90 | 256.934,80 | |
| 018.HA.09.7912.SDA | Penelitian dan Pengembangan Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.SDA.006 | Produk Teknologi Pertanian Adaptif dan Modern | | Produk | RO Baru | - | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | 8.200,00 | 9.840,00 | 9.939,00 | 10.039,00 | |
| 018.HA.09.7912.SDC | Penelitian dan Pengembangan Model | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.SDC.001 | Model Pertanian modern | | Produk | RO Baru | - | 2,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | 495,64 | 521,00 | 548,00 | 576,00 | |
| 018.HA.09.7912.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.ABR.XXX | Bahan Rekomendasi Kebijakan Pertanian Modern | | Rekomendasi Kebijakan | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 441,00 | 463,00 | 486,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Produk Modernisasi Pertanian | | Produk | RO Baru | - | - | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | 7.497,00 | 7.572,00 | 7.648,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Sarana Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | - | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | 18.191,00 | 18.373,00 | 18.557,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.106 | Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi | | Unit | 1.962,00 | 1.962,00 | - | - | - | - | 32.163,64 | - | - | - | - | |
| 018.HA.09.7912.CAG.006 | Benih Sumber Tanaman Pangan Lainnya Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 587,00 | 617,00 | 648,00 | 681,00 | - | 11.220,48 | 12.282,00 | 12.372,00 | 12.491,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.107 | Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | 148,00 | - | - | - | - | 7.412,80 | - | - | - | - | |
| 018.HA.09.7912.CAG.007 | Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 298.799,00 | 313.739,00 | 329.426,00 | 345.898,00 | - | 5.011,53 | 5.463,00 | 5.527,00 | 5.604,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.008 | Benih Sumber Tanaman Perkebunan Lainnya Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 65.500,00 | 68.775,00 | 72.214,00 | 75.825,00 | - | 1.635,70 | 1.818,00 | 1.804,00 | 1.895,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.XXX | Benih Sumber Tanaman Pakan Ternak Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | - | 100,00 | 105,00 | 111,00 | - | - | 500,00 | 525,00 | 552,00 | |
| 018.HA.09.7912.CAG.009 | Bibit Sumber Peternakan Lainnya Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 144.000,00 | 151.200,00 | 158.760,00 | 166.698,00 | - | 3.893,74 | 4.189,00 | 4.294,00 | 4.309,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.RAG.005 | Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 2.186,00 | 2.296,00 | 2.411,00 | 2.532,00 | - | 37.262,37 | 39.226,00 | 40.111,90 | 40.138,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7912.RAG.006 | Benih Sumber Kedelai Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 565,00 | 594,00 | 624,00 | 656,00 | - | 13.040,12 | 13.893,00 | 13.978,00 | 14.097,00 | |
| 018.HA.09.7912.RAG.007 | Benih Sumber Bawang Putih Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | 280,00 | 294,00 | 309,00 | 325,00 | - | 17.528,93 | 18.606,00 | 18.827,00 | 19.794,00 | |
| 018.HA.09.7912.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.CBK.XXX | Prasarana Benih/ Bibit Sumber Spesifik Lokasi | | Unit | RO Baru | - | - | 34,00 | 34,00 | 34,00 | - | - | 11.415,00 | 11.460,00 | 11.817,80 | |
| 018.HA.09.7912.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.AEF.XXX | Diseminasi Teknologi Pertanian Modern | | Orang | RO Baru | - | - | 7.635,75 | 7.636,25 | 7.680,75 | - | - | 30.543,00 | 30.545,00 | 30.723,00 | |
| 018.HA.09.7912.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.HA.09.7912.BDB.XXX | Pendampingan penerapan modernisasi pertanian meningkatkan produktivitas | | Lembaga | RO Baru | - | - | 114,00 | 114,00 | 114,00 | - | - | 77.741,01 | 78.151,00 | 78.208,00 | |
| Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri | | | | | | | | | | 4.596.019,33 | 6.623.748,31 | 4.400.021,63 | 3.109.965,34 | 2.604.268,77 | |
| SP.1 | Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Tanaman Pangan |
| IKP 1.1 | Indeks harga yang diterima petani Tanaman Pangan | | % | 133,83 | 135,19 | 136,57 | 137,96 | 139,36 | 140,78 | | | | | | |
| SP.2 | Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen TP (HHTP) |
| IKP 2.1 | Volume ekspor komoditas tanaman pangan | | ton | 262.954 | 264.509 | 266.073 | 267.647 | 269.229 | 270.822 | | | | | | |
| SP.3 | Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen TP (HHTP) |
| IKP 3.1 | Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman pangan | | Nilai | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | | | | | | |
| SP.4 | Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi | | | | | | | | | | | | | | Ditjen TP (HHTP) |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKP 4.1 | Indeks hilirisasi komoditas tanaman pangan unggulan | | Nilai | indikator baru | 0,43 | 0,57 | 0,71 | 0,86 | 1,00 | | | | | | |
| SP.5 | Meningkatnya indeks harga yang diterima petani Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Hortikultura |
| IKP 5.1 | indeks harga yang diterima petani Hortikultura | | Nilai | 141,82 | 141,83 | 141,84 | 141,85 | 141,86 | 141,87 | | | | | | |
| SP.6 | Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Hortikultura |
| IKP 6.1 | Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Hortikultura | | Nilai | indikator baru | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | | | | | | |
| SP.7 | Meningkatnya volume ekspor komoditas hortikultura | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Hortikultura |
| IKP 7.1 | Volume ekspor komoditas hortikultura | | Ribu Ton | 354 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | | | | | | |
| SP.8 | Meningkatnya hasil pengolahan komoditas hortikultura unggulan yang telah menerapkan hilirisasi | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Hortikultura |
| IKP.8.1 | Indeks hilirisasi komoditas tanaman hortikultura unggulan | | % | indikator baru | 0,07 | 0,27 | 0,67 | 0,87 | 1,00 | | | | | | |
| SP.9 | Terpenuhinya Produksi Komoditas Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 9.1 | Produksi Kelapa Sawit | | Ton | 235.421.494 | 239.646.870 | 243.241.575 | 245.432.325 | 253.040.740 | 257.074.690 | | | | | | |
| IKP 9.2 | Produksi Kelapa | | Ton | 2.792.228 | 2.880.690 | 2.890.917 | 2.901.144 | 2.911.371 | 2.936.021 | | | | | | |
| IKP 9.3 | Produksi Sagu | | Ton | 393.284 | 393.623 | 413.304 | 433.969 | 455.667 | 478.451 | | | | | | |
| IKP 9.4 | Produksi Lada | | Ton | 58.897 | 64.408 | 64.408 | 64.537 | 64.601 | 64.666 | | | | | | |
| IKP 9.5 | Produksi Pala | | Ton | 39.558 | 41.527 | 41.568 | 41.610 | 41.652 | 41.693 | | | | | | |
| IKP 9.6 | Produksi Cengkeh | | Ton | 133.408 | 133.570 | 133.703 | 133.837 | 133.971 | 134.105 | | | | | | |
| IKP 9.7 | Produksi Vanili | | Ton | 1.212 | 1.582 | 1.585 | 1.585 | 1.587 | 1.588 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKP 9.8 | Produksi Kopi | | Ton | 758.725 | 780.957 | 786.119 | 791.434 | 796.776 | 802.210 | | | | | | |
| IKP 9.9 | Produksi Tebu | | Ton | 33.216.612 | 36.813.539 | 39.555.979 | 42.478.762 | 60.450.243 | 84.714.460 | | | | | | |
| IKP 9.10 | Produksi Karet | | Ton | 2.132.088 | 2.496.364 | 2.470.676 | 2.756.865 | 2.917.026 | 3.080.114 | | | | | | |
| IKP 9.11 | Produksi Kakao | | Ton | 617.112 | 632.787 | 633.290 | 633.792 | 634.294 | 634.796 | | | | | | |
| IKP 9.12 | Produksi Teh | | Ton | 116.418 | 116.555 | 116.579 | 116.602 | 116.624 | 116.648 | | | | | | |
| IKP 9.13 | Produksi Jambu Mete | | Ton | 136.505 | 136.642 | 136.915 | 137.257 | 137.600 | 138.013 | | | | | | |
| IKP 9.14 | Produksi Tanaman Palma Lainnya | | Ton | 186.765 | 188.236 | 189.899 | 192.270 | 194.173 | 195.953 | | | | | | |
| IKP 9.15 | Produksi Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya | | Ton | 283.070 | 317.790 | 383.719 | 400.831 | 417.946 | 435.065 | | | | | | |
| SP.10 | Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi | | | | | | | | | | | | | | Ditjen. Perkebunan |
| IKP.10.1 | Produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi | | Juta Ton | Indikator Baru | 66,37 | 87,35 | 89,97 | 93,67 | 98,78 | | | | | | |
| SP 11 | Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Perkebunan |
| IKP 11.1 | Indeks harga yang diterima Pekebun | | Nilai | Indikator Baru | 154,80 | 160,10 | 165,70 | 171,40 | 177,30 | | | | | | |
| SP 12 | Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Perkebunan |
| IKP 12.1 | Indeks Mutu dan Keamanan komoditas pertanian tanaman Perkebunan | | Nilai | Indikator Baru | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | | | | | | |
| SP 13 | Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Perkebunan |
| IKP 13.1 | Volume ekspor komoditas perkebunan | | ribu ton | 38.034,00 | 38.224,00 | 38.415,00 | 38.607,00 | 38.800,00 | 38.994,00 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SP.14 | Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi | | | | | | | | | | | | | | Ditjen Perkebunan |
| IKP 14.1 | Indeks hilirisasi komoditas Perkebunan unggulan | | Nilai | Indikator Baru | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | | | | | | |
| SP.15 | Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 15.1 | Indeks Harga yang diterima peternak | | indeks | 122,91 | 124,75 | 126,62 | 128,52 | 130,45 | 132,41 | | | | | | |
| SP.16 | Terjaminnya mutu komoditas peternakan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 16.1 | Indeks Mutu komoditas peternakan | | indeks | - | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | | | | | | |
| SP.17 | Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 17.1 | volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan | | Ton | 489.639 | 499.432 | 514.415 | 540.136 | 567.143 | 595.500 | | | | | | |
| SP.18 | Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi | | | | | | | | | | | | | | |
| IKP 18.1 | Indeks hilirisasi komoditas peternakan unggulan | | indeks | - | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | | | | | | |
| SP.19 | Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional | | | | | | | | | | | | | | BRMP |
| IKP 19.1 | Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi (%) | | % | Indikator Baru | 13,07 | 28,76 | 30,72 | 53,59 | 55,00 | | | | | | |
| 5885 Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan | | | | | | | | | | 1.291.112,91 | 6.000,00 | 7.346,58 | 7.775,93 | 8.248,22 | |
| SK.1 | Tersedianya akses pasar komoditas tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan usaha tani | | | | | | | | | 1.560 | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | Dit HH TP |
| IKK 1.1 | Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani Tanaman Pangan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani tanaman pangan | | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1.560 | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.5885.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5885.BMA.001 | Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan | | data | RO Baru | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 1.560 | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | |
| SK.2 | Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian TP siap ekspor | | | | | | | | | 14.811,64 | 1.903,21 | 2.696,79 | 2.906,14 | 3.136,43 | Dit HH TP |
| IKK 2.1 | Persentase produk komoditas tanaman pangan siap ekspor terhadap total potensi ekspor tanaman pangan | | % | 29 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | 14.811,64 | 1.903,21 | 2.696,79 | 2.906,14 | 3.136,43 | |
| 018.EC.5885.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5885.AEA.001 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu, serta pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan | | Kegiatan | 32 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14.811,64 | 1.903,21 | 2.696,79 | 2.906,14 | 3.136,43 | |
| SK.3 | Terwujudnya komoditas pertanian TP bermutu dan aman | | | | | | | | | 715 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Dit HH TP |
| IKK 3.1 | Persentase komoditas pertanian TP yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian TP | | % | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 715 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 018.EC.5885.PDC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5885.PDC.001 | Sertifikat Produk Tanaman Pangan | | Sertifikat | 6 | 13 | 44 | 44 | 44 | 44 | 715 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| SK.4 | Meningkatnya komoditas tanaman pangan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing | | | | | | | | | 1.274.026,27 | 96,79 | 449,79 | 449,79 | 449,79 | Dit HH TP |
| IKK 4.1 | Persentase komoditas tanaman pangan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas tanaman pangan unggulan | | % | Indikator Baru | 28,57 | 42,86 | 57,14 | 71,43 | 85,71 | 1.274.026,27 | 96,79 | 449,79 | 449,79 | 449,79 | |
| 018.EC.5885.AFA | Norma,Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.5885.AFA.001 | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pascapanen, pengolahan, hilirisasi, penerapan dan pengawasan standar, keamanan dan mutu, serta pemasaran dan pengembangan usaha tanaman pangan | | NSPK | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 27,85 | 96,79 | 449,79 | 449,79 | 449,79 | |
| 018.EC.5885.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5885.CAG.002 | Sarana pengolahan hasil tanaman pangan | | Unit | RO Baru | 1,00 | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | |
| 018.EC.5885.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5885.RAG.001 | Sarana pascapanen tanaman pangan | | Unit | 1.407,00 | 2.622,00 | - | - | - | - | 654.182,25 | - | - | - | - | |
| 018.EC.5885.RAG.003 | Sarana pascapanen tanaman pangan (QW) | | Unit | 1,00 | 2.295,00 | - | - | - | - | 619.416,17 | - | - | - | - | |
| 5887 Hilirisasi Hasil Hortikultura | | | | | | | | | | 185.098,00 | 157.615,44 | 443.522,00 | 713.522,00 | 174.497,00 | |
| SK.1 | Tersedianya akses pasar komoditas hortikultura yang dapat dimanfaatkan usaha tani | | | | | | | | | - | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura |
| IKK 1.1 | Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani hortikultura terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani hortikultura | | % | - | 80,00 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | 95,00 | | | | | | |
| 018.EC.5887.PEH | Promosi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.PEH.020 | Promosi Produk Hortikultura | | Promosi | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 20 | | | | | | |
| SK.2 | Terwujudnya komoditas pertanian Hortikultura bermutu dan aman | | | | | | | | | - | 9.700,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura |
| IKK 2.1 | Persentase komoditas pertanian Hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian Hortikultura | | % | - | 80,00 | 82,50 | 85,00 | 87,50 | 90,00 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.5887.PDA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.PDA.010 | Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura | | produk | 1.000 | - | 1.780 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | | | | | | |
| 018.EC.5887.PDC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.PDC.010 | Sertifikat Produk Hortikultura | | produk | 100 | - | 150 | 150 | 150 | 300 | | | | | | |
| SK.3 | Meningkatnya ketersediaan produk komoditas pertanian hortikultura siap ekspor | | | | | | | | | 184.598,00 | 144.961,90 | 430.272,00 | 700.172,00 | 161.098,00 | Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura |
| IKK 3.1 | Persentase produk komoditas hortikultura siap ekspor terhadap total potensi ekspor hortikultura | | % | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 018.EC.5887.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.QDD.021 | Kelompok Tani terlatih GAP | | Kelompok masyarakat | 110 | - | 135 | 140 | 140 | 300 | | | | | | |
| 018.EC.5887.QDD.022 | Kelompok Tani Terlatih GHP | | Kelompok masyarakat | 40 | - | 40 | 50 | 50 | 100 | | | | | | |
| 018.EC.5887.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.RAI.010 | *Horticulture Development of Dryland Areas Project* | | Unit | 1 | 500 | 887 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | | | | | | |
| SK.4 | Meningkatnya komoditas hortikultura unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing | | | | | | | | | 500,00 | 2.554,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.049,00 | Dit Hilirisasi Hasil Hortikultura |
| IKK 4.1 | Persentase komoditas hortikultura yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas hortikultura unggulan | | % | - | 66,67 | 73,33 | 80,00 | 86,67 | 100 | | | | | | |
| 018.EC.5887.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.AEA.011 | Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Hortikultura | | Kegiatan | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 018.EC.5887.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.5887.ABR.012 | Rekomendasi Kebijakan Hilirisasi Hasil Hortikultura | | Rekomendasi Kebijakan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit Dan Aneka Palma | | | | | | | | | | 90.509,02 | 474.798,55 | 224.045,79 | 120.674,00 | 121.757,80 | |
| SK.1 | Terpenuhinya produktivitas komoditas tanaman kelapa sawit dan aneka palma | | | | | | | | | | | | | | Dit Tan. Sawit & Aneka Palma |
| IKK1.1 | Produktivitas Kelapa Sawit | | Ton/Ha | 17,20 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,50 | | | | | | |
| IKK1.2 | Produktivitas Kelapa | | Ton/Ha | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | | | | | | |
| IKK1.3 | Produktivitas Sagu | | Ton/Ha | 3,01 | 3,12 | 3,14 | 3,16 | 3,18 | 3,19 | | | | | | |
| Ikk1.4 | Produktivitas Tanaman Palma Lainnya | | Ton/Ha | 3,50 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,56 | 3,58 | | | | | | |
| 1777.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777.AEA.001 | Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma | | Kegiatan | 7 | 8 | - | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 1777.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777.AFA.001 | Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma | | NSPK | 6 | 5 | - | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| 1777.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777.RAI.001 | Kawasan Kelapa | | Ha | 11.260 | 11.515 | 154.000 | 64.275 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 1777.RAI.002 | Kawasan Sagu | | Ha | 551 | 1.700 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | | | | | | |
| 1777.RAI.003 | Kawasan Pinang | | Ha | 100 | - | - | 300 | 300 | 300 | | | | | | |
| 1777.CAI.001 | Kawasan Tanaman Palma Lainnya | | Ha | - | - | - | 500 | 500 | 500 | | | | | | |
| | Kawasan Kelapa Sawit | | Ha | - | 25.500 | 36.000 | 46.500 | 52.000 | 57.000 | | | | | | |
| 1777.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1777.QDC.001 | Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma | | Orang | - | - | 3.800 | 4.600 | 5.200 | 6.000 | | | | | | |
| SK.2 | Tersedianya komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan |
| IKK 2.1 | Persentase ketersediaan komoditas perkebunan untuk bahan baku bio energi | | % | Indikator Baru | 28 | 36 | 37 | 37 | 38 | | | | | | |
| 1777.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1777.AEA.002 | Koordinasi, Bimtek, Pembinaan, Monev dan Pelaporan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit untuk mendukung Bio Energi | | Kegiatan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Tahunan | | | | | | | | | | 1.811.291,96 | 1.721.379,76 | 1.970.829,86 | 1.868.696,68 | 1.884.908,80 | |
| SK.1 | Terpenuhinya produktivitas tanaman semusim dan tahunan | | | | | | | | | | | | | | Dit Tan Semusim dan Tahunan |
| IKK 1.1 | Produktivitas Lada | | Ton/Ha | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Produktivitas Pala | | Ton/Ha | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | | | | | | |
| IKK 1.3 | Produktivitas Cengkeh | | Ton/Ha | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | | | | | | |
| IKK 1.4 | Produktivitas Vanili | | Ton/Ha | 0,31 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | | | | | | |
| IKK 1.5 | Produktivitas Kopi | | Ton/Ha | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | | | | | | |
| IKK 1.6 | Produktivitas Kakao | | Ton/Ha | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | | | | | | |
| IKK 1.7 | Produktivitas Tebu | | Ton/Ha | 63,78 | 69,98 | 73,42 | 75,82 | 83,50 | 87,40 | | | | | | |
| IKK 1.8 | Produktivitas Karet | | Ton/Ha | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | | | | | | |
| IKK 1.9 | Produktivitas Teh | | Ton/Ha | 1,48 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | | | | | | |
| IKK 1.10 | Produktivitas Jambu Mete | | Ton/Ha | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | | | | | | |
| IKK 1.11 | Produktivitas tanaman semusim dan tahunan lainnya | | Ton/Ha | 3,34 | 3,34 | 3,45 | 3,47 | 3,50 | 3,51 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5888.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888.AEA.001 | Koordinasi Bimtek, Pembinaan, Monev, dan Pelaporan budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan | | Kegiatan | 7 | 6 | - | 34 | 34 | 34 | | | | | | |
| 5888.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888.AFA.001 | Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Tahunan | | NSPK | 11 | 16 | - | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 5888.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888.RAI.001 | Kawasan Lada | | Ha | 200 | 1.200 | 3.438 | 2.362 | 3.000 | 3.100 | | | | | | |
| 5888.RAI.002 | Kawasan Pala | | Ha | 1.000 | 8.000 | 14.800 | 22.200 | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| 5888.RAI.003 | Kawasan Cengkeh | | Ha | 700 | - | - | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | | | | | |
| 5888.RAI.004 | Kawasan Tebu | | Ha | 4.700 | 100.453 | 99.547 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | | | | | |
| 5888.RAI.005 | Kawasan Vanili | | Ha | 15 | - | - | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 5888.RAI.006 | Kawasan Kopi | | Ha | 11.600 | 17.900 | 86.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 5888.RAI.007 | Kawasan Kakao | | Ha | 1.350 | 8.716 | 175.500 | 68.734 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5888.RAI.008 | Kawasan Karet | | Ha | 1.200 | - | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 5888.RAI.009 | Kawasan Jambu Mete | | Ha | 3.700 | 1.800 | 48.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| 5888.RAI.010 | Kawasan Teh | | Ha | - | - | - | 4.950 | 4.950 | 4.950 | | | | | | |
| 5888.CAI.001 | Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya | | Ha | - | - | - | 1.350 | 1.450 | 1.550 | | | | | | |
| 5888.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5888.QDC.001 | Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Semusim dan Tahunan | | Orang | - | - | 38.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | | | | | | |
| 1779 Pelindungan Perkebunan | | | | | | | | | | 10.541,17 | 5.049,51 | 92.007,60 | 106.203,92 | 109.567,48 | |
| SK.1 | Terlindunginya komoditas perkebunan dari OPT dan dampak perubahan iklim | | | | | | | | | | | | | | Dit Pelindungan Bun |
| IKSK 1.1 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa Sawit | | % | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 1.2 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kelapa | | % | 31 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | | | | | | |
| IKSK 1.3 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Sagu | | % | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| IKSK 1.4 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Lada | | % | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | | | | | | |
| IKSK 1.5 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Pala | | % | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | | | | | | |
| IKSK 1.6 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Cengkeh | | % | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | | | | | | |
| IKSK 1.7 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Vanili | | % | 48 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | | | | | | |
| IKSK 1.8 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kopi | | % | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | | | | | | |
| IKSK 1.9 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tebu | | % | 15 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 1.10 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Karet | | % | 33 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | | | | | | |
| IKSK 1.11 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Kakao | | % | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | | | | | | |
| IKSK 1.12 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Teh | | % | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | | | | | | |
| IKSK 1.13 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Jambu Mete | | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| IKSK 1.14 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Palma Lainnya | | % | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| IKSK 1.15 | - Persentase area/ wilayah perkebunan yang terkendali terhadap luas area/wilayah perkebunan yang terserang OPT dan DPI pada komoditas Tanaman Semusim dan Tahunan Lainnya | | % | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 1779.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.AEA.001 | Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perlindungan Perkebunan | | Kegiatan | 7 | 5 | - | 17 | 17 | 17 | | | | | | |
| 1779.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.AFA.001 | Peraturan/Norma/Pedoman Pelindungan Perkebunan | | NSPK | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| 1779.RAI | Sarana Pengembangan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1779.RAI.001 | Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun | | Ha | 81 | - | 22 | 400 | 400 | 400 | | | | | | |
| 1779.RAI.002 | Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan | | Ha | 4.045 | - | 450 | 5.350 | 6.275 | 6.275 | | | | | | |
| 1779.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.QDD.001 | Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan | | Kelompok Masyarakat | 51 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | | | | | | |
| 1779.QDD.002 | Regu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | | Kelompok Masyarakat | - | - | 13 | 210 | 260 | 257 | | | | | | |
| 1779.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.CAG.001 | Perangkat Perlindungan Perkebunan | | Unit | 61 | 62 | - | 62 | 62 | 62 | | | | | | |
| SK.2 | Terwujudnya layanan pelindungan perkebunan | | | | | | | | | | | | | | UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKSK 2.1 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.2 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.3 | persentase layanan pelindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.4 | persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 2.5 | persentase layanan pelindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.6 | persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.7 | persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.8 | persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.9 | persentase layanan pelindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.10 | persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.11 | persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Medan | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.12 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.13 | persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.14 | persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.15 | persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.16 | persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.17 | persentase layanan pelindungan komoditas Tebu di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 2.18 | persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.19 | persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.20 | persentase layanan pelindungan komoditas Teh di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.21 | persentase layanan pelindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.22 | persentase layanan pelindungan komoditas semusim dan tahunan lainnya di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.23 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.24 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.25 | persentase layanan pelindungan komoditas Sagu di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.26 | persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.27 | persentase layanan pelindungan komoditas Pala di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.28 | persentase layanan pelindungan komoditas Cengkeh di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.29 | persentase layanan pelindungan komoditas Vanili di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.30 | persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 2.31 | persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.32 | persentase layanan pelindungan komoditas Jambu Mete di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.33 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa Sawit di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.34 | persentase layanan pelindungan komoditas Kelapa di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.35 | persentase layanan pelindungan komoditas Lada di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.36 | persentase layanan pelindungan komoditas Kopi di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.37 | persentase layanan pelindungan komoditas Karet di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| IKSK 2.38 | persentase layanan pelindungan komoditas Kakao di wilayah kerja BPTP Pontianak | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 1779.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.CAG.002 | Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan | | Unit | 13 | 6 | - | 18 | 21 | 23 | | | | | | |
| 1779.BAA | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 1779.BAA.001 | Layanan Proteksi Tanaman Perkebunan | | Orang | - | - | 26 | 73 | 82 | 92 | | | | | | |
| 5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan | | | | | | | | | | 1.026.539,83 | 3.664.272,45 | 972.806,31 | 54.305,70 | 55.448,64 | |
| SK.1 | Tersedianya benih perkebunan berdasarkan kebutuhan produksi perkebunan | | | | | | | | | | | | | | Dit Perbenihan Bun |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 1.1 | - Persentase ketersediaan benih kelapa sawit terhadap kebutuhan produksi kelapa sawit | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | | |
| IKSK 1.2 | - Persentase ketersediaan benih kelapa terhadap kebutuhan produksi kelapa | | % | Indikator Baru | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.3 | - Persentase ketersediaan benih sagu terhadap kebutuhan produksi sagu | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.4 | - Persentase ketersediaan benih lada terhadap kebutuhan produksi lada | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.5 | - Persentase ketersediaan benih pala terhadap kebutuhan produksi pala | | % | Indikator Baru | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.6 | - Persentase ketersediaan benih cengkeh terhadap kebutuhan produksi cengkeh | | % | Indikator Baru | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.7 | - Persentase ketersediaan benih vanili terhadap kebutuhan produksi vanili | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.8 | - Persentase ketersediaan benih kopi terhadap kebutuhan produksi kopi | | % | Indikator Baru | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.9 | - Persentase ketersediaan benih tebu terhadap kebutuhan produksi tebu | | % | Indikator Baru | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.10 | - Persentase ketersediaan benih karet terhadap kebutuhan produksi karet | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.11 | - Persentase ketersediaan benih kakao terhadap kebutuhan produksi kakao | | % | Indikator Baru | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 1.12 | - Persentase ketersediaan benih teh terhadap kebutuhan produksi teh | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.13 | - Persentase ketersediaan benih jambu mete terhadap kebutuhan produksi jambu mete | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 1.14 | - Persentase ketersediaan benih tanaman palma lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman palma lainnya | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| IKSK 1.15 | - Persentase ketersediaan benih semusim dan tahunan lainnya terhadap kebutuhan produksi tanaman semusim dan tahunan lainnya | | % | Indikator Baru | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | | | | | | |
| 5890.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.ABR.001 | Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan | | Rekomendasi | 70,00 | 17 | 2 | 121 | 121 | 121 | | | | | | |
| 5890.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.AEA.001 | Koordinasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Perbenihan Perkebunan | | Kegiatan | 7,00 | 1 | - | 30 | 35 | 40 | | | | | | |
| 5890.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.AFA.001 | Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan | | NSPK | 6,00 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 5890.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.RBK.001 | Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan | | Unit(ha) | 12,00 | 1.580 | 6.638 | 21 | 13 | 10 | | | | | | |
| 5890.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.QDD.001 | Desa Mandiri Benih Komoditas Perkebunan | | Kelompok Masyarakat | - | - | 2 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 5890.RDK | OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.RDK.001 | Layanan Pemeliharaan Kebun Benih Sebar Komoditas Perkebunan | | Unit(ha) | 841,00 | 635 | 203 | 782 | 743 | 683 | | | | | | |
| 5890.RDK.002 | Layanan Operasional Nursery | | Unit | 11,00 | 78 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | |
| 5890.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5890.RAG.001 | Benih Komoditas Perkebunan Siap Salur | | Unit (Batang) | - | - | 291.042.800 | 81.642.250 | - | - | | | | | | |
| SK.2 | Terjaminnya mutu benih Perkebunan yang beredar | | | | | | | | | | | | | | UPT lingkup Ditjen. Perkebunan |
| IKSK 2.1 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.2 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih aren yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.3 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.4 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih karet yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.5 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.6 | Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kopi yang beredar diwilayah BBPPTP Medan | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| IKSK 2.7 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | | |
| IKSK 2.8 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | | | | | | |
| IKSK 2.9 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.10 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKSK 2.11 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih sagu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Ambon | | % | Indikator Baru | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.12 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa sawit yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.13 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih tebu yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.14 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kopi yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.15 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kakao yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.16 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.17 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih jambu mete yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.18 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih pala yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.19 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih lada yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.20 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih vanili yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.21 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih teh yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |
| IKSK 2.22 | - Persentase benih bermutu terhadap total benih tanaman semusim lainnya yang beredar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya | | % | Indikator Baru | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5890.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.BJA.001 | Layanan Pengujian Mutu Benih | | Produk (Batang) | 12.589.740 | 12.589.740 | 5.527.084 | 12.589.740 | 12.589.740 | 12.589.740 | | | | | | |
| 5890.BJA.002 | Layanan Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan | | Produk (Batang) | 61.659.600 | 61.409.600 | 50.334.580 | 61.659.600 | 61.659.600 | 61.659.600 | | | | | | |
| 5890.RDK | OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 5890.RDK.003 | Layanan Operasional laboratorium pengujian perbenihan tanaman perkebunan | | Unit | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | | | |
| 5889. Hilirisasi Hasil Perkebunan | | | | | | | | | | 27.061,69 | 4.956,00 | 9.876,38 | 10.736,38 | 11.496,38 | |
| SK.1 | Tersedianya akses pasar komoditas perkebunan yang dapat dimanfaatkan usaha tani | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan |
| IKK 1.1 | Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha tani perkebunan terhadap total akses pasar yang didapat usaha tani perkebunan (%) | | % | Indikator Baru | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | | | | | | |
| 5889.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.BMA.001 | Informasi Pasar Komoditas Perkebunan | | Dokumen | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | | | |
| 5889.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.QDD.001 | Layanan Pengawasan Usaha Perkebunan | | Kelompok Masyarakat | 15 | - | 10 | 16 | 16 | 16 | | | | | | |
| 5889.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.AEA.001 | Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Hilirisasi Hasil Perkebunan | | Kegiatan | 57 | 17 | - | - | - | - | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.2 | Terwujudnya komoditas perkebunan bermutu bermutu dan aman | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan |
| IKK 2.1 | Persentase komoditas pertanian perkebunan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan terhadap total komoditas pertanian perkebunan | | % | Indikator Baru | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | | | | | | |
| 5889.BIA | Pengawasan dan Pengendalian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.BIA.001 | Pengawasan dan pengendalian Mutu dan keamanan produk perkebunan | | Laporan | - | - | - | 12 | 15 | 17 | | | | | | |
| 5889.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.QDD.002 | Pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan komoditas Perkebunan kelompok masyarakat | | Kelompok Masyarakat | - | - | - | 7 | 7 | 7 | | | | | | |
| SK.3 | Meningkatnya ketersediaan produk komoditas perkebunan siap ekspor | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan |
| IKK 3.1 | Persentase produk komoditas perkebunan siap ekspor terhadap total potensi ekspor perkebunan | | % | Indikator Baru | 70 | 73 | 76 | 80 | 83 | | | | | | |
| 5889.AEH | Promosi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.AEH.001 | Promosi Produk Hasil Perkebunan | | Promosi | 15 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| SK.4 | Meningkatnya komoditas perkebunan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing | | | | | | | | | | | | | | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan |
| IKK 4.1 | Persentase komoditas perkebunan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas perkebunan unggulan | | % | Indikator Baru | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5889.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.QDD.003 | Pembinaan hilirisasi komoditas perkebunan unggulan | | Kelompok Masyarakat | - | - | - | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| 5889.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.AFA.001 | Peraturan/Norma/ Pedoman Hilirisasi Hasil Perkebunan | | NSPK | 8 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | | | | | | |
| 5889.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5889.ABR.001 | Kebijakan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan (Hilirisasi Bidang Perkebunan) | | Rekomendasi kebijakan | - | - | 12 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 5889.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5889.RAG.001 | Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan | - | Unit | 45 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5889.RAG.002 | Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan | - | Unit | 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5889.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | - | | - | | | | | | - | - | - | - | - | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 5889.RBK.002 | Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan | - | Unit | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5889.PDA | Standarisasi Produk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5889.PDA.001 | Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) | - | STDB | 42.001 | 13.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5891 Hilirisasi Hasil Peternakan | | | | | | | | | | 4.500,00 | 25.000,00 | 80.377,00 | 81.524,00 | 84.471,00 | |
| SK.1 | Tersedianya akses pasar komoditas peternakan yang dapat dimanfaatkan usaha peternakan | | | | | | | | | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 1.000,00 | |
| IKK 1.1 | Persentase akses pasar yang dimanfaatkan usaha peternakan terhadap total akses pasar yang didapat usaha peternakan | Pusat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.EC.5891.AFA | Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur | | | | | | | | | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 1.000,00 | |
| 018.06.EC.5891.AFA 001 | NSPK Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan | | NSPK | RO baru | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300,00 | 400,00 | 600,00 | 700,00 | 1.000,00 | |
| SK.2 | Meningkatnya ketersediaan produk komoditas peternakan siap ekspor | | | | | | | | | - | 860,00 | 3.077,00 | 3.474,00 | 3.750,00 | |
| IKK 2.1 | Persentase produk komoditas peternakan siap ekspor terhadap total potensi ekspor peternakan | Pusat | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - | 860,00 | 3.077,00 | 3.474,00 | 3.750,00 | |
| 018.06.EC.5891.PEH | Promosi | | | | | | | | | - | 860,00 | 3.077,00 | 3.474,00 | 3.750,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.06.EC.5891.PEH 001 | Promosi produk dan usaha peternakan | | Promosi | RO baru | - | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 860,00 | 3.077,00 | 3.474,00 | 3.750,00 | |
| SK.3 | Meningkatnya komoditas peternakan unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing | | | | | | | | | 2.276,81 | 1.970,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.280,00 | |
| IKK 3.1 | Persentase komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing terhadap total komoditas peternakan unggulan | Pusat | % | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 2.276,81 | 1.970,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.280,00 | |
| 018.06.EC.5891.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | 2.276,81 | 1.970,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.280,00 | |
| 018.06.EC.5891.AEA 001 | Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | | Kegiatan | 4 | 4 | - | - | - | - | | | | | | |
| 018.06.EC.5891.AEA 002 | Koordinasi Bidang Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Peternakan | | Kegiatan | RO baru | - | 10 | 12 | 14 | 16 | 2.276,81 | 1.970,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.280,00 | |
| 018.06.EC.5891.RAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 018.06.EC.5891.RAG 001 | Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | | Unit | 41 | - | - | 7 | 7 | 10 | | - | | | | |
| 018.06.EC.5891.RBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | - | - | - | - | - | |
| 018.06.EC.5891.RBK 001 | Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan | | Unit | 38 | - | - | 7 | 7 | 10 | | - | | | | |
| SK.4 | Meningkatnya investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan | | | | | | | | | - | 21.500,00 | 66.500,00 | 66.800,00 | 67.921,00 | |
| IKK 4.1 | Peningkatan investasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Pusat | % | 15,76 | 16,26 | 16,76 | 17,26 | 17,76 | 18,26 | - | 21.500,00 | 66.500,00 | 66.800,00 | 67.921,00 | |
| 018.06.EC.5891.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | - | 21.500,00 | 66.500,00 | 66.800,00 | 67.921,00 | |
| 018.06.EC.5891.QDB 003 | Fasilitasi dan Pembinaan Investasi Peternakan | | Lembaga | RO baru | - | 274 | 274 | 274 | 274 | - | 21.500,00 | 66.500,00 | 66.800,00 | 67.921,00 | |
| SK.5 | Terwujudnya komoditas produk peternakan bermutu | | | | | | | | | 1.923,19 | 270,00 | 5.400,00 | 5.750,00 | 6.520,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 5.1 | Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu terhadap total komoditas produk peternakan siap edar | Pusat | % | Indikator Baru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.923,19 | 220,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.320,00 | |
| IKK 5.2 | Persentase pengujian mutu produk peternakan yang dilakukan terhadap permintaan pengujian di BPMSPH | | % | Indikator Baru | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | 50,00 | 500,00 | 750,00 | 1.200,00 | |
| 018.06.EC.5891.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.923,19 | 220,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.320,00 | |
| 018.06.EC.5891.QDB 001 | Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor | | Lembaga | 43 | 20 | - | - | - | - | 1.923,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018.06.EC.5891.QDB 002 | Fasilitasi dan Pembinaan Mutu, Pasca Panen, dan Pengolahan Hasil Peternakan | | Lembaga | RO baru | - | 6 | 8 | 10 | 12 | - | 220,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.320,00 | |
| 018.06.EC.5891.QIC | Pengawasan dan pengendalian lembaga | | | | | | | | | - | 50,00 | 500,00 | 750,00 | 1.200,00 | |
| 018.06.EC.5891.QIC 001 | Pengawasan Penerapan Jaminan Mutu pada Unit Usaha Produk Hasil Peternakan | | Lembaga | RO baru | - | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 50,00 | 500,00 | 750,00 | 1.200,00 | |
| 7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian | | Pusat | | | | | | | | 149.364,75 | 564.676,60 | 599.210,11 | 146.526,73 | 153.873,46 | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas produk usahatani tanaman pangan | | | | | | | | | | | | | | PPMP – Tanaman Pangan |
| IKK 1.1 | Persentase produk usaha tani tanaman pangan yang tersertifikasi (%) | | % | Indikator Baru | 6,67 | 13,33 | 20,00 | 26,67 | 33,33 | 3.754,28 | 1.849,51 | 7.833,00 | 8.225,00 | 8.635,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan | | Standar | 5,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | 662,00 | 695,00 | 729,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Konsep Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan | | Standar | 11,00 | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | - | - | 662,00 | 695,00 | 729,00 | |
| 018.HA.09.7911.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.AEF.XXX | Hasil Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan yang disebarluaskan | | Orang | 1.690,00 | - | - | 3.583,00 | 3.763,00 | 3.950,00 | - | - | 1.433,00 | 1.505,00 | 1.580,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.001 | Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Pangan | | Produk | 144,00 | 144,00 | 513,00 | 539,00 | 566,00 | 595,00 | 1.581,30 | 1.500,37 | 1.576,00 | 1.655,00 | 1.738,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.001 | Sarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern | | Unit | 7,00 | 88,00 | 30,00 | 98,00 | 103,00 | 109,00 | 2.172,98 | 349,15 | 2.397,00 | 2.517,00 | 2.643,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.2 | Meningkatnya kualitas produk usahatani hortikultura | | | | | | | | | | | | | | PPMP – Hortikultura |
| IKK 2.1 | Persentase produk usaha tani hortikultura yang tersertifikasi (%) | | % | Indikator Baru | 9,09 | 18,18 | 18,18 | 27,27 | 27,27 | 1.193,98 | 1.144,68 | 7.476,00 | 7.851,00 | 8.246,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Hortikultura | | Standar | 7,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | 3.105,00 | 3.260,00 | 3.423,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Konsep Rancangan Standar Instrumen Hortikultura | | Standar | 7,00 | - | - | 8,00 | 9,00 | 9,00 | - | - | 1.058,00 | 1.111,00 | 1.167,00 | |
| 018.HA.09.7911.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.AEF.XXX | Hasil Standardisasi Instrumen Hortikultura yang disebarluaskan | | Orang | 550,00 | - | - | 2.233,00 | 2.345,00 | 2.463,00 | - | - | 893,00 | 938,00 | 985,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.002 | Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura | | Produk | 354,00 | 455,00 | 355,00 | 502,00 | 528,00 | 555,00 | 969,25 | 1.047,00 | 1.069,00 | 1.123,00 | 1.180,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.09.7911.CAG.002 | Sarana Laboratorium Hortikultura Modern | | Unit | 4,00 | 12,00 | 1,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 224,74 | 97,68 | 248,00 | 261,00 | 275,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Hortikultura Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.3 | Meningkatnya kualitas produk usahatani perkebunan | | | | | | | | | | | | | | PPMP Perkebunan |
| IKK 3.1 | Persentase produk usaha tani perkebunan yang tersertifikasi (%) | | % | Indikator Baru | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1.642,45 | 1.841,41 | 5.421,00 | 5.695,00 | 5.979,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Perkebunan | | Standar | 8,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | 1.323,00 | 1.389,00 | 1.459,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Konsep Rancangan Standar Instrumen Perkebunan | | Standar | 8,00 | - | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | 1.058,00 | 1.111,00 | 1.167,00 | |
| 018.HA.09.7911.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.AEF.010 | Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarluaskan | | Orang | 145,00 | 903,00 | 941,00 | 995,00 | 1.050,00 | 1.095,00 | 361,26 | 376,27 | 398,00 | 420,00 | 438,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.003 | Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan | | Produk | 684,00 | 1.308,00 | 1.380,00 | 1.449,00 | 1.522,00 | 1.599,00 | 645,95 | 663,65 | 697,00 | 732,00 | 769,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.003 | Sarana Laboratorium Perkebunan Modern | | Unit | 40,00 | 30,00 | 19,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 635,24 | 801,48 | 842,00 | 885,00 | 930,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Perkebunan Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.4 | Meningkatnya kualitas produk usahatani peternakan dan kesehatan hewan | | | | | | | | | | | | | | PPMP – Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| IKK 4.1 | Persentase produk usaha tani peternakan dan kesehatan hewan yang tersertifikasi (%) | | % | Indikator Baru | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 2.791,53 | 1.682,55 | 28.354,00 | 29.772,00 | 31.260,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | Standar | 8,00 | - | - | 15,00 | 16,00 | 16,00 | - | - | 5.788,00 | 6.078,00 | 6.381,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Konsep Rancangan Standar Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | Standar | 8,00 | - | - | 15,00 | 16,00 | 16,00 | - | - | 1.985,00 | 2.084,00 | 2.188,00 | |
| 018.HA.09.7911.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.AEF.004 | Hasil Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disebarluaskan | | Orang | 1.043,00 | - | - | 1.860,00 | 1.953,00 | 2.050,00 | - | - | 744,00 | 781,00 | 820,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.004 | Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan | | Produk | 500,00 | 2.259,00 | 995,00 | 2.491,00 | 2.616,00 | 2.747,00 | 2.791,53 | 990,51 | 3.079,00 | 3.233,00 | 3.395,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.006 | Sarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern | | Unit | 15,00 | - | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | 692,05 | 15.655,00 | 16.438,00 | 17.260,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.5 | Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian | | | | | | | | | | | | | | BB Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian |
| IKK 5.1 | Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%) | | % | Indikator Baru | 4,67 | 15,89 | 15,89 | 31,78 | 31,78 | 135.410,64 | 554.019,76 | 516.865,11 | 60.052,73 | 63.069,46 | |
| 018.HA.09.7911.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.AEF.009 | Diseminasi standar instrumen pertanian | | Orang | 46.652,00 | 7.669,00 | 5.277,00 | 8.455,00 | 8.878,00 | 9.321,00 | 3.062,42 | 2.402,96 | 3.850,11 | 4.042,73 | 4.244,46 | |
| 018.EC.09.7911.ADC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADC.XXX | Sertifikasi Produk Instrumen Pertanian | | Produk | RO Baru | - | - | 150,00 | 158,00 | 166,00 | - | - | 7.497,00 | 7.872,00 | 8.265,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.009 | Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian | | Produk | 526,00 | 527,00 | 475,00 | 582,00 | 612,00 | 643,00 | 644,01 | 581,27 | 711,00 | 747,00 | 785,00 | |
| 018.HA.09.7911.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BDB.001 | Pendampingan Lembaga Penerap Standar | | Lembaga | 57,00 | 14,00 | 8,00 | 72,00 | 76,00 | 80,00 | 673,82 | 411,59 | 3.466,00 | 3.658,00 | 3.851,00 | |
| 018.HA.09.7911.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.QDB.001 | Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment | | Lembaga | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 130.000,00 | 550.000,00 | 459.700,00 | - | - | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.005 | Sarana Laboratorium Pertanian Modern | | Unit | 2,00 | 88,00 | 9,00 | 143,00 | 151,00 | 159,00 | 1.030,39 | 623,93 | 1.675,00 | 1.769,00 | 1.862,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Pertanian Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 34,00 | 38,00 | 38,00 | - | - | 39.966,00 | 41.964,00 | 44.062,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.6 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian tanaman padi | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi |
| IKK 6.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Tanaman Padi (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | - | - | 2.731,00 | 2.868,00 | 3.012,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.XXX | Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Padi | | Produk | RO Baru | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 525,00 | 552,00 | 580,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.XXX | Sarana Laboratorium Padi Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Padi Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.7 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian veteriner | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Veteriner |
| IKK 7.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Veteriner (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | - | - | 2.731,00 | 2.868,00 | 3.012,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.XXX | Laporan Hasil Uji Instrumen Veteriner | | Produk | RO Baru | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 525,00 | 552,00 | 580,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.XXX | Sarana Laboratorium Veteriner Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Veteriner Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.8 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian |
| IKK 8.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 2.035,53 | 1.899,29 | 7.772,00 | 8.165,00 | 8.577,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | | Standar | 8,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 11,00 | - | - | 3.722,00 | 3.908,00 | 4.104,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Konsep Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | | Standar | 8,00 | - | - | 10,00 | 10,00 | 11,00 | - | - | 606,00 | 637,00 | 669,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.007 | Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian | | Produk | 18.979,00 | 23.768,00 | 19.990,00 | 26.205,00 | 27.516,00 | 28.892,00 | 1.985,30 | 1.842,93 | 2.190,00 | 2.300,00 | 2.415,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.004 | Sarana Laboratorium SDLP Modern | | Unit | 14,00 | 9,00 | 19,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 50,22 | 56,36 | 151,00 | 162,00 | 173,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium SDLP Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.9 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian |
| IKK 9.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,20 | 3,23 | 3,25 | 3,26 | 3,28 | 511,00 | 186,15 | 7.675,00 | 8.060,00 | 8.464,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Pascapanen Pertanian | | Standar | 4,00 | - | - | 7,00 | 7,00 | 8,00 | - | - | 2.602,00 | 2.732,00 | 2.869,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADC.XXX | Sertifikasi Produk Instrumen Pascapanen Pertanian | | Sertifikat | RO Baru | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | 110,00 | 116,00 | 122,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.006 | Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian | | Produk | 212,00 | 200,00 | 215,00 | 226,00 | 238,00 | 250,00 | 511,00 | 186,15 | 564,00 | 593,00 | 623,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.XXX | Sarana Laboratorium Pascpapanen Pertanian Modern | | Unit | 2,00 | - | - | 2,00 | 4,00 | 6,00 | - | - | 3.296,00 | 3.461,00 | 3.634,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Pascapanen Pertanian Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.10 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian mekanisasi pertanian | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian |
| IKK 10.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Mekanisasi Pertanian (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,20 | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 | 1.962,94 | 2.012,01 | 9.496,00 | 9.972,00 | 10.470,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian | | Standar | 12,00 | - | - | 12,00 | 13,00 | 13,00 | - | - | 4.683,00 | 4.918,00 | 5.163,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADC | Sertifikasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADC.XXX | Sertifikasi Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian | | Sertifikat | RO Baru | - | - | 9,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 441,00 | 463,00 | 486,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.008 | Laporan Hasil Uji Instrumen Mekanisasi Pertanian | | Produk | 112,00 | 125,00 | 146,00 | 154,00 | 162,00 | 171,00 | 1.962,94 | 1.817,01 | 2.166,00 | 2.275,00 | 2.389,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.007 | Sarana Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian Modern | | Unit | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 195,00 | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Mekanisasi Pertanian Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| SK.11 | Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian bioteknologi dan SDG pertanian | | | | | | | | | | | | | | BB Perakitan dan Modernisasi Bioteknolgoi dan Sumber Daya Genetik Pertanian |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| IKK 11.1 | Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Bioteknologi dan SDG Pertanian (Indeks) | | Nilai | Indikator Baru | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,40 | 3,45 | 62,42 | 41,25 | 2.856,00 | 2.998,00 | 3.149,00 | |
| 018.EC.09.7911.ADA | Standarisasi Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.ADA.XXX | Rancangan Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | | Standar | 2,00 | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 881,00 | 925,00 | 971,00 | |
| 018.EC.09.7911.BJA | Penyidikan dan Pengujian Produk | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.BJA.005 | Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | | Produk | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 62,42 | 41,25 | 100,00 | 105,00 | 111,00 | |
| 018.HA.09.7911.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CAG.XXX | Sarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern | | Unit | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 772,00 | 810,00 | 851,00 | |
| 018.HA.09.7911.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.EC.09.7911.CBK.XXX | Prasarana Laboratorium Sumber Daya Genetik Pertanian Modern | | Unit | RO Baru | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1.103,00 | 1.158,00 | 1.216,00 | |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI | | | | | | | | | | 554.766,45 | 747.692,74 | 3.789.387,09 | 3.954.388,15 | 4.140.070,22 | BPPSDMP |
| SP 1 | Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani | | | Indikator baru | | | | | | 554.766,45 | 747.692,74 | 3.789.387,09 | 3.954.388,15 | 4.140.070,22 | BPPSDMP |
| IKP 1.1 | Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas | | % | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN | | | | | | | | | | 72.190,61 | 72.723,84 | 353.846,69 | 374.178,75 | 395.073,82 | |
| SK.1 | Meningkatnya kompetensi petani | Pusat | | Indikator baru | | | | | | 19.500,22 | 1.240,00 | 13.958,00 | 15.171,00 | 16.494,00 | Pusat Pelatihan Pertanian |
| IKK 1.1 | SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%) | Pusat | % | Indikator Baru | 90,10 | 90,20 | 90,30 | 90,40 | 90,50 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1810.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 62 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 500,22 | - | 3.473,00 | 3.647,00 | 3.829,00 | |
| 018.DL.1810.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AFA.001 | Peraturan /norma /pedoman pelatihan pertanian | | NSPK | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 9.000,00 | - | 8.470,00 | 9.317,00 | 10.249,00 | |
| 018.DL.1810.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.BMA.001 | Data dan informasi pelatihan pertanian | | Dokumen | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.815,00 | 1.997,00 | 2.196,00 | |
| 018.DL.1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.QDB.001 | Penumbuhan dan Penguatan P4S | | Lembaga | 100 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 190,00 | 200,00 | 210,00 | 220,00 | |
| 018.DL.1810.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.QDD.001 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani | | Kelompok Masyarakat | 1.691 | 1.691 | - | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 018.DL.1810.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEC.001 | Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | 10 | - | - | - | - | 1.050,00 | - | - | - | |
| SK.2 | Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (sesudah pelatihan) | | | Indikator baru | | | | | | 500,00 | 2.957,50 | 13.397,00 | 14.322,00 | 15.434,00 | Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian |
| IKK 2.1 | Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (aparatur) | UPT | % | Indikator Baru | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1810.DCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.DCC.001 | Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi aparatur | | Orang | Ro baru | - | 438 | 726 | 726 | 726 | - | 2.630,00 | 6.065,00 | 6.368,00 | 6.687,00 | |
| 018.DL.1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.PDI.002 | Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian | | Orang | Ro baru | - | 90 | 120 | 150 | 180 | - | 247,50 | 363,00 | 499,00 | 659,00 | |
| 018.DL.1810.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 62 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 250,00 | - | 992,00 | 1.042,00 | 1.094,00 | |
| 018.DL.1810.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEC.001 | Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 110,00 | 116,00 | 122,00 | |
| IKK 2.2 | Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian (non aparatur) | UPT | % | Indikator Baru | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | | | | | | |
| 018.DL.1810.DCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.DCC.002 | Pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian bagi non aparatur | | Orang | Ro baru | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| 018.DL.1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1810.PDI.002 | Sertifikasi profesi manajemen dan kepemimpinan bidang pertanian | | Orang | Ro baru | - | - | 120 | 150 | 180 | - | - | 363,00 | 499,00 | 659,00 | |
| 018.DL.1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.QDB.001 | Penumbuhan dan Penguatan P4S | | Lembaga | 100 | - | 4 | 74 | 72 | 72 | - | 80,00 | 4.079,00 | 4.167,00 | 4.376,00 | |
| 018.DL.1810.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 62 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 250,00 | - | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | |
| 018.DL.1810.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEC.001 | Kerja Sama Pelatihan Bidang Pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 110,00 | 116,00 | 122,00 | |
| SK.3 | Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) | | | Indikator baru | | | | | | 32.856,38 | 57.834,20 | 296.491,69 | 314.685,75 | 333.145,82 | - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP)<br>- Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) |
| IKK 3.1 | Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) | UPT | % | Indikator Baru | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | | | | | | |
| 018.DL.1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.SCC.001 | Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur | | Orang | 2.328 | 2.028 | 18.567 | 31.258 | 33.258 | 35.258 | 8.249,85 | 20.716,66 | 127.156,74 | 135.292,69 | 143.428,64 | |
| 018.DL.1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.PDI.001 | Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian | | Orang | 630 | 211 | 1.000 | 1.386 | 1.722 | 2.058 | 483,78 | 2.879,00 | 4.211,00 | 5.750,00 | 7.555,00 | |
| 018.DL.1810.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 62 | 8 | - | 9 | 9 | 9 | 2.000,00 | - | 7.814,25 | 7.814,25 | 7.814,25 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1810.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEC.001 | Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 992,57 | 992,57 | 992,57 | |
| IKK 3.2 | Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) | | % | Indikator Baru | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | | | | | | |
| 018.DL.1810.SCC | Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.SCC.002 | Pelatihan pertanian bagi non aparatur | | Orang | 15.409 | 72.171 | 33.685 | 35.685 | 37.685 | 39.685 | 20.122,74 | 33.558,55 | 124.897,50 | 131.897,50 | 138.897,50 | |
| 018.DL.1810.PDI | Sertifikasi Profesi dan SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.PDI.001 | Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian | | Orang | Ro baru | - | - | 2.000 | 2.500 | 3.000 | - | - | 6.076,48 | 7.595,60 | 9.114,72 | |
| 018.DL.1810.QDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.QDB.001 | Penumbuhan dan Penguatan P4S | | Lembaga | 100 | - | 34 | 514 | 514 | 514 | - | 680,00 | 15.420,00 | 15.420,00 | 15.420,00 | |
| 018.DL.1810.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 62 | 7 | - | 9 | 9 | 9 | 2.000,00 | - | 8.930,57 | 8.930,57 | 8.930,57 | |
| 018.DL.1810.AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.AEC.001 | Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian | | Kegiatan | Ro baru | - | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 992,57 | 992,57 | 992,57 | |
| SK.4 | Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | | | Indikator Baru | | | | | | 19.334,01 | 10.692,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - BBPMKP<br>- BBPP<br>- Bapeltan |
| IKK 4.1 | Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan | UPT | Skala Likert (1-5) | Indikator baru | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1810.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.CAG.001 | Sarana pelatihan pertanian | | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.334,01 | 3.992,14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 018.DL.1810.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1810.CBK.001 | Prasarana Pelatihan Pertanian | | Unit | Ro baru | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15.000,00 | 6.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | | | 106.324,43 | 430.328,00 | 2.613.322,18 | 2.665.707,18 | 2.725.692,18 | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas penyuluh pertanian | | | Indikator baru | | | | | | 106.324,43 | 417.828,00 | 1.603.122,18 | 1.654.007,18 | 1.712.492,18 | Pusat Penyuluhan Pertanian |
| IKSK 1.1 | Persentase penyuluh yang meningkat kompetensinya dibanding total penyuluh (ASN) (%) | Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi | % | Indikator baru | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 018.DL.1812.QDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.QDC.001 | Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian | | Orang | 38.831 | 10.510 | 37.605 | 75.658 | 75.658 | 75.658 | 58.236,00 | 135.078,00 | 390.504,18 | 390.504,18 | 390.504,18 | |
| 018.DL.1812.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.BDB.001 | Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan yang terfasilitasi pertanian | | Lembaga | 6 | - | 543 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | - | 10.860,00 | 757.770,00 | 816.060,00 | 874.350,00 | |
| 018.DL.1812.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kegiatan | 6 | 6 | - | 39 | 39 | 39 | 20.388,43 | - | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | |
| 018.DL.1812.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.1812.BMA.001 | Data dan informasi penyuluhan pertanian | | Dokumen | Ro baru | - | 39 | 39 | 39 | 39 | - | 2.280,00 | 2.730,00 | 2.925,00 | 3.120,00 | |
| 018.DL.1812.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.CAG.001 | Sarana Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian | | Unit | Ro baru | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 2.280,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 018.DL.1812.CAG.002 | Sarana Kerja Penyuluh Pertanian | | Unit | Ro baru | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 250.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 018.DL.1812.CAG.003 | Sarana Operasional Swasembada Pangan dan Hilirisasi | | Unit | Ro baru | - | 20 | - | - | - | - | 11.900,00 | - | - | - | |
| 018.DL.1812.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.CAN.001 | Sarana TIK penyuluhan pertanian | | Unit | Ro baru | - | 38 | 39 | 39 | 39 | 27.700,00 | 2.280,00 | 24.618,00 | 24.618,00 | 24.618,00 | |
| 018.DL.1812.FBA | Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.FBA.001 | Fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi | | Provinsi | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 2.850,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 018.DL.1812.PBR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.PBR.001 | Rekomendasi kebijakan terhadap pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di bawah Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | | Provinsi | Ro baru | - | 1 | 1 | - | - | - | 300,00 | 7.600,00 | - | - | |
| SK.2 | Meningkatnya jumlah petani milenial | | | Indikator baru | | | | | | - | 12.500,00 | 1.010.200,00 | 1.011.700,00 | 1.013.200,00 | Pusat Penyuluhan Pertanian |
| IKK 2.1 | Persentase petani muda terhadap jumlah petani | Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekon | % | Indikator baru | 22,03 | 22,13 | 22,23 | 22,33 | 22,43 | - | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | sentrasi | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.QDD.053 | Fasilitasi dan pembinaan Brigade Pangan | | Kelompok Masyarakat | Ro baru | - | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | |
| 018.DL.1812.QDD.051 | Percontohan penerapan Teknologi Pertanian | | Kelompok Masyarakat | 420 | - | 1.250 | 5.829 | 5.829 | 5.829 | - | 12.500,00 | 582.900,00 | 582.900,00 | 582.900,00 | |
| 018.DL.1812.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.AFA.002 | Peraturan /norma /pedoman regenerasi petani dan Brigade Pangan | | NSPK | Ro baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 018.DL.1812.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kelompok Masyarakat | 6 | - | - | 39 | 39 | 39 | - | - | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| IKK 2.2 | Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi | Pusat dan/atau UPT dan/atau Dekonsentrasi | Kelompok Masyarakat | Indikator Baru | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | - | - | 20.250,00 | 21.000,00 | 21.750,00 | |
| 018.DL.1812.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.QDD.003 | Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi | | Kelompok Masyarakat | Ro baru | - | - | 135 | 140 | 145 | - | - | 20.250,00 | 21.000,00 | 21.750,00 | |
| 018.DL.1812.AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.1812.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | Kelompok Masyarakat | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN | | | | | | | | | | 375.052,00 | 238.230,00 | 809.131,22 | 898.682,22 | 1.000.688,22 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| SK.1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian | | | Indikator Baru | | | | | | 375.052,00 | 238.230,00 | 809.131,22 | 898.682,22 | 1.000.688,22 | - Pusat Pendidikan Pertanian<br>- Polbangtan<br>- SMK-PP |
| IKSK 1.1 | Persentase SDM lulusan pendidikan tinggi dan menengah vokasi pertanian yang bekerja dan/atau melanjutkan pendidikan di sektor pertanian | Pusat dan UPT | % | Indikator Baru | 80,00 | 80,10 | 80,20 | 80,20 | 80,20 | | | | | | |
| 018.DL.5892.SAC | Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.SAC.001 | Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV) | UPT | Unit | 4.476 | 4.886 | 4.960 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 109.201,00 | 161.500,00 | 195.415,00 | 214.957,00 | 236.452,00 | |
| 018.DL.5892.SAC.002 | Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Diploma Tiga (D-III) | UPT | Unit | 925 | 908 | 950 | 990 | 1.100 | 1.200 | 16.521,00 | 27.138,00 | 32.836,00 | 36.119,00 | 39.731,00 | |
| 018.DL.5892.SAC.003 | Pendidikan Menengah Vokasi Pertanian | UPT | Unit | 1.209 | 1.053 | 950 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 12.007,00 | 18.475,00 | 24.020,22 | 24.020,22 | 24.020,22 | |
| 018.DL.5892.DDD | Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.DDD.001 | Pendaftaran HKI Paten Inovasi Hasil Penelitian Politeknik bidang pertanian di bawah Kementerian Pertanian dalam rangka Tri Dharma PT | UPT | Kekayaan Intelektual | Ro baru | - | - | 80 | 80 | 80 | - | - | 7.260,00 | 7.986,00 | 8.785,00 | |
| 018.DL.5892.BDC | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | | | Ro baru | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.BDC.001 | Pengabdian kepada masyarakat | Pusat dan UPT | Orang | Ro baru | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 10.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | |
| 018.DL.5892.BDC.002 | Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian | UPT | Orang | Ro baru | 83.780 | - | - | - | - | 128.810,00 | - | | | | |
| 018.DL.5892.BDC.003 | Kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas petani | UPT | Orang | Ro baru | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 42.823,55 | - | 184.000,00 | 220.000,00 | 266.000,00 | |
| 018.DL.5892.AEA | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | Pusat dan UPT | Kegiatan | 12 | 8 | - | 12 | 12 | 12 | 5.750,00 | - | 44.600,00 | 56.100,00 | 67.700,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.5892.PEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.PEA.001 | Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) | | Kegiatan | 1 | 1 | - | - | - | - | 12.359,45 | | | | | |
| 018.DL.5892.AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.AFA.001 | Peraturan /norma/ pedoman pendidikan pertanian | Pusat | | 6 | 6 | - | 7 | 7 | 7 | 10.000,00 | - | 23.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 | |
| 018.DL.5892.BMA | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.BMA.001 | Data dan informasi pendidikan pertanian | Pusat dan UPT | Dokumen | Ro baru | - | 1 | 12 | 12 | 12 | - | 1.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 018.DL.5892.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.BDB.001 | Fasilitasi Perguruan Tinggi Mitra dan SMK-PP Binaan | Pusat dan UPT | Dokumen | Ro baru | - | 100 | 12 | 12 | 12 | - | 1.130,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 018.DL.5892.BDB.002 | Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Pertanian | Pusat dan UPT | Dokumen | Ro baru | - | 1 | 12 | 12 | 12 | - | 1.070,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 018.DL.5892.CAA | Sarana Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.CAA.001 | Sarana pendidikan tinggi vokasi pertanian | UPT | Unit | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.462,00 | 2.113,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 018.DL.5892.CAA.002 | Sarana bidang pendidikan menengah vokasi pertanian | UPT | Unit | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 890,00 | 1.715,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 018.DL.5892.CBI | Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.CBI.001 | Prasarana pendidikan menengah vokasi pertanian | UPT | Unit | Ro baru | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 228,00 | 3.789,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.000,00 | |
| 018.DL.5892.CBJ | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.5892.CBJ.002 | Prasarana pendidikan tinggi vokasi pertanian | UPT | Unit | Ro baru | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 35.000,00 | 10.300,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN | | | | | | | | | | 1.199,41 | 6.410,90 | 13.087,00 | 15.820,00 | 18.616,00 | |
| SK.1 | Meningkatnya kompetensi ASN Pertanian | | | Indikator Baru | | | | | | 1.199,41 | 6.410,90 | 13.087,00 | 15.820,00 | 18.616,00 | Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian |
| IKK 1.1 | Persentase ASN pertanian yang mengikuti Penilaian Kompetensi terhadap target penilaian kompetensi ASN Pertanian | Pusat | % | Indikator Baru | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | | | | | | |
| IKK 1.2 | Persentase ASN Kementerian Pertanian yang dikembangkan kompetensinya terhadap total Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Pertanian | | % | Indikator Baru | 25 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | | | | |
| 018.DL.7930.FAC | Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.FAC.001 | Penilaian Kompetensi ASN Pertanian | Pusat | Orang | Ro baru | 10 | 302 | 333 | 367 | 404 | 157,33 | 1.537,00 | 1.614,00 | 1.695,00 | 1.780,00 | |
| 018.DL.7930.FAC.002 | Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian | Pusat | Orang | Ro baru | - | 260 | 286 | 315 | 347 | - | 1.833,00 | 1.925,00 | 2.021,00 | 2.122,00 | |
| 018.DL.7930.ABR | Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | | | Ro baru | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.ABR.001 | Kajian Kebijakan Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian | Pusat | Rekomendasi Kebijakan | Ro baru | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.210,00 | 1.332,00 | 1.464,00 | |
| 018.DL.7930.AFA | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria | | | Ro baru | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.AFA.001 | Peraturan / norma/ pedoman penilaian kompetensi ASN pertanian | Pusat | NSPK | Ro baru | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 18,98 | - | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.630,00 | |
| 018.DL.7930.AEA | Koordinasi | | | Ro baru | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.AEA.001 | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan | Pusat | Kegiatan | Ro baru | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 966,00 | - | 1.338,00 | 1.472,00 | 1.620,00 | |
| 018.DL.7930.AEC | Kerja sama | | | Ro baru | | | | | | | | | | | |

| | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Satuan | Baseline | Target | | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | | Unit Organisasi Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 018.DL.7930.AEC.001 | Kerjasama penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian | Pusat | Kegiatan | Ro baru | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 018.DL.7930.CAG | Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.CAG.001 | Sarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian | Pusat | Unit | Ro baru | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,10 | 1.146,90 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 018.DL.7930.CBK | Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.DL.7930.CBK.001 | Prasarana penilaian dan pengembangan kompetensi ASN pertanian | Pusat | Unit | Ro baru | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1.894,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |

**Lampiran 2 Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Pertanian**

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | PP 02.10 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | SS.1, IKSS 1.2 Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | % | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | % | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | | | | | | | | | | | BPSDM |
| 2 | PP 02.10 Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) | IT.1 Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) | % | 0,7445 | 0,7731 | 0,8038 | 0,8324 | 0,8599 | % | 0,7445 | 0,7731 | 0,8038 | 0,8324 | 0,8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | KP 02.10.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah | IKP 2.1 Peningkatan Produksi beras KSPP Kalimantan Tengah | ton | 196.984 | 844.362 | 1.332.808 | 1.821.255 | 2.309.701 | ton | 196.984 | 844.362 | 1.332.808 | 1.821.255 | 2.309.701 | 0,00 | 0,00 | 17.499,68 | 26.303,13 | 36.100,00 | | | | | | TP |
| 4 | KP 02.10.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah | IKK 3.1 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Kalimantan Tengah | Ha | 146.806 | 590.872 | 941.637 | 1.292.402 | 1.643.167 | Ha | 146.806 | 590.872 | 941.637 | 1.292.402 | 1.643.167 | - | - | 17.499,68 | 26.303,13 | 36.100,00 | | | | | | TP |
| 5 | KP 02.10.2 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP | IKP 4.1 Peningkatan Produksi Hortikultura KSPP Sumatera Utara | Ton | 25.840 | 33.440 | 41.040 | 48.640 | 56.240 | Ton | 25.840 | 33.440 | 41.040 | 48.640 | 56.240 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | | | | | | HORTI |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Sumatera Utara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | KP 02.10.2 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara | IKK 2.1 Peningkatan Luas panen Hortikultura KSPP Sumatera Utara | Ha | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | Ha | 1.700 | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | 0 | 0 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | | | | | | |
| 7 | KP 02.10.3 Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan | IKP 2.2 Peningkatan Produksi beras KSPP Sumatera Selatan | Ton | 65.724 | 443.784 | 1.375.883 | 2.307.982 | 3.240.081 | Ton | 65.724 | 443.784 | 1.375.883 | 2.307.982 | 3.240.081 | 0,00 | 0,00 | 25.690,78 | 40.552,29 | 57.104,70 | | | | | | TP |
| 8 | KP 02.10.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan | IKK 3.2 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Sumatera Selatan | Ha | 28.568 | 309.179 | 1.072.532 | 1.835.886 | 2.599.240 | Ha | 28.568 | 309.179 | 1.072.532 | 1.835.886 | 2.599.240 | - | - | 25.690,78 | 40.552,29 | 57.104,70 | | | | | | TP |
| 9 | KP 02.10.4 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur | IKP 2.3 Peningkatan Produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur | Ton | 33.624 | 71.324 | 126.889 | 182.454 | 238.020 | Ton | 33.624 | 71.324 | 126.889 | 182.454 | 238.020 | 0 | 0 | 1.897 | 2.903 | 4.022,91 | | | | | | TP |
| 10 | KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur | IKK 3.3 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Nusa Tenggara Timur | Ha | 10.930 | 38.435 | 86.660 | 134.886 | 183.111 | Ha | 10.930 | 38.435 | 86.660 | 134.886 | 183.111 | - | - | 1.897,04 | 2.903,03 | 4.022,91 | | | | | | TP |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 11 | KP 02.10.4 Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | IKP 2.4. Peningkatan Produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | Ton | 49.100 | 60.687 | 81.260 | 117.177 | 181.038 | Ton | 49.100 | 60.687 | 81.260 | 117.177 | 181.038 | 0,00 | 0,00 | 119.678,03 | 124.277,28 | 129.076,54 | | | | | | TP |
| 12 | KP 02.10.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | IKK 3.4 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur | Ha | 9.048 | 10.857 | 14.114 | 19.760 | 29.640 | Ha | 9.048 | 10.857 | 14.114 | 19.760 | 29.640 | - | - | 119.678,03 | 124.277,28 | 129.076,54 | | | | | | TP |
| 13 | KP 02.10.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua | IKP 2.5 Peningkatan Produksi jagung KSPP Papua | Ton | 1.310 | 3.847 | 6.535 | 9.382 | 12.393 | Ton | 1.310 | 3.847 | 6.535 | 9.382 | 12.393 | 0,00 | 0,00 | 2.144,19 | 2.448,10 | 2.750,16 | | | | | | TP |
| 14 | KP 02.10.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua | IKK 3.5 Peningkatan Luas panen jagung KSPP Papua | Ha | 189 | 539 | 889 | 1.239 | 1.589 | Ha | 189 | 539 | 889 | 1.239 | 1.589 | - | - | 2.144,19 | 2.448,10 | 2.750,16 | | | | | | TP |
| 15 | KP 02.10.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan | IKP 2.6 Peningkatan Produksi beras KSPP Papua Selatan | Ton | - | 964.000 | 2.121.000 | 3.168.000 | 3.719.000 | Ton | - | 964.000 | 2.121.000 | 3.168.000 | 3.719.000 | 0,00 | 0,00 | 18.575,36 | 29.534,83 | 41.742,56 | | | | | | |
| 16 | KP 02.10.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP | IKK 3.6 Peningkatan Luas panen Padi KSPP Papua Selatan | Ha | - | 665.000 | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | Ha | - | 665.000 | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | - | - | 18.575,36 | 29.534,83 | 41.742,56 | | | | | | TP |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Papua Selatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | KP 02.10.7 Lahan baku sawah yang dicetak | IKK 1.2 Lahan baku sawah yang dicetak | ribu ha | 42,00 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | ribu ha | 42,00 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 7.675.905,90 | 9.054.362,43 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | | | | | | LIP |
| 18 | KP 02.10.7 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman | IKK 1.1 Luas lahan sawah yang ditingkatkan Indeks Pertanaman | ribu ha | 6,90 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | ribu ha | 6,90 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 2.680.644,18 | 1.899.600,00 | 3.000.000,00 | 3.600.000,00 | 4.200.000,00 | | | | | | LIP |
| 19 | KP 02.10.16 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi | IKK 2.2 Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi | Lembaga | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | Lembaga | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 0 | 0 | 20.250 | 21.000 | 21.750 | | | | | | BPSDM |
| 20 | KP 02.10.16 Persentase petani muda terhadap jumlah petani | IKK 2.1 Persentase petani muda terhadap jumlah petani | % | 22,03 | 22,13 | 22,23 | 22,33 | 22,43 | % | 22,03 | 22,13 | 22,23 | 22,33 | 22,43 | 0 | 12.500 | 1.010.200 | 1.011.700 | 1.013.200 | | | | | | BPSDM |
| 21 | KP 02.10.10 Produksi Daging | IKP 5.1 Produksi Daging | Juta Ton | 4,96 | 5,10 | 5,25 | 5,41 | 5,56 | Juta Ton | 4,972 | 5,122 | 5,277 | 5,437 | 5,602 | 571.715,40 | 574.575,19 | 4.817.436,88 | 4.898.226,69 | 5.029.567,43 | | | | | | PKH |
| 22 | KP 02.10.10 Produksi Telur | IKP 5.2 Produksi telur | Juta Ton | 7,43 | 7,75 | 8,04 | 8,43 | 8,79 | Juta Ton | 7,436 | 7,753 | 8,085 | 8,432 | 8,795 | 165.811,75 | 31.338,68 | 82.937,40 | 82.937,40 | 92.937,40 | | | | | | |
| 23 | KP 02.10.10 Produksi Susu | IKP 5.3 Produksi susu | Ribu Ton | 855,57 | 866,43 | 877,53 | 888,85 | 900,40 | Ribu Ton | 866,285 | 893,960 | 922,448 | 939,554 | 943,637 | 948,00 | 643,32 | 593.320,39 | 584.345,78 | 617.065,40 | | | | | | |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 24 | KP 02.10.11 Produksi Padi | IKP 1.1 Produksi Padi | Juta Ton | 54,45 | 54,85 | 55,27 | 55,68 | 56,05 | Juta Ton | 54,45 | 54,85 | 55,27 | 55,68 | 56,05 | 867.713,13 | 1.587.856,00 | 1.410.523,68 | 1.518.856,00 | 1.449.856,00 | | | | | | TP |
| 25 | KP 02.10.11 Produksi Jagung | IKP 1.2 Produksi Jagung | Juta Ton | 21,48 | 22,51 | 23,58 | 24,71 | 25,89 | Juta Ton | 21,48 | 22,51 | 23,58 | 24,71 | 25,89 | 640.002,76 | 909.000,00 | 827.100,00 | 922.878,18 | 894.676,29 | | | | | | TP |
| 26 | KP 02.10.11 Produksi Aneka Kacang | IKP 1.3 Produksi Aneka Kacang | Ribu Ton | 540,28 | 552,84 | 565,70 | 578,86 | 592,32 | Ribu Ton | 540,28 | 552,84 | 565,7 | 578,86 | 592,32 | - | 10.150,00 | 10.150,00 | 17.091,25 | 33.287,50 | | | | | | TP |
| 27 | KP 02.10.11 Produksi Sorghum | IKP 1.4 Produksi Sorghum | Ribu Ton | 18,21 | 18,40 | 18,58 | 18,77 | 18,95 | Ribu Ton | 18,21 | 18,4 | 18,58 | 18,77 | 18,95 | 102,50 | 1.262,50 | 2.387,50 | 3.012,50 | 3.762,50 | | | | | | TP |
| 28 | KP 02.10.11 Produksi Ubi jalar | IKP 1.5 Produksi Ubi jalar | Ton | 1.517.449 | 1.562.972 | 1.609.861 | 1.658.157 | 1.707.902 | Ton | 1.517.449 | 1.562.972 | 1.609.861 | 1.658.157 | 1.707.902 | - | 10.150,81 | 10.150,81 | 29.785,81 | 47.550,81 | | | | | | TP |
| 29 | KP 02.10.11 Produksi Kedelai | IKP 1.6 Produksi Kedelai | Ton | 370.359 | 381.470 | 392.914 | 404.701 | 416.842 | Ton | 370.359 | 381.470 | 392.914 | 404.701 | 416.842 | 153,95 | 91.350,00 | 111.350,00 | 121.350,00 | 121.350,00 | | | | | | TP |
| 30 | KP 02.10.11 Produksi buah dan sayur | IKP 3.1 Produksi buah dan sayur | Juta Ton | 30,66 | 31,85 | 33,04 | 34,25 | 35,47 | Juta Ton | 30,66 | 31,85 | 33,04 | 34,25 | 35,47 | 205.171,67 | 235.914,00 | 760.127,00 | 871.655,00 | 960.155,00 | | | | | | Horti |
| 31 | KP 02.10.14 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi | IKK 1.1 Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi | komoditas | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Komoditas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.000,00 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | 43.355,86 | | | | | | TP |
| 32 | KP 02.10.13 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu | IKK 5.1 Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.923,19 | 220,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.320,00 | | | | | | |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 33 | KP 02.10.13 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan | IKP 7.1 Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | % | 80 | 80,3 | 80,6 | 85 | 90 | - | - | 154.857,51 | 172.120,00 | 172.120,00 | | | | | | pkh |
| 34 | KP.02.10.17 Produksi Tanaman obat | IKP 3.2 Produksi Tanaman obat | Ton | 529.523,45 | 532.171,06 | 534.831,92 | 537.506,08 | 540.193,61 | Ton | 529.523,45 | 532.171,06 | 534.831,92 | 537.506,08 | 540.193,61 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 20.000 | | | | | | HORTIKULTURA |
| 35 | KP.02.10.17 Produksi Florikultura | IKP 3.3 Produksi Florikultura | Ribu Tangkai | 597.622,50 | 597.459,16 | 597.295,82 | 597.132,48 | 596.969,14 | Ribu Tangkai | 597.622,50 | 597.459,16 | 597.295,82 | 597.132,48 | 596.969,14 | 0 | 0 | 2.985 | 2.985 | 2.985 | | | | | | HORTIKULTURA |
| 36 | KP 05.01.05 Produksi Kelapa sawit | IKP 9.1 Produksi Kelapa Sawit | Ton | 239.646.870 | 243.241.575 | 245.432.325 | 253.040.740 | 257.074.690 | Ton | 239.646.870 | 243.241.575 | 245.432.325 | 253.040.740 | 257.074.690 | | | | | | 1.612.500 | 2.250.000 | 2.887.500 | 3.225.000 | 3.525.000 | PERKEBUNAN |
| 37 | KP 05.01.05 Produksi bahan baku (CPO dan CPKO) | Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, Produksi CPO dan CPKO sudah tidak menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian | ton/hektar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | KP 05.01.06 Produksi kelapa | IKP 9.2 Produksi Kelapa | Ton | 2.880.690 | 2.890.917 | 2.901.144 | 2.911.371 | 2.936.021 | Ton | 2.880.690 | 2.890.917 | 2.901.144 | 2.911.371 | 2.936.021 | 82.136,75 | 460.889,56 | 191.889,99 | 87.573,00 | 87.573,00 | | | | | | |
| 39 | KP 05.01.08 Produksi Sagu | IKP 9.3 Produksi Sagu | Ton | 393.623 | 413.304 | 433.969 | 455.667 | 478.451 | Ton | 393.623 | 413.304 | 433.969 | 455.667 | 478.451 | 5.946,30 | 12.811,49 | 17.645,00 | 17.645,00 | 17.645,00 | | | | | | |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 40 | KP 02.10.17 Produksi Lada | IKP 9.4 Produksi Lada | Ton | 64.408 | 64.408 | 64.537 | 64.601 | 64.666 | Ton | 64.408 | 64.408 | 64.537 | 64.601 | 64.666 | 15.630,21 | 11.571,70 | 11.677,73 | 51.131,84 | 51.131,84 | | | | | | |
| 41 | KP 02.10.17 Produksi Pala | IKP 9.5 Produksi Pala | Ton | 41.527 | 41.568 | 41.610 | 41.652 | 41.693 | Ton | 41.527 | 41.568 | 41.610 | 41.652 | 41.693 | 43.047,68 | 48.271,68 | 73.171,20 | 38.739,20 | 38.739,20 | | | | | | |
| 42 | KP 02.10.17 Produksi Cengkeh | IKP 9.6 Produksi Cengkeh | Ton | 133.570 | 133.703 | 133.837 | 133.971 | 134.105 | Ton | 133.570 | 133.703 | 133.837 | 133.971 | 134.105 | - | - | 15.674,00 | 15.674,00 | 15.674,00 | | | | | | |
| 43 | KP 02.10.17 Produksi Vanili | IKP 9.7 Produksi Vanili | Ton | 1.582 | 1.585 | 1.585 | 1.587 | 1.588 | Ton | 1.582 | 1.585 | 1.585 | 1.587 | 1.588 | - | - | 5.912,50 | 5.912,50 | 5.912,50 | | | | | | |
| 44 | KP 02.10.17 Produksi Kopi | IKP 9.8 Produksi Kopi | Ton | 780.957 | 786.119 | 791.434 | 796.776 | 802.210 | Ton | 780.957 | 786.119 | 791.434 | 796.776 | 802.210 | 181.696,49 | 142.416,00 | 241.800,00 | 241.800,00 | 241.800,00 | | | | | | |
| 45 | KP 02.10.17 Produksi Tebu | IKP 9.9 Produksi Tebu | Ton | 36.813.539 | 39.555.979 | 42.478.762 | 60.450.243 | 84.714.460 | Ton | 36.813.539 | 39.555.979 | 42.478.762 | 60.450.243 | 84.714.460 | 1.446.411,65 | 1.033.124,58 | 908.301,79 | 908.301,79 | 908.301,79 | | | | | | |
| 46 | KP 02.10.17 Produksi Karet | IKP 9.10 Produksi Karet | Ton | 2.496.364 | 2.470.676 | 2.756.865 | 2.917.026 | 3.080.114 | Ton | 2.496.364 | 2.470.676 | 2.756.865 | 2.917.026 | 3.080.114 | - | - | 153.012,17 | 153.012,17 | 153.012,17 | | | | | | |
| 47 | KP 02.10.17 Produksi Kakao | IKP 9.11 Produksi Kakao | Ton | 632.787 | 633.290 | 633.792 | 634.294 | 634.796 | Ton | 632.787 | 633.290 | 633.792 | 634.294 | 634.796 | 113.310,51 | 290.628,00 | 357.527,92 | 241.880,75 | 252.150,00 | | | | | | |
| 48 | KP 02.10.17 Produksi Teh | IKP 9.12 Produksi Teh | Ton | 116.555 | 116.579 | 116.602 | 116.624 | 116.648 | Ton | 116.555 | 116.579 | 116.602 | 116.624 | 116.648 | - | - | 121.590,52 | 125.182,44 | 124.992,87 | | | | | | |
| 49 | KP 05.01.08 Produksi Ubi Kayu | IKP 1.7 Produksi Ubi Kayu | Ton | 17.270,930 | 17.529,990 | 17.792,940 | 18.059,830 | 18.330,730 | | 17.270,926 | 17.529,990 | 17.792,940 | 18.059,834 | 18.330,731 | 0 | 5.075 | 40.075 | 73.325 | 110.075 | | | | | | TP |
| 50 | KP 05.01.08 Produktivitas Ubi Kayu | IKK 1.1 Produktivitas Ubi Kayu | Ton/Hektar | 27,81 | 28,25 | 28,69 | 29,12 | 29,56 | Ton/ha | 27,81 | 28,25 | 28,69 | 29,12 | 29,56 | 3.293 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 3.499 | | | | | | TP |
| 51 | KP 05.01.06 Produktivitas kelapa | IKK 1.2 Produktivitas Kelapa | Ton/Hektar | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | Ton/Hektar | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 52 | KP 05.01.06 Produktivitas sagu | IKK 1.3 Produktivitas sagu | Ton/Hektar | 3,12 | 3,14 | 3,16 | 3,18 | 3,19 | Ton/Hektar | 3,12 | 3,14 | 3,16 | 3,18 | 3,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Perkebunan | IT.7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan | % | 1,94 | 2,04 | 2,32 | 2,43 | 3,03 | % | 1,94 | 2,04 | 2,32 | 2,43 | 3,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | PERKEBUNAN |
| 54 | KP 02.10.17 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura | IT.8 Pertumbuhan PDB tanaman Hortikultura | % | 1,36 | 1,77 | 2,35 | 2,65 | 3,04 | % | 1,36 | 1,77 | 2,35 | 2,65 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | HORTI |
| 55 | KP 02.10.18 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan | IT.3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan | indeks | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | indeks | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 56 | KP 02.10.18 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan | IKK 4.1 Proporsi lahan pertanian dibawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan | % | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | % | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 0 | 154.500 | 169.950 | 185.400 | 200.850 | | | | | | LIP |
| 57 | KP 02.10.18 Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai | IKK 4.2 Presentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan | % | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | % | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 11.706,68 | 19.949,58 | 22.236,00 | 22.454,00 | 22.672,00 | | | | | | LIP |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | KP 02.10.18 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian | IT.4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian | % | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | % | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | KP 02.10.18 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | IKK 3 Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas | varietas dan/atau galur | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | varietas dan/atau galur/rumpun | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PKH |
| 60 | KP 02.10.18 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia | IKK 1.1 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia | aksesi | 4.700 | 4.725 | 4.750 | 4.775 | 4.800 | aksesi | 4.700 | 4.725 | 4.750 | 4.775 | 4.800 | 0 | 260 | 26.683 | 28.015 | 29.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRMP |
| 61 | KP 02.15.02 Persentase penuruna | IKK 3.1 Persentase penuruna | % | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.500 | 22.537 | 22.576 | 22.615 | | | | | | PSP |

| NO | kegiatan prioritas/ proyek prioritas | Penugasan Indikator | Satuan | TARGET RPJMN | | | | | Satuan | TARGET RENSTRA 2025-2029 | | | | | Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | Alokasi NON APBN (dalam Juta Rupiah) | | | | | ESELON I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | n susut pangan | n susut pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | KP 04.14.01 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan | IKK 2.2 Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan | kab/kota | 100 | 200 | 300 | 400 | 514 | Kab/kota | 100 | 200 | 300 | 400 | 514 | 0,00 | 0,00 | 82.347,71 | 95.148,00 | 95.148,00 | | | | | | PKH |
| 63 | KP 08.03.03 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian | IT.5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian | % | 0,091 | 0,187 | 0,276 | 0,360 | 0,439 | % | 0,091 | 0,187 | 0,276 | 0,360 | 0,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

**Lampiran 3 Matrik Kerangka Regulasi**

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUU tentang Perubahan UU 16/2006 tentang SP3K (Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) | Uke I: Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan Pertanian<br><br>Uke II: Pusat Penyuluhan Pertanian | Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyuluhan pertanian dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga diperlukan pengaturan yang lebih holistik dan sistemik. Muatan Substansi Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu bentuk kelembagaan penyuluh secara spesifik sudah ditetapkan pada tiap tingkatan pemerintahan:<br>a. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian di tingkat Pusat;<br>b. Badan Koordinasi Penyuluhan di Tingkat Provinsi;<br>c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota; dan<br>d. Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan | 1. Penataan pengelolaan Penyuluhan Pertanian, (Kelembagaan dan Ketenagaan) untuk mendukung pewujudan swasembada pangan.<br>2. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian memperkuat pengembangan pertanian untuk semakin adaptif, maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan dalam menjamin ketersediaan, kelayakan dan kemandirian pangan.<br>3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal | a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<br>b. Kementerian Dalam Negeri.<br>c. Kementerian Hukum.<br>d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<br>e. Badan Kepegawaian Negara.<br>f. Organisasi Profesi Penyuluh Pertanian.<br>g. Komisi Penyuluhan Pertanian. | 1. Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik Tahun 2025<br>2. Penyusunan Draf dan Rapat PAK Tahun 2026<br>3. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2027<br>4. Pembahasan dengan DPD dan DPR Tahun 2028 |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan perangkat daerah (tatacara, jenis dan kriteria tipelogi perangkat daerah), yang mengakibatkan berubahnya kelembagaan Penyuluhan pertanian pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menjadikan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 menjadi tidak efektif. | | | |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rancangan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian (Suburusan Penyuluhan) | Kementerian Pertanian BPPSDMP) | Dengan dialihkannya Penyuluh Pertanian ASN dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian diperlukan pengaturan yang komprehensif dengan melakukan penambahan urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian (Suburusan Penyuluhan Pertanian) yang belum tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut penambahan urusan konkuren ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden. | 1. Menyelaraskan dengan Pengaturan pada Undang-Undang 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br>2. Substansi pada Rancangan Perpres memuat pembagian Suburusan Penyuluhan Pertanian pada Aspek Kebijakan, Aspek Ketenagaan, Aspek Kelembagaan, dan Sasaran Penyuluhan Pertanian.<br>3. Harmonisasi dan Kolaborasi kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pertanian pada Suburusan Penyuluhan Pertanian agar peningkatan produktivitas pertanian optimal | 1. Kementerian Sekretariat Negara<br>2. Kementerian Koordinator Bidang Pangan<br>3. Kementerian Dalam Negeri<br>4. Kementerian Keuangan<br>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi<br>6. Badan Kepegawaian Negara<br>7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | 1. Pembentukan Panitia Antar Kementerian 7 Maret 2025<br>2. Pembahasan Draft oleh Panitia Antar Kementerian (Maret sd September)<br>3. Harmonisasi (Oktober)<br>4. Penetapan (November) |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Revisi UU No.18/2009 jo UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non-pemrakarsa)<br><br>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan) | Diversifikasi Pengaturan Hewan/Ternak/ Unggas Memberikan kepastian hukum dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi manakala Indonesia terjadi keadaan dalam hal tertentu (akibat bencana, perlunya cadangan stok ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga) serta membatasi dominasi suatu negara eksportir sapi. Selain itu memberikan kesempatan yang sama bagi bagi Pelaku Usaha Lainnya dalam melakukan pemasukan/ importasi ternak ke Indonesia. Pelibatan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak diharapkan dapat mengakselerasi penambahan populasi dan kecukupan produk hewan, di samping dampak positif dari kebijakan dan regulasi yang membuka alternatif pasokan ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina pengamanan maksimal.<br><br>Penguatan hilirisasi peternakan Pentingnya penguatan hilirisasi peternakan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan peternak, menciptakan lapangan | Regulasi ini akan mendukung PP No.5/2025 tentang Perubahan Kedua PP No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, PP No. 29/2023 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pepres No. 66/2021 tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional, PP No. 25/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, PP No.3/2017 tentang Otoritas Veteriner jo PP No.34/2024. | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Karantina Indonesia, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kementerian Perdagangan, Badan Kejuruan Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia. | 2026: Penyusunan Kajian/NA<br><br>2027-2028: tahap penyusunan RUU (penyusunan DIM, Rapat PAK, Harmonisasi, dan partisipasi publik (sosialisi, FGD, danlokakarya)<br><br>2028: diusulkan sebagai Prolegnas Prioritas. |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kerja, dan membuka peluang ekonomi baru bagi Masyarakat, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan peternak dan mendukung ketahanan pangan nasional. Hilirisasi peternakan dilakukan dengan menghasilkan produk akhir bernilai tambah, seperti daging, susu, dan produk olahan lainnya.<br><br>Penguatan Otoritas Veteriner antara lain Dengan Membentuk VSB<br>VSB merupakan salat satu upaya untuk menguatkan otoritas veteriner di Indonesia guna melindungi hewan, tumbuhan, dan Masyarakat dari risiko tersebarnya penyakit hewan menular.<br><br>One Health Pentingnya one health dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan yakni untuk mengatasi potensi penyebaran penyakit hewan dari hewan ke manusia atau dari hewan ke hewan serta mendukung Pembangunan berkelanjutan.<br><br>Pengaturan Profesi Bidang Peternakan<br><br>Dalam penyelenggaraan peternakan bahwa profesi-profesi di bidang peternakan | | | |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terlibat dalam berbagai aspek penyelenggaraan peternakan, mulai dari pemeliharaan, pembiakan, hingga pemasaran. Koloborasi lintas profesi di bidang peternakan dapat meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendorong kemajuan peternakan nasional. | | | |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RPerpres tentang Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) | Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap perencanaan/non-pemrakarsa)<br><br>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian (sebagai pelaksana tahap penyusunan) | Peningkatan populasi & produksi dalam rangka mendukung Makan Bergizi dan menciptakan lapangan pekerjaaan. | Untuk mendukung strategi P2SDN perlu dukungan pembiayaan, jaminan lahan, infrastruktur, jaminan pasar, pembiayaan, perkarantinaan, dan perizinan dari kementerian/lembaga sehingga swasembada pangan yang menjadi Asta Cita Presiden terwujud. | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bank Tanah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perdagangan. | Thn 2025: Draft RPerpres, Partisipasi Publik (sosialisi, FGD, dan lokakarya) |
| 5 | Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kakao | Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan | Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. | Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kakao, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. | 1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kakao;<br>2. Kementerin Koordinator Bidang Perekonomian;<br>3. Kementerin Koordinator Bidang Pangan;<br>4. Kementerian Perindustrian;<br>5. BRIN;<br>6. Perusahaan Perkebunan kakao;<br>7. Pekebun kakao. | 2025 – 2026: Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi. |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rancangan Permentan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa | Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma | Amanat Pasal 17 Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan. | Memberikan payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengembangan perkebunan kelapa, yang meliputi peningkatan kualitas SDM, inovasi teknologi, peremajaan tanaman tua, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. | 1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa;<br>2. Kementerin Koordinator Bidang Perekonomian;<br>3. Kementerin Koordinator Bidang Pangan;<br>4. Kementerian Perindustrian;<br>5. BRIN;<br>6. Perusahaan Perkebunan Kelapa;<br>7. Pekebun Kelapa. | 2025 – 2026:<br>Public hearing, harmonisasi, Penetapan, Pengundangan, Sosialisasi. |
| 7 | RUU Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Kementerian Pertanian (cq Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian | mewujudkan swasembada pangan dengan menetapkan KP2B dan LP2B melalui pengecualian lahan baku sawah/lahan sawah produktif untuk dialihfungsikan oleh PSN atau kepentingan umum. | pengendalian alih fungsi lahan serta penetapan LBS non KP2B dan LP2B menjadi LBS peruntukkan KP2b dan LP2B.<br>koordinasi dengan K/L untuk dukungan penetapan LBS dan pengendalian alih fungsi lahan serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah | Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian ATR/BPR, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota | 2026-2029 |
| 8 | Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi | Kementerian PU | 1. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah;<br>2. pengaturan air irigasi;<br>3. Pembentukan UPT Irigasi Pertanian;<br>4. tata cara persetujuan pemanfaatan irigasi; dan<br>5. pembinaan P3A<br>6. pelaksanaan pengelolan aset<br>7. pengawasan pengembangan | 1. mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan<br>2. pembagian tugas dan kewenangan jaringan irigasi antara pusat dan daerah<br>3. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi kewenangan pusat dilakukan oleh Menteri PU paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota | 2025-2026, draft telah siap harmonisasi, namun terdapat perubahan organisasi kementerian masing-masing berdasarkan Perpres, draft dikembalikan oleh Kementerian Hukum untuk dikaji kembali |

| No | Judul Kerangka Regulasi | K/L Pemrakarsa | Urgensi | Analisis Keterkaitan | Stakeholder Terkait | Target Pembentukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier | | | |
| 9 | Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/ /2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian | 1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;<br>2. Evaluasi terhadap tata cara alih fungsi LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan<br>3. Peningkatan Pengawasan LP2B. | mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota | 2025, telah ditetapkan dalam prolegtan 2025 melalui Permentan No 22/Kpts /HK.140/M/01/2025. |
| 10 | Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/ /2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan | Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian | 1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;<br>2. Evaluasi terhadap tata cara penetapan LP2B di tingkat Pusat dan daerah; dan<br>3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Nasional;<br>4. mekanisme insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota | 2026, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebjiakan dan berkas public hearing |
| 11 | Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/ /2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayan Perkumpulan Petani Pemakai Air | Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian | 1. Penyesuaian terhadap kebijakan swasembada pangan;<br>2. evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan jaringan irigasi tingkat usaha tani | mendukung program pemerintah mengenai swasembada pangan<br><br>penyesuaian kewenangan Kementan dalam bidang irigasi | Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota | 2027, diusulkan dit teknis dengan dilengkapi naskah kebjiakan dan berkas public hearing |

**Lampiran 4 Manajemen Risiko**

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sasaran Strategis | Meningkatnya pendapatan petani | Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) | Anjloknya harga produk pertanian | Terbatasnya sistem penyangga harga komoditas pertanian | Penguatan mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan kemitraan, cadangan pangan pemerintah, dan penguatan kelembagaan petani. | Ditjen Tanaman pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, BPPSDMP |
| | | | | | Overproduksi akibat tidak seimbangnya pola tanam dan permintaan pasar | Pengaturan pola tanam dan distribusi produks | |
| 2 | | | | Kenaikan harga input produksi | Kenaikan harga bahan baku global | Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu. | Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, dan Ditjen perkebunan |
| 4 | | | Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian | Terbatasnya akses petani terhadap teknologi pertanian | Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan teknologi | Penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian untuk memperkenalkan dan | BPPSDMP |

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | meningkatkan adopsi teknologi tepat guna | |
| | | | | Terbatasnya akses petani terhadap inovasi pertanian | Kurangnya diseminasi hasil riset dan inovasi dari lembaga penelitian ke tingkat petani. | Penguatan penyuluhan dan diseminasi hasil riset melalui koordinasi dengan BRIN untuk meningkatkan adopsi inovasi pertanian. | BPPSDMP |
| 5 | | Terwujudnya Swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan | Persentase komoditas pertanian yang mencapai swasembada terhadap komoditas pertanian prioritas | Perubahan iklim ekstrem | Perubahan pola curah hujan dan suhu yang memengaruhi musim tanam. | Penyusunan kalender tanam adaptif berbasis prakiraan cuaca (kerja sama BMKG). | Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan |
| | | | | Serangan organisme pengganggu tumbuhan/hewan | Kelemahan dalam sistem deteksi dini dan pengendalian hama/penyakit. | Penguatan sistem monitoring dan deteksi dini OPT/OPH., Pelatihan petani dalam pengendalian hama terpadu (PHT). | Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Perkebunan, BRMP |
| 6 | | | | Kenaikan harga input produksi | Fluktuasi harga bahan baku pupuk, benih, dan pestisida di pasar global | Fasilitasi subsidi dan bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) melalui koordinasi kebijakan anggaran dengan Kemenkeu. | Ditjen TP, Hortikultura, PKH, Sekretariat Jenderal |

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Keterbatasan infrastruktur pertanian | Belum optimalnya pembangunan, pemeliharaan, dan pemerataan infrastruktur pertanian | Pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan jalan usaha tani. | Ditjen PSP, LIP |
| | | | | Degradasi dan konversi lahan | Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. | Pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), konservasi tanah dan air, serta penguatan pengawasan dan penegakan regulasi alih fungsi lahan melalui koordinasi lintas sektor | Ditjen PSP |
| **12** | | Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian | Market share produk ekspor pertanian (%) | Belum meratanya penerapan standar mutu dan keamanan pangan | Kurangnya pemahaman pelaku usaha/petani terhadap standar mutu dan keamanan pangan | Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi standar mutu | Dit.Hilirisasi lingkup Kementan |
| **13** | | | | Kapasitas produksi berstandar ekspor yang belum stabil | ketersediaan bahan baku berfluktuasi | Mengembangkan kemitraan antara petani dan industri pengolahan | Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan |

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Keterbatasan teknologi produksi dan pengolahan | Meningkatkan adopsi teknologi produksi dan pascapanen modern melalui pelatihan, demplot, dan fasilitasi alat mesin pertanian (alsintan) serta unit pengolahan hasil (UPH) | BPPSDMP, Ditjen PSP |
| | | | | | | Mendorong sertifikasi produk berstandar ekspor | Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan |
| **14** | | Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan | Indeks Hilirisasi komoditas pertanian unggulan | Ketersediaan bahan baku yang tidak konsisten | Musim tanam/panen yang tidak seragam | Pengembangan sistem rantai pasok terintegrasi | Ditjen TP, Hortikultura, Perkebunan, PKH |
| **15** | | | | Rendahnya pemanfaatan teknologi pengolahan dan pascapanen | Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha | Pelatihan dan pendampingan teknologi pengolahan | BPPSDMP, Dit Hilirisasi lingkup Kementan |
| **16** | | | | Terbatasnya infrastruktur pendukung hilirisasi | Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur | Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi | Ditjen PSP, Ditjen LIP |

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian | Persentase pemenuhan kebutuhan bahan baku bio energi | Perubahan iklim ekstrem dan serangan hama penyakit | curah hujan tidak menentu, gelombang panas, kekeringan, banjir | Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tahan iklim dan hama (varietas unggul tahan panas, tahan penyakit) | Ditjen Perkebunan, BRMP |
| 18 | | | | Keterbatasan fasilitas pengolahan bahan baku bio energi | Investasi infrastruktur pengolahan yang renda | Mendorong investasi dan kemitraan untuk pengembangan fasilitas pengolahan bio energi | Ditjen Perkebunan |
| 19 | | Menurunnya kasus penularan penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak kepada manusia | Persentase penurunan kasus penyakit hewan dan penyakit bawaan produk hewan yang berdampak pada manusia | Munculnya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis | Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan serta fasilitas laboratorium veteriner. | Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan hewan melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan. | Ditjen PKH |
| 20 | | | | | Perubahan iklim yang memicu munculnya vektor atau pola penyebaran penyakit baru. | Penerapan sistem pemantauan dan deteksi dini penyakit hewan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) | Ditjen PKH |
| 21 | | | | | Minimnya kepatuhan peternak/ pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi. | Kampanye dan sosialisasi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar biosekuriti dan sanitasi. | Ditjen PKH |

| No | Jenis Konteks (pilih akan diisi) | Nama Konteks (Nama Sasaran Strategis) | Indikator (Indikator SS) | Pernyataan Risiko | Penyebab Risiko | Perlakuan Risiko | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian | Kegiatan pengawasan tidak efektif dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan program dan anggaran | Keterbatasan SDM auditor yang berkompeten dan tersertifikasi | Membangun sistem pengawasan terpadu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi penyimpangan secara real-time. | Inspektorat Jenderal |
| **25** | | | | Lemahnya keamanan siber | Minimnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keamanan siber | Penguatan kapasitas SDM khususnya di bidang keamanan siber melalui pelatihan teknis dan sertifikasi profesional. | Sekretariat Jenderal |
| **26** | | | | Ketidaktertiban dan inefisiensi dalam pengelolaan aset | Lemahnya koordinasi antara unit kerja pemilik aset dan pengelola aset pusat | Menyusun dan menerapkan prosedur pengelolaan aset yang tertib dan efisien, serta rutin melakukan audit aset. | Sekretariat Jenderal |

**Lampiran 5 Pohon Kinerja**

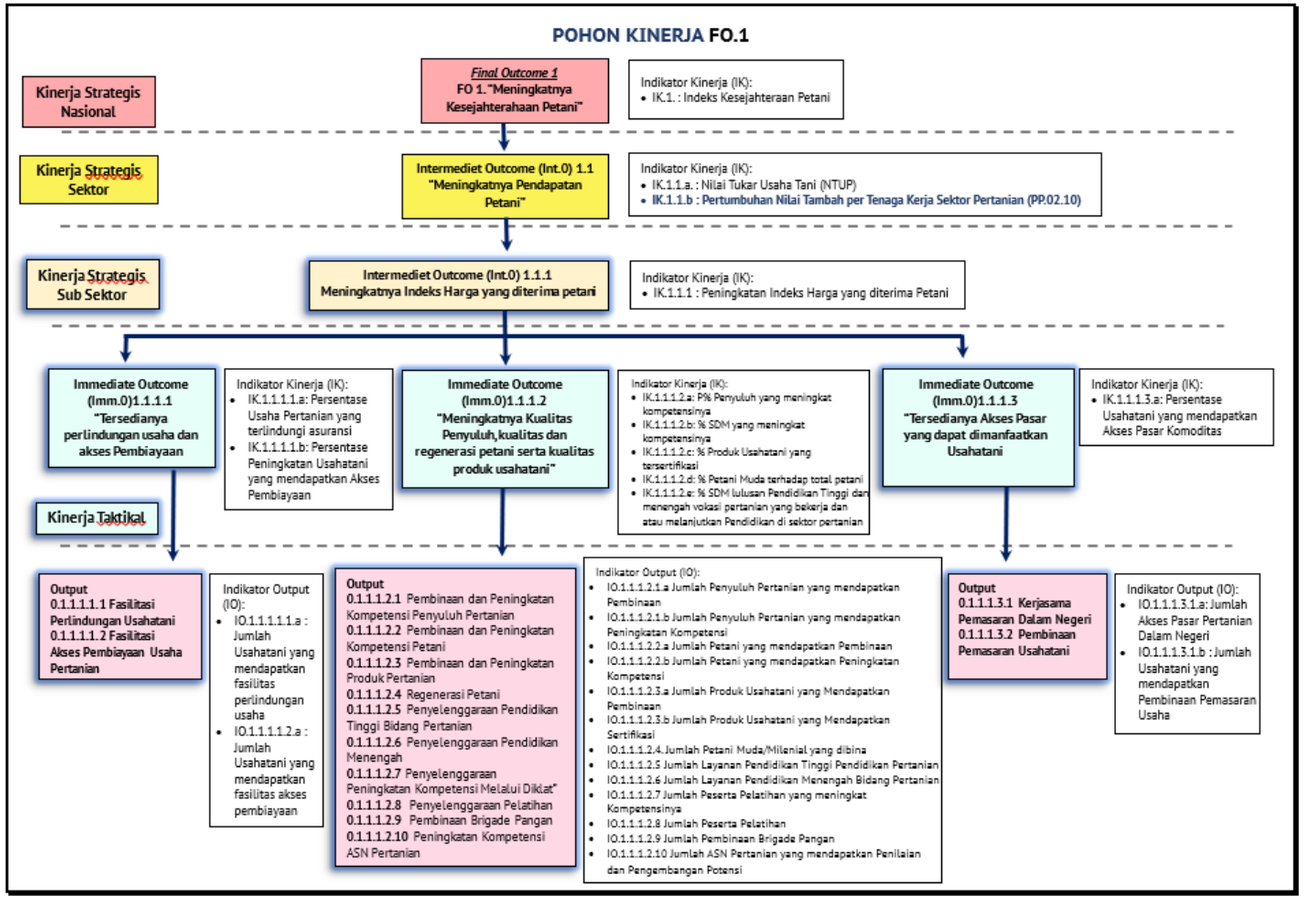

## POHON KINERJA FO.2

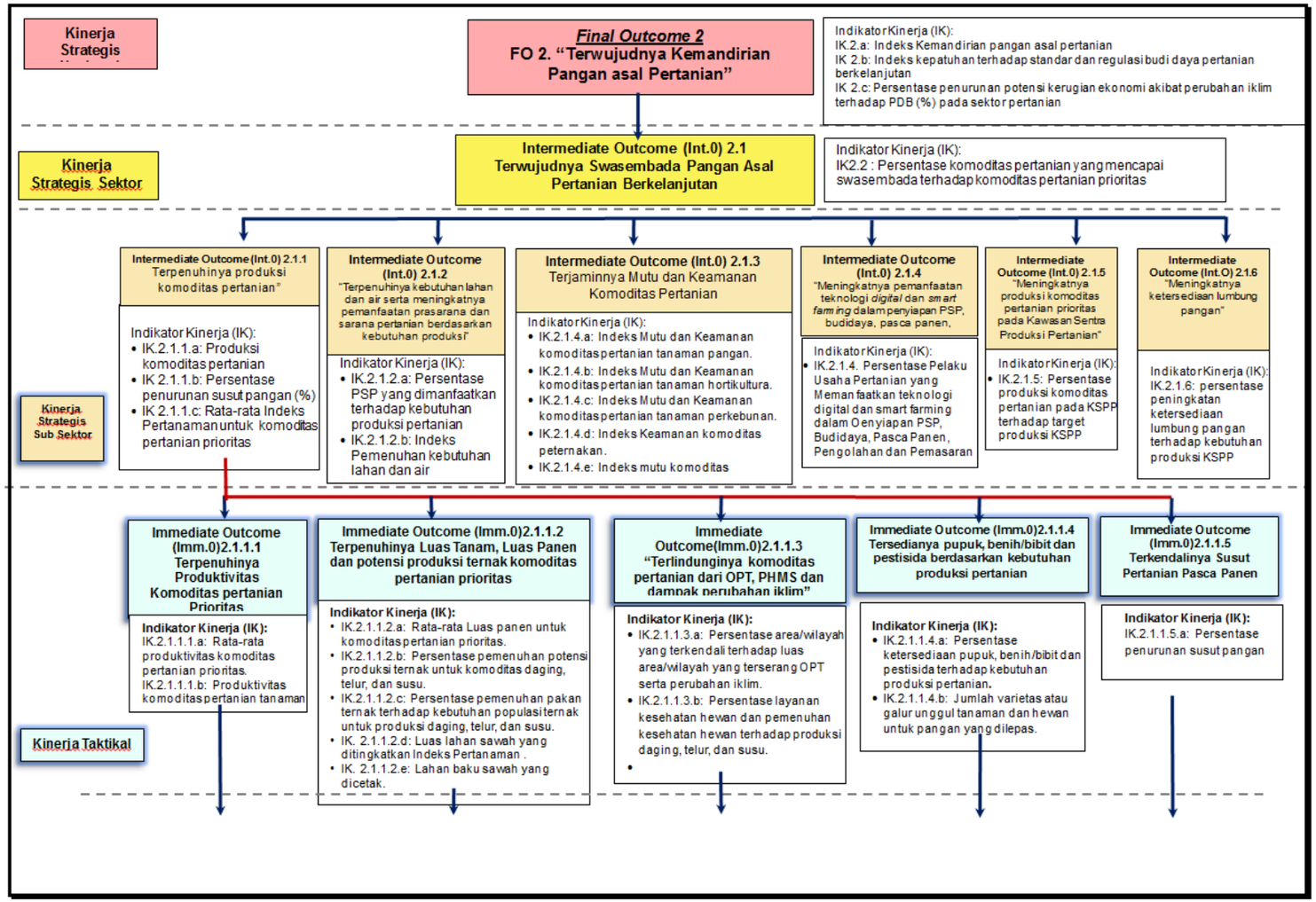

**LANJUTAN POHON KINERJA**

**Output**
- **O 2.1.1.1.1 "Budidaya komoditas pertanian prioritas**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.1.1.1.a: Luas Kawasan budidaya komoditas pertanian prioritas

**Output**
- **O 2.1.1.2.1 "Penanaman komoditas pertanian prioritas"**
- **O 2.1.1.2.2 "Pengelolaan potensi produksi ternak"**
- **O.2.1.1.2.3 "Pemenuhan kebutuhan pakan ternak berdasarkan kebutuhan populasi ternak"**
- **O 2.1.1.2.4 "Populasi ternak"**
- **O.2.1.1.2.5 "Penjaminan mutu dan keamanan pakan"**
- **O.2.1.1.2.6 "Pemanfaatan bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman"**
- **O 2.1.1.2.7 "Intensifikasi lahan pertanian"**
- **O 2.1.1.2.8 "Rehabilitasi lahan pertanian"**
- **O 2.1.1.2.9 "pelindungan lahan Pertanian"**
- **O 2.1.1.2.10 "Optimasi lahan Pertanian"**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.1.2.1.a: Luas Tanam komoditas pertanian prioritas
- IO.2.1.1.2.2.a: Jumlah potensi produksi ternak
- IO.2.1.1.2.3.a: Jumlah populasi ternak
- IO.2.1.1.2.4.a: Jumlah pakan yang terjamin mutu dan keamanannya
- IO.2.1.1.2.5.a: Jumlah bahan pakan ternak sumber energi dalam negeri yang bermutu dan aman.
- IO.2.1.1.2.6.a: Jumlah pakan ternak yang tersedia untuk populasi ternak.
- IO. 2.1.1.2.7.a: Luas intensifikasi lahan pertanian
- IO. 2.1.1.2.8.a: Jumlah rehabilitasi lahan pertanian
- IO. 2.1.1.2.9.a: Jumlah lahan pertanian yang dilindungi
- IO. 2.1.1.2.10.a: Luas optimasi lahan pertanian

**Output**
- **O 2.1.1.3.1 "pelindungan komoditas pertanian dari OPT"**
- **O 2.1.1.3.2 "Penanganan DPI pada komoditas pertanian"**
- **O 2.1.1.3.3 "Pencegahan dan pemberantasan PHMS pada ternak"**
- **O 2.1.1.3.4 "Ketersediaan obat hewan sesuai kenbutuhan"**
- **O 2.1.1.3.5 "Penyidikan dan pengujian penyakit hewan**
- **O 2.1.1.3.6 "Pengujian mutu obat hewan**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.1.3.1.a: Luas area pengendalian OPT
- IO 2.1.1.3.2.a: "Luas area mitigasi DPI"
- IO 2.1.1.3.3.a: Jumlah penularan PHMS yang berhasil dicegah pada ternak (kejadian per kabupaten/kota)
- IO 2.1.1.3.3.b: Jumlah penanganan PHMS pada ternak.
- IO 2.1.1.3.4.a: Jumlah obat hewan
- IO 2.1.1.3.5.a: Jumlah penyidikan dan pengujian penyakit hewan
- IO 2.1.1.3.6.a: Jumlah obat hewan yang teruji

**Output**
- **O 2.1.1.4.1 "Menjamin ketersediaan dan akses petani terhadap pupuk"**
- **O 2.1.1.4.2 "Menjamin ketersediaan dan akses petani terhadap benih/bibit bermutu"**
- **O 2.1.1.4.3 "Pengujian Mutu Benih"**
- **O 2.1.1.4.4 "Menjamin ketersediaan dan akses petani terhadap pestisida untuk pelindungan komoditas pertanian"**
- **O 2.1.1.4.5 "pelindungan SDG ternak dan varietas tanaman untuk komoditas pertanian"**
- **O 2.1.1.4.6 "Pembinaan pemanfaatan varietas unggul pertanian"**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.1.4.1.a: Jumlah pupuk berkualitas yang tersedia dan dapat diakses petani
- IO.2.1.1.4.1.b: Jumlah wilayah mandiri pupuk
- IO.2.1.1.4.1.c: Jumlah petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi
- IO.2.1.1.4.2.a: Jumlah benih/bibit bermutu yang tersedia tepat waktu dan dapat diakses petani
- IO.2.1.1.4.2.b: Jumlah wilayah mandiri benih/bibit
- IO.2.1.1.4.3.a: Jumlah pengujian mutu benih
- IO.2.1.1.4.3.b: Jumlah benih hasil pengujian yang menenuhi persyaratan mutu benih
- IO.2.1.1.4.4.a: Jumlah pestisida bio yang tersedia dan dapat diakses petani
- IO.2.1.1.4.4.b: Jumlah pestisida bio yang dimanfaatkan petani
- IO.2.1.1.4.5.a: Jumlah layanan pelindungan SDG ternak dan varietas tanaman
- IO.2.1.1.4.6.a: Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan pemanfaatan varietas unggul pertanian

**Output**
- **O 2.1.1.5.1 "Fasilitasi dan pembinaan pengendalian susut pangan**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.1.5.1.a: Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pengendalian susut pangan

**Kinerja Operasional**

## POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.2

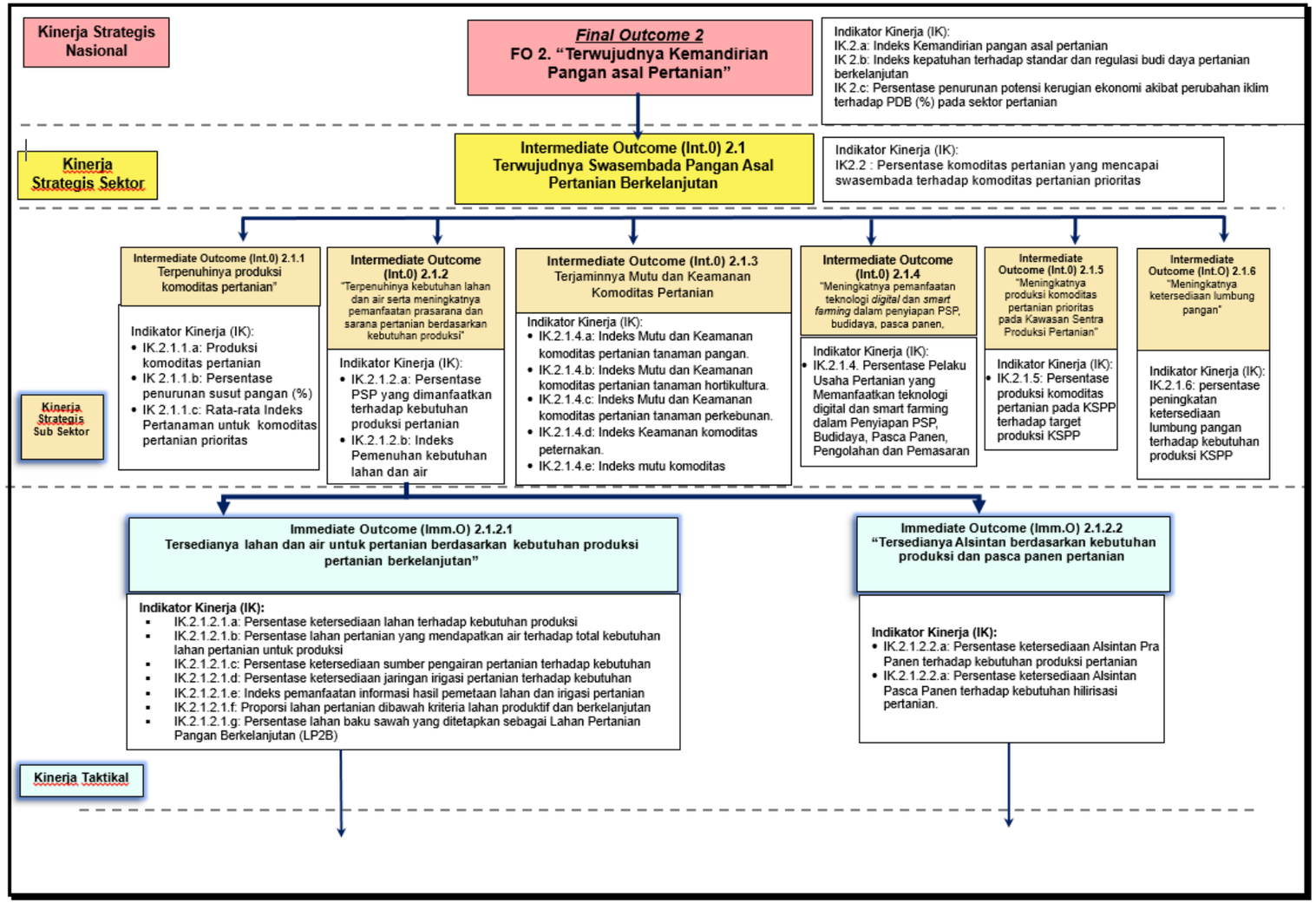

**LANJUTAN INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.2**

**Output**
- **2.1.2.1.1 "Ekstensifikasi lahan pertanian"**
- **2.1.2.1.2 "Pemetaan dan pemutakhiran lahan dan irigasi pertanian"**
- **2.1.2.1.3 "Konservasi lahan pertanian"**
- **2.1.2.1.4 "Pengairan pertanian"**
- **2.1.2.1.5 "Konservasi dan pengembangan sumber air pertanian"**
- **2.1.2.1.6 " Irigasi pertanian"**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.2.1.1.a: Luas ekstensifikasi lahan pertanian
- IO.2.1.2.1.2.a: Jumlah lahan dan irigasi pertanian yang dipetakan dan dimutakhirkan
- IO.2.1.2.1.3.a: Jumlah konservasi lahan pertanian
- IO.2.1.2.1.4.a: Jumlah PSP sumber pengairan pertanian yang tersedia dan dapat digunakan.
- IO.2.1.2.1.5.a: Jumlah konservasi dan pengembangan sumber air pertanian
- IO.2.1.2.1.6.a: Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi pertanian

**Output**
- **2.1.2.2.1 "Pengelolaan Alsintan Pra Panen"**
- **2.1.2.2.2 "Pengelolaan Alsintan Pasca Panen"**

Indikator Output (IO):
- IO.2.1.2.2.1.a: Jumlah Alsintan Pra Panen
- IO.2.1.2.2.2.a: Jumlah Alsintan Pasca Panen

**Kinerja Operasional**

## POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.3

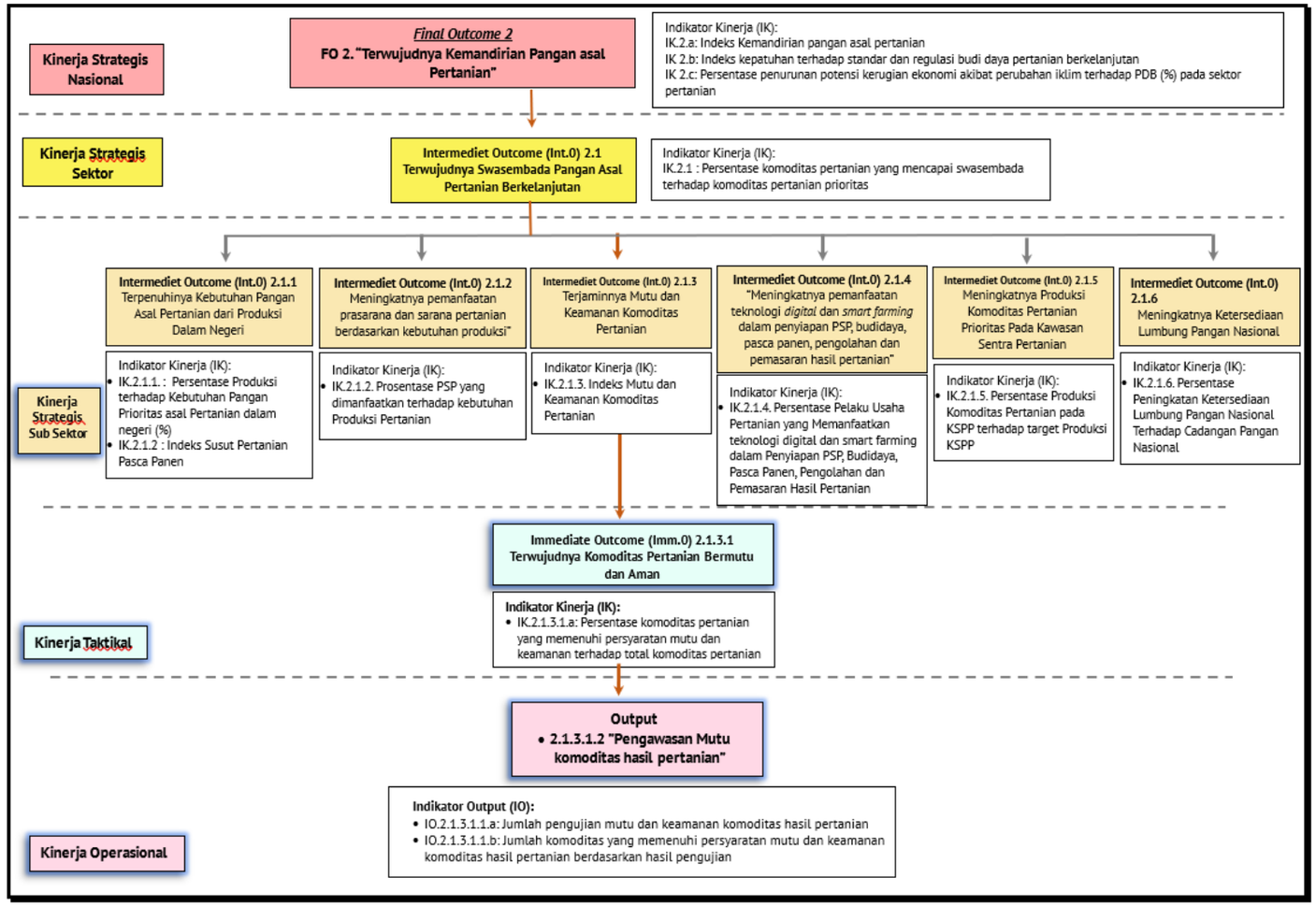

## POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.4

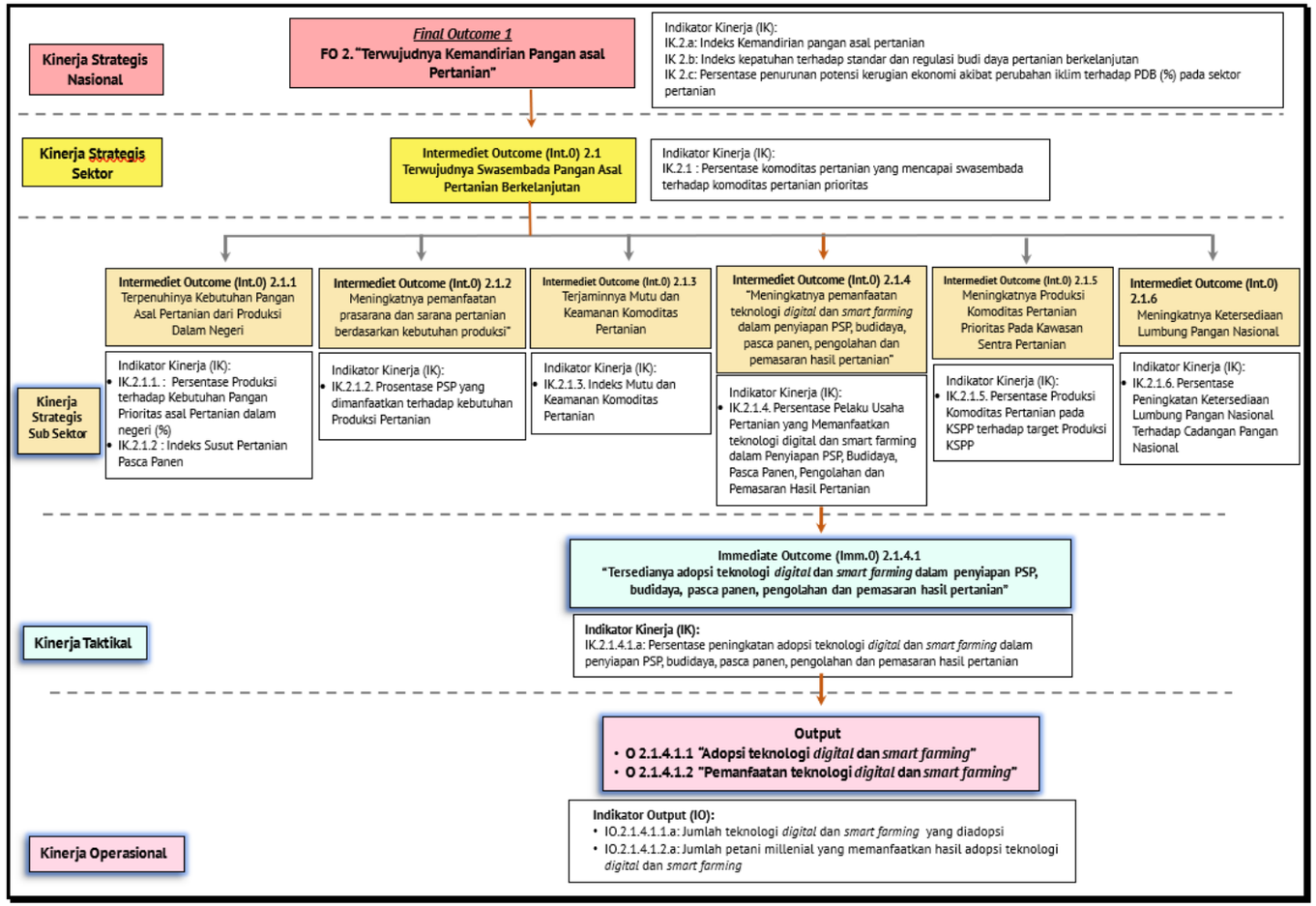

## POHON KINERJA FO.2 – INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.5 DAN INTERMEDIATE OUTCOME 2.1.6

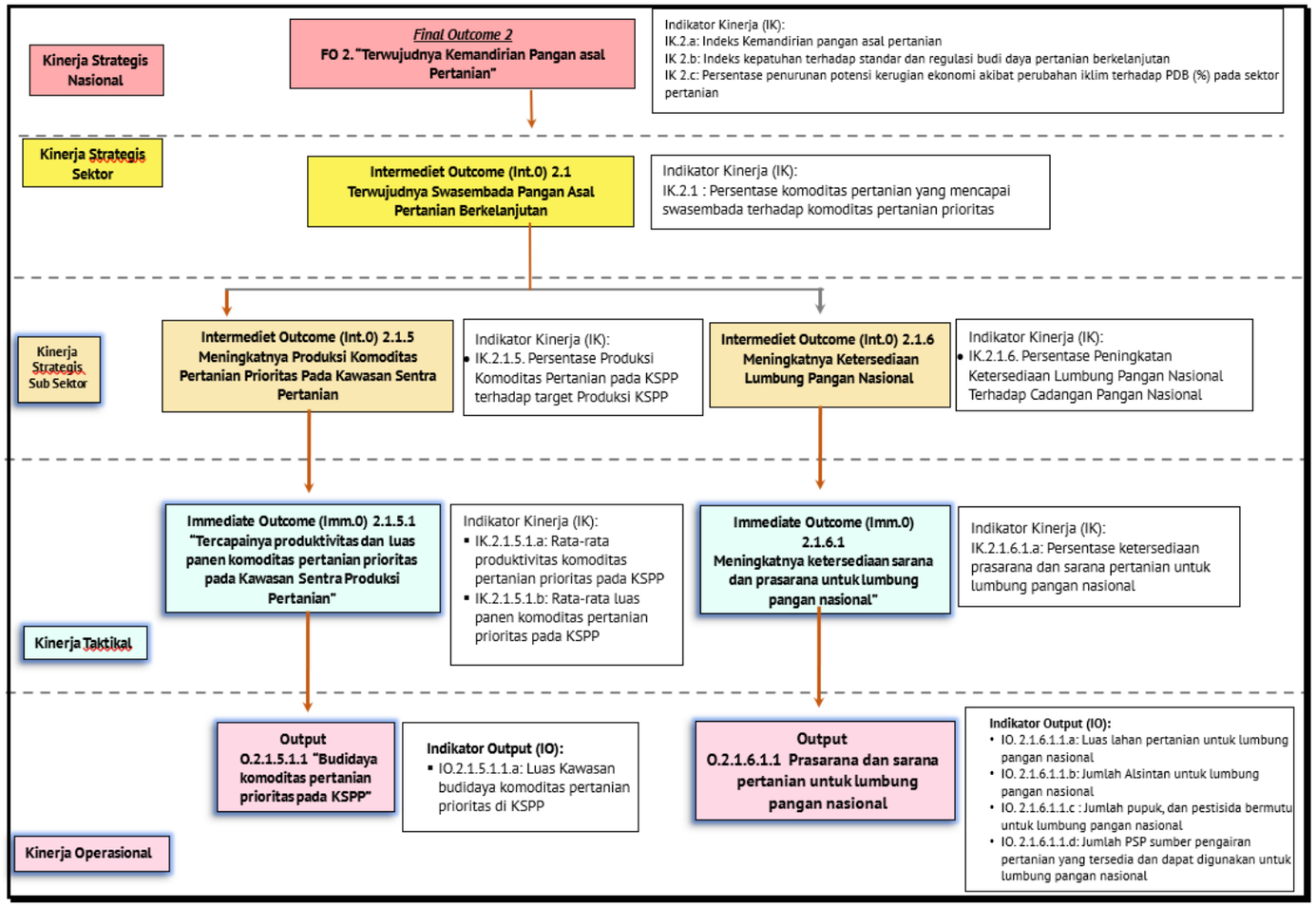

**POHON KINERJA FO.3**

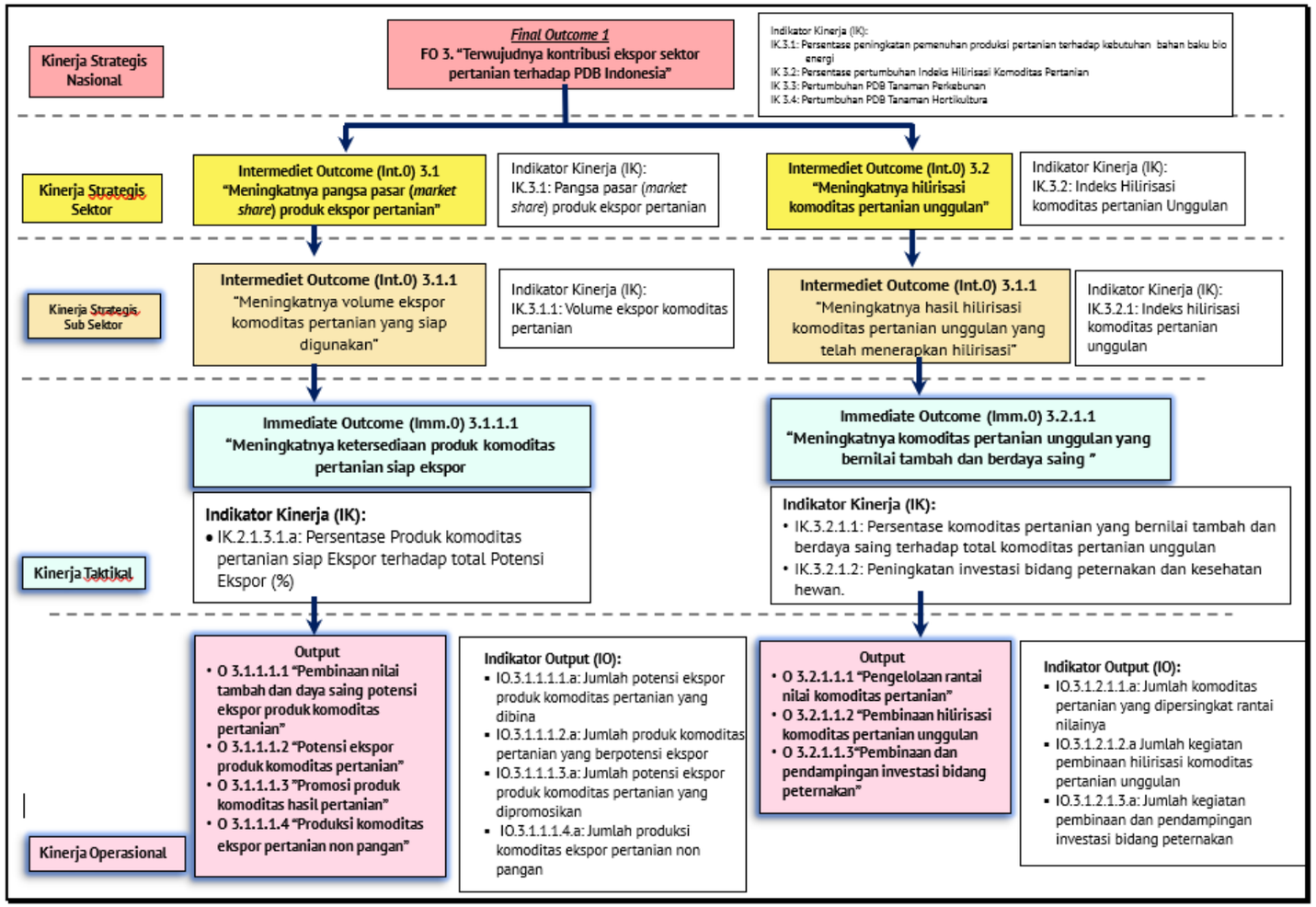

**POHON KINERJA FO.4**

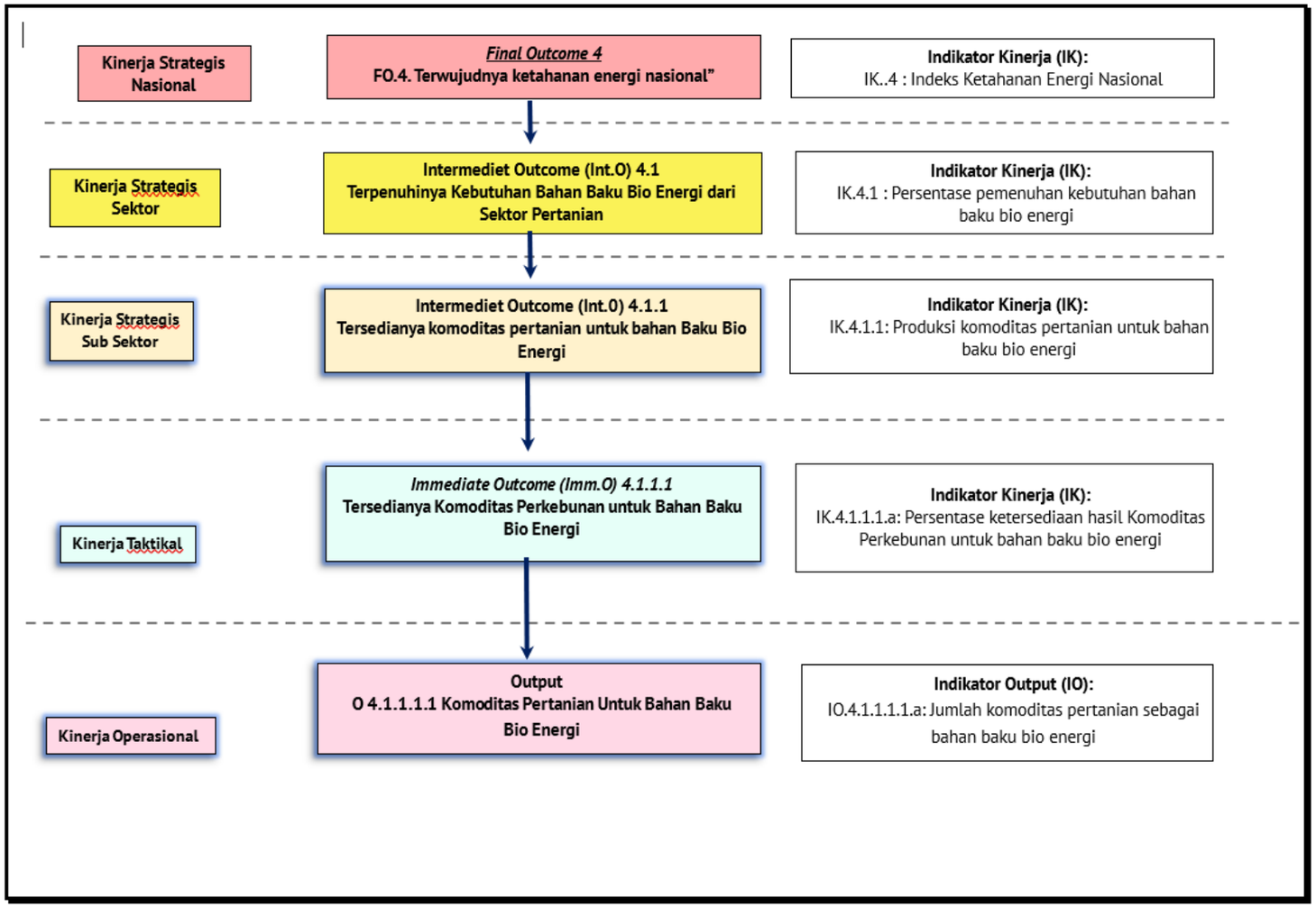

## POHON KINERJA FO.5

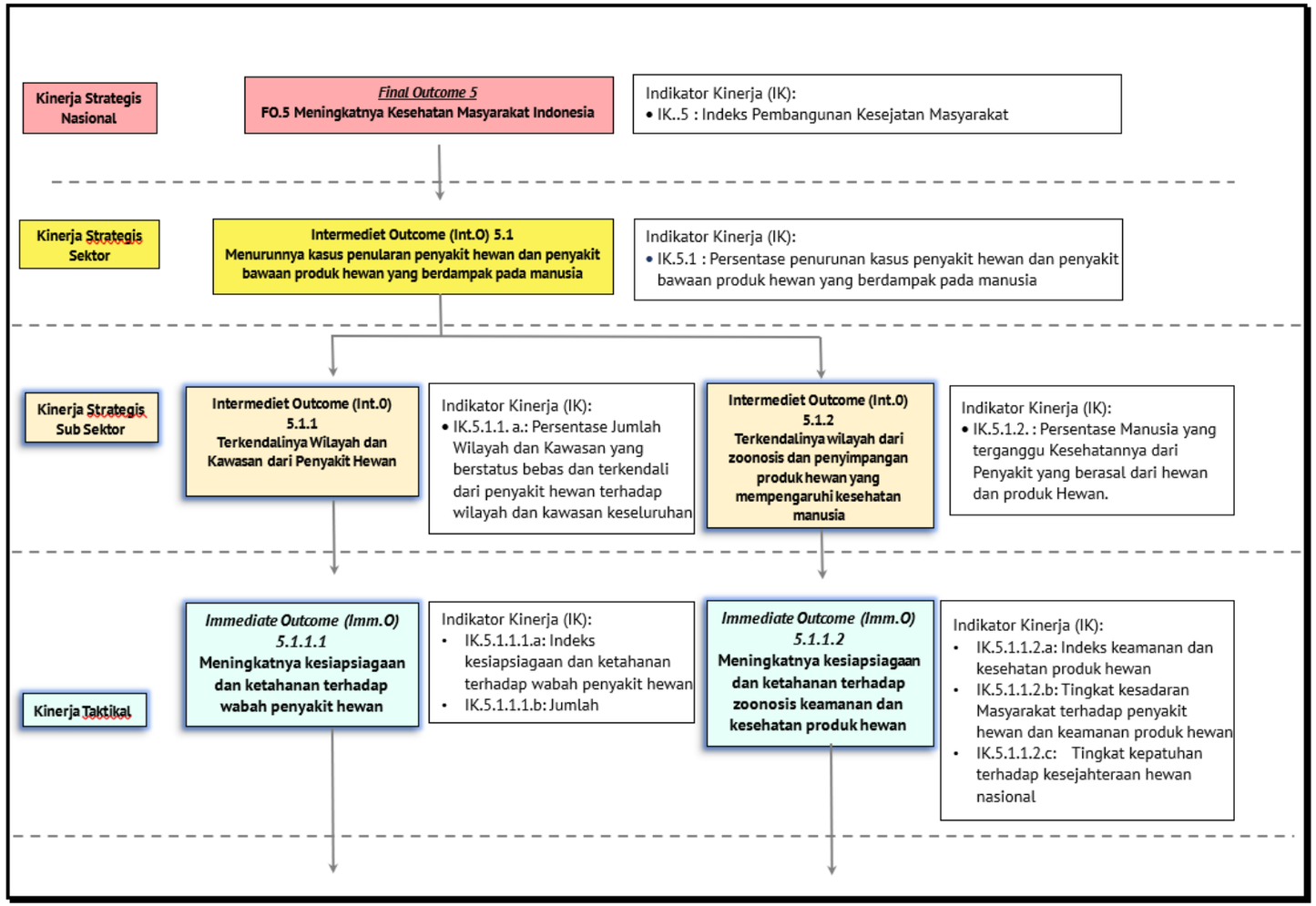

**LANJUTAN POHON KINERJA FO.5**

**Output**
- **5.1.1.1.1 : Pemberantasan penyakit hewan**
- **5.1.1.1.2 : Deteksi potensi wabah penyakit hewan**

**Indikator Output (IO):**
- IO.5.1.1.1.1.a : Jumlah kegiatan Pencegahan penularan penyakit hewan
- IO.5.1.1.1.2.a : Jumlah kegiatan Pemberantasan penyakit hewan
- IO.5.1.1.1.5.a : Jumlah kegiatan Deteksi potensi wabah penyakit hewan
- IO.5.1.1.1.6.a : Jumlah kegiatan Respon potensi wabah penyakit hewan

***Output***
- **5.1.1.2.1 : Pengawasan Keamanan Produk Hewan**
- **5.1.1.2.2 : Pengawasan Kesehatan Produk Hewan**
- **5.1.1.2.3 : Pengawasan Penerapan Kesejahteraan Hewan**
- **5.1.1.2.4 : Peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap zoonosis dan keamanan produk**
- **5.1.1.2.5: Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner**

**Indikator Output (IO):**
- IO.5.1.1.2.1.a : Jumlah kegiatan Pengawasan Keamanan Produk Hewan
- IO.5.1.1.2.2.a : Jumlah kegiatan Pengawasan Kesehatan Produk Hewan
- IO.5.1.1.2.3.a :Jumlah kegiatan Pengawasan kesejahteraan Hewan
- IO.5.1.1.2.4.a : Jumlah kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zoonosis dan keamanan produk
- IO.5.1.1.2.5.a : Jumlah layanan kesehatan masyarakat veteriner

**Kinerja Operasional**

## POHON KINERJA FO.6

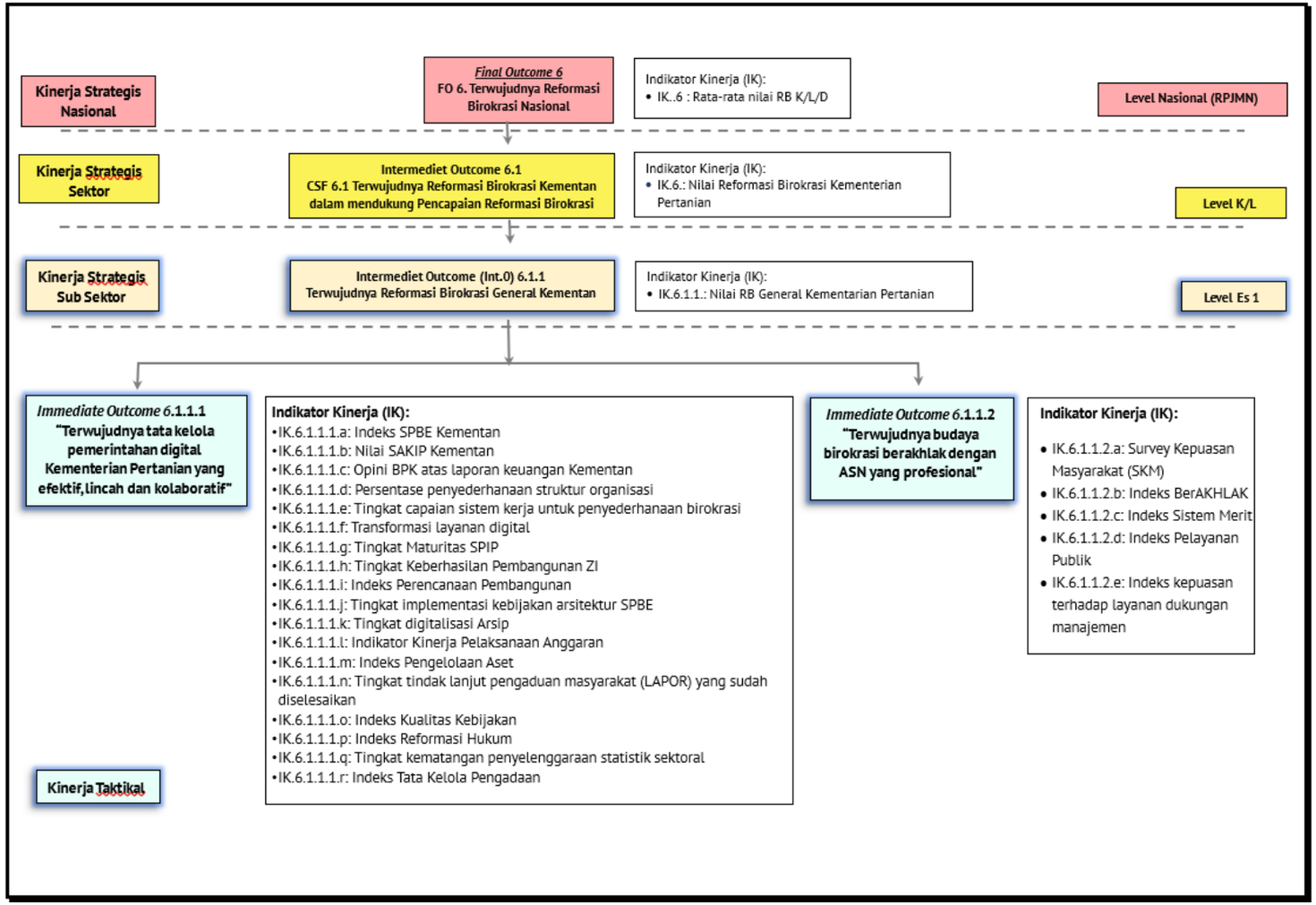

**LANJUTAN POHON KINERJA FO.6**

*Immediate Outcome* 6.1.1.1
**"Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Pertanian yang efektif, lincah dan kolaboratif"**

**Kinerja Taktikal**

**Output**

**Biro Perencanaan**
- O 6.1.1.1.1 "Layanan Perencanaan"
- O 6.1.1.1.2 "Layanan Evaluasi dan Pelaporan"

**Biro Organisasi Kepegawaian**
- O 6.1.1.1.3 "Layanan Organisasi"
- O 6.1.1.1.4 "Layanan Tata Laksana"
- O 6.1.1.1.5 "Layanan Kepegawaian"

**Biro Keuangan dan BMN**
- O 6.1.1.1.6 "Layanan BMN"
- O 6.1.1.1.7 "Layanan Manajemen Keuangan"

**Biro Umum dan Pengadaan**
- O 6.1.1.1.8 "Layanan Pengadaan Barang dan Jasa"
- O 6.1.1.1.9 "Layanan Kerumahtanggan"
- O 6.1.1.1.10 "Layanan Kearsipan"
- O 6.1.1.1.11 "Layanan PNBP"
- O 6.1.1.1.12 "Layanan Perkantoran"

**Pusat Data dan Teknologi Informasi**
- O 6.1.1.1.13 "Layanan SPBE Kementerian Pertanian"

**Biro Hukum**
- O 6.1.1.1.14 Layanan program, evaluasi legislasi, instrumen hukum dan peraturan kebijakan
- O 6.1.1.1.15 "Layanan Peraturan Perundang-Undangan"
- O 6.1.1.1.16 Layanan advokasi hukum
- O 6.1.1.1.17 Layanan penyusunan naskah perjanjian

**Inspektorat Wilayah I**
- O 6.1.1.1.18 "Layanan Pengawasan intern Inspektorat I

**Inspektorat Wilayah II**
- O 6.1.1.1.19 "Layanan Pengawasan intern Inspektorat II"

**Inspektorat Wilayah III**
- O 6.1.1.1.20 "Layanan Pengawasan intern Inspektorat III"

**Inspektorat Wilayah IV**
- O 6.1.1.1.21 "Layanan Pengawasan intern Inspektorat IV"

**Inspektorat Investigasi**
- O 6.1.1.1.22 "Layanan Pengawasan untuk tujuan tertentu"

**Indikator Output (IO):**
- IO.6.1.1.1.1: Jumlah layanan Perencanaan
- IO.6.1.1.1.2: Jumlah layanan Evaluasi dan Pelaporan
- IO.6.1.1.1.3: Jumlah layanan Organisasi
- IO.6.1.1.1.4: Jumlah layanan Tata Laksana
- IO.6.1.1.1.5: Jumlah layanan Kepegawaian
- IO.6.1.1.1.6: Jumlah layanan BMN
- IO.6.1.1.1.7: Jumlah layanan Manajemen Keuangan
- IO.6.1.1.1.8: Jumlah layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- IO.6.1.1.1.9: Jumlah layanan Kerumahtanggan
- IO.6.1.1.1.10: Jumlah layanan Kerasipan
- IO.6.1.1.1.11: Jumlah layanan PNBP
- IO.6.1.1.1.12: Jumlah layanan perkantoran
- IO.6.1.1.1.13: Jumlah layanan SPBE Kementan
- IO.6.1.1.1.14: layanan program, evaluasi legislasi, instrumen hukum dan peraturan kebijakan
- IO.6.1.1.1.15: Jumlah Layanan Peraturan Perundang-Undangan
- IO.6.1.1.1.16: Jumlah layanan advokasi hukum (litigasi dan non litigasi)
- IO.6.1.1.1.17: Jumlah layanan penyusunan naskah perjanjian
- IO.6.1.1.1.18: Jumlah layanan pengawasan intern Inspektorat I
- IO.6.1.1.1.19: Jumlah layanan pengawasan intern Inspektorat II
- IO.6.1.1.1.20: Jumlah layanan pengawasan intern Inspektorat III
- IO.6.1.1.1.21: Jumlah layanan pengawasan intern Inspektorat IV
- IO.6.1.1.1.22: Jumlah layanan pengawasan untuk tujuan tertentu

*Immediate Outcome* 6.1.1.2
**"Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional"**

**Output**

**Biro Humas dan Informasi Publik**
- O 6.1.1.2.1 "Layanan Humas dan Informasi"
- O 6.1.1.2.2 "Layanan Protokoler"
- O 6.1.1.2.3 " Layanan pengelolaan media

**Biro Kerja Sama Luar Negeri**
- O 6.1.1.2.4 "Layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian"
- O 6.1.1.2.5 "Koordinasi dengan atase pertanian"

**PSEKP**
- O 6.1.1.2.6 "Layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian"
- O 6.1.1.2.7 "Layanan publik sosial ekonomi dan kebijakan pertanian"
- O 6.1.1.2.8 "Layanan Dukungan Manajemen Internal"
- O 6.1.1.2.9 "Layanan Sarana dan Prasarana Internal"

**Perpustakaan dan Literasi Digital**
- O 6.1.1.2.10 "Layanan Dukungan Manajemen Internal"
- O 6.1.1.2.11 "Layanan Publik Kepada Masyarakat"
- O 6.1.1.2.12 "Layanan Publik Kepada Lembaga"
- O 6.1.1.2.13 "Layanan Sarana dan Prasarana Internal"

**Museum Tanah dan Pertanian**
- O 6.1.1.2.14 "Layanan Publik Kepada Masyarakat"
- O 6.1.1.2.15 "Layanan Dukungan Manajemen Internal"
- O 6.1.1.2.16 "Layanan Sarana dan Prasarana Internal"

**PPVTPP**
- O 6.1.1.2.17 "Layanan pelindungan Hak PVT Pertanian"
- O 6.1.1.2.18 "Layanan Pendaftaran Varietas tanaman"
- O 6.1.1.2.19 "Layanan Perizinan Pertanian Terpadu Satu Pintu"
- O 6.1.1.2.20 "Layanan Dukungan Manajemen Internal"
- O 6.1.1.2.21 "Layanan Sarana dan Prasarana Internal"
- O 6.1.1.2.22 "Layanan Sistem Informasi Pemerintahan"
- O 6.1.1.1.23 Layanan Dukungan Manajemen SetDitjen/SetBadan/SetItjen

**Indikator Output (IO):**
- IO.6.1.1.2.1 : Jumlah layanan Humas dan Informasi
- IO.6.1.1.2.2 : Jumlah layanan Protokkoler
- IO.6.1.1.2.3 : Jumlah layanan pengelolaan media
- IO.6.1.1.2.4 : Jumlah layanan Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian
- IO.6.1.1.2.5 : Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan atase pertanian
- IO.6.1.1.2.6 : Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian
- IO.6.1.1.2.7 : Jumlah Layanan publik sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
- IO.6.1.1.2.8 : Jumlah layanan dukungan manajemen internal
- IO.6.1.1.2.9 : Jumlah layanan Sarana dan Prasarana internal
- IO.6.1.1.2.10 : Jumlah layanan Dukungan Manajemen Internal
- IO.6.1.1.2.11 : Jumlah layanan Publik Kepada Masyarakat
- IO.6.1.1.2.12 : Jumlah layanan Publik Kepada Lembaga
- IO.6.1.1.2.13 : Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal
- IO.6.1.1.2.14 : Jumlah layanan Publik Kepada Masyarakat
- IO.6.1.1.2.15 : Jumlah layanan Dukungan Manajemen Internal
- IO.6.1.1.2.16 : Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal
- IO.6.1.1.1.17 : Jumlah layanan Perlingungan Hak PVT Pertanian
- IO.6.1.1.1.18 : Jumlah layanan Pendaftaran Varietas tanaman
- IO.6.1.1.1.19 : Jumlah layanan Perizinan Pertanian Terpadu Satu Pintu
- IO.6.1.1.1.20 : Jumlah layanan Dukungan Manajemen Internal
- IO.6.1.1.1.21 : Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal
- IO.6.1.1.1.22 : Jumlah layanan Sistem Informasi Pemerintahan
- IO.6.1.1.1.23 : Jumlah layanan Dukungan Manajemen SetDitjen/SetBadan/SetItjen

**Lampiran 6. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian 2025-2029**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target 2025 | Target 2026 | Target 2027 | Target 2028 | Target 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meningkatnya kesejahteraan petani | IT1 Indeks Kesejahteraan Petani | Indeks | 0,7445 | 0,7731 | 0,8038 | 0,8324 | 0,8599 |
| 2. Terwujudnya kemandirian pangan berkelanjutan berdasarkan prioritas | IT2 Indeks swasembada pangan prioritas | Indeks | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,7 | 0,72 |
| | IT3 Indeks kepatuhan terhadap standar dan regulasi budi daya pertanian berkelanjutan | Indeks | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| | IT4 Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian | Persen | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 |
| | IT5 Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian | Persen | 0,091 | 0,187 | 0,276 | 0,36 | 0,439 |
| 3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian bagi rakyat | IT6 persentase peningkatan pemenuhan produksi pertanian terhadap kebutuhan bahan baku bio energi | Persen | 0 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| | IT7 Pertumbuhan PDB Tanaman Perkebunan | Persen | 1,94 | 2,04 | 2,32 | 2,43 | 3,03 |
| | IT8 Pertumbuhan PDB Tanaman Hortikultura | Persen | 1,36 | 1,77 | 2,35 | 2,65 | 3,04 |
| 4. Meningkatnya kesehatan masyarakat dari akibat dan dampak penyakit hewan serta penyakit bawaan pangan | IT9 Indeks Kesehatan Masyarakat Veteriner | Indeks | 0,605 | 0,609 | 0,613 | 0,617 | 0,621 |
| 5. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian pertanian yang transparan akuntabel dan professional | IT10 Persentase peningkatan nilai RB Kementerian Pertanian | Persen | 2.76% | 1.41% | 3.02% | 3.32% | 4.52% |

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN